

LAPORAN KINERJA KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, taufik dan inayah-Nya kita dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2025.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan ini adalah perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Balangan periode Tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Balangan dan wujud transparansi/pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi

optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun-tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Paringin, 30 Maret 2026



BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI, S.Ag., M.I.Kom.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PERNYATAAN TELAH DI REVIU	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMAR DAN GRAFIK	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Balangan	2
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	5
C. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	8
B. Perjanjian Kinerja (PK)	10
C. Anggaran	11
D. Definisi Operasional, Rumus, dan Sumber Data Indikator Kinerja Utama	15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran	24
C. Realisasi Anggaran	236
D. Refocusing Anggaran	238
E. Piagam Penghargaan	239

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

A. Simpulan Capaian Kinerja Sasaran	241
B. Rencana Aksi Tahun 2026	242
C. Langkah Perbaikan SAKIP dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi	244



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN INSPEKTORAT

Alamat : Jalan Jend. A. Yani Km. 3,5 Telp. (0526) 2028395 Fax. (0526) 2028248
Paringin Selatan - Kode Pos 71462

PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Balangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Paringin, 26 Maret 2026

Inspektur Kabupaten Balangan


Drs. Urai Nur Iskandar, M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19730501 199311 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA YANG DIPERJANJIKAN PADA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 RPJMD PERIODE 2025-2029

TUJUAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN YANG BERDAMPAK PADA KEMAJUAN DAERAH SECARA BERKELANJUTAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur	1. Indeks Infrastruktur	0,512	0,550	107,42
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	2. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	0,83	0,000012	200
	3. Indeks Ketahanan Daerah	0,62	0,64	103,23

TUJUAN 2

MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	3,78	17,72	468,78
	5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	4,04	9,18	227,23
	6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	5,29	9,40	177,69
	7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,34	12,59	150,96
4. Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi	8. Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	10	4,11	41,10
5. Menurunnya Pengangguran Daerah	9. Tingkat Pengangguran Terbuka	2,67	2,74	97,38
	10. Rasio Kewirausahaan	2,40	1,74	72,50
6. Meningkatnya Kemajuan Perekonomian dan Kemandirian Desa	11. Indeks Desa	69,35	80,08	115,47

TUJUAN 3**MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Umur Harapan Hidup	74,26	74,14	99,84
	2. Prevalensi Stunting	11,88	14,53	77,69
2. Meningkatkan Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	3. Harapan Lama Sekolah	13,17	13,35	101,37
	4. Rata-Rata lama Sekolah	8,37	8,34	99,64

TUJUAN 4**MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT YANG HARMONIS DAN KONDUSIF**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
3. Menurunnya Kemiskinan Daerah	5. Angka Kemiskinan	4,62	4,64	99,57
4. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	6. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	70	81,15	115,93
5. Meningkatkan Kemajuan Budaya	7. Indeks Pembangunan Kebudayaan	60,34	60,64	100,50

TUJUAN 5**TERWUJUDNYA KUALITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, BERSIH DAN AKUNTABEL**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
6. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	8. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,49 (-A)	4,57	101,78
	9. Indeks Integritas	75,25	74,68	99,24
	10. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77	77,10	100,13
	11. Indeks SPBE	3,40	3,82	112,35
	12. Indeks Manajemen Risiko	3,049	3,053	100,13
	13. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80,70	93,4811	115,84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Nama Satuan Kerja/Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	5
Tabel 2. 1	Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	9
Tabel 2. 2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2025	10
Tabel 2. 3	Program dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2025	11
Tabel 3. 1	Hasil Pengukuran atas Pencapaian Kinerja Tahun 2025	23
Tabel 3. 2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Indeks Infrastruktur	24
Tabel 3. 3	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator Indeks Infrastruktur.	25
Tabel 3. 4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator Indeks Infrastruktur	25
Tabel 3. 5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator Indeks Infrastruktur	25
Tabel 3. 6	Crosscutting Kinerja	32
Tabel 3. 7	Monev Crosscutting Kinerja	33
Tabel 3. 8	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 1: Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kac	35
Tabel 3. 9	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator 1: Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	35
Tabel 3. 10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator 1: Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	35
Tabel 3. 11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator 1: Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	35
Tabel 3. 12	Crosscutting Kinerja	41
Tabel 3. 13	Monev Crosscutting Kinerja	42

Tabel 3. 14	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 2: Indeks Ketahanan Daerah	43
Tabel 3. 15	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator 2: Indeks Ketahanan Daerah	43
Tabel 3. 16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator 2: Indeks Ketahanan Daerah	43
Tabel 3. 17	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator 2: Indeks Ketahanan Daerah	43
Tabel 3. 18	Crosscutting Kinerja	49
Tabel 3. 19	Monev Crosscutting Kinerja	50
Tabel 3. 20	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	51
Tabel 3. 21	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator 1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	51
Tabel 3. 22	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator 1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	52
Tabel 3. 23	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator 1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	52
Tabel 3. 24	Crosscutting Kinerja	58
Tabel 3. 25	Monev Crosscutting Kinerja	59
Tabel 3. 26	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	60
Tabel 3. 27	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator 2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	61
Tabel 3. 28	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator 2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	61
Tabel 3. 29	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator 2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	61

Tabel 3. 30	Crosscutting Kinerja	66
Tabel 3. 31	Monev Crosscutting Kinerja	67
Tabel 3. 32	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 3 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan .	68
Tabel 3. 33	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator 3 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	68
Tabel 3. 34	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator 3 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	68
Tabel 3. 35	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator 3 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	69
Tabel 3. 36	Crosscutting Kinerja	73
Tabel 3. 37	Monev Crosscutting Kinerja	74
Tabel 3. 38	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 4 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	75
Tabel 3. 39	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator 4 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	75
Tabel 3. 40	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator 4 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	76
Tabel 3. 41	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator 4 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	76
Tabel 3. 42	Crosscutting Kinerja	81
Tabel 3. 43	Monev Crosscutting Kinerja	82
Tabel 3. 44	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	83
Tabel 3. 45	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	83
Tabel 3. 46	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	83

Tabel 3. 47	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	83
Tabel 3. 48	Crosscutting Kinerja	90
Tabel 3. 49	Monev Crosscutting Kinerja	91
Tabel 3. 50	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 1 : Tingkat Pengagguran Terbuka	92
Tabel 3. 51	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator 1 : Tingkat Pengagguran Terbuka	92
Tabel 3. 52	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator 1 : Tingkat Pengagguran Terbuka	92
Tabel 3. 53	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator 1 : Tingkat Pengagguran Terbuka	92
Tabel 3. 54	Crosscutting Kinerja	97
Tabel 3. 55	Monev Crosscutting Kinerja	98
Tabel 3. 56	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 2 : Rasio Kewirausahaan	99
Tabel 3. 57	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator 2 : Rasio Kewirausahaan . .	99
Tabel 3. 58	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator 2 : Rasio Kewirausahaan	99
Tabel 3. 59	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator 2 : Rasio Kewirausahaan	99
Tabel 3. 60	Crosscutting Kinerja	106
Tabel 3. 61	Monev Crosscutting Kinerja	106
Tabel 3. 62	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Indeks Desa	107
Tabel 3. 63	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator Indeks Desa	108
Tabel 3. 64	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator Indeks Desa	108
Tabel 3. 65	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator Indeks Desa	108
Tabel 3. 66	Crosscutting Kinerja	114

Tabel 3. 67	Monev Crosscutting Kinerja	114
Tabel 3. 68	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 1 : Umur Harapan Hidup	116
Tabel 3. 69	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator 1 : Umur Harapan Hidup . .	116
Tabel 3. 60	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator 1 : Umur Harapan Hidup	116
Tabel 3. 71	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator 1 : Umur Harapan Hidup	116
Tabel 3. 72	Crosscutting Kinerja	124
Tabel 3. 73	Monev Crosscutting Kinerja	125
Tabel 3. 74	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 2 : Prevalensi Stunting	126
Tabel 3. 75	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator 2 : Prevalensi Stunting	126
Tabel 3. 76	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator 2 : Prevalensi Stunting	126
Tabel 3. 77	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator 2 : Prevalensi Stunting	126
Tabel 3. 78	Crosscutting Kinerja	134
Tabel 3. 79	Monev Crosscutting Kinerja	136
Tabel 3. 80	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 1 : Harapan Lama Sekolah	137
Tabel 3. 81	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator 1 : Harapan Lama Sekolah	137
Tabel 3. 82	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator 1 : Harapan Lama Sekolah	138
Tabel 3. 83	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator 1 : Harapan Lama Sekolah	138
Tabel 3. 84	Crosscutting Kinerja	145
Tabel 3. 85	Monev Crosscutting Kinerja	146
Tabel 3. 86	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 2 : Rata-rata Lama Sekolah	147
Tabel 3. 87	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator 2 : Rata-rata Lama Sekolah	147

Tabel 3. 88	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator 2 : Rata Lama Sekolah	147
Tabel 3. 89	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator 2 : Rata-rata Lama Sekolah	148
Tabel 3. 90	Crosscutting Kinerja	154
Tabel 3. 91	Monev Crosscutting Kinerja	155
Tabel 3. 92	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Angka Kemiskinan	156
Tabel 3. 93	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator Angka Kemiskinan	156
Tabel 3. 94	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator Angka Kemiskinan	156
Tabel 3. 95	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator Angka Kemiskinan	156
Tabel 3. 96	Crosscutting Kinerja	161
Tabel 3. 97	Monev Crosscutting Kinerja	163
Tabel 3. 98	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	165
Tabel 3. 99	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	165
Tabel 3.100	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	165
Tabel 3.101	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	165
Tabel 3.102	Crosscutting Kinerja	171
Tabel 3.103	Monev Crosscutting Kinerja	172
Tabel 3.104	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan	173
Tabel 3.105	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan	173

Tabel 3.106	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan Indikator .	173
Tabel 3.107	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan	173
Tabel 3.108	Crosscutting Kinerja	180
Tabel 3.109	Monev Crosscutting Kinerja	181
Tabel 3.110	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 1 : Indeks Pelayanan Publik	182
Tabel 3.111	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator 1 : Indeks Pelayanan Publik	182
Tabel 3.112	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator 1 : Indeks Pelayanan Publik	182
Tabel 3.113	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator 1 : Indeks Pelayanan Publik	183
Tabel 3.114	Crosscutting Kinerja	190
Tabel 3.115	Monev Crosscutting Kinerja	191
Tabel 3.116	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 2 : Indeks Integritas	193
Tabel 3.117	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator 2 : Indeks Integritas	193
Tabel 3.118	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator 2 : Indeks Integritas	194
Tabel 3.119	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator 2 : Indeks Integritas	194
Tabel 3.120	Crosscutting Kinerja	199
Tabel 3.121	Monev Crosscutting Kinerja	200
Tabel 3.122	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . . .	201
Tabel 3.123	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	201
Tabel 3.124	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	202

Tabel 3.125	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	202
Tabel 3.126	Crosscutting Kinerja	211
Tabel 3.127	Monev Crosscutting Kinerja	213
Tabel 3.128	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 4 : Indeks SPBE	214
Tabel 3.129	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator 4 : Indeks SPBE	214
Tabel 3.130	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator 4 : Indeks SPBE	214
Tabel 3.131	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator 4 : Indeks SPBE	215
Tabel 3.132	Crosscutting Kinerja	218
Tabel 3.133	Monev Crosscutting Kinerja	218
Tabel 3.134	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 6 : Indeks Manajemen Risiko	220
Tabel 3.135	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator 6 : Indeks Manajemen Risiko	220
Tabel 3.136	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator 6 : Indeks Manajemen Risiko	220
Tabel 3.137	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator 6 : Indeks Manajemen Risiko	220
Tabel 3.138	Crosscutting Kinerja	225
Tabel 3.139	Monev Crosscutting Kinerja	226
Tabel 3.140	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator 7 : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	227
Tabel 3.141	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya Indikator 7 : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	228
Tabel 3.142	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Indikator 7 : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	228
Tabel 3.143	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional Indikator 7 : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	228

Tabel 3.144	Crosscutting Kinerja	234
Tabel 3.145	Monev Crosscutting Kinerja	235

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1	Gambaran Kondisi Geografis Kabupaten Balangan	2
Gambar 1.2	Luas Masing-masing Kecamatan dalam Satuan Km ²	2

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 SURAT KEPUTUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN BALANGAN PERIODE RPJMD 2025-2029
- LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2025
- LAMPIRAN 3 CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025
- LAMPIRAN 4 MATRIK TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI SAKIP PEMERINTAH
KABUPATEN BALANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu aspek yang menjamin kesejahteraan nasional. Tata kelola tidak dapat lepas dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai syarat untuk mencapai tujuan dan sasaran. Akuntabilitas kinerja disusun oleh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Kebijakan terkait laporan kinerja yaitu Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Balangan dalam melakukan penyusunan laporan kinerja. Dalam sudut pandang yang lebih luas laporan kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Pemerintah Kabupaten Balangan akan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanahkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi misi daerah secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja, dan akan disajikan dalam sebuah bentuk pertanggungjawaban pelaporan kinerja. Pelaporan Kinerja yang disusun diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk menyusun rencana kinerja, penyesuaian aktivitas kinerja dan penyesuaian penggunaan anggaran guna mencapai keberhasilan kinerja. Selain itu informasi laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi dan dalam upaya melakukan perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagai wujud nyata dampak informasi yang diberikan dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2025 untuk periode pertama RPJMD tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi kinerja yang akan disajikan dalam LKIP ini dan LKIP beberapa tahun yang lewat akan menjadi salah satu alat utama untuk melakukan penyusunan kinerja daerah yang lebih *outcome* sesuai dengan pohon kinerja yang telah disusun berdasarkan *logical framework* isu strategis daerah.

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

A.1. Luas dan Batas Wilayah

Gambar 1.1
Gambaran Kondisi Geografis Kabupaten Balangan



Letak Geografis

2001'37"-2035'58" LS
114050'24"-115050'24" BT

Luas Wilayah

1878,30 km²

Ketinggian

25 – 100 mdpl

Kecamatan Tebing Tinggi menjadi kecamatan dengan wilayah tertinggi di Kabupaten Balangan yaitu pada ketinggian 79 mdpl.

Kecamatan Halong menjadi kecamatan terluas di Kabupaten Balangan dengan persentase wilayah sebesar 35,13 persen (659,84 km²).

Sumber Data : Peta BPS Kabupaten Balangan Tahun 2024 diolah

Secara astronomis, Kabupaten Balangan terletak pada posisi 2° 35' 58" sampai dengan 2° 35' 58" Lintang Selatan dan 114° 50' 24" sampai dengan 115° 50' 24" Bujur Timur mempunyai daerah yang sebagian besar berada pada ketinggian antara 25-100 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Balangan termasuk daerah pegunungan dimana banyak jalannya yang berkelak-kelok dan naik turun.

Kabupaten Balangan beribu kota kabupaten di Paringin, berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Kalimantan Selatan) dan Kabupaten Paser (Kalimantan Timur) di bagian utara, Kabupaten Kotabaru (Kalimantan Selatan) dan Kabupaten Paser (Kalimantan Timur) di bagian timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bagian selatan, serta Kabupaten Hulu Sungai Utara di bagian barat.

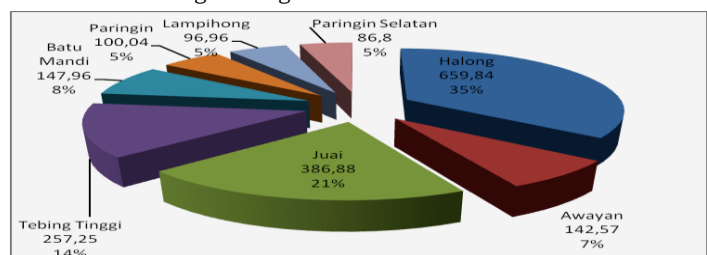
Kabupaten Balangan mempunyai luas 1.878,30 km² atau sekitar 5 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, Kabupaten Balangan terbagi menjadi 8 wilayah kecamatan dengan Kecamatan Halong sebagai kecamatan dengan wilayah terluas dan Kecamatan Paringin Selatan sebagai kecamatan dengan wilayah tersempit.

Kabupaten Balangan merupakan kabupaten otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003. Pada awal berdirinya, Kabupaten Balangan hanya terdiri dari 6 kecamatan. Kemudian pada tahun 2006 terjadi pemekaran wilayah menjadi 8 kecamatan.

Kabupaten Balangan dipimpin oleh H. Abdul Hadi, S.Ag.,M.I.Kom. sebagai Bupati dan H. Akhmad Fauzi, S.Pd sebagai Wakil Bupati Balangan terpilih Periode 2025-2029, yang ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2025.

Dari 8 kecamatan yang ada, total desa dan kelurahan yang dimiliki Kabupaten Balangan adalah sebanyak

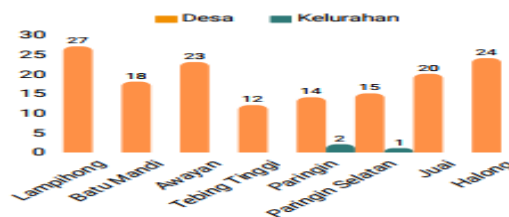
Gambar 1.2
Luas Masing-masing Kecamatan dalam Satuan Km²



Sumber : BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017

156. Dengan rincian Desa berjumlah 153 desa dan 3 kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Lampihong dengan 27 desa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Tebing Tinggi dengan 12 desa.

Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Balangan, 2023



A.2 Aspek Strategis RPJMD Periode 2025-2029

Aspek strategis yang menjadi bagian dari perwujudan visi Bupati untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2025-2029 yang ingin diwujudkan pada masa awal sampai akhir jabatan Bupati Balangan adalah:

- Pembangunan dan Pemberdayaan Wilayah Perdesaan.** Wilayah perdesaan di Kabupaten Balangan merupakan basis utama perekonomian masyarakat, terutama melalui sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Isu strategis dalam pembangunan perdesaan terletak pada masih terbatasnya infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi, sanitasi, dan pelayanan dasar, serta kualitas layanan sosial yang masih perlu diperkuat. Hal ini berimplikasi pada aksesibilitas antarwilayah perdesaan yang belum optimal dan berpengaruh terhadap distribusi hasil pertanian maupun akses masyarakat terhadap layanan publik. Pemberdayaan desa harus diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan desa, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta diversifikasi usaha masyarakat. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana fisik, tetapi juga pada penguatan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal secara berkelanjutan.
- Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Mendukung Transformasi Ekonomi dan Sosial.** Kawasan perkotaan Balangan memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, serta jasa yang menopang aktivitas ekonomi daerah. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sarana transportasi, drainase, jaringan air bersih, serta fasilitas publik yang representatif. Pembangunan perkotaan diarahkan pada peningkatan infrastruktur yang mampu mendukung transformasi ekonomi menuju basis jasa dan perdagangan, serta menyediakan ruang publik yang inklusif. Peningkatan prasarana perkotaan juga harus sejalan dengan penataan tata ruang yang memperhatikan aspek lingkungan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat.
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.** Sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, Kabupaten Balangan menghadapi tantangan degradasi lingkungan, alih fungsi lahan, dan pengelolaan sampah yang masih terbatas. Permasalahan lingkungan hidup cukup serius, terutama kualitas air yang masih rendah akibat tingginya angka buang air besar sembarangan di sungai. Kualitas lahan juga tergolong sedang karena keterbatasan ruang terbuka hijau. Sementara itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada 2024 masih berada pada angka 70,80 dengan kategori sedang. Di sisi lain, tingginya aktivitas pertambangan menambah tekanan terhadap kondisi lahan dan tutupan vegetasi, sehingga menuntut adanya kebijakan pemulihan pascatambang dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Isu strategis ini menekankan pentingnya pengendalian pencemaran, rehabilitasi lingkungan, serta pengelolaan ekosistem sungai, hutan, dan lahan basah. Upaya pembangunan berkelanjutan perlu diwujudkan melalui kebijakan perlindungan kawasan lindung, penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan, serta penerapan prinsip ekonomi hijau. Dengan menjaga kualitas lingkungan hidup, Balangan dapat mendukung keberlangsungan pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- d. **Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.** Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan masih bertumpu pada sektor primer, terutama pertanian dan pertambangan. Struktur ekonomi masih didominasi sektor pertambangan, dengan kontribusi meningkat dari 59,92% (2020) menjadi 72,61% (2024). Sebaliknya, kontribusi sektor non-pertambangan seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata justru menurun. Hal ini menandakan kerentanan ekonomi yang tinggi, sehingga diperlukan transformasi menuju sektor unggulan lain yang lebih berkelanjutan. Isu strategisnya adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan yang inklusif dengan memperluas kesempatan kerja, memberdayakan UMKM, dan mendorong investasi yang ramah lingkungan. Penguatan ekonomi inklusif harus menjamin keterlibatan masyarakat desa maupun kota dalam rantai nilai ekonomi, sementara keberlanjutan pembangunan ekonomi menuntut penerapan prinsip efisiensi sumber daya, pengelolaan hasil tambang yang berwawasan lingkungan, serta pengembangan sektor unggulan baru. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga adil dan berkelanjutan.
- e. **Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Kompeten dengan Tetap Mengedepankan Nilai Spiritual dan Etika.** Sumber daya manusia merupakan kunci dalam menghadapi perubahan global dan era digital. Tantangan Kabupaten Balangan adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat agar mampu bersaing di pasar kerja, sekaligus membangun karakter yang berbasis nilai spiritual dan etika. Upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pendidikan formal yang merata, pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri, serta program pengembangan kompetensi aparatur. Dengan tetap mengedepankan nilai keagamaan dan etika sosial, pembangunan SDM tidak hanya melahirkan tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga pribadi yang berintegritas dan berakhlak mulia.
- f. **Peningkatan Ketahanan Agama, Sosial, dan Budaya yang Harmonis dan Kondusif untuk Mendukung Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.** Keragaman agama, budaya, dan sosial di Kabupaten Balangan merupakan potensi sekaligus tantangan dalam menjaga harmoni masyarakat. Isu strategisnya adalah bagaimana memperkuat kerukunan umat beragama, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat, serta melestarikan kebudayaan lokal sebagai identitas daerah. Pembangunan yang merata dan berkeadilan harus ditopang oleh suasana sosial yang kondusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, penguatan ketahanan agama, sosial, dan budaya bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi juga menjadi fondasi moral pembangunan.
- g. **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Inovatif dalam Mendukung Percepatan Pembangunan.** Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Kabupaten Balangan menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Isu strategis ini menekankan perlunya birokrasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat pelayanan, serta mendorong partisipasi masyarakat. Dengan penguatan tata kelola pemerintahan, percepatan pembangunan daerah dapat dicapai secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

B. TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

B.1. Tugas Pokok

Pemerintah Kabupaten Balangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Salah satu tugas utama pemerintah adalah pelayanan umum (*public service*), selain tugas pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Meski demikian sering kali pelayanan publik dikeluhkan masyarakat karena tidak memenuhi ekspektasi dan kepuasan pengguna layanan. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan upaya membangun Mall Pelayanan Publik, melaksanakan standar kepatuhan pelayanan publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.

B.2. Struktur Organisasi

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan mulai diberlakukan dan dilaksanakan pelantikan pejabat struktural dan fungsional pada bulan Januari tahun 2024. Adapun Nama Satuan Kerja/Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1

Nama Satuan Kerja/Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Nama Satuan Kerja/Organisasi			
1.	Sekretariat Daerah	14.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sekretariat DPRD	15.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.	Inspektorat	16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
5.	Dinas Kesehatan	18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	20.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
8.	Dinas Sosial	21.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Nama Satuan Kerja/Organisasi			
9.	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11.	Dinas Perhubungan	24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	25.	Kecamatan (8 Kecamatan)
13.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

Sumber data Bagian Organisasi Setda Kabupaten Balangan 2025

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pelaporan kinerja ini ditekankan kepada capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama atas pertanggungjawaban terhadap keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan untuk pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai berikut :

Iktisar Eksekutif

- A. Tabulasi Ringkasan Capaian Kinerja: Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, Target, Realisasi, Capaian
- B. Tabulasi Ringkasan Kendala Langkah ke Depan

Bab I Pendahuluan :

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja :

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja :

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisa Capaian Kinerja Sasaran

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

C. Realisasi Anggaran.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup :

- A. Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
- B. Rencana Aksi Tahun 2026
- C. Langkah Perbaikan SAKIP dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja.
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045.

Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Balangan terpilih periode 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam periode RPJMD 2025-2029, yaitu : **“BALANGAN BAHARAT (MEMBANGUN DESA DAN MENATA KOTA, MENUJU MASYARAKAT YANG HARMONIS, RELIGIUS, MAJU DAN SEJAHTERA)”**. Visi ini terdiri atas tiga makna pokok, yakni :

1. **Membangun Desa dan Kota**, yakni tujuan pembangunan desa dan kota meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Membangun desa yang maju dan mandiri, mewujudkan kota yang tertata rapi.
2. **Haromonis**, yakni masyarakat dikatakan hidup harmonis jika interaksi atau hubungan antar individu atau kelompok di masyarakat satu dengan lainnya berjalan dengan baik, memiliki rasa solidaritas, menghargai perbedaan, merasa saling membutuhkan, terbangun kerjasama, tolong menolong dan lainnya.
3. **Religius**, yakni religiusitas dalam kehidupan sosial masyarakat memiliki makna sebagai pedoman hidup, penguat solidaritas, dan perekat sosial. Nilai-nilai religius yang diajarkan agama dapat membantu masyarakat menjalani kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera.
4. **Maju**, yakni makna "maju" dalam kehidupan masyarakat adalah kondisi masyarakat yang berkembang, berorientasi pada kemajuan, dan unggul dalam berbagai bidang. Masyarakat maju juga memiliki warga yang kreatif, dinamis, dan berpikir positif.
5. **Sejahtera**, yakni masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam keadaan sehat, damai, dan sejahtera. Masyarakat Sejahtera juga memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial.

Visi RPJMD juga mendukung Visi RPJPD 2025-2045: Balangan Sebagai Daerah Penyangga Logistik yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan (Balaju Sejalan) yang menekankan pembangunan yang merata dan berkeadilan, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan desa dan penataan perkotaan, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis, religius, maju, dan sejahtera. Dalam konteks jangka panjang, visi ini juga secara strategis diarahkan untuk mendukung perwujudan Balangan sebagai daerah penyangga logistik yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Sebagai kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam, letak geografis yang strategis, serta peran penting dalam rantai distribusi regional, Balangan diharapkan dapat mengoptimalkan peranannya sebagai simpul logistik, mendukung kelancaran arus barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas wilayah. Komitmen keberlanjutan (*sustainability*) tercermin dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan ketahanan infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, guna menjamin kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, visi "Balangan Baharat" tidak hanya mengedepankan aspek kesejahteraan sosial dan religiusitas masyarakat, tetapi juga menegaskan kesiapan Balangan sebagai daerah penyangga logistik yang mendukung pembangunan nasional dan regional secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan Visi Balangan Baharat, maka ditetapkan 5 (lima) Misi. Rumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Balangan menggambarkan kondisi yang diharapkan dapat terwujud selama 5 (lima) tahun kedepan. Misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Mengembangkan Wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Lingkungan yang Lestari.
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia.
4. Meningkatkan Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif.
5. Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Melayani dan Inovatif.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah ditetapkan 5 (lima) tujuan. Adapun matrik hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Balangan sebagaimana tabulasi data berikut:

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI : “BALANGAN BAHARAT (MEMBANGUN DESA DAN MENATA KOTA, MENUJU MASYARAKAT YANG HARMONIS, RELIGIUS, MAJU DAN SEJAHTERA)”.					
Misi	Tujuan		Sasaran Strategis		
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	
1	2	3	4	5	
1. Mengembangkan Wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Lingkungan yang Lestari.	1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Daya Dukung Lingkungan yang Berdampak pada Kemajuan Daerah secara Berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	1. Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur	1. Indeks Infrastruktur	
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	2. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	
		3. Indeks Resiko Bencana		3. Indeks Ketahanan Daerah	
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan.	2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi	3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	
				5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	
		5. Indeks Gini		6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	
				7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	
		4. Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi	8. Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi		
			5. Menurunnya Pengangguran Daerah	9. Tingkat Pengangguran Terbuka	
				10. Rasio Kewirausahaan	
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia.	3. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	7. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12. Umur Harapan Hidup	
			8. Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	13. Prevalensi Stunting	
				14. Harapan Lama Sekolah	
				15. Rata-Rata lama Sekolah	

VISI : “BALANGAN BAHARAT (MEMBANGUN DESA DAN MENATA KOTA, MENUJU MASYARAKAT YANG HARMONIS, RELIGIUS, MAJU DAN SEJAHTERAJ)”. 				
Misi	Tujuan		Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5
4. Meningkatkan Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif.	4. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif	7. Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	9. Menurunnya Kemiskinan Daerah	16. Angka Kemiskinan
			10. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	17. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)
			11. Meningkatnya Kemajuan Budaya	18. Indeks Pembangunan Kebudayaan
5. Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Melayani dan Inovatif.	5. Terwujudnya Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	8. Indeks Reformasi Birokrasi	12. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	19. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
				20. Indeks Integritas
				21. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
				22. Indeks SPBE
				23. Indeks Pemerintahan Digital
				24. Indeks Manajemen Risiko
				25. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2025 ditetapkan pada bulan Januari 2025 dan telah dilakukan perubahan PK pada bulan September Tahun 2025. Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2025 tergambar dalam tabulasi berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur	1. Indeks Infrastruktur	0,512
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	2. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	0,83
		3. Indeks Ketahanan Daerah	0,62
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	3,78
		5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	4,04
		6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	5,29
		7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,34

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi	8. Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	10
5.	Menurunnya Pengangguran Daerah	9. Tingkat Pengangguran Terbuka	2,67
		10. Rasio Kewirausahaan	2,40
6.	Meningkatnya Kemajuan Perekonomian dan Kemandirian Desa	11. Indeks Desa	69,35
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12. Umur Harapan Hidup	74,26
		13. Prevalensi Stunting	11,88
8.	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	14. Harapan Lama Sekolah	13,17
		15. Rata-Rata lama Sekolah	8,37
9.	Menurunnya Kemiskinan Daerah	16. Angka Kemiskinan	4,62
10.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	17. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	70
11.	Meningkatnya Kemajuan Budaya	18. Indeks Pembangunan Kebudayaan	60,34
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	19. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,49 (-A)
		20. Indeks Integritas	75,25
		21. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77
		22. Indeks SPBE	3,40
		23. Indeks Manajemen Risiko	3,049
		24. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80,70

C. ANGGARAN

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkanlah beberapa program yang terdiri dari 140 (seratus empat puluh) program dengan jumlah anggaran tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Program dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2025

No	Program	Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.118.601.435.748
2.	Pengelolaan Pendidikan	Rp. 267.062.939.386
3.	Pengembangan Kurikulum	Rp. 535.107.600
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 3.393.077.200
5.	Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 90.234.000
6.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 171.477.609.822
7.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 11.538.513.100
8.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 491.315.000

No	Program	Anggaran
9.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 875.815.900
10.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 88.919.485.700
11.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 17.854.046.000
12.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 29.457.305.927
13.	Penataan Bangunan Gedung	Rp. 347.742.604.776
14.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 107.010.974.361
15.	Penyelenggaraan Jalan	Rp. 291.208.817.898
16.	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 5.771.571.200
17.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 2.980.899.300
18.	Pengembangan Perumahan	Rp. 1.126.129.800
19.	Kawasan Permukiman	Rp. 13.402.662.380
20.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 32.505.945.300
21.	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 168.342.718.108
22.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 9.840.446.612
23.	Penanggulangan Bencana	Rp. 6.667.428.200
24.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 1.746.966.500
25.	Pemberdayaan Sosial	Rp. 5.932.289.500
26.	Rehabilitasi Sosial	Rp. 2.933.048.600
27.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 7.356.484.000
28.	Penanganan Bencana	Rp. 797.954.900
29.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 121.070.000
30.	Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 222.172.500
31.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 49.960.003.710
32.	Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 1.103.758.700
33.	Hubungan Industrial	Rp. 15.024.999.800
34.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 1.889.783.700
35.	Perlindungan Perempuan	Rp. 252.022.600
36.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 391.553.000
37.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 111.734.200
38.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 598.583.200
39.	Perlindungan Khusus Anak	Rp. 262.208.500
40.	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 2.507.235.508
41.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 6.891.120.400
42.	Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 630.219.100
43.	Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 282.145.200
44.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 0
45.	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp. 157.190.600
46.	Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp. 10.000.300
47.	Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp. 523.944.700
48.	Penatagunaan Tanah	Rp. 719.079.700
49.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 1.742.587.500
50.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 2.406.768.450
51.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 11.958.360.200

No	Program	Anggaran
52.	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 40.100.000
53.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 299.115.170
54.	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHa), Kearifan Lokal dan Hak MHa Yang Terkait Dengan PPLH	Rp. 22.502.400
55.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 87.178.500
56.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 55.348.800
57.	Pengelolaan Persampahan	Rp. 10.607.448.530
58.	Pendaftaran Penduduk	Rp. 786.436.500
59.	Pencatatan Sipil	Rp. 600.125.100
60.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 922.643.500
61.	Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 27.772.500
62.	Penataan Desa	Rp. 223.064.000
63.	Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 76.625.792.100
64.	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 12.064.688.040
65.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 5.722.967.100
66.	Pengendalian Penduduk	Rp. 8.179.672.800
67.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 1.134.721.200
68.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 3.069.527.800
69.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 47.528.393.614
70.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 11.117.025.400
71.	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 7.123.434.852
72.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 478.297.400
73.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 131.730.000
74.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 2.591.953.850
75.	Pengembangan UMKM	Rp. 489.535.000
76.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 319.270.000
77.	Promosi Penanaman Modal	Rp. 542.993.500
78.	Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 3.908.092.900
79.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 275.310.000
80.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 388.366.000
81.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 1.741.044.400
82.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 18.429.872.500
83.	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 344.212.000
84.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 415.461.700
85.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 272.835.800
86.	Pengembangan Kebudayaan	Rp. 677.605.000
87.	Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 4.525.807.230
88.	Pembinaan Sejarah	Rp. 2.013.103.500
89.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 2.224.278.000
90.	Pembinaan Perpustakaan	Rp. 5.320.466.050
91.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 261.522.500
92.	Pengelolaan Arsip	Rp. 847.015.500
93.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 857.194.800
94.	Perizinan Penggunaan Arsip	Rp. 35.496.400
95.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 1.118.470.500

No	Program	Anggaran
96.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 56.406.287.675
97.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 484.838.300
98.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.323.288.100
99.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 2.901.212.518
100.	Pemasaran Pariwisata	Rp. 2.408.263.300
101.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 1.430.354.600
102.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 69.060.739.000
103.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 113.557.779.010
104.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 906.922.450
105.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 17.999.625.500
106.	Penyuluhan Pertanian	Rp. 4.501.838.200
107.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 118.505.000
108.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 2.150.470.300
109.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 983.380.800
110.	Pengembangan Ekspor	Rp. 236.883.500
111.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 395.314.900
112.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 1.481.508.000
113.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 702.390.000
114.	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp. 505.214.000
115.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 1.162.091.900
116.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 762.080.000
117.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 381.750.000
118.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 184.171.361.600
119.	Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 4.086.156.700
120.	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 39.946.645.215
121.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.541.199.300
122.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 3.926.389.400
123.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 419.586.191.633
124.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 18.027.142.300
125.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 5.165.819.500
126.	Kepegawaian Daerah	Rp. 8.217.242.700
127.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 5.655.597.800
128.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 7.046.613.000
129.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.387.427.200
130.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 3.276.430.500
131.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 2.340.749.040
132.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 7.928.959.688
133.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 840.764.300
134.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 1.105.153.800
135.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 1.850.975.100
136.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.863.312.800
137.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 1.685.076.500
138.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 443.943.000
139.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 998.395.900
140.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 3.474.237.000

D. DEFINISI OPERASIONAL, RUMUS DAN SUMBER DATA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berikut definisi operasional, rumus dan sumber data dari indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Balangan Periode RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Rumus	Sumber Data
1.	Indeks Infrastruktur	Indeks Infrastruktur adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas infrastruktur dasar di suatu wilayah.	Indeks Infrastruktur = 15% (persentase RT akses sanitasi aman) + 15% (persentase RT akses sumber air aman) + 15% (persentase RT akses internet) + 20% (persentase jalan dalam kondisi mantap) + 15% (persentase RT dg akses hunian layak) + 10% (Persentase Perumahan yang dilengkapi PSU) + 10% (rasio konektivitas)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah indikator yang menggambarkan efisiensi emisi GRK terhadap aktivitas ekonomi, yaitu berapa besar emisi GRK yang dihasilkan per unit Produk Domestik Bruto (PDB). Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas upaya pengurangan emisi dalam konteks pembangunan ekonomi.	Intensitas Emisi GRK = Total Emisi GRK (ton CO ₂ e) dibagi PDB (miliar Rp) Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) = (Intensitas Tahun Dasar - Intensitas Tahun Berjalan dibagi Intensitas Tahun Dasar) x 100	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
3.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat ukur yang menggambarkan tingkat kapasitas dan ketahanan suatu daerah terhadap bencana.	Indeks Ketahanan Daerah = Kapasitas dibagi Kerentanan di kali Ancaman	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan adalah tingkat perubahan nilai tambah bruto sektor pertanian dan perikanan	Laju Pertumbuhan = PDB Tahun Ini - PDB Tahun Lalu dibagi PDB Tahun Lalu x 100%	Badan Pusat Statistik

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Rumus	Sumber Data
		dari tahun ke tahun, dihitung dalam persentase. Pertumbuhan ini mencerminkan kinerja sektor primer dalam mendukung perekonomian suatu wilayah.		
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan adalah persentase pertumbuhan nilai tambah bruto (PDB) sektor industri pengolahan dari suatu wilayah dalam periode waktu tertentu (biasanya tahunan). Nilai ini mencerminkan performa sektor industri manufaktur, yang mencakup semua aktivitas pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi	$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{\text{PDB Industri Tahun ini} - \text{PDB Industri Tahun Lalu}}{\text{PDB Industri Tahun Lalu}} \times 100 \%$	Badan Pusat Statistik
6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan adalah tingkat perubahan (kenaikan atau penurunan) nilai tambah bruto dari sektor perdagangan besar dan eceran (termasuk reparasi mobil dan sepeda motor) dalam suatu periode waktu, biasanya dihitung tahunan.	$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{\text{PDB Perdagangan Tahun ini} - \text{PDB Perdagangan Tahun Lalu}}{\text{PDB Perdagangan Tahun Lalu}} \times 100\%$	Data Badan Pusat Statistik; Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah persentase perubahan tahunan nilai tambah bruto sektor ini (dalam PDB harga konstan), yang	$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{\text{PDB Sektor Tahun ini} - \text{PDB Sektor Tahun Lalu}}{\text{PDB Sektor Tahun Lalu}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Rumus	Sumber Data
		mencerminkan tingkat peningkatan aktivitas ekonomi dari usaha penyedia penginapan dan layanan makanan/minuman.		
8.	Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi adalah persentase kenaikan atau penurunan nilai realisasi investasi pada suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat perkembangan realisasi investasi yang masuk ke suatu daerah atau negara.	Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi = $\frac{\text{Realisasi } t - \text{Realisasi } t-1}{\text{Realisasi } t-1} \times 100 \%$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; BKPM / Kementerian Investasi RI
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan terhadap total angkatan kerja.	$TPT = \frac{(\text{Jumlah Pengangguran Terbuka} / \text{Jumlah Angkatan Kerja}) \times 100\%}{100\%}$	Badan Pusat Statistik
10.	Rasio Kewirausahaan	Rasio kewirausahaan adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang berstatus sebagai wirausaha (entrepreneur) dengan total jumlah penduduk usia kerja atau angkatan kerja di suatu wilayah pada periode tertentu	Rasio Kewirausahaan = $\frac{(\text{Jumlah Berusaha Dibantu Buruh Tetap} / \text{Jumlah Angkatan Kerja}) \times 100\%}{100\%}$	Badan Pusat Statistik
11.	Indeks Desa	Indeks Desa adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian	Indeks Desa (ID) = $\frac{\text{Total skor desa}}{\text{skor maksimum}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Rumus	Sumber Data
		suatu desa berdasarkan berbagai aspek pembangunan. Indeks ini mencerminkan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan desa, serta kemampuan desa dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.		
12.	Umur Harapan Hidup	Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata usia yang akan dicapai seseorang sejak lahir jika selama hidupnya ia mengalami pola kematian seperti yang berlaku pada saat itu.	Umur Harapan Hidup Saat Lahir = Total tahun hidup yang akan dijalani oleh penduduk sejak usia 0 tahun (umur lahir) / jumlah penduduk yang hidup pada awal usia (biasanya 100.000 penduduk)	Badan Pusat Statistik
13.	Prevalensi Stunting	Prevalensi stunting adalah persentase balita (anak usia di bawah 5 tahun) yang mengalami tumbuh kerdil atau gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis, biasanya akibat asupan gizi yang kurang dalam waktu lama dan/atau infeksi berulang, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan.	Prevalensi stunting = (Jumlah balita stunting / Jumlah Total Balita) x 100%	Dinas Kesehatan; Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI)
14.	Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah rata-rata jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat dijalani oleh seorang anak usia tertentu (biasanya anak usia 7 tahun), jika mengikuti sistem pendidikan yang berlaku saat ini sepanjang hidupnya.	$HLS = \sum (P_i \times i)$ dimana : P_i = probabilitas penduduk akan melanjutkan ke jenjang pendidikan ke-i , i = jenjang atau tingkat pendidikan (dalam tahun)	Badan Pusat Statistik

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Rumus	Sumber Data
15.	Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal, terlepas dari jenjang pendidikan yang diselesaikan.	$RLS = \sum (\text{Jumlah penduduk pada tingkat pendidikan tertentu} \times \text{lama sekolah}) / \text{jumlah total penduduk usia 25 tahun ke atas}$	Badan Pusat Statistik
16.	Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.	Angka Kemiskinan (%) = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	Dinas Sosial; Kementerian Sosial
17.	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	IPKKU (Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) oleh pemerintah daerah. IPKKU mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil menciptakan kondisi aman, tertib, dan terlindunginya masyarakat.	Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraan dan Ketertiban Umum (IPKKU) = $\sum (\text{Nilai bobot pada dimensi ke-i} \times \text{Nilai bobot pada subdimensi ke-n dimensi ke-i} \times \text{Nilai rerata likert pada indikator di subdimensi ke-n dimensi ke-i})$	Satuan Polisi Pamong Praja
18.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pembangunan bidang kebudayaan di suatu wilayah secara kuantitatif. Indeks ini disusun oleh Kementerian Pendidikan,	$IPK = \sum_{i=1}^n W_i \cdot X_i$ * x_i = skor standar dari masing-masing indikator * w_i = bobot dari masing-masing dimensi/indicator IPK terdiri dari 7 dimensi utama, masing-masing dengan indikator tersendiri: 1. Ekspresi Budaya - Partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, seni dan tradisi. 2. Warisan Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Rumus	Sumber Data
		Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan tujuan menilai sejauh mana kebudayaan dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.	- Pelestarian cagar budaya, benda budaya, dan warisan tak benda. 3. Ekonomi Budaya - Kontribusi sektor budaya terhadap ekonomi (pendapatan lapangan kerja) 4. Pendidikan dan Literasi Budaya - Akses masyarakat terhadap pendidikan budaya dan literasi 5. Ketahanan Sosial Budaya - Toleransi, kohesi sosial dan penghormatan terhadap keberagaman 6. Gender dan Budaya - Keterlibatan gender dalam praktik budaya dan akses terhadap sumber daya budaya 7. Kebebasan Ekspresi dan Partisipasi Budaya - Perlindungan terhadap kebebasan berbudaya dan berekspresi	
19.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Indeks ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek layanan publik, seperti efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas.	$IPP = \sum_{i=1}^n (Skor_i \times Bobot_i)$	Penilaian PEKPP; Kementerian PANRB
20.	Indeks Integritas	Indeks Integritas adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat integritas suatu lembaga atau institusi publik, terutama dalam konteks pencegahan korupsi, pelayanan publik, dan tata kelola yang bersih. Indeks ini sering digunakan untuk mengukur persepsi dan	Indeks Integritas = $\sum n_i = i (X1 * Wi) / \sum n_i = i Wi$	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Rumus	Sumber Data
		pengalaman masyarakat terhadap praktik integritas dan korupsi di instansi pemerintah		
21.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi terhadap substansi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran kinerja.	$\text{Nilai AKIP} = (\text{Skor Perencanaan} \times 30\%) + (\text{Skor Pengukuran} \times 30\%) + (\text{Skor Pelaporan} \times 15) + (\text{Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja} \times 25\%)$ LHE SAKIP Kemenpan RB RI	LHE SAKIP Kementerian PAN RB RI
22.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh. IPKD dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai alat ukur kinerja tata kelola keuangan daerah, berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.	$\text{IPKD Total} = \frac{\sum (\text{Skor Dimensi} \times \text{Bobot})}{\sum \text{Bobot}}$ IPKD terdiri dari 6 dimensi utama (versi Kemendagri Terbaru) : 1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran. 2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD. 3. Pelaksanaan APBD. 4. Pengelolaan Pendapatan Daerah. 5. Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah). 6. Transparansi Keuangan Daerah.	Kementerian Dalam Negeri
23.	Indeks SPBE	Indeks SPBE adalah ukuran tingkat kematangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat maupun pemerintah daerah.	$\text{Indeks SPBE} = \frac{\sum n_i = i (X_i * W_i)}{\sum n_i = i W_i}$	Kementerian PANRB
24.	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks Pemerintahan Digital (IPD) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat	$\text{Indeks Pemerintahan Digital} = (\text{Skor Strategi dan Rencana} \times 5\%) + (\text{Skor Tata Kelola dan Manajemen} \times 5\%) + (\text{Skor Teknologi Digital} \times$	Kementerian PANRB

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Rumus	Sumber Data
		perkembangan, pemanfaatan, dan efektivitas transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indeks ini pada dasarnya menggambarkan sejauh mana pemerintah mampu memanfaatkan teknologi digital dalam memberikan layanan publik, mengelola administrasi pemerintahan, serta membangun tata kelola yang transparan, efisien, dan partisipatif.	20%) + (Skor Audit Teknologi Digital + 6%) + (Skor Keamanan Siber x 9%) + (Skor Kapabilitas dan Budaya Digital x 10%) + (Skor Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi x 10%) + (Skor Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah x 15%) + (Skor Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah x 20%)	
25.	Indeks Manajemen Risiko	Alat ukur tingkat penerapan manajemen risiko di suatu instansi/organisasi untuk melihat sejauh mana organisasi sudah mengidentifikasi, menganalisis, memitigasi, dan memonitor risiko sesuai standar manajemen risiko.	$IMR = \frac{\sum n_i = i (X_i \times W_i)}{\sum n_i = i W_i}$	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja tahun 2025 adalah memuat sasaran kinerja yang berinduk pada pohon kinerja hasil review Kementerian PAN RB. Hasil Pengukuran atas Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2025 dapat di gambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran atas Pencapaian Kinerja Tahun 2025

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan daya dukung lingkungan yang berdampak pada kemajuan daerah secara berkelanjutan (IK : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur)					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur	1. Indeks Infrastruktur	0,512	0,550	107,42
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan daya dukung lingkungan yang berdampak pada kemajuan daerah secara berkelanjutan (IK : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Resiko Bencana)					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	2. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	0,83	0,000012	200
		3. Indeks Ketahanan Daerah	0,62	0,64	103,23
Tujuan 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan (IK : Laju Pertumbuhan Ekonomi)					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	3,78	17,72	468,78
		5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	4,04	9,18	227,23
		6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	5,29	9,40	177,69
		7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,34	12,59	150,96
Tujuan 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan (IK : Indeks Gini)					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi	8. Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	10	4,11	41,10
5.	Menurunnya Pengangguran Daerah	9. Tingkat Pengangguran Terbuka	2,67	2,74	97,38
		10. Rasio Kewirausahaan	2,40	1,74	72,50
6.	Meningkatnya Kemajuan Perekonomian dan Kemandirian Desa	11. Indeks Desa	69,35	80,08	115,47

Tujuan 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan (IK : Laju Pertumbuhan Ekonomi)					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (IK : Indeks Pembangunan Manusia)					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12. Umur Harapan Hidup	74,26	74,14	99,84
		13. Prevalensi Stunting	11,88	14,53	77,69
8.	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	14. Harapan Lama Sekolah	13,17	13,35	101,37
		15. Rata-Rata lama Sekolah	8,37	8,34	99,64

Tujuan 4 : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif (IK : Indeks Harmoni Indonesia (IHaI))					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
9.	Menurunnya Kemiskinan Daerah	16. Angka Kemiskinan	4,62	4,64	99,57
10.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	17. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	70	81,15	115,93
11.	Meningkatnya Kemajuan Budaya	18. Indeks Pembangunan Kebudayaan	60,34	60,64	100,50

Tujuan 5 : Terwujudnya Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel (IK : Indeks Reformasi Birokrasi)					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	19. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,49 (-A)	4,57	101,78
		20. Indeks Integritas	75,25	74,68	99,24
		21. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77	77,10	100,13
		22. Indeks SPBE	3,40	3,82	112,35
		23. Indeks Manajemen Risiko	3,049	3,053	100,13
		24. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80,70	93,48	115,84

B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

B.1 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur (Indikator Indeks Infrastruktur)

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator Indeks Infrastruktur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	0,512	0,550	107,42

Target Indeks Infrastruktur tahun 2025 adalah 0,512. Realisasi tahun 2025 adalah 0,550, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 107,42 persen.

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator Indeks Infrastruktur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1.	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	0,512	0,550	0,42	-	-

Target Indeks Infrastruktur tahun 2025 adalah 0,512. Realisasi tahun 2025 adalah 0,550, realisasi Tahun 2024 adalah 0,42, realisasi tahun 2023 dan tahun 2022 tidak dapat dibandingkan karena Indeks Infrastruktur RPJMD Lama berbeda komponen penilaiannya dengan RPJMD Baru.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator Indeks Infrastruktur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	0,63	0,550	87,30

Target Akhir RPJMD untuk Indeks Infrastruktur adalah 0,63 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 0,550 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 87,30 persen.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator Indeks Infrastruktur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
1.	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	0,550	-	-	-	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Indeks Infrastruktur Kabupaten Balangan tahun 2025 sebesar 0,542 sedangkan untuk realisasi Kabupaten Tabalong, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan, realisasi Nasional dan realisasi Internasional tidak diperoleh sumber data karena berbeda indikator kinerjanya.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.2, tabel 3.3 tabel 3.4 dan tabel 3.5, analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator Indeks Infrastruktur)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.2 adalah target Indeks Infrastruktur tahun 2025 yaitu 0.512. Realisasi tahun 2025 adalah 0,550, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 107,42 persen. Berikut indikator dari penilaian Indeks Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Balangan:

No	Indikator	Baseline 2024	2025
1.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	3,80	0,92
2.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Aman	0	72,72
3.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	68,44	75,82
4.	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	48,12	52,58
5.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	79,90	85,10
6.	Persentase Perumahan yang Dilengkapi PSU	90	92
7.	Rasio Konektivitas	1	1
	Nilai Indeks	0,415	0,550

Faktor yang mempengaruhi tercapainya kinerja Indeks Infrastruktur antara lain adalah:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

- Perencanaan dan Prioritas Pembangunan Daerah. Pemerintah Kabupaten Balangan telah memasukkan *pembangunan infrastruktur* sebagai prioritas utama dalam APBD dan RKPD, dengan fokus meningkatkan sarana prasarana seperti sanitasi yang aman, sumber air yang aman, akses internet, jalan dalam kondisi mantap, hunian layak, perumahan yang dilengkapi PSU dan rasio konektivitas ini memperkuat fondasi perencanaan infrastruktur daerah. Kualitas perencanaan sangat menentukan bagaimana anggaran dialokasikan dan program dijalankan untuk meningkatkan indeks infrastruktur.
- Alokasi Anggaran APBD untuk Infrastruktur. Penetapan dan pengalokasian anggaran daerah yang memadai untuk infrastruktur sangat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membangun dan memelihara infrastruktur. Sebagaimana APBD 2025 Kabupaten Balangan memprioritaskan pembangunan infrastruktur karena ketersediaan anggaran internal adalah faktor utama yang menentukan seberapa luas dan cepat perbaikan/peningkatan infrastruktur dilakukan.
- Kualitas Pelaksanaan dan Pengawasan Proyek. Masalah teknis seperti perencanaan proyek yang kurang tepat, pelaksanaan lambat, atau pengawasan yang kurang ketat dapat menurunkan kualitas hasil pembangunan infrastruktur. DPRD Balangan menyoroti perlunya perencanaan yang lebih jeli dan pengawasan pelaksanaan proyek jalan untuk menghindari infrastruktur yang kurang memadai. Ini menunjukkan bahwa sistem internal pengendalian mutu proyek berpengaruh langsung pada capaian infrastruktur.
- Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Lokal. Kemampuan SDM di bidang perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan teknis pelaksanaan memengaruhi efektivitas pembangunan infrastruktur. Keterbatasan SDM dapat berdampak pada kualitas rencana, kemampuan monitoring, dan penyelesaian proyek tepat waktu dan sesuai standar. SDM yang lebih terampil dan berpengalaman akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan kualitas infrastruktur. Kualitas dan kuantitas SDM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan antara lain tersedianya JF Perencana, Pelaksana Teknis dan Pengawas Pembangunan.
- Koordinasi Internal Antar SKPD. Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dalam sektor infrastruktur seperti Dinas PUPRPERKIM, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, serta Bapperida sangat penting. Kolaborasi yang kurang kuat dapat menyebabkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan program infrastruktur. Koordinasi internal yang kuat meningkatkan keselarasan program dan mengurangi hambatan implementasi.

2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Pusat/Provinsi. Kebijakan pusat dan provinsi terkait pembangunan infrastruktur, termasuk alokasi dana melalui DAK (Dana Alokasi Khusus), DAU/DAD, atau program prioritas nasional, memberikan dana dan arahan teknis eksternal yang menentukan besaran dan kecepatan pembangunan infrastruktur Kabupaten Balangan. Dukungan dana ini sangat memengaruhi kemampuan daerah untuk membangun dan memelihara infrastruktur publik, sekaligus memengaruhi nilai indeks infrastruktur lokal.
- Dampak Faktor Lingkungan yang Melewati Batas Wilayah. Fenomena alam seperti perubahan iklim, banjir, atau kebakaran yang bersifat regional/global dapat mengganggu infrastruktur dan menuntut upaya pemulihan yang tidak terduga. Hal seperti ini berdampak pada kapasitas daerah dalam memelihara dan meningkatkan infrastruktur, serta menjadi faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya.
- Pasar dan Harga Bahan Baku Konstruksi. Harga bahan material bangunan seperti semen, besi, atau aspal dipengaruhi oleh pasar nasional dan global. Perubahan harga ini berdampak pada biaya pembangunan infrastruktur di daerah, sehingga mempengaruhi kemampuan daerah memenuhi target indeks infrastruktur.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.3 adalah target Indeks Infrastruktur tahun 2025 adalah 0,512. Realisasi tahun 2025 adalah 0,550, Realisasi Tahun 2024 adalah 0,42, Realisasi tahun 2023 dan tahun 2022 tidak dapat dibandingkan karena Indeks Infrastruktur RPJMD Lama berbeda komponen penilaiannya dengan RPJMD

Baru. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2025 secara formal menetapkan peningkatan indeks dan kualitas infrastruktur sebagai prioritas pembangunan utama melalui:

1. Peraturan Bupati tentang RKPD 2025 yang menjadi pedoman kebijakan teknis.
2. Tema dan prioritas dalam PKUA/APBD 2025 yang menekankan percepatan pemenuhan infrastruktur berkualitas.
3. Sinkronisasi dengan RPJMD 2025–2029 untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.4 adalah target akhir RPJMD untuk Indeks Infrastruktur adalah 0,63 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 0,550 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 87,30 persen. Berdasarkan data tabel di atas untuk menuju kepada pencapaian target akhir RPJMD tahun 2030 yakni 0,63, maka Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas baik dalam dokumen perencanaan umum maupun dokumen perencanaan khusus infrastruktur. Karena saat ini Indeks Infrastruktur hanya berada di 0,542, itu artinya harus melakukan gerakan percepatan setiap tahunnya. Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi infrastruktur ini adalah sebagai berikut:

- Penyusunan perencanaan strategis terpadu.
Menjadikan RPJMD periode 2025-2029 Kabupaten Balangan sebagai dokumen pokok pembangunan infrastruktur jangka menengah, termasuk arah, tujuan, dan target kinerja infrastruktur di semua wilayah Kabupaten Balangan. Fokusnya mencakup pengembangan sarana prasarana, penataan perkotaan dan desa, serta peningkatan jaringan infrastruktur dasar. Aksi kunci yang dilakukan yaitu finalisasi dokumen RPJMD 2025-2029 yang memuat indikator capaian infrastruktur dan integrasi target indeks infrastruktur ke dalam kerangka program per SKPD.
- Pelaksanaan proyek strategis yang memprioritaskan jalan, fasilitas publik, dan permukiman.
Pemerintah Kabupaten Balangan telah merilis 12 proyek strategis yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/144/Kum Tahun 2025 tentang Daftar Proyek Strategis Kabupaten Balangan Tahun 2025. Proyek strategis ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan infrastruktur dasar, termasuk pembangunan jalan, fasilitas publik, dan rehabilitasi fasilitas pelayanan masyarakat. Proyek terpilih tersebut antara lain adalah Peningkatan Jalan Paringin - Banua Hanyar, Peningkatan Jalan Gunung Manau – Lok Batu, Rekonstruksi Longsor Desa Tanah Habang Kiri, Penataan Kawasan Terminal Paringin Tahap III, Pembangunan Mall Pelayanan Publik Tahap II. Adapun aksi kunci yang dilakukan percepatan pelaksanaan proyek melalui alokasi anggaran APBD, jadwal pekerjaan, dan pengawasan teknis dan penyelarasan teknis pelaksanaan sesuai standar mutu infrastruktur.
- Penguatan tata ruang dan mutu perumahan
Verifikasi siteplan pengembangan perumahan di Balangan untuk memastikan pertumbuhan permukiman yang sesuai dengan tata ruang yang efektif dan memenuhi standar keselamatan serta kenyamanan. Aksi kunci yang dilakukan melaksanakan evaluasi dan verifikasi perencanaan siteplan perumahan oleh Dinas PUPRPERKIM dan inspeksi pembangunan permukiman untuk memastikan sesuai rencana.
- Penyediaan fasilitas pelayanan publik
Penyediaan dan rehabilitasi fasilitas pelayanan publik seperti pusat pelayanan terpadu, puskesmas, dan fasilitas sosial lainnya untuk menunjang akses layanan bagi masyarakat. Aksi kunci yang dilakukan adalah rehabilitasi puskesmas di beberapa titik (Kecamatan Halong dan Kecamatan Uren) dan penyediaan fasilitas pelayanan terpadu di lokasi strategis.
- Monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan capaian target kinerja infrastruktur daerah.
Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan proyek serta program infrastruktur melalui mekanisme internal SKPD, forum konsultasi publik, dan musyawarah pembangunan. Hal ini termasuk umpan balik masyarakat dan perbaikan program berkelanjutan sesuai hasil Musrenbang dan FKP. Aksi kunci yang dilakukan adalah evaluasi tahunan pelaksanaan proyek strategis, menyusun laporan evaluasi indeks infrastruktur dan perbaikan mutu perencanaan infrastruktur untuk tahun anggaran berikutnya.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.5 adalah menjelaskan bahwa realisasi Indeks Infrastruktur Kabupaten Balangan tahun 2025 sebesar 0,550 sedangkan untuk realisasi Kabupaten Tabalong, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan, realisasi Nasional dan realisasi Internasional tidak diperoleh sumber data karena berbeda indikator kinerjanya.

Faktor dominan yang menyebabkan perbedaan Indeks Infrastruktur Kabupaten Balangan tahun 2025 dibanding kabupaten/kota di Kalimantan Selatan mencakup:

1. Tingginya Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menjadi faktor dominan yang menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Balangan relatif lebih besar. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan bahan material di dalam daerah, ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah, serta tingginya biaya transportasi logistik. Kondisi tersebut mengakibatkan kemampuan pembangunan fisik menjadi lebih terbatas meskipun alokasi anggaran relatif sebanding dengan daerah lain.
2. Tantangan geografis dan distribusi wilayah pedesaan yang menyulitkan pembangunan merata, terutama pada wilayah-wilayah Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Halong.
3. Kualitas perencanaan perlu penguatan agar proyek infrastruktur dapat dieksekusi lebih efisien. Perencanaan pembangunan infrastruktur masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek integrasi data perencanaan, penetapan skala prioritas berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta sinkronisasi antar bidang dan program. Perencanaan yang belum optimal berpotensi menimbulkan inefisiensi pelaksanaan kegiatan, seperti penyesuaian desain, keterlambatan pekerjaan, dan kurang tepatnya penentuan lokasi prioritas pembangunan.

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.2 sampai dengan tabel 3.5 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks Infrastruktur adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks Infrastruktur yaitu :**

- **Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Sesuai Prioritas APBD 2025**

Dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kabupaten Balangan Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Balangan menegaskan *lanjutan pengembangan infrastruktur* sebagai salah satu sasaran strategis. Termasuk dalam upaya ini adalah:

- Peningkatan stok infrastruktur terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas. Peningkatan stok infrastruktur dapat dilakukan melalui pelebaran dan perbaikan jalan, bendungan pitap, jaringan air bersih, irigasi, sistem pengolahan limbah, perluasan jaringan internet/*broadband*, pembangunan data center, BTS, dan infrastruktur 5G, sistem digital pemerintah (*e-government*).
- Memastikan dukungan terhadap penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Ini menunjukkan komitmen anggaran dan kebijakan untuk memperkuat infrastruktur dasar, yang secara langsung berdampak pada nilai indeks infrastruktur.

- **Pelaksanaan Proyek Strategis Infrastruktur**

Pemerintah Kabupaten Balangan mulai menggarap 12 proyek strategis infrastruktur (telah dijelaskan pada narasi 3.4 sebelumnya) yang telah diatur melalui Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/144/Kum TAHUN 2025 tentang Daftar Proyek Strategis Kabupaten Balangan Tahun 2025. Proyek tersebut dilaksanakan oleh pihak terkait sepanjang tahun 2025. Proyek ini menyasar kebutuhan masyarakat dan pelayanan dasar faktor penting dalam penilaian indeks infrastruktur. Upaya ini sebagai cerminan percepatan pelaksanaan program infrastruktur yang lebih sistematis dan terencana.

- **Dokumen RPJMD 2025–2029 yang Menempatkan Infrastruktur sebagai Fokus Utama**

Dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029, pemerintah daerah menegaskan *pengembangan infrastruktur dan sarana ekonomi desa serta kota* sebagai salah satu fokus utama arahan pembangunan lima tahunan. Penekanan infrastruktur dalam RPJMD memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program pembangunannya terintegrasi dengan target capaian indeks infrastruktur.

- **Kolaborasi dengan Swasta dan Mitra**

Pemerintah Kabupaten Balangan terus menjalin kolaborasi strategis, termasuk dengan sektor swasta, misalnya melalui dukungan CSR dari perusahaan besar seperti Adaro Group yang turut memperkuat kinerja pembangunan daerah. Meskipun fokusnya tidak hanya infrastruktur fisik, kolaborasi semacam ini membantu *memperluas sumber daya* untuk pembangunan fasilitas yang lebih merata dan berkualitas.

- **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pendidikan**

Upaya strategis lain adalah dengan mendukung pembangunan fasilitas pendidikan tinggi (misal kerja sama dengan PSDKU Universitas Lambung Mangkurat) yang disiapkan membangun kampus di Balangan pada 2025. Infrastruktur pendidikan ini tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari infrastruktur sosial yang diperhitungkan dalam indeks yang lebih luas (khususnya infrastruktur layanan publik). Pemberian bantuan Beasiswa Seribu Sarjana sesuai Peraturan Bupati Balangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan dan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/542/Kum Tahun 2025 tentang Penerima Beasiswa Program Seribu Sarjana Tahun 2025.

- **Perbaikan Tata Kelola Infrastruktur melalui Peraturan Daerah**

Penerbitan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 turut menjamin *kepastian program dan alokasi anggaran* untuk pembangunan berbagai sektor infrastruktur. Walaupun secara administratif fokusnya untuk 2026, dokumen ini menjadi landasan perencanaan dan transisi program infrastruktur yang dimulai pada 2025.

2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator Indeks Infrastruktur)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dengan indikator kinerja Indeks Infrastruktur. Adapun gambaran umum keterikatan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
1.	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program strategis pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, akses layanan dasar, dan kelayakan infrastruktur pendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Balangan tahun 2025 merupakan program kunci dalam peningkatan Indeks Infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Balangan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akses sanitasi layak, menurunkan angka stunting, dan mendukung pencapaian kabupaten bebas buang air besar sembarangan (<i>Open Defecation Free / ODF</i>).
		Program Penyelenggaraan Jalan	Program ini diorientasikan pada perbaikan, rekonstruksi, peningkatan fungsi jalan serta dukungan terhadap konektivitas antarkawasan di seluruh Kabupaten Balangan sesuai dengan Renstra Dinas PUPR Perkim.
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Infrastruktur yaitu:

- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) merupakan program strategis pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, akses layanan dasar, dan kelayakan

infrastruktur pendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Balangan tahun 2025, program PSU menjadi bagian penting dari:

- Prioritas pembangunan infrastruktur daerah
- Upaya peningkatan Indeks Infrastruktur Wilayah
- Dukungan terhadap pemerataan pembangunan desa-kota

Berikut indikator dari Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks Infrastruktur:

a. Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik

Pada Tahun 2025, Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan berhasil mencapai kinerja yang baik pada indikator Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik. Target yang ditetapkan sebesar 50%, dan realisasi yang berhasil dicapai sebesar 52%. Artinya, kondisi jalan lingkungan yang baik di Kabupaten Balangan sudah melebihi target yang direncanakan. Capaian ini diperoleh melalui upaya nyata berupa perbaikan dan peningkatan jalan lingkungan yang menjadi prioritas masyarakat, terutama di kawasan permukiman. Pekerjaan dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan agar jalan yang dibangun atau diperbaiki dapat digunakan dengan nyaman dan aman. Koordinasi dengan desa dan kelurahan juga terus dilakukan agar penanganan jalan tepat sasaran. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas jalan lingkungan sudah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ke depan, Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan akan terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar kondisi jalan lingkungan dapat terus terjaga dan semakin merata.

b. Persentase Panjang Drainase dalam kondisi baik

Pada Tahun 2025, indikator Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik berhasil mencapai kinerja yang melampaui target. Target yang ditetapkan sebesar 65%, sedangkan realisasi mencapai 67%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan dan pemeliharaan drainase telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang nyata. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan pembangunan, perbaikan, dan normalisasi saluran drainase pada kawasan permukiman dan wilayah rawan genangan. Perencanaan kegiatan dilakukan berdasarkan kondisi lapangan serta hasil koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan agar penanganan drainase tepat sasaran. Pengawasan teknis juga dilakukan untuk memastikan saluran drainase berfungsi dengan baik. Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa pengelolaan drainase sudah berjalan dengan baik dan berkontribusi dalam mengurangi genangan air serta meningkatkan kenyamanan lingkungan permukiman.

- Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Balangan tahun 2025 merupakan program kunci dalam peningkatan Indeks Infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Program ini memberikan dampak langsung dan terukur pada ketersediaan layanan air minum layak. Tantangan utama terletak pada:

- Keberlanjutan sumber air baku
- Efektivitas pengelolaan dan pemeliharaan

Keberhasilan program sangat ditentukan oleh pendekatan sistem, kelembagaan pengelola, dan kesinambungan pendanaan. Berikut indikator dari Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks Infrastruktur yaitu persentase rumah tangga dengan akses air minum aman. Pada Tahun 2025, indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman menunjukkan capaian yang melampaui target. Target yang ditetapkan sebesar 72,27%, sedangkan realisasi mencapai 72,72%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses air minum aman bagi masyarakat telah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan penyediaan dan peningkatan sarana air minum, baik melalui pengembangan jaringan perpipaan maupun sarana air minum bukan jaringan perpipaan, serta perbaikan kualitas sarana eksisting. Perencanaan kegiatan dilakukan berdasarkan kebutuhan lapangan dan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan agar pelayanan air minum tepat sasaran. Adapun hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran yang

menyebabkan belum seluruh wilayah dapat terlayani secara optimal, serta kondisi geografis dan sebaran permukiman yang menyulitkan pengembangan jaringan air minum. Selain itu, ketersediaan sumber air baku yang terbatas pada beberapa wilayah juga menjadi tantangan dalam peningkatan layanan. Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa penyediaan akses air minum aman bagi masyarakat telah menunjukkan hasil yang positif dan berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Balangan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akses sanitasi layak, menurunkan angka stunting, dan mendukung pencapaian kabupaten bebas buang air besar sembarangan (*Open Defecation Free / ODF*). Pada Tahun 2025, capaian indikator Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Limbah Aman belum sepenuhnya mencapai target. Target yang ditetapkan sebesar 1%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 0,97%. Selisih capaian tersebut relatif kecil dan menunjukkan bahwa upaya peningkatan layanan air limbah aman telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan. Upaya yang telah dilakukan antara lain pembangunan dan peningkatan sarana pengelolaan air limbah domestik, khususnya melalui penyediaan sistem setempat, serta sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan air limbah yang aman. Penentuan lokasi kegiatan dilakukan berdasarkan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Adapun hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran, cakupan layanan yang masih terbatas, serta rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sarana air limbah yang tersedia. Selain itu, keterbatasan lahan dan kondisi permukiman yang tersebar juga memengaruhi percepatan perluasan layanan.
- Program Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Balangan merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan, yang selanjutnya berdampak positif pada Indeks Infrastruktur daerah. Program ini diorientasikan pada perbaikan, rekonstruksi, peningkatan fungsi jalan serta dukungan terhadap konektivitas antarkawasan di seluruh Kabupaten Balangan sesuai dengan Renstra Dinas PUPRPERKIM. Berikut indikator dari Program Penyelenggaraan Jalan Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks Infrastruktur:

a. Persentase jalan dalam kondisi mantap

Pada Tahun 2025, Jalan dalam Kondisi Mantap mencapai 52,58%. Realisasi tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan pada ruas-ruas prioritas, khususnya jalan yang menunjang akses pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat. Perencanaan kegiatan dilakukan berdasarkan kondisi lapangan dan hasil evaluasi teknis, serta didukung oleh pengawasan pekerjaan agar kualitas jalan tetap terjaga. Adapun data jalan dalam kondisi mantap sebagaimana tabulasi berikut:

Kondisi Jalan		Realisasi Tahun											
		2022			2023			2024			2025		
		Panjang Jalan (Km)	%		Panjang Jalan (Km)	%		Panjang Jalan (Km)	%		Panjang Jalan (Km)	%	
BAIK	MANTAP	185,300	27,564	72,616	292,494	52,41	61,55	275,108	48,51	65,18	157,74	27,816	52,577
SEDANG		302,860	45,051		51,009	9,14		94,547	16,67		140,41	24,761	
RUSAK RINGAN	TIDAK MANTAP	89,630	13,333	27,384	17,99	3,22	38,43	16,08	2,84	34,82	73,16	12,901	47,422
RUSAK BERAT		94,463	14,052		196,482	35,21		181,341	31,98		195,76	34,521	
TOTAL		672.253			557.975			567.076			567.076		

b. Persentase jembatan dalam kondisi mantap

Pada Tahun 2025, jembatan dalam kondisi mantap 383 unit. Upaya yang dilakukan oleh Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan dalam rangka mewujudkan jembatan dalam kondisi mantap antara lain melalui kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala jembatan, perbaikan pada bagian struktur dan bangunan pelengkap, serta pengawasan kondisi jembatan secara periodik. Penanganan diprioritaskan pada jembatan yang menunjang konektivitas wilayah dan keselamatan pengguna jalan.

Pemerintah Kabupaten Balangan dalam upaya meningkatkan Indeks Infrastruktur juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD terkait untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*	Memerlukan dukungan teknis, anggaran dan izin peran utama dalam infrastruktur pelaksanaan fisik proyek jalan dan fasilitas umum lainnya	Peningkatan Jalan Paringin-Banua Hanyar, Peningkatan Jalan Gunung Manau-Lok Batu, Rekonstruksi Longsor Desa Tanah Habang Kiri, Penataan Kawasan Terminal Paringin Tahap III, Pembangunan Mall Pelayanan Publik Tahap II serta fasilitas publik lain yang tercatat dalam daftar proyek strategis tahun 2025
		Dinas Perhubungan*	Pengembangan infrastruktur transportasi	Peningkatan fasilitas transportasi daerah seperti terminal, halte, rambu lalu lintas, marka jalan, serta fasilitas keselamatan transportasi
		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup*	Pengembangan infrastruktur lingkungan	Pengelolaan sarana prasarana pengelolaan sampah seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta pengelolaan sistem persampahan di kawasan permukiman
		Bapperida	Menyatukan prioritas pembangunan antar SKPD dalam infrastruktur perencanaan, koordinasi dan sinkronisasi	Keselarasan program lintas SKPD agar konsisten dengan RPJMD dan RKPD. Fasilitasi Forum Perencanaan yaitu melaksanakan Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 yang dihadiri oleh SKPD, DPRD, akademisi, swasta, dan masyarakat.
		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Perkembangan infrastruktur pertanian	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta sarana produksi pertanian untuk mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian.
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Perkembangan infrastruktur digital	Pengembangan jaringan komunikasi dan teknologi informasi, termasuk penguatan

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
				jaringan internet pemerintahan dan pelayanan publik.
		Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mengkoordinasikan izin dari SKPD teknis lain dalam infrastruktur perizinan pembangunan dan MPP	Memfasilitasi konsultasi dan izin pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai salah satu pusat layanan terpadu.
		Sekretariat Daerah	Menghubungkan semua SKPD dalam satu sistem laporan (SI ABANG)	Terlaksananya pengoperasian <i>Si-ABANG</i> untuk <i>Monev Terintegrasi</i> sebagai sistem monitoring bersama.

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Indeks Infrastruktur di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting kinerja SKPD :

Tabel 3.7
Money Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Money Offline	Money Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	1. Rapat koordinasi penentuan target infrastruktur di Ruang Rapat Bapperida	1. Komunikasi by WhattApp terkait kondisi jalan mantap	
			2. Asistensi Laporan Kinerja SKPD dengan Dinas PUPRPERKIM Senin 12 Januari 2026 di Ruang Rapat Bagian Organisasi	2. Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Indeks Infrastruktur	
			3. Rapat Koordinasi dan Monitoring serta Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2025 untuk mengevaluasi progres semua kegiatan yang telah direncanakan, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur	3. Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memonitor kinerja program dan kegiatan SKPD secara terintegrasi dengan perencanaan, keuangan, dan penilaian kinerja.	
			4. Integrasi monitoring melalui Perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dirancang melalui forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.		
			5. Monev Proyek strategis seperti pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang		

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Monev Offline	Monev Online	Keterangan
			ditargetkan rampung pada akhir 2025 dipantau progres fisiknya secara berkala oleh perangkat daerah terkait termasuk Dinas PUPRPERKIM dan Bapperida		
			6. Koordinasi antar SKPD (misalnya Dinas PUPRPERKIM, Dinas PMPTSP, Bapperida) untuk mengawasi realisasi pembangunan dan intervensi lintas sektor		
			7. Melaksanakan pemantauan periodik terhadap : Nilai indeks infrastruktur secara tahunan, perbandingan capaian fisik dan indikator target dan sebagai dasar evaluasi kebijakan program berikutnya		

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator Indeks Infrastruktur)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target indikator kinerja Indeks Infrastruktur tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

- SDM diorganisasi secara terpadu lintas SKPD melalui garis koordinasi di bawah Koordinator Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur Bapperida.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, sertifikasi, dan manajemen proyek meningkatkan produktivitas, kualitas pengawasan, dan kemampuan pengendalian proyek. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPRPERKIM adalah Pelatihan Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang Terlatih dan Terlibat dalam Kegiatan Konstruksi Pemerintah Kabupaten/Kota (Sertifikat Pelatihan Operator dan Teknis/Analisis).

b. Efisiensi Anggaran

- Perencanaan berbasis prioritas memastikan alokasi anggaran fokus pada proyek yang memiliki dampak langsung terhadap aksesibilitas dan konektivitas daerah. Dinas PUPRPERKIM dan SKPD lain sebagai pemangku kinerja Indeks Infrastruktur sudah menggunakan Aplikasi SAKIPRA dan SIPD.
- Sinergi antarprogram (misal pembangunan infrastruktur jalan penghubung antara jalan usaha tani dengan jalan utama). Efisiensi anggaran sebesar 14,53 persen.
- Infrastruktur masih menjadi prioritas kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan sehingga banyak efisiensi yang dilakukan seperti kegiatan bimtek dialihkan ke infrastruktur sebesar 55,72% dari total APBD.

c. Efisiensi Waktu

- Perencanaan terpadu dan penjadwalan lintas proyek dalam Aplikasi SIRUP.
- Pemantauan dan evaluasi rutin meminimalkan keterlambatan akibat hambatan teknis, administrasi, atau logistik melalui Aplikasi E-Procurement.

B.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana
(Indikator 1 : Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca)

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator 1: Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	0,83	0,000012	200

Target Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2025 adalah 0,83. Realisasi tahun 2025 adalah 0,000012 sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 200 persen.

Tabel 3.9
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator 1: Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	0,83	0,000012	0,35	-	-

Target Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2025 adalah 0,83. Realisasi tahun 2025 adalah 0,000012, realisasi tahun 2024 adalah 0,35. Realisasi tahun 2023 dan 2022 tidak ada perhitungan karena belum menjadi indikator kinerja.

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator 1: Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	0,66	0,000012	200

Target Akhir RPJMD untuk Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca adalah 0,66 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 0,000012 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 200 persen.

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator 1: Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	0,000012	-	-	-	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 0,28, realisasi Kabupaten Tabalong tidak bisa dibandingkan karena berbeda indikator kinerjanya, sedangkan realisasi Propinsi Kalimantan Selatan, realisasi Nasional dan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.8, tabel 3.9 tabel 3.10 dan tabel 3.11, analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator 1 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.8 adalah target Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2025 yaitu 0,83. Realisasi tahun 2025 adalah 0,000012, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 200 persen tercapai sesuai target.

Tingkat emisi GRK agregat tahun 2024 di Kabupaten Balangan mencapai emisi dan serapan absolut 1.353.235 ton CO₂-eq. Masing-masing kategori/sektor yang berkontribusi mengemisikan GRK adalah sektor energi sebesar 377.703 ton CO₂-eq (27,9%), sektor pertanian 106.383 ton CO₂-eq (7,9%), perubahan tutupan lahan absolut 845.490 ton CO₂-eq (62,5%) dan sektor limbah domestik 23.658 ton CO₂-eq (1,7%). Status emisi dan serapan GRK kumulatif absolut selama tahun 2010 – 2024 yang berkontribusi adalah sektor energi 3.731.847 ton CO₂-eq (19,4%), sektor pertanian 1.304.199 ton CO₂-eq (6,8%), sektor tutupan lahan 13.833.292 ton CO₂-eq (72,1%), dan sektor pengelolaan limbah domestik 327.834 ton CO₂-eq (1,7%). Ada tren penurunan emisi GRK di Kabupaten Balangan selama periode 2011–2024. Pada tahun 2024 ada penurunan emisi GRK sebesar 27,6% dan lebih tinggi targetnya 21,1% pada NDC1, tetapi lebih rendah targetnya 30,6% pada NDC2. Inventarisasi GRK tahun 2024 melampaui NDC1 tetapi tidak NDC2.

Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 0,28 pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 33,25 persen dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adalah:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

- Pengelolaan sampah yang baik dapat menurunkan emisi metana dari limbah organik. Pemerintah Balangan sudah mendorong kegiatan pengelolaan sampah seperti daur ulang di desa yang melibatkan masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah akhir di TPA. Ini menunjukkan peran internal sektor lingkungan hidup dalam merancang dan mengelola program pengurangan emisi dari limbah.
- Pelaksanaan kegiatan rencana aksi penanaman pohon yang dilakukan pada hari menanam pohon sedunia di Kebun Raya Balangan serta penanaman pohon di Desa Pimping dan Desa Kandang Jaya Kecamatan Lampihong. Bibit pohon yang akan ditanam berasal dari Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan berupa bibit pohon trembesi. Penanaman bibit pohon dilakukan disekitar kantor desa dan disekitar pinggir sungai. Dokumentasi kegiatan sebagai berikut:



- Komitmen pemerintah kabupaten melalui kebijakan internal, termasuk integrasi mitigasi ke dalam dokumen strategis RPJMD Pemerintah Kabupaten Balangan periode 2025-2029, akan memengaruhi intensitas emisi GRK daerah. Komitmen ini mencakup target penurunan emisi dan pengalokasian anggaran untuk kegiatan mitigasi, serta integrasi ke program sektoral lain.
- Koordinasi efektif antara Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Bapperida, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta sektor lainnya sangat penting dalam implementasi penurunan emisi di sektor energi, limbah, dan lahan. Harmoni kebijakan internal mempercepat upaya mitigasi.
- Adanya penggunaan lampu jalan yang ramah lingkungan seperti lampu solar cell yang menggunakan energi matahari sebagai sumber listrik.

- Melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- Adanya penugasan dari Bupati Balangan mengenai pembentukan kelompok kerja yang beanggotakan dari SKPD terkait dengan tujuan agar ketersediaan data aktivitas dapat dilakukan secara berkelanjutan.

2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- Kebijakan dan Program dari Provinsi Kalimantan Selatan seperti penguatan tata kelola hutan dan rehabilitasi lahan sangat memengaruhi laju emisi GRK, terutama dari sektor penggunaan lahan dan kehutanan di Balangan dan sekitarnya serta Program seperti *IFNET 2030* dan *REDD+* untuk mendorong mitigasi emisi melalui konservasi hutan.
- Perubahan Iklim dan Faktor Alam Global. Fenomena perubahan iklim global (suhu, curah hujan, kejadian bencana alam) dapat memengaruhi laju emisi dan intensitas GRK dari sektor lahan dan tutupan hutan. Kebakaran hutan di Kabupaten Balangan tahun 2025 tidak banyak terjadi karena Pemerintah Kabupaten Balangan menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan. Sehingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan lonjakan emisi CO₂ dan CH₄ dapat ditekan agar tidak meningkat di tahun 2025.
- Komitmen Indonesia terhadap perjanjian iklim global seperti *Paris Agreement* memaksa penurunan emisi di semua wilayah termasuk Balangan, melalui target *Nationally Determined Contributions (NDC)* yang menetapkan batas-batas pengurangan emisi di level nasional dan diturunkan ke daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa Gubernur bertugas menyelenggarakan inventarisasi GRK di tingkat provinsi dan mengoordinasikan penyelenggaraan inventarisasi GRK di kabupaten dan kota di wilayahnya. Gubernur melaporkan hasil kegiatan inventarisasi GRK dari kabupaten dan/atau kota kepada Menteri satu kali dalam setahun. Sejalan dengan itu Kabupaten Balangan melaporkan kegiatan IGRK tahun 2024 pada pelaporan tahun 2025. Sesuai dengan ruang lingkup penyediaan data aktivitas yang tersebar pada beberapa pemangku kepentingan lingkungan kabupaten, provinsi, regional dan nasional. Penyusunan dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Balangan 2025 diharapkan menjadi kegiatan berkelanjutan, dapat diterapkan sebagai *baseline year* data untuk perhitungan tahun-tahun berikutnya. Oleh sebab itu, instansi-instansi terkait mulai dapat secara rutin mendokumentasikan data aktivitas terkait.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kecukupan Sektor Pelaporan GRK yang bersumber dari masing-masing sektor.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.9 adalah target Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2025 adalah 0,83. Realisasi tahun 2025 adalah 0,000012, Realisasi tahun 2024 adalah 0,35. Hal-hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan terkait Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yaitu:

- **Penguatan Kesadaran dan Pengelolaan Sampah sebagai Mitigasi Emisi.** Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) mengadakan kegiatan bertema lingkungan yang sekaligus menjadi upaya nyata menekan sumber emisi GRK, misalnya dari timbunan sampah organik yang menghasilkan metana.
- **Program “Pilah Sampah Dapat Sembako”** pada peringatan *Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025* mendorong masyarakat memilah sampah dari rumah, mengurangi plastik sekali pakai, dan mengubah sampah anorganik menjadi nilai ekonomi sekaligus menekan emisi gas berbahaya. Program ini merupakan bagian dari kebijakan publik yang menggabungkan edukasi, pengelolaan sampah, dan aksi mitigasi emisi di level masyarakat.
- **Edukasi dan Kampanye Lingkungan untuk Menurunkan Emisi.** Wakil Bupati Balangan menegaskan bahwa sampah bukan hanya masalah estetika, tetapi juga merupakan *kontributor signifikan emisi GRK* melalui gas metana dari penguraian sampah. Pemerintah Daerah mendorong pengurangan sampah serta pengembangan pusat daur ulang, termasuk model *zero trash rampung*, yang membantu mengurangi emisi dari sektor persampahan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengintegrasikan mitigasi emisi dalam kebijakan pengelolaan sampah lokal.

- **Inventarisasi Emisi GRK dan Pelaporan Lingkungan.** Walaupun dokumen inventarisasi GRK Kabupaten Balangan tidak dipublikasi lengkap secara online, laporan inventarisasi emisi daerah menunjukkan komitmen untuk mengikuti kebijakan nasional tentang pengurangan emisi (Peraturan Presiden No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK) yang diturunkan untuk provinsi dan kabupaten. Inventarisasi menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan mitigasi berbasis data dan juga menjadi syarat pelaporan kepada Pemerintah Pusat.
- **Sinergi dengan Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan.** Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar koordinasi tata kelola hutan untuk menekan emisi GRK dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota termasuk Balangan. Rakor ini bertujuan memperkuat pengelolaan hutan, rehabilitasi lahan, dan pencegahan kebakaran hutan faktor penting yang berkontribusi besar terhadap emisi GRK di wilayah ini. Kebijakan provinsi menjadi *landasan eksternal* yang kemudian diikuti secara internal melalui kebijakan dan program pemerintah kabupaten.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.10 adalah target akhir RPJMD untuk Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca adalah 0,66 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 0,000012 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 200 persen. Berdasarkan data tabel di atas untuk menuju kepada pencapaian target akhir RPJMD tahun 2030 yakni 0,66. Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas baik dalam dokumen perencanaan umum maupun dokumen perencanaan khusus Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Karena saat ini Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca sudah berada di 0,000012, itu artinya harus melakukan gerakan percepatan setiap tahunnya agar hasil kinerja lebih maksimal. Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan kinerja sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas dan cakupan inventarisasi emisi GRK sebagai basis perencanaan dan pelaporan. Langkah kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan dan validasi data inventarisasi emisi GRK per sektor sehingga dokumen *inventarisasi GRK* terbit dan terverifikasi.
- Menekan perubahan tutupan lahan dan degradasi dengan konservasi hutan. Langkah kegiatan yang dilakukan perlindungan hutan lindung.
- Mengurangi emisi metana dari TPA dan sumber sampah organik melalui pengelolaan terintegrasi (*reduce-reuse-recycle/3R*). Langkah kegiatan yang dilakukan penyediaan fasilitas TPS3R di desa/kelurahan. Berdasarkan laporan pengelolaan sampah Provinsi Kalimantan Selatan yang mencakup fasilitas pengelolaan sampah termasuk *TPS3R*, pada data tahun 2024, Kabupaten Balangan tercatat memiliki sekitar 7 TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) yang aktif mengelola sampah di tingkat lokal. Sedangkan untuk tahun 2025 belum tersedia *data resmi yang dirilis* secara publik yang menyatakan jumlah TPS3R aktif di Kabupaten Balangan per akhir tahun 2025.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.11 adalah menjelaskan bahwa realisasi Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 0,000012, realisasi Kabupaten Tabalong tidak bisa dibandingkan karena berbeda indikator kinerjanya, sedangkan realisasi Propinsi Kalimantan Selatan, realisasi Nasional dan realisasi Internasional tidak ada sumber data. Pada tahun 2025, faktor dominan yang mempengaruhi emisi GRK Kabupaten Balangan adalah:

1. Emisi GRK di Kabupaten Balangan sangat dipengaruhi oleh sektor energi, terutama dari konsumsi bahan bakar untuk transportasi dan kegiatan produktif lainnya. Berdasarkan data inventarisasi GRK Kabupaten Balangan periode 2010–2023, kontribusi sektor energi mencapai sekitar 67,7 % dari total emisi CO₂-eq kumulatif, jauh lebih besar dibanding sektor lain seperti pertanian (6,0 %) dan perubahan tutupan lahan (25,5 %) serta limbah (0,7 %). Artinya sektor energi (kendaraan bermotor, alat berat, pembangkit mini, konsumsi BBM lainnya) menjadi *pendorong utama GRK di Balangan*, lebih dominan dibandingkan dengan kontribusi LULUCF dan pertanian.
2. Sektor pertanian–peternakan. Kontribusi sektor pertanian di Balangan termasuk lebih rendah (~6 %) dibanding sektor energi dan LULUCF. Sementara di beberapa kabupaten lain yang basis ekonomi lebih kuat di pertanian intensif atau peternakan, sektor ini bisa menyumbang lebih besar (karena metana dari peternakan, nitrous oxide

dari pupuk dan sawah), meskipun dalam konteks Provinsi Kalimantan Selatan secara agregat pertanian bukan sumber dominan.

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.8 sampai dengan tabel 3.11 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan kinerja melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan yaitu :**

- Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipatif. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup (DPLH) menggelar kegiatan pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat seperti program “*Pilah Sampah Dapat Sembako*” pada peringatan *Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025*. Kegiatan ini mendorong pemilahan sampah sejak awal sehingga mengurangi sampah anorganik dan organik yang dibuang ke TPA, sekaligus mendorong kesadaran lingkungan yang dapat menekan emisi metana dari sampah.
- Aksi Bersih Desa dalam Rangka Pengelolaan Sampah. Pada *Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025*, Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan Aksi Bersih Desa di Desa Muara Jaya guna menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat desa. Fokus kegiatan ini adalah mengurangi sampah residu yang masuk ke TPA, sehingga memperkecil sumber emisi GRK dari limbah.
- Pemantauan Kualitas Udara dan Emisi. Laporan *Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah* Kabupaten Balangan tahun 2025 menyebutkan bahwa pemerintah melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala dan uji emisi kendaraan bermotor, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan ProKlim dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Upaya ini mendukung data dasar dalam menilai dinamika emisi GRK dan kebijakan mitigasi yang lebih terukur.
- Kesiapsiagaan dan Pencegahan Kebakaran Hutan/Lahan. Pemerintah Kabupaten Balangan juga fokus pada peningkatan kesiapsiagaan dan responsifitas terhadap kebakaran hutan dan lahan, yang menjadi salah satu sumber besar emisi GRK ketika terjadi. Koordinasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam pencegahan kebakaran menjadi bagian penting dari strategi mitigasi.
- Sosialisasi Kesadaran Lingkungan. Pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa sampah bukan hanya masalah estetika tetapi juga penyumbang emisi GRK. Program ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Balangan bahwa pengelolaan sampah terpadu dapat menurunkan emisi gas rumah kaca. Ini menjadi landasan perubahan perilaku masyarakat yang mendukung target penurunan emisi.
- Kategori energi : Identifikasi klasifikasi pemakaian energi, pemakaian BBM di Provinsi dan kabupaten, agar mengurangi bias dari HEESI, identifikasi klasifikasi kendaraan di kabupaten agar mengurangi bias dari provinsi data timeseris ditingkatkan ketersediaannya, diperlukan data primer bahan bakar rumah tangga bisa ada sampling per klasifikasi pendapatan, sesuai dengan lokasi kegiatan, tahun depan bisa dilaporkan kondisi IGRK kelompok Perusahaan.
- Kategori pertanian : Identifikasi varietas, pemakaian BO; pemakaian pupuk Urea, berapa kali tanam setahun perlu diverifikasi dari laporan dinas pertanian, identifikasi populasi sapi di kabupaten klasifikasi umur ternak penggunaan kotoran ternak, identifikasi kebutuhan pupuk riil per desa sehingga dapat dikembangkan per kabupaten diverifikasi dari laporan dinas terkait pertanian dan Perkebunan, Identifikasi sampling pemakaian BO dan pakan.
- Kategori kehutanan dan tutupan lahan : Mengikuti sesuai pelaporan provinsi.
- Kategori limbah : Dikembangkan klasifikasi komponen komposisi limbah padat; identifikasi cakupan TPA; kapasitas TPA sudah melampaui volume limbah yang dapat dikelola mendalami data SIPSN, Identifikasi tipe pengelolaan limbah cair domestic, dan cakupannya dalam jumlah populasi, identifikasi dan meminta laporan pengelolaan limbah CPO dari Perusahaan

2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator 1 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana dengan indikator kinerja Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Adapun gambaran umum keterikatan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun 2025 menekankan pada pendekatan berbasis pengelolaan sampah, edukasi masyarakat, inovasi pengolahan sampah, Program Kampung Iklim, serta pemantauan kualitas lingkungan sebagai langkah nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program prioritas yang diposisikan sebagai bagian dari pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
		Program Pengelolaan Persampahan	Program ini merupakan instrumen mitigasi yang paling realistis, cepat, dan berbasis masyarakat untuk mendukung target penurunan emisi GRK Kabupaten Balangan.
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca yaitu:

- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** Kabupaten Balangan Tahun 2025 menekankan pada pendekatan berbasis pengelolaan sampah, edukasi masyarakat, inovasi pengolahan sampah. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) melaksanakan beberapa kegiatan lingkungan yang berkaitan langsung dengan sumber emisi tidak langsung, antara lain:
 - Pilah Sampah Dapat Sembako**
 Kegiatan ini digelar pada *Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi sampah plastik dan meminimalkan limbah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengurangan sampah anorganik dan peningkatan pemilahan limbah organik→ anorganik dapat membantu mengurangi emisi metana dari limbah yang melepaskan gas rumah kaca.
 - Aksi Bersih Desa di Desa Muara Jaya**
 Dilaksanakan pada *Hari Peduli Sampah Nasional 2025*, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan budaya pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab di desa-desa. Program ini memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sekaligus *mengurangi potensi sumber emisi GRK* dari limbah domestik.
 - Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)**
 Pemerintah kabupaten menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan respon terhadap kebakaran hutan dan lahan salah satu sumber emisi besar di Kalimantan. Fokus koordinasi lintas sektor:
 - Pencegahan kebakaran melalui peringatan dini
 - Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain
 - Strategi mitigasi dampak asap dan emisi karbon besar akibat karhutla.
- Program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3** merupakan salah satu program prioritas di Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan yang diposisikan sebagai bagian dari pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Program ini mencakup penyusunan kebijakan, pembinaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap B3 dan limbah B3 di wilayah kabupaten. Meskipun inti program fokus pada pengendalian pencemaran daripada GRK langsung, program B3/Limbah B3 tetap

memberikan kontribusi signifikan terhadap strategi mitigasi perubahan iklim dengan beberapa mekanisme:

- Pengurangan Emisi Tidak Langsung dari Pengelolaan Limbah B3
 - Pengelolaan limbah B3 yang tepat mengurangi potensi terbukanya sumber pencemaran tanah, air, dan udara, yang dapat menurunkan emisi gas berbahaya lain yang berkontribusi pada GRK ketika limbah dibakar atau terurai tidak terkontrol.
 - Meski tidak sebesar sektor energi atau perubahan lahan, limbah yang melepaskan gas beracun (VOC, dioxin, furan) turut memperburuk efek rumah kaca regional bila tidak dikelola secara benar, sehingga pengendalian B3 membantu mengurangi *pressure* terhadap atmosfer.
- Insentif Tata Kelola Lingkungan yang Lebih Baik
 - Pendekatan tata kelola limbah dan B3 mempromosikan praktik produksi bersih di Pelaku Usaha/ Kegiatan (PUK) sehingga mendorong efisiensi material/B3 dan potensi emission leakage berkurang.
 - Dengan meminimalkan limbah berbahaya yang dibuang sembarangan dan mendorong pemrosesan limbah sesuai standar, program membantu menurunkan emisi tidak langsung yang terkait dengan degradasi lingkungan serta konsumsi energi tambahan untuk pembersihan/penanggulangan terjadi.
- Program Pengelolaan Persampahan Kabupaten Balangan Tahun 2025 memiliki peran strategis dalam menurunkan emisi GRK sektor limbah, terutama melalui pengurangan sampah di sumber, pemilahan dan pengolahan sampah organik dan penguatan TPS3R dan perubahan perilaku Masyarakat Meskipun kontribusinya terhadap total GRK kabupaten tidak sebesar sektor energi dan perubahan lahan, program ini merupakan instrumen mitigasi yang paling realistis, cepat, dan berbasis masyarakat untuk mendukung target penurunan emisi GRK Kabupaten Balangan.

Dari ketiga program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup*	Penghubung teknis lintas SKPD dalam melakukan koordinasi mitigasi GRK dan pengendalian pencemaran	Pengumpulan data, implementasi program sampah, pengawasan pencemaran, dan mitigasi bencana lingkungan.
		Bapperida	Sinkronisasi kebijakan dan anggaran untuk integrasi target emisi ke perencanaan	Mitigasi emisi GRK ke dalam dokumen formal (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS).
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desain pembangunan infrastruktur rendah emisi	Tata ruang, penanganan drainase, dan jaringan infrastruktur dengan pembangunan rendah karbon pilihan material, pengelolaan air, dan ruang terbuka hijau.
		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Data dan praktik rendah emisi sektor lahan dan agro	Inventarisasi sumber emisi pertanian, edukasi praktik pertanian rendah emisi, dan pelaporan data emisi sektor pertanian.

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
		Dinas Perhubungan	Inventarisasi dan pengendalian transportasi rendah emisi	Mengurangi emisi dari kendaraan operasional dan transportasi umum.

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting kinerja SKPD:

Tabel 3.13
Monev Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Monev Offline	Monev Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	- Rapat koordinasi penentuan target Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca di Ruang Rapat Bapperida - Monitoring Inventarisasi Emisi GRK (MRV – Measurement, Reporting dan Verification) Pemerintah Daerah, serta menyusun dan memantau inventarisasi gas rumah kaca secara berkala sebagai dasar evaluasi kinerja penurunan emisi.	1. Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator 1 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target indikator kinerja Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

- SDM dikelola secara lintas sektor.
- Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM dalam mitigasi GRK, monitoring lingkungan, dan teknologi rendah karbon meningkatkan produktivitas dan efektivitas intervensi program.

b. Efisiensi Anggaran

- Sinergi lintas program (misal reboisasi sekaligus mendukung ketahanan pangan atau pariwisata ekowisata) menghasilkan multi-output dari satu alokasi anggaran. Efisiensi dari Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dari anggaran sebesar Rp. 2.406.768.450 realisasi Rp. 1.966.542.534 Capaian keuangan sebesar 81,71%.
- Kemitraan dengan pihak swasta, NGO, dan donor internasional membantu mengurangi beban anggaran pemerintah dan memperluas cakupan program.

c. Efisiensi Waktu

- Perencanaan terpadu dan koordinasi lintas SKPD meminimalkan keterlambatan implementasi dan memastikan kegiatan berjalan paralel sesuai prioritas.
- Pemantauan rutin berbasis indikator memungkinkan deteksi hambatan dini dan penyesuaian strategi secara cepat.

B.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana (Indikator 2 : Indeks Ketahanan Daerah)

Tabel 3.14
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator 2: Indeks Ketahanan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,62	0,64	103,23

Target Indeks Ketahanan Daerah tahun 2025 adalah 0,62. Realisasi tahun 2025 adalah 0,64, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 103,23 persen.

Tabel 3.15
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator 2: Indeks Ketahanan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,62	0,64	0,59	0,52	0,43

Target Indeks Ketahanan Daerah tahun 2025 adalah 0,62. Realisasi tahun 2025 adalah 0,64, Realisasi Tahun 2024 adalah 0,59, Realisasi tahun 2023 adalah 0,52, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 0,43.

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator 2: Indeks Ketahanan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,74	0,64	86,48

Target Akhir RPJMD untuk Indeks Ketahanan Daerah adalah 0,74 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 0,64 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 86,48 persen.

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator 2: Indeks Ketahanan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten HSS	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,64	0,49	0,54	-	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 0,64, realisasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 0,49, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 0,54. Sedangkan realisasi Nasional dan Internasional tidak ada sumber data karena penilaian kinerjanya hanya sampai Tingkat Provinsi.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.14, tabel 3.15, tabel 3.16, dan tabel 3.17 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator 2 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.14 adalah target Indeks Ketahanan Daerah tahun 2025 yaitu 0,62. Realisasi tahun 2025 adalah 0,64, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 103,23 persen. Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,64 pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 103,23 persen dipengaruhi oleh berbagai faktor pendongkrak kinerja antara lain adalah:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

- **Kapasitas Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan.** Kelembagaan yang kuat di BPBD dan SKPD terkait meningkatkan penerapan program mitigasi bencana (disiapkan dalam RPJMD/RKPD dengan prioritas jelas). Perencanaan, koordinasi, dan monitoring internal yang baik membantu meningkatkan efektivitas kebijakan ketahanan. Keberhasilan peningkatan IKD Balangan menunjukkan adanya proses perencanaan dan pelaksanaan yang berjalan sistematis. Komitmen pimpinan dalam mengarahkan sumber daya untuk mitigasi dan tersedianya SOP serta sistem kerja terintegrasi antar perangkat daerah.
- **Ketersediaan dan Mutu Pelayanan Dasar**
Penyediaan sarana prasarana kesehatan, pendidikan, akses clean water dan sanitasi memperkuat ketahanan sosial masyarakat sehingga masyarakat lebih siap menghadapi risiko. Infrastruktur pelayanan yang memadai menjadi dasar peningkatan kemampuan sosial masyarakat dalam menanggulangi dampak ancaman. Seperti perluasan dan kualitas fasilitas Kesehatan dan program peningkatan layanan dasar oleh SKPD terkait.
- **Ketahanan Lingkungan dan Penanganan Risiko Lokal**
Kesadaran masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang baik (misal pengelolaan hutan/lahan, penanganan titik rawan bencana) membantu menurunkan kerentanan daerah terhadap ancaman seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, dan bencana lain. IKD Balangan terus naik selama beberapa tahun, menunjukkan peningkatan kapasitas daerah dalam menangani ancaman (bencana alam) secara internal. Sebagai contoh kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan rencana kontinjensi dan mitigasi bencana tingkat kabupaten, pelibatan masyarakat dalam pencegahan awal (DRR/community preparedness).
- **Sistem Data, Monitoring dan Evaluasi Internal**
Ketersediaan data risiko dan indikator ketahanan secara teratur memungkinkan pemerintah daerah mengukur progres dan merumuskan kebijakan berbasis bukti. Pemantauan yang baik menjadi dasar evaluasi keberhasilan program internal untuk perbaikan berkelanjutan, seperti pelaksanaan evaluasi berkala capaian IKD dan sistem informasi manajemen risiko yang terintegrasi.
- **SDM dan Kapasitas Teknis Aparatur**
Kualitas sumber daya manusia di SKPD teknis penanggulangan risiko, seperti BPBD, Dinas PUPRPERKIM, Dinas Sosial, dan SKPD lain yang terlibat langsung dengan pengurangan risiko serta respons terhadap bencana. Kapasitas teknis internal memengaruhi pengelolaan risiko, mitigasi, serta perencanaan yang efektif. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelatihan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dan pengembangan kompetensi staf dalam pengelolaan risiko. Selain itu, pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dari beberapa SKPD lintas sektor yang turut berperan dalam pemenuhan capaian 7 indikator untuk penilaian IKD tersebut. Dokumentasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sebagai berikut:



2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- **Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Provinsi/Nasional**

Fasilitasi dari tingkat provinsi atau pusat melalui penguatan regulasi kebencanaan dan strategi mitigasi dapat mendukung capaian IKD daerah. Contohnya di Kalimantan Selatan, penguatan dokumen kebencanaan dan kolaborasi lintas instansi membantu daerah memperbaiki ketahanan bencana secara komprehensif. Kebijakan seperti dokumen strategi pengurangan risiko bencana dan rencana kontinjensi memberi pedoman teknis yang digunakan daerah dalam menilai dan meningkatkan IKD. Petunjuk teknis BNPB tentang IKD menetapkan 7 prioritas dengan indikator spesifik yang mendorong program mitigasi yang lebih kuat.

- **Kondisi Alam dan Pola Iklim**

Faktor alam seperti curah hujan ekstrem, angin puting beliung, banjir atau kekeringan yang tidak bisa diprediksi sepenuhnya oleh pemerintahan daerah juga *mempengaruhi ketahanan daerah*. Variasi cuaca ekstrem merupakan konteks eksternal yang memengaruhi kemampuan daerah menghadapi dan pulih dari bencana. Fenomena iklim global seperti El Niño atau Osilasi Madden-Julian dapat memodulasi ekstrem hujan atau kekeringan di Indonesia. Daerah yang mengalami perubahan ekstrem iklim akan menghadapi tantangan ketahanan yang lebih kompleks, sehingga kemampuan merespons bisa terhambat atau terpaksa difokuskan pada penanganan krisis.

- **Pendanaan dan Bantuan Eksternal**

Dana dari luar baik bantuan teknis, hibah, program CSR swasta, atau dukungan dari BNPB/kemendagri menjadi sumber eksternal yang meningkatkan kapasitas daerah dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Dana eksternal memungkinkan daerah melakukan pelatihan, pembelian peralatan tanggap darurat, dan integrasi teknologi informasi yang seringkali tidak mampu sepenuhnya dibiayai oleh APBD daerah.

- **Peraturan dan Standar Penilaian BNPB**

Standar penilaian IKD ditetapkan oleh BNPB melalui petunjuk teknis nasional, dimana komponen-komponen seperti penyusunan kajian risiko, kesiapsiagaan, mitigasi, dan respon bencana menjadi bagian dari indikator penilaian. Karena metodologi dan indikator IKD ditetapkan oleh lembaga eksternal (BNPB), daerah harus menyesuaikan proses internal mereka agar memenuhi standar tersebut setidaknya dalam hal data, dokumentasi, dan bukti capaian.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.15 adalah target Indeks Ketahanan Daerah tahun 2025 adalah 0,62. Realisasi tahun 2025 adalah 0,64, Realisasi tahun 2024 adalah 0,59, Realisasi tahun 2023 adalah 0,52, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 0,43. Berdasarkan data ini lonjakan tiap tahunnya adalah sebesar 0,05 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,12, dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,21 artinya secara simultan Indeks Ketahanan Daerah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan seluruh SKPD dan *stake holder* yang terlibat. Berikut kebijakan terkait *Indeks Ketahanan Daerah* (IKD) di Kabupaten Balangan tahun 2025 yakni kebijakan formal dan arahan pemerintah yang mendukung peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana:

- **Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah (P-KUA APBD 2025)**

Dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) APBD Kabupaten Balangan Tahun 2025, Pemerintah Daerah menetapkan beberapa arah kebijakan pembangunan, yang secara tidak langsung terkait dengan kemampuan daerah dalam meningkatkan ketahanan (termasuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, pelayanan dasar, dan pelayanan infrastruktur). Kebijakan ini menjadi landasan alokasi sumber daya untuk program-program strategis yang berdampak pada ketahanan masyarakat. Walaupun dokumen P-KUA tidak secara eksplisit menyebut *Indeks Ketahanan Daerah*, aspek-aspek seperti peningkatan ketahanan sumber daya air, akses sanitasi, dan kualitas layanan publik merupakan bagian dari landasan kebijakan prioritas APBD yang mendukung ketahanan sosial dan layanan dasar.

- **Kebijakan Pelaksanaan dan Monitoring Ketahanan Bencana**

Berdasarkan pola capaian IKD yang terus meningkat di Balangan (misalnya dari 0,39 pada 2021 menjadi 0,59 pada 2024), Pemerintah Daerah melalui BPBD Balangan terus mengimplementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program-program kebencanaan sebagai bagian dari praktik kebijakan yang efektif terhadap peningkatan ketahanan. Dalam arah kebijakan operasional, BPBD menekankan pentingnya:

- koordinasi lintas sektor antar SKPD
- penganggaran program mitigasi risiko bencana
- evaluasi kebijakan dan program secara berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan bahwa BPBD sebagai pelaksana kebijakan lokal di bidang kebencanaan mengambil peran besar dalam memastikan pelaksanaan prioritas ketahanan daerah.

- **Sinergi Kebijakan Pemerintah Provinsi dan BNPB**

Walaupun bukan kebijakan langsung kabupaten, arah dan dukungan kebijakan dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan BNPB juga memberikan dasar teknis yang kuat bagi pemerintah kabupaten untuk mengukur serta meningkatkan IKD melalui dokumen-dokumen seperti Strategi Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Kontinjensi. Sinergi ini mempengaruhi kebijakan lokal dalam:

- penyusunan kajian risiko bencana (KRB)
- penghitungan IKD
- pembentukan instrumen mitigasi berbasis risiko.

Dengan demikian, pemerintah kabupaten mengikuti arahan teknis provinsi/BNPB untuk menerapkan standar yang ditetapkan secara nasional.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.16 adalah target akhir RPJMD untuk Indeks Ketahanan Daerah adalah 0,74 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 0,64 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 86,48 persen. Berdasarkan data tabel di atas untuk menuju kepada pencapaian target akhir RPJMD tahun 2030 yakni 0,74, maka Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas. Karena saat ini Indeks Ketahanan Daerah hanya berada di 0,64, itu artinya harus melakukan gerakan percepatan setiap tahunnya. Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi Indeks Ketahanan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- **Penyusunan dan Penguatan Kajian Risiko Bencana (KRB).** Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Balangan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Balangan bekerjasama dengan Tim Asistensi Nasional KRB dari BNPB pada tanggal 12 Desember 2025 dan telah mendapatkan rekomendasi pengesahan final pada tanggal 21 Januari 2026. Dokumen KRB Balangan yang telah mendapatkan rekomendasi pengesahan final tersebut akan diperkuat melalui Peraturan Bupati Balangan Tahun 2026 yang masih dalam tahap proses pengajuan di bagian hukum. Kajian Risiko Bencana (KRB) yang disusun komprehensif untuk mengidentifikasi *potensi ancaman, kerentanan, dan kapasitas daerah* terhadap berbagai ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, atau karhutla. Langkah kegiatan yang dilaksanakan melalui fasilitasi workshop dan konsultasi publik penyusunan KRB, dan pemetaan zona risiko berbasis data BMKG, BNPB, dan data lokal sehingga tersedianya peta risiko di seluruh kecamatan Kabupaten Balangan.
- **Penguatan Kapasitas Teknis BPBD dan Mitigasi SKPD Terkait.** Meningkatkan kapasitas teknis BPBD dan SKPD terkait melalui pelatihan mitigasi risiko, manajemen darurat, dan pengukuran IKD sesuai metode BNPB. Langkah kegiatan yang dilakukan pelatihan teknis terhadap petugas tanggap darurat dan perencana risiko. (<https://drive.google.com/drive/folders/1CHoWlueV6UTOCoMWg-gpEm1ZytK-ebgb?usp=sharing>)
- **Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur yang Rentan.** Menangani infrastruktur yang berisiko tinggi (jembatan, tanggul, fasilitas publik) agar lebih tahan bencana dan menurunkan dampak risiko terhadap masyarakat. Langkah kegiatannya melakukan identifikasi aset yang rentan sehingga infrastruktur kritis bisa dilakukan rehabilitasi/perbaikan.

- **Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat.** Menguatkan peran masyarakat melalui mekanisme *desa tangguh bencana*, edukasi mitigasi risiko, dan pelibatan aktif warga dalam sistem peringatan dini. Langkah kegiatannya melaksanakan fasilitasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di desa/kelurahan sehingga desa/kelurahan memiliki rencana tanggap darurat desa/kelurahan. Edukasi dan simulasi kesiapsiagaan bencana secara berkala kepada masyarakat.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.17 adalah menjelaskan bahwa realisasi Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 0,64, realisasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 0,49, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 0,54. Sedangkan realisasi Nasional dan Internasional tidak ada sumber data karena penilaian kinerjanya hanya sampai Tingkat Provinsi.

Realisasi Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Balangan tahun 2025 sebesar 0,64 jika dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Balangan lebih tinggi 0,14 poin, dibandingkan dengan realisasi Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan berada lebih tinggi sebesar 0,10 poin. Jadi capaian realisasi Kabupaten Balangan (0,64) secara signifikan melampaui capaian realisasi Provinsi Kalimantan Selatan (0,54), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (0,49), Kabupaten Tabalong (0,39), dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (0,34) dan saat ini, Kabupaten Balangan berada di posisi kedua, hanya berselisih 0,02 poin di bawah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang meraih nilai tertinggi sebesar 0,66. Sebagaimana data pada tabel di bawah ini:

KABUPATEN/KOTA	HASIL IKD KAB LAIN
Balangan	0,64
Hulu Sungai Selatan	0,49
Hulu Sungai Tengah	0,34
Hulu Sungai Utara	0,66
Tabalong	0,39

Standar penilaian Indeks Ketahanan Daerah mengacu pada juknis perhitungan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB. Penilaian Indeks Ketahanan Daerah perlu dilakukan untuk mengukur kemampuan/kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada fase perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Kategori penilaian Indeks Ketahanan Daerah terbagi kedalam 3 kelas : 1. Kategori Rendah indeks dengan nilai rentang 0 -< 0,4. 2. Kategori Sedang Indeks dengan nilai rentang 0,4 -< 0,8. 3. Kategori Tinggi Indeks dengan nilai rentang 0,8 - 1. Kabupaten Balangan pernah mendapatkan predikat nilai rendah pada penilaian IKD di tahun 2020 - 2021 dengan nilai 0,39, sedangkan dari tahun 2022 - 2025 Kabupaten Balangan masuk dalam predikat nilai IKD kategori sedang.

Faktor dominan yang mempengaruhi adalah Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 paling dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi lokal, kualitas SDM, dan daya dukung lingkungan. Infrastruktur dan layanan dasar menjadi faktor penentu kecepatan pemulihan saat terjadi gangguan. Ketahanan lingkungan dan pangan menentukan keberlanjutan ketahanan jangka panjang, dan tata kelola pemerintahan menjadi penguat seluruh sistem ketahanan.

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.14 sampai dengan tabel 3.17 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah yaitu :**

- **Penguatan Perencanaan dan Mitigasi Risiko Bencana** yaitu Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) berdasarkan Surat Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor B-19/BNPB/D-I/SS.01.02/1/2026 Hal Surat Keterangan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Balangan Periode Tahun 2026-2030 tanggal 21 Januari 2026 Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendorong penyusunan dan konsultasi publik Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Balangan 2025 untuk memetakan potensi bahaya, kerentanan dan kapasitas daerah secara komprehensif. Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari DPRD sebagai salah satu langkah strategis kebijakan.

- **Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana Secara Lintas Sektor** yaitu Kolaborasi SKPD Dalam Perencanaan dan Anggaran. Aktivitas penanggulangan bencana dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor SKPD, sehingga setiap organisasi perangkat daerah memasukkan aspek pengurangan risiko bencana ke dalam rencana kerja dan anggarannya.
- **Penetapan Status Siaga Darurat Bencana** yaitu status Siaga Hidrometeorologi 2025–2026 dimana Pemkab. Balangan menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi (banjir, angin puting beliung, tanah longsor) dari 12 Nopember 2025 hingga 31 Januari 2026 untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap potensi bencana di musim hujan.
- **Edukasi, Kesiapsiagaan dan Rencana Tanggap Darurat Masyarakat** yaitu Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat. BPBD Balangan aktif melakukan edukasi mitigasi bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui informasi, latihan, dan sosialisasi. Strategi ini juga mencakup penggunaan alat komunikasi terbaru untuk memperluas jangkauan informasi kesiapsiagaan.
- **Monitoring, Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan** yaitu Evaluasi Perencanaan, Pelaksanaan dan IKD. Pemkab Balangan menerapkan fase perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi secara berkesinambungan untuk semua program penanggulangan bencana. Ini terbukti dari peningkatan IKD yang konsisten dari 0,39 (2021) menjadi 0,59 (2024).
- **Kolaborasi dan Dukungan Mitigasi dengan Pihak Eksternal** yaitu Koordinasi Kesiapsiagaan Karhutla bersama BMKG. Rakors bersama BMKG dan berbagai unsur termasuk TNI/Polri dan sektor swasta memperkuat pemahaman informasi cuaca/iklim untukantisipasi kebakaran hutan dan lahan, terutama pada musim kemarau.

2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator 2 Indeks Ketahanan Daerah)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah. Adapun gambaran umum keterikatan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Program ini mampu menjadikan Kabupaten Balangan lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan menghadapi risiko bencana di masa depan.
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah yaitu: Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Balangan Tahun 2025 memiliki peran sangat strategis dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah, terutama melalui:

- Pengurangan risiko sebelum bencana kegiatan utama yang dilakukan pemetaan dan pemutakhiran peta rawan bencana, integrasi risiko bencana dalam RTRW dan perencanaan Pembangunan, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan dan normalisasi drainase dan sungai skala lokal
- Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat kegiatan utama yang dilakukan pembentukan dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana), simulasi dan latihan evakuasi, penyediaan jalur evakuasi dan rambu kebencanaan, serta sistem informasi dan peringatan dini berbasis komunitas.
- Respon darurat yang cepat dan terkoordinasi kegiatan utama yang dilakukan penyediaan logistik dan peralatan tanggap darurat, penguatan posko bencana dan sistem komando serta koordinasi lintas SKPD, TNI/Polri, dan relawan.
- Pemulihan pascabencana yang efektif kegiatan utama yang dilakukan perbaikan rumah dan fasilitas umum

rusak, pemulihan infrastruktur jalan, air, dan sanitasi serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Dengan penguatan pada aspek pencegahan, kapasitas masyarakat, dan integrasi perencanaan, program ini mampu menjadikan Kabupaten Balangan lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan menghadapi risiko bencana di masa depan.

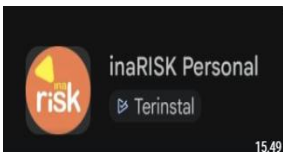
Dari program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	BPBD*	Basis operasional seluruh indikator IKD sebagai koordinator teknis mitigasi dan respons	Tersusunnya Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Monitoring melalui Sistem InaRISK BNPB
		Bapperida	Menjamin IKD masuk ke dokumen perencanaan dan anggaran	Memastikan keselarasan program penanggulangan bencana dan target IKD ke dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan anggaran daerah.
		Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Meningkatkan akses informasi risiko masyarakat peran utamanya informasi dan peringatan dini	Menangani informasi transportasi dan kondisi citra pergerakan saat bencana dan menyebarkan informasi mitigasi dan status siaga bencana.
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Membangun budaya kesiapsiagaan melalui edukasi mitigasi bencana	Edukasi mitigasi bencana ke kurikulum lokal dan pelatihan kesiapsiagaan siswa dan guru.
		Dinas Kesehatan	Memperkuat ketahanan layanan pasca-bencana dalam memberikan respon medis darurat	Menyiapkan <i>pos kesehatan darurat, peralatan medis, dan respon cepat</i> saat status siaga bencana

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting kinerja SKPD:

Tabel 3.19
Money Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Money Offline	Money Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	1. Rapat koordinasi penentuan target Indeks Ketahanan Daerah di Ruang Rapat Bapperida 2. Pemantauan berkala Nilai IKD secara tahunan. Nilai IKD dipublikasikan melalui BPBD Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan laporan BPBD Balangan dan hasil perhitungan BNPB 3. Rapat Koordinasi / Penyusunan dan FGD Penilaian IKD	1. Monitoring melalui Sistem InaRISK BNPB (berbasis peta dengan data kejadian, pelatihan, sosialisasi, posko, dan rambu peringatan). 2. Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Indeks Ketahanan Daerah	  

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator 2 Indeks Ketahanan Daerah)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

- SDM dioptimalkan melalui koordinasi lintas SKPD, seperti Bapperida, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPRPERKIM, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan perikanan, dan BPBD untuk mengelola aspek sosial, ekonomi, infrastruktur, dan mitigasi bencana.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, workshop, dan simulasi manajemen risiko meningkatkan kemampuan analisis, perencanaan, dan respons cepat terhadap ancaman yang dapat mempengaruhi ketahanan daerah.

b. Efisiensi Anggaran

- Anggaran dialokasikan berdasarkan prioritas strategis yang berdampak langsung pada peningkatan ketahanan daerah, seperti program mitigasi bencana, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. Jumlah anggaran tahun 2025 untuk Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 6.667.428.200 dengan realisasi sebesar Rp. 6.290.498.922
- Integrasi program lintas sektor (misal ketahanan pangan sekaligus mendukung UMKM dan ekonomi lokal) menghasilkan multi-output dari satu alokasi anggaran, meningkatkan produktivitas penggunaan dana.

c. Efisiensi Waktu

- Perencanaan dan koordinasi lintas program memastikan kegiatan berjalan simultan dan terstruktur, sehingga mengurangi tumpang tindih dan keterlambatan.
- Pemantauan dan evaluasi berkala menggunakan indikator kinerja utama memungkinkan penyesuaian strategi secara cepat jika capaian belum optimal.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengumpulan data, monitoring, dan pelaporan mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan akurasi data.



B.3 Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Indikator 1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan)

Tabel 3.20
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator 1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	3,78	17,72	468,78

Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan tahun 2025 adalah 3,78. Realisasi tahun 2025 adalah 17,72, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 468,78 persen.

Tabel 3.21
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator 1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	3,78	17,72	3,63	3,99	0,35

Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan tahun 2025 adalah 3,78. Realisasi tahun 2025 adalah 17,72, Realisasi Tahun 2024 adalah 3,63, Realisasi tahun 2023 adalah 3,99, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 0,35.

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator 1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	4,19	17,72	422,91

Target Akhir RPJMD untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan adalah 4,19 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 17,72 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 422,91 persen.

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator 1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	17,72	8,31	6,72	5,33	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 17,72, realisasi Kabupaten Tabalong sebesar 8,31, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan sebesar 6,72, realisasi Nasional 5,33. Sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.20, tabel 3.21, tabel 3.22, dan tabel 3.23 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.20 adalah target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan tahun 2025 yaitu 3,78. Realisasi tahun 2025 adalah 17,72, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 468,78 persen. Berikut peran dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan yaitu:

1. Tren luas padi di Kabupaten Balangan tahun 2020-2025 (ribu hectare). Luas panen padi Kabupaten Balangan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,28 ribu hektare dibandingkan dengan tahun 2024.
2. Perkembangan produktivitas padi Kabupaten Balangan 2020-2024 (ku/ha). Perkembangan produktivitas padi di Kabupaten Balangan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,56 kuintal per hektar dibandingkan dengan tahun 2024.
3. Perkembangan produktivitas padi GKG Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024 (ribu ton). Produksi padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) di Kabupaten Balangan tahun 2025 meningkat sebesar 25,01 ribu ton dibandingkan dengan tahun 2024.

4. Perkembangan produksi jagung Kabupaten Balangan 2020-2024 (ribu ton) Produksi jagung dalam bentuk jagung pipilan kering di Kabupaten Balangan tahun 2024 meningkat sebesar 24,84 ribu ton dibandingkan dengan tahun 2024.
5. Perkembangan luas panen sayuran hortikultura (hectare) 2023-2024. Luas panen sayuran hortikultura terbesar pada tahun 2024 adalah cabai rawit sebesar 214,50 Ha dibandingkan dengan sayuran hortikultura lainnya.
6. Perkembangan produksi sayuran hortikultura (ton) 2023-2024. Produksi sayuran hortikultura terbesar pada tahun 2024 adalah cabai rawit sebesar 1.237,10 ton dibandingkan dengan sayuran hortikultura lainnya.
7. Perkembangan luas panen buah-buahan semusim Kabupaten Balangan tahun 2021-2024 (hektar). Luas panen melon dan semangka mengalami kenaikan masing-masing sebesar 4,70 dan 13,00 hektar.
8. Perkembangan produksi buah-buahan semusim Kabupaten Balangan tahun 2021-2024 (kuintal). Produksi melon dan semangka di tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 50 dan 1.672 kuintal dibandingkan dengan tahun 2023.
9. Perkembangan produksi buah-buahan tahunan 2021-2024 (kuintal). Produksi buah tahunan paling banyak pada Tahun 2024 di Kabupaten Balangan yaitu buah nangka/cepedak (19,94 ribu ton), pisang (10,43 ribu ton), dan durian (5,21 ribu ton).
10. Luas panen tanaman biofarmaka di Kabupaten Balangan (ribu m²), 2021-2024. Luas panen tanaman biofarmaka paling besar pada Tahun 2024 di Kabupaten Balangan yaitu jahe sebesar 3,13 ribu meter persegi.
11. Produksi tanaman biofarmaka di Kabupaten Balangan (ton), 2021-2024). Produksi tanaman biofarmaka paling banyak pada Tahun 2024 di Kabupaten Balangan yaitu jahe sebesar 12,64 ton.
12. Luas area tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Balangan (ribu hektar), 2022-2024. Luas area tanaman perkebunan paling besar pada Tahun 2024 di Kabupaten Balangan yaitu karet sebesar 37,34 ribu hektar.
13. Produksi perkebunan rakyat di Kabupaten Balangan (ribu ton), 2022-2024. Produksi tanaman perkebunan paling besar pada Tahun 2024 di Kabupaten Balangan yaitu karet sebesar 28,63 ribu ton.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan sebesar 17,72 pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 468,78 persen dipengaruhi oleh berbagai faktor kinerja antara lain:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

- **Kontribusi Sektor terhadap PDRB Daerah**

Sektor pertanian dan perikanan merupakan salah satu kontributor penting terhadap struktur PDRB Kabupaten Balangan meskipun lebih kecil dibanding pertambangan, tetapi sektor ini tetap memberikan kontribusi ekonomi signifikan yang stabil dari waktu ke waktu. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melakukan beberapa Gerakan di tahun 2025 antara lain:

- Meningkatkan produktifitas dengan cara membangun dan memperbaiki infrastruktur pertanian, memberikan penyuluhan dan pelatihan, pengoptimalan lahan, penggunaan teknologi pertanian yang ada guna mendukung produktivitas yang tinggi.
- Regenerasi petani melalui karakteristik petani tua cenderung menggunakan metode konvensional dan terkendala dalam mengadopsi teknologi baru. Regenerasi petani masih menjadi tantangan tersendiri karena bertani dianggap kurang menguntungkan. Pentingnya menghapus stigma tersebut dengan adanya edukasi dan pelatihan sejak dini.
- Pelestarian lahan dengan membuat regulasi tata ruang untuk menjaga kelestarian lahan pertanian produktif dan mendorong praktik pertanian berkelanjutan sehingga luas lahan pertanian tetap terjaga dan produksi pangan dapat dilakukan secara optimal.
- Value Added Produk Pertanian melalui proses pengolahan dari produk mentah hasil pertanian menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sehingga dapat dijual dengan harga lebih tinggi. Hal ini guna mengurangi kerugian akibat produk mentah pertanian yg cepat rusak dan meningkatkan pendapatan petani.

- **Hilirisasi Produksi**

Adanya langkah strategis Pemerintah Daerah bersama Lembaga Riset (misal dengan IPB University) untuk mendorong hilirisasi produk pertanian, seperti pengembangan industri pengolahan hasil pertanian menjadi faktor internal yang bisa memacu laju ekonomi dari sektor tersebut. Pemerintah Kabupaten Balangan juga memanfaatkan dukungan kajian dan kolaborasi antara PT. Adaro dengan perguruan tinggi IPB University untuk mendorong hilirisasi komoditas pertanian unggulan seperti padi, jagung, dan karet langkah yang akan membuka peluang nilai tambah lebih tinggi dan memperkuat rantai nilai produksi. Pada acara kegiatan Pendampingan Program Implementasi Pengembangan Petani Desa di PT. Adaro Indonesia yang di selenggarakan IPB tersebut Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan hadir sebagai Narasumber pada acara yang dilaksanakan dalam rentang waktu 15 Desember s/d 28 Februari 2026.

- **Kapasitas dan Pelatihan SDM Pertanian/Perikanan**

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mencakup unit teknis untuk penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia. Ini merupakan faktor internal yang mendukung kapasitas petani dalam mengadopsi praktik yang lebih efisien dan produktif. SDM yang terlatih meningkatkan efisiensi produksi, kemampuan adopsi teknologi, serta manajemen usaha yang berdampak pada pertumbuhan sektor.

2. Faktor Eksternal terkait Kebijakan Nasional dan Pendanaan Eksternal, pola kebijakan nasional Indonesia yang fokus memperkuat sektor pertanian melalui investasi besar dalam pengolahan dan hilirisasi pertanian seperti investasi triliunan rupiah ke sektor terkait oleh Pemerintah Pusat memberikan *dukungan makro* bagi komoditas pertanian, termasuk peluang ekspor dan perluasan pasar domestik. *Pengaruh eksternal* dari kebijakan nasional ini membuka akses pembiayaan, teknologi, dan pasar yang lebih luas yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pertanian/perikanan Balangan untuk meningkatkan produksi, nilai tambah, dan daya saing.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.21 adalah target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan tahun 2025 adalah 3,78. Realisasi tahun 2025 adalah 17,72, Realisasi tahun 2024 adalah 3,63, Realisasi tahun 2023 adalah 3,99, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 0,35. Berdasarkan data ini lonjakan tiap tahunnya adalah sebesar 14,09 poin jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 13,73 poin dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 17,37 poin artinya secara simultan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan seluruh SKPD dan *stake holder* yang terlibat. Kebijakan terkait Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai berikut:

- **Kebijakan Perubahan Umum APBD 2025**

Dalam dokumen Perubahan KUA APBD Kabupaten Balangan Tahun 2025, pemerintah daerah mencermati struktur perekonomian kabupaten yang masih bersifat agraris sekaligus bergantung pada sektor pertambangan, dan menekankan pentingnya penguatan sektor pertanian (termasuk pertanian, kehutanan, dan perikanan) untuk diversifikasi ekonomi dan peningkatan kontribusi ekonomi lokal. Kebijakan APBD ini mendorong alokasi anggaran yang lebih terarah untuk sektor primer sehingga dapat menjadi basis perencanaan kegiatan untuk peningkatan produksi dan nilai tambah di pertanian dan perikanan. Berikut link untuk penyaluran bantuan APBD Provinsi <https://drive.google.com/drive/folders/17mS4dbWOjErX5UIZEW8u3E2MR7KCb1g> dan link



Balangan, 13 Januari 2026

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Pendampingan Program Implementasi Pengembangan Potensi Desa

Kepada Yth.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Balangan
Jalan Jend. A. Yani No. KM 45, Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan
Kalimantan Selatan 71618

Dengan Hormat,

Pertama-tama kami mengucapkan salam sejahtera teriring do'a semoga segenap pimpinan beserta staf DKPPP Kabupaten Balangan, berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberi-Nya bimbingan serta kekuatan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Dalam rangka mendukung program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di wilayah sektor tambang, PT. Prima Kelola IPB (PKIPB) bekerja sama dengan PT. Adaro Indonesia akan melaksanakan kegiatan "Pendampingan Program Implementasi Pengembangan Potensi Desa di PT. Adaro Indonesia", yang berlokasi di Kabupaten Balangan. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam rentang waktu 15 Desember 2025 s/d 28 Februari 2026, dengan kegiatan pendampingan masyarakat binaan tingkat desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud untuk menyampaikan permohonan permintaan narasumber sesuai bidang yang terlampir kepada DKPPP Kabupaten Balangan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

PT. Prima Kelola IPB

Dipa Nur Assyifa
Team Leader Kab Balangan

<https://drive.google.com/drive/folders/1lNurYNepF8Og56C8djFU7d6b9sv8NN-V>

- **Peraturan Bupati tentang Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan**

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2025–2029 mencerminkan kebijakan pemerintah kabupaten untuk mendukung sektor perkebunan yang merupakan bagian dari subsektor pertanian yang penting bagi ekonomi lokal. Walaupun fokusnya pada perkebunan sawit, kebijakan ini berdampak terhadap pendapatan petani dan nilai tambah pertanian di Balangan serta dapat memperkuat basis dukungan terhadap diversifikasi ekonomi pertanian dan perikanan.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.22 adalah target akhir RPJMD untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan adalah 4,19 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 17,72 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 422,91 persen. Berdasarkan data tabel di atas pencapaian target akhir RPJMD tahun 2030 yakni 4,19 telah tercapai di tahun 2025 ini. Pemerintah Kabupaten Balangan ke depannya harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas agar realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan terus meningkat. Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan ini adalah sebagai berikut :

- **Program Pengembangan Pangan Lokal**

Pelaksanaan rencana aksi pengembangan pangan lokal di seluruh kecamatan untuk mendata potensi produksi sebagai basis perencanaan komoditas unggulan. Sampai dengan tahun 2025 sudah disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG).

- **Penguatan Hilirisasi dan Nilai Tambah Produk Agribisnis**

Pengembangan unit pengolahan hasil pertanian dan perikanan, termasuk fasilitas pengolahan produk olahan pangan dan ikan sehingga tersedianya 3-5 unit pengolahan komoditas strategis di wilayah kabupaten. Tempat pengolahannya berada di Kecamatan Lampihong, yaitu Desa Lajar dan Papuyuan. Produk olahannya berupa abon patin dan abon haruan.

- **Integrasi Kebijakan Perencanaan dan Anggaran Daerah**

Memasukkan target pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan ke dalam RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2025, serta memastikan alokasi anggaran mendukung kegiatan strategis.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.23 adalah menjelaskan bahwa realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 17,72, realisasi Kabupaten Tabalong sebesar 8,31, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan sebesar 6,72, realisasi Nasional 5,33. Sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan 17,72 jika dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Tabalong sebesar 9,41 poin Kabupaten Balangan berada di atas, dan jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 11 poin Kabupaten Balangan berada di atas realisasi Provinsi. Dibandingkan dengan realisasi Nasional sebesar 12,39 poin realisasi Nasional di bawah realisasi Kabupaten Balangan. Berdasarkan data ini diketahui bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan memiliki potensi pertumbuhan lebih cepat.

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.20 sampai dengan tabel 3.23 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan yaitu :**

- **Optimalisasi Program Sektor Pertanian dan Perikanan dalam RPJMD 2025–2029**

Pemerintah Kabupaten Balangan melalui *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029* menetapkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai salah satu fokus utama pembangunan ekonomi daerah. Ini menjadi dasar kebijakan pembangunan dan penyusunan program di sektor pertanian dan perikanan antara lain adalah fokus pada

hilirisasi pertanian dan perikanan, penguatan koperasi dan UMKM pengolahan, peningkatan teknologi budidaya dan pascapanen, penguatan akses pasar dan rantai dingin (perikanan) dan integrasi pertanian-perikanan dengan pariwisata dan ekonomi lokal. Dampaknya pada sektor pertanian/perikanan masuk sebagai prioritas dalam perencanaan jangka menengah bukan hanya program jangka pendek sehingga alokasi dan pelaksanaan program lebih terarah.

- **Kampanye Peningkatan Konsumsi Ikan dan Diversifikasi Produk**

Pemerintah daerah bersama TP-PKK menyelenggarakan Lomba Masak Serba Ikan (LMSI) untuk mendorong konsumsi ikan dan diversifikasi olahan produk perikanan, termasuk potensi kuliner khas daerah yang bernilai ekonomi. Dampak dari kegiatan ini tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat (misal pencegahan stunting melalui konsumsi protein ikan), tetapi juga mengembangkan pasar olahan ikan yang berpotensi memberi nilai tambah bagi produk perikanan lokal. Selain itu Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan juga menyalurkan bantuan untuk meningkatkan produksi perikanan di Kabupaten Balangan yaitu pemberian jukung dan alat tangkap ikan di Desa Tanah Habang Kanan, Desa Jimamun, Desa Pimping. Penyerahan mesin pakan ikan, PHO Sarana Perikanan Budidaya (Kolam Tanah, Kolam Bioflok dan Karamba Jaring Apung) di Desa Balang dan Desa Binjai.



- **Sinergi Program Nasional (Gerakan Tanam Padi dan Jagung Serentak)**

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat melaksanakan Gerakan Tanam Padi Serentak Nasional di 14 Provinsi. Bupati Balangan bersama Forkopinda melaksanakan kegiatan tanam padi serentak di Kabupaten Balangan yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2025 di Desa Babayau Kecamatan Paringin, tanam perdana padi unggul tanggal 10 Desember 2025 di Desa Bungin Kecamatan Paringin Selatan. Selain kegiatan tanam padi juga diselenggarakan kegiatan panen raya sawah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 di Desa Pulantan Kecamatan Awayan dan panen raya serentak bersama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 April 2025 di Desa Sikontan Kecamatan Awayan. Program nasional selain tanam padi serentak juga dilaksanakan penanaman dan panen jagung serentak di Kabupaten Balangan yaitu penanaman jagung serentak kuartal III pada tanggal 9 Juli 2025 di Desa Harapan Baru Kecamatan Paringin Selatan bersama Forkopimda, panen jagung pada tanggal 27 September 2025 di Desa Dayak Pitap Kecamatan Tebing Tinggi dan panen jagung serentak pada tanggal 25 Oktober 2025. Kegiatan ini memperkuat kolaborasi dalam upaya mengoptimalkan lahan pertanian dan produksi pangan secara berkelanjutan. Dampak dari kegiatan ini membantu meningkatkan produktivitas padi, mendukung ketahanan pangan, serta memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi sektor pertanian lokal.



- **Peningkatan Kontribusi Sektor terhadap PDRB**

Berdasarkan *penyesuaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan* Kabupaten Balangan menargetkan peningkatan kontribusi PDRB dari sektor pertanian dan perikanan secara bertahap, dari sekitar 13,39% pada 2024 naik menjadi sekitar 13,46 % pada 2025 hingga target 13,98% pada 2026. Dampaknya pada penetapan target capaian ini memberi arah program kerja yang terukur serta mendorong pelaksanaan kebijakan yang fokus pada pertumbuhan ekonomi sektor primer. Berbagai bentuk kegiatan untuk meningkatkan PDRB dari sektor pertanian dan perikanan seperti memberikan bantuan saprodi budidaya cabe, bantuan pengembangan jagung hibrida, bantuan benih pada MK, bantuan pupuk organik cair, penyaluran obat-obatan dan CBD, penyaluran bantuan saprodi tanaman jagung musin hujan, sebagaimana dalam gambar berikut:



2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan. Adapun gambaran umum keterikatan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat infrastruktur dasar produksi seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, sarana dan prasarana perikanan budidaya, serta fasilitas pendukung distribusi hasil pertanian dan perikanan.
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Melalui peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan kelembagaan pembudidaya, program ini menjadi salah satu motor pertumbuhan subsektor perikanan yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan yaitu:

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor pertanian dan perikanan Kabupaten Balangan, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor pertanian dan perikanan pada tahun 2025. Program ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat infrastruktur dasar produksi seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, sarana dan prasarana perikanan budidaya, serta fasilitas pendukung distribusi hasil pertanian dan perikanan. Dengan tersedianya prasarana yang memadai, proses produksi menjadi lebih

efisien dan berkelanjutan, risiko gagal panen akibat keterbatasan air dapat ditekan, serta akses pasar menjadi lebih terbuka. Hal ini secara langsung mendorong peningkatan output sektor pertanian dan perikanan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian dan perikanan Kabupaten Balangan tahun 2025. Berikut dokumentasi pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan kepada para petani:



- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya memiliki keterkaitan yang langsung, kuat, dan strategis dalam meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor pertanian dan perikanan Kabupaten Balangan tahun 2025. Melalui peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan kelembagaan pembudidaya. Program ini relevan digunakan karena mendorong pertumbuhan ekonomi subsektor unggulan, menciptakan lapangan kerja lokal, dan memperkuat ketahanan pangan berbasis protein hewani.

Dari kedua program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Tersedianya sarana prasarana produksi pertanian, pembinaan kelompok tani, pengembangan teknologi budidaya, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian dan perikanan.
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Infrastruktur Pendukung Produksi Pertanian	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, serta peningkatan infrastruktur jalan yang menghubungkan sentra produksi pertanian dengan pusat distribusi.

No	Kinerja	Crosscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
		Dinas Perhubungan	Peningkatan Konektivitas Distribusi Hasil Produksi	Terlaksananya pengembangan fasilitas transportasi dan pengaturan sistem transportasi daerah yang mendukung distribusi hasil pertanian dan perikanan.
		Bapperida	Perencanaan Pengembangan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Memastikan program pengembangan sektor pertanian dan perikanan terintegrasi dalam Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan anggaran daerah.
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Pengembangan Pemasaran dan Nilai Tambah Produk	Terlaksananya program pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), penguatan pemasaran produk pertanian dan perikanan, serta pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting kinerja SKPD:

Tabel 3.25
Money Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Money Offline	Money Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertanian dan Perikanan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	1. Rapat koordinasi penentuan target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan di Ruang Rapat Bapperida	1. Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Money Offline	Money Online	Keterangan
			2. Rakor Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program yang diselenggarakan secara berkala memantau sekaligus menyelaraskan kegiatan antar SKPD agar tepat sasaran.	2. Monitoring terhadap Data harga komoditas dan pasokan pangan melalui platform E-Ketapang	

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

- SDM dikelola secara lintas sektor.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, pendampingan budidaya, dan inovasi Si Intan dan Si Enak.
- Pemanfaatan SDM lokal, kelompok tani mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli eksternal dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

b. Efisiensi Anggaran

Alokasi anggaran difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan produksi, produktivitas, dan nilai tambah, seperti mekanisasi pertanian, budidaya ikan, pengolahan hasil, dan pemasaran. Anggaran program prioritas sebesar Rp 272.599.269.861,- dengan realisasi sebesar Rp 248.979.356.801,39 dengan capaian sebesar 91,34%.

c. Efisiensi Waktu

- Perencanaan terkoordinasi antara program pertanian, perikanan, dan infrastruktur mendukung pelaksanaan kegiatan yang simultan dan tepat waktu.
- Monitoring dan evaluasi rutin memungkinkan penyesuaian strategi cepat bila capaian belum optimal.

B.3 Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Indikator 2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan)

Tabel 3.26
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator 2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	4,04	9,18	227,23

Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan tahun 2025 adalah 4,04. Realisasi tahun 2025 adalah 9,18, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 227,23 persen.

Tabel 3.27
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator 2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	4,04	9,18	3,82	3,54	4,57

Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan tahun 2025 adalah 4,04. Realisasi tahun 2025 adalah 9,18, Realisasi Tahun 2024 adalah 3,82, Realisasi tahun 2023 adalah 3,54, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 4,57.

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator 2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	4,48	9,18	204,91

Target Akhir RPJMD untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan adalah 4,48 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 9,18 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 204,91 persen.

Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator 2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	9,18	9,56	7,37	19,07	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 9,18, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 9,56, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 7,37, realisasi Nasional adalah 19,07, sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.26, tabel 3.27, tabel 3.28, dan tabel 3.29 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.26 adalah target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan tahun 2025 yaitu 4,04. Realisasi tahun 2025 adalah 9,18, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 227,23 persen. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan sebesar 9,18 pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 227,23 persen dipengaruhi oleh berbagai faktor kinerja antara lain adalah:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

- Ketersediaan Bahan Baku Lokal

Kabupaten Balangan memiliki potensi sumber daya lokal yang cukup besar dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menjadi input utama industri pengolahan. Ketersediaan bahan baku yang relatif stabil sepanjang tahun mendukung kontinuitas produksi industri pengolahan. Kedekatan lokasi bahan baku dengan unit industri juga menekan biaya logistik sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Kondisi ini menjadi faktor internal penting yang mendorong peningkatan output dan nilai tambah sektor industri pengolahan. Hal ini terjadi pada UMK yang memproduksi makanan dan minuman dengan bahan baku hasil pertanian dan perkebunan Kabupaten Balangan seperti cabe rawit, jagung, sayur, buah cempedak, pisang dan lain-lain.

- Kapasitas dan Jumlah Industri Pengolahan

Pada tahun 2025 terjadi peningkatan aktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM), baik dari sisi jumlah unit usaha maupun kapasitas produksi. Jumlah IKM Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 2.521. Beberapa usaha industri rumah tangga yang berkembang menjadi skala kecil/menengah melalui pembinaan dan fasilitasi pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas produksi tersebut secara langsung berdampak pada kenaikan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Balangan. Berikut data sentra industri di Kabupaten Balangan yang berskala kecil:

Uraian	2022	2023	2024	2025
Jumlah Sentra Industri Alami	3	7	7	7
Jumlah Usaha Industri Kecil dan Rumah Tangga (unit)	2.381	2.421	2.469	2.521
Pertumbuhan Industri (%)	1,36	1,68	1,98	2,11
Kontribusi sektor industri PDRB harga berlaku (%)	1,27	1,26	1,26	1,27

- Dukungan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Balangan memberikan dukungan internal melalui program pembinaan IKM, kemudahan perizinan usaha, serta fasilitasi alat produksi dan promosi produk lokal. Kebijakan tersebut menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong tumbuhnya industri baru, serta memperluas skala usaha industri yang telah ada. Dukungan kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam menjaga pertumbuhan sektor industri pengolahan antara lain melaksanakan pelatihan diversifikasi Sasirangan, pelatihan bordir, pelatihan kemasan, dan pelatihan olahan pangan.



2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- **Kondisi Perekonomian Regional dan Nasional**

Stabilitas perekonomian regional dan nasional pada tahun 2025 berpengaruh terhadap permintaan terhadap produk industri pengolahan Kabupaten Balangan. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil mendorong peningkatan daya beli masyarakat dan permintaan pasar, sehingga memberikan peluang bagi industri pengolahan untuk meningkatkan produksi dan penjualan. Sebaliknya, fluktuasi ekonomi nasional tetap menjadi faktor eksternal yang perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi kinerja sektor industri secara keseluruhan.

- **Akses Pasar dan Jaringan Distribusi Eksternal**

Kemudahan akses distribusi ke wilayah lain di Kalimantan Selatan maupun luar daerah menjadi faktor eksternal penting bagi industri pengolahan Kabupaten Balangan. Dukungan jaringan transportasi regional serta konektivitas antar wilayah memudahkan pemasaran produk industri, sehingga memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan peluang pertumbuhan sektor industri pengolahan.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.27 adalah target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan tahun 2025 adalah 3,78. Realisasi tahun 2025 adalah 9,18, Realisasi tahun 2024 adalah 3,82, Realisasi tahun 2023 adalah 3,54, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 4,57. Berdasarkan data ini lonjakan tiap tahunnya adalah 5,36 poin jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 5,34 poin, dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 4,61 poin, artinya secara simultan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan seluruh SKPD dan *stake holder* yang terlibat. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan terkait Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan antara lain:

- **Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)**

Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan kebijakan penguatan Industri Kecil dan Menengah sebagai motor utama pertumbuhan sektor industri pengolahan. Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, dan keberlanjutan usaha IKM melalui pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi sarana produksi antara lain Pelatihan Penyuluh Teknik Pewarna Alam Kain Sasirangan dengan peserta sebanyak 2 (dua) orang, Pelatihan Pengembangan Inovasi Pembuatan Gazebo dari Kayu Kombinasi Logam bagi IKM meubel, serta keikutsertaan pelaku industri dalam seminar dan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pelaku industri, pemerintah, maupun pihak swasta. Selain itu, dilakukan pula fasilitasi uji kompetensi bagi 4 (empat) orang pelaku IKM anyaman guna meningkatkan profesionalisme dan daya saing usaha.



- **Kebijakan Hilirisasi dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Lokal**

Kebijakan ini bertujuan mendorong pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, khususnya yang berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan lokal. Pemerintah daerah mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya menjual bahan baku, tetapi mengembangkan produk olahan yang memiliki daya saing. Sebagai contoh produksi olahan pangan berupa amplang, di mana bahan baku yang semula berasal dari ikan laut dialihkan menjadi ikan air tawar yang tersedia di daerah setempat, sehingga mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan kemandirian bahan baku.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.28 adalah target akhir RPJMD untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan adalah 4,48 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 9,18 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 227,23 persen. Berdasarkan data tabel di atas target akhir RPJMD tahun 2030 yakni 4,48 telah tercapai. Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas agar Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan tidak mengalami penurunan serta selalu meningkat setiap tahunnya. Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan ini adalah:

- Inovasi Produk dan Pengembangan Riset Baru melalui pengembangan desain, fitur, dan peningkatan kualitas barang atau produk agar mampu memenuhi kebutuhan pasar. Upaya ini juga didukung dengan kegiatan penelitian dan pengembangan produk baru, seperti inovasi pembuatan lemari dengan sistem ukir pada IKM meubel, serta pengembangan produk kemasan dan olahan pangan baru berupa amplang pada IKM Desa Riwa, sehingga tercipta produk yang bernilai tambah dan berdaya saing.
- Penguasaan Teknologi melalui peningkatan kemampuan pelaku IKM dalam memanfaatkan teknologi informasi dan peralatan modern. Kegiatan ini meliputi pembelajaran dan pendampingan penguasaan sistem pelaporan SINIBA, serta pelatihan tata cara penggunaan mesin dan peralatan produksi modern, seperti pengoperasian mesin pellet untuk pembuatan pakan ternak berbahan dasar jagung.



- Percepatan Peningkatan Kualitas SDM Industri. Produktivitas industri sangat dipengaruhi oleh keterampilan tenaga kerja dan pelaku usaha. Rencana aksi Pelatihan teknis produksi dan mutu, pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku IKM.
- Fasilitasi Promosi Produk IKM melalui keikutsertaan dalam pameran dan expo di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional sebagai Upaya memperluas akses pasar dan meningkatkan visibilitas produk lokal.
- Fasilitasi Legalitas dan Sertifikasi Produk IKM untuk memperoleh pendaftaran Hak Merek serta Sertifikat Halal guna meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat identitas produk, dan memperluas peluang pemasaran.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.29 adalah tabel diatas menjelaskan realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 9,18, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 9,56, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 7,37, realisasi Nasional adalah 19,07, sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Balangan 9,18 jika dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Tabalong sebesar -0,38 poin Kabupaten Balangan berada di bawah, dan jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 1,81 poin Kabupaten Balangan berada di atas realisasi Provinsi. Dibandingkan dengan realisasi Nasional 9,89 poin Kabupaten Balangan berada di bawah realisasi Nasional.

Faktor yang mempengaruhi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Pemerintah Kabupaten Balangan adalah struktur ekonomi dan basis industri di Provinsi Kalimantan Selatan yang lebih luas dan basis industri yang lebih matang membantu sektor industri pengolahan berkembang lebih cepat dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan provinsi keseluruhan. Di Tabalong, pertambangan dan penggalian mendominasi ekonomi, sehingga skala dan peran industri pengolahan relatif terbatas. Sedangkan di Balangan, komposisi yang lebih berat pada sektor primer membuat industri pengolahan belum menjadi penggerak/pemicu pertumbuhan utama.

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.26 sampai dengan tabel 3.29 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan yaitu :**

- **Meningkatkan Investasi dan Kemudahan Berusaha**

Pemerintah Kabupaten Balangan menargetkan realisasi investasi mencapai sekitar Rp620 miliar pada 2025, sebagai bagian dari strategi percepatan ekonomi. Fokusnya termasuk meningkatkan investasi di sektor usaha menengah dan besar serta mendorong pelaku UMKM untuk turut berkontribusi melalui layanan dan pendampingan perizinan. Dampaknya Investasi yang lebih besar dapat meningkatkan kapasitas industri pengolahan serta mendorong masuknya teknologi dan modal baru.

- **Diversifikasi Struktur Ekonomi Non Pertambangan** antara lain mendukung UMKM dan koperasi sebagai bagian dari penguatan basis industri lokal. Ini artinya Balangan tidak hanya mengandalkan produksi komoditas mentah, tetapi secara aktif mendorong kegiatan pengolahan dan pemasaran produk dalam daerah dan melaksanakan kebijakan prioritas nasional seperti Koperasi Merah Putih.

- **Dukungan terhadap Budaya Konsumsi Produk Lokal**

Program seperti “Belanja Cil” diinisiasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balangan untuk meningkatkan konsumsi dan permintaan terhadap produk lokal, termasuk produk industri pengolahan oleh pelaku UMKM dan menciptakan budaya ekonomi yang menguatkan produksi lokal dan perputaran ekonomi di Balangan. Permintaan domestik yang meningkat akan mendorong pabrikan dan pengrajin lokal untuk memperluas produksi.

- **Penguatan Sumber Daya Manusia dan Kerja Sama Pendidikan**

Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Balangan dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) serta institusi lain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal, menyediakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri sehingga tenaga kerja siap pakai tersedia untuk sektor industri pengolahan. SDM yang kompeten akan menjadi faktor penentu dalam menciptakan industri pengolahan yang efisien dan produktif. Selain itu peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pelatihan teknis dan pelatihan berbasis kompetensi sebagai upaya meningkatkan kualitas produk serta mendorong diversifikasi produk. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan variasi produk bernilai tambah, seperti pembuatan bantal, pakaian jadi, sandal, dan tas berbahan kain sasirangan.

- **Stabilitas Ekonomi dan Akses Kepada Masyarakat**

Selain itu, langkah-langkah seperti pasar murah yang digelar di berbagai kecamatan membantu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat hal yang pada gilirannya dapat meningkatkan konsumsi lokal dan menjaga permintaan terhadap produk industri pengolahan di pasar domestik.

2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan. Adapun gambaran umum keterikatan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan, khususnya melalui penguatan industri kecil berbasis potensi lokal.

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
	Pertambahan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program ini memastikan bahwa kegiatan industri pengolahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tata ruang wilayah, serta standar lingkungan dan keselamatan.
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan yaitu:

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten Balangan tahun 2025 telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan, khususnya melalui penguatan industri kecil berbasis potensi lokal. Program ini dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang menjadi acuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing industri, serta pemerataan pembangunan industri. Pelaksanaan program difokuskan pada penguatan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelatihan peningkatan kapasitas SDM industri, pelatihan berbasis kompetensi, serta pemberian bantuan peralatan produksi bagi pelaku industri.
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten Balangan tahun 2025 memiliki peran strategis dalam menunjang pertumbuhan sektor industri pengolahan melalui penciptaan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif. Penyederhanaan dan Digitalisasi Perizinan, pemanfaatan sistem perizinan terintegrasi (OSS) mempercepat proses penerbitan izin dan mengurangi biaya transaksi dan birokrasi. Kemudahan perizinan ini membantu meningkatkan minat pendirian usaha industri pengolahan baru.

Dari kedua program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan*	Pembinaan industri, peningkatan mutu produk	Pengembangan sentra industri, peningkatan kualitas produk, kemasan, dan standar mutu, fasilitasi pemasaran dan promosi produk olahan.
		Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Fasilitasi investasi dan perizinan industri	Fasilitasi perizinan industri pengolahan, pendampingan investor sektor industri dan kemudahan OSS dan legalitas usaha.
		Bapperida	Perencanaan dan Sinkronisasi Kebijakan	Integrasi target pertumbuhan sektor industri dalam dokumen RPJMD, Renstra dan RKPD.
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Infrastruktur Pendukung Industri	Penyediaan dan peningkatan jalan produksi, akses kawasan industri dan sentra IKM,

No	Kinerja	Crosscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
				infrastruktur dasar pendukung logistik.
		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan	Penyediaan bahan baku industri	Penyediaan bahan baku hasil pertanian dan perikanan, pengembangan komoditas unggulan lokal dan stabilitas pasokan bahan baku.
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Tenaga Kerja	Penguatan UMKM pengolahan dan penyediaan tenaga kerja terampil	Penguatan UMKM dan produktivitas industri rumah tangga serta ketersediaan tenaga kerja terampil dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja luar daerah.

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting kinerja SKPD:

Tabel 3.31
Monev Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Monev Offline	Monev Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	1. Rapat koordinasi penentuan target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan di Ruang Rapat Bapperida 2. Monitoring capaian program prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap sektor industri	1. Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target dari indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

- SDM dikelola secara lintas sektor.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, pendampingan produksi, manajemen kualitas, dan inovasi produk meningkatkan kemampuan tenaga kerja, efisiensi proses produksi, dan daya saing produk.

b. Efisiensi Anggaran

- Alokasi anggaran difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan nilai tambah produk, kapasitas produksi, dan pemasaran. Efisiensi dari Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dari anggaran sebesar Rp. 702,390,000,00, Realisasi sebesar Rp. 697,585,026,00 menunjukkan adanya penghematan anggaran sebesar 0,68%

- Kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pendukung mengurangi beban anggaran pemerintah sekaligus memperluas cakupan kegiatan.

c. Efisiensi Waktu

- Perencanaan terkoordinasi dan penjadwalan kegiatan lintas SKPD memastikan program berjalan simultan dan tepat waktu, mengurangi tumpang tindih.
- Monitoring dan evaluasi rutin memungkinkan penyesuaian strategi jika capaian target belum optimal.

B.3 Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Indikator 3 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan)

Tabel 3.32
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator 3 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	5,29	9,40	177,69

Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan tahun 2025 adalah 5,29. Realisasi tahun 2025 adalah 9,40, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 177,69 persen.

Tabel 3.33
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator 3 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	5,29	9,40	4,96	6,67	5,53

Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan tahun 2025 adalah 5,29. Realisasi tahun 2025 adalah 9,40, Realisasi Tahun 2024 adalah 4,96, Realisasi tahun 2023 adalah 6,67, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 5,53.

Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator 3 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	5,86	9,40	160,41

Target Akhir RPJMD untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan adalah 5,86 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 9,40 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 160,41 persen.

Tabel 3.35
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator 3 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	9,40	8,87	8,08	13,17	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 9,40, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 8,87, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan sebesar 8,08, realisasi Nasional sebesar 13,17, sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.32, tabel 3.33, tabel 3.34, dan tabel 3.35 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.32 adalah target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan tahun 2025 yaitu 5,29. Realisasi tahun 2025 adalah 9,40, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 177,69 persen. Berikut Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Balangan (Persen) c-to-c:

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (c-to-c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Balangan (Persen)				
	2025				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
Sektor Primer	3,12	2,97	3,34	-	-
Sektor Sekunder	4,40	5,11	6,03	-	-
Sektor Tersier	7,07	7,19	7,63	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	3,92	3,81	4,22	-	-

Keterangan Data :

2023: Angka sementara; 2024: Angka sangat sementara; 2025: Angka sangat-sangat sementara.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan sebesar 9,40 pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 177,69 persen dipengaruhi oleh berbagai faktor kinerja antara lain adalah:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

- Dominasi pedagang kecil dan UMKM dalam struktur sektor perdagangan Kabupaten Balangan mempengaruhi skala dan kecepatan pertumbuhan sektor perdagangan. Pendampingan kepada pelaku usaha lokal telah dilaksanakan melalui kegiatan temu UMKM sebagai sarana fasilitasi komunikasi dan pembinaan. Meskipun demikian, cakupan pendampingan masih terbatas dan perlu diperluas agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha serta memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan aktivitas perdagangan.
- Kemampuan manajemen, kecukupan modal usaha, dan akses distribusi pedagang lokal merupakan faktor internal yang sangat menentukan volume transaksi perdagangan di Kabupaten Balangan. Pengelolaan usaha yang baik memungkinkan pedagang mengatur stok dan perputaran modal secara efektif, sehingga meningkatkan frekuensi dan nilai transaksi. Dukungan modal usaha yang memadai memperluas kapasitas

dan ragam barang dagangan, sementara akses distribusi yang lancar menjamin ketersediaan barang dan stabilitas harga. Sinergi ketiga faktor tersebut mendorong peningkatan aktivitas perdagangan dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan daerah.

- Program bantuan modal, subsidi, atau kredit usaha rakyat (KUR) menjadi salah satu pendorong utama peningkatan jumlah wirausaha. Pemerintah Kabupaten Balangan mengembangkan inovasi pemberian bantuan modal usaha melalui inovasi Sanggam Bakabun dan Sanggam Babungas.

2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- Kondisi Perekonomian Regional dan Nasional. Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional mempengaruhi arus barang, harga, dan permintaan pasar. Pertumbuhan ekonomi yang stabil di tingkat regional dan nasional mendorong kelancaran distribusi dan peningkatan aktivitas perdagangan di Kabupaten Balangan.
- Fluktuasi harga bahan baku yang berpotensi memengaruhi biaya produksi telah diantisipasi melalui upaya stabilisasi pasokan berbasis potensi lokal serta pendampingan kepada pelaku usaha dalam pemanfaatan bahan baku lokal. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku dari luar daerah dan menjaga keberlanjutan produksi.
- Pergeseran pola konsumsi masyarakat ke arah platform digital juga telah direspons secara positif melalui program pendampingan UMKM untuk memasuki marketplace dan media sosial, seperti Shopee, Tokopedia, dan Instagram, serta penguatan promosi berbasis digital. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pasar, meningkatkan visibilitas produk lokal, dan mendorong peningkatan volume transaksi perdagangan.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.33 adalah target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan tahun 2025 adalah 5,29. Realisasi tahun 2025 adalah 9,40, Realisasi tahun 2024 adalah 4,96, Realisasi tahun 2023 adalah 6,67, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 5,53. Berdasarkan data ini lonjakan tiap tahunnya jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 4,44 poin, dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 lonjakannya sebesar 2,73 poin dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 3,87 poin, artinya secara simultan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan seluruh SKPD dan *stake holder* yang terlibat. Kebijakan terkait Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan di Kabupaten Balangan tahun 2025 diarahkan pada penguatan produk lokal, stabilisasi harga, pemberdayaan pedagang dan UMKM, pengembangan sarana perdagangan, kemudahan berusaha, kelancaran distribusi, serta pemanfaatan teknologi. Kebijakan tersebut saling melengkapi dan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan sektor perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.34 adalah target akhir RPJMD untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan adalah 5,86 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 9,40 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 160,41 persen. Berdasarkan data tabel di atas target akhir RPJMD tahun 2030 yakni 5,86 telah tercapai. Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas agar Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang sekarang berada di 9,40 terus meningkat setiap tahunnya. Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan ini adalah difokuskan pada peningkatan daya beli, penguatan pelaku usaha, optimalisasi produk lokal, perbaikan infrastruktur, perluasan pasar, digitalisasi perdagangan, serta monitoring kinerja yang konsisten. Pelaksanaan rencana aksi secara terintegrasi diyakini mampu mempercepat realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Kabupaten Balangan hingga mencapai target akhir Renstra.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.35 adalah menjelaskan bahwa realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 9,40, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 8,87, realisasi Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 8,08, realisasi Nasional sebesar 13,17, sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Kabupaten Balangan 9,40 jika dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Tabalong sebesar 0,53 poin Kabupaten Balangan berada di atas, dan jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 1,32 poin Kabupaten Balangan berada di atas realisasi Provinsi. Jika dibandingkan dengan realisasi Nasional 3,77 poin Kabupaten Balangan berada di bawah.

Faktor dominan yang mempengaruhi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Pemerintah Kabupaten Balangan adalah Skala dan Struktur Ekonomi Daerah. Kabupaten Balangan memiliki karakteristik skala ekonomi relatif kecil, struktur ekonomi masih didominasi sektor primer (pertanian dan pertambangan) serta perdagangan bersifat lokal dan konsumtif. Sementara kabupaten/kota lain (terutama daerah perkotaan) memiliki basis industri dan jasa lebih kuat dan perdagangan bersifat regional dan antardaerah. Dampak dari skala ekonomi yang lebih kecil menyebabkan laju pertumbuhan sektor perdagangan Balangan lebih sensitif terhadap fluktuasi daya beli lokal, dibandingkan daerah dengan pasar lebih luas. Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 17,72, pertambangan dan penggalan sebesar 1,31, industri pengolahan 9,18, pengadaan Listrik, gas, 9,75, pengadaan air 3,19, konstruksi 5,66, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 9,40, transportasi dan pergudangan 8,20, penyediaan akomodasi dan makan 12,59, informasi dan komunikasi 7,67, jasa keuangan 5,15, real estate 6,34, jasa Perusahaan 8,50, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 8,70, jasa Pendidikan 8,20, jasa Kesehatan dan kegiatan sosial 6,87 dan jasa lainnya 8,88 sehingga produk domestik regional bruto tahun 2025 sebesar 4,51.

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.32 sampai dengan tabel 3.35 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yaitu :**

- Pendekatan Terintegrasi dan Lintas Sektor. Upaya yang dilakukan bersifat terintegrasi, artinya setiap program dan intervensi saling mendukung dan tidak berdiri sendiri. Misalnya, pemberdayaan pedagang kecil dan UMKM tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga berpengaruh pada efektivitas distribusi, penggunaan produk lokal, dan pemanfaatan sarana perdagangan. Pendekatan lintas sektor ini memungkinkan koordinasi antar SKPD seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan Bapperida untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.
- Penguatan kapasitas UMKM dilakukan melalui pendampingan berbasis digital, antara lain melalui kegiatan temu UMKM dengan tema *Strategi Digital dan Layanan Logistik Terpadu untuk UMKM Go Digital*. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam pemanfaatan platform digital, pengelolaan pemasaran daring, serta efisiensi distribusi produk.
- Optimalisasi program promosi dilaksanakan melalui penyelenggaraan pameran dan bazar baik di dalam maupun di luar daerah, antara lain melalui pelaksanaan Balangan Expo secara rutin, partisipasi dalam pameran tingkat provinsi dan nasional, serta pelaksanaan bazar tematik yang berbasis pada potensi unggulan lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan visibilitas produk UMKM.



- Melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM agar aktif memanfaatkan toko daring pemerintah, seperti Si Open dan E-Katalog, sebagai sarana pemasaran dan pengadaan barang/jasa. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peluang transaksi, memperluas jaringan pemasaran, serta mendukung keberpihakan belanja pemerintah terhadap produk UMKM lokal.
- Pelaksanaan perlindungan konsumen sebagai bagian integral dari penguatan sektor perdagangan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini melalui fasilitasi perizinan di sektor perdagangan, pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, serta penyelenggaraan operasi pasar dan pasar

murah, khususnya pada hari besar keagamaan, sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi daerah. Di samping itu, diselenggarakan kegiatan kemetrollogian untuk menjamin ketepatan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), sehingga tercipta keadilan dalam transaksi, kepastian berusaha, serta perlindungan yang optimal bagi konsumen.



2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan. Adapun gambaran umum keterikatan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program ini berperan penting dalam menunjang pertumbuhan sektor perdagangan melalui peningkatan kelancaran distribusi, efisiensi biaya, dan pemerataan akses perdagangan.
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program ini berperan penting dalam memperkuat aktivitas perdagangan, meningkatkan daya saing produk daerah, serta memperluas peran pelaku usaha lokal dalam rantai distribusi.
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yaitu:

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2025 berperan penting dalam menunjang pertumbuhan sektor perdagangan melalui peningkatan kelancaran distribusi, efisiensi biaya, dan pemerataan akses perdagangan. Beberapa factor pendorong keberhasilan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yaitu:
 - Kelancaran Arus Distribusi Barang. Sarana distribusi yang memadai mempercepat pergerakan barang dari produsen ke konsumen, mengurangi keterlambatan pasokan sehingga kelancaran distribusi mendorong peningkatan volume transaksi perdagangan.
 - Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Sarana Perdagangan. Revitalisasi pasar dan sarana distribusi meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas dan menarik lebih banyak aktivitas jual beli. Aktivitas perdagangan yang meningkat berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan. Revitalisasi pasar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan antara lain Pasar Paringin, Pasar Adaro Paringin, Pasar Dalam Adaro, Pasar S Lewan, Pasar Lampihong, Pasar Awayan, Pasar Bihara, dan Halaman Pasar Batumandi.



- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan instrumen strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan sektor perdagangan melalui peningkatan konsumsi dan peredaran produk lokal. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dirancang untuk memperkuat pasar domestik melalui kampanye *Bangga Bela, Beli, dan Pakai Produk Dalam Negeri*, penerapan standarisasi produk, serta pemberian dukungan kepada UMKM, disertai dengan upaya mendorong instansi pemerintah dan BUMD agar memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan P3DN. Program ini berkontribusi langsung terhadap indikator peningkatan volume perdagangan dengan memperkuat basis permintaan domestik, karena meningkatnya kesadaran masyarakat, kualitas produk, serta akses pemasaran produk lokal akan mendorong peningkatan konsumsi dalam negeri. Implementasi program dilakukan melalui intensifikasi promosi dan pemasaran, antara lain melalui penyelenggaraan pameran di tingkat kabupaten seperti Balangan Expo yang menampilkan produk pangan lokal, kerajinan, dan produk halal, serta partisipasi dalam pameran tingkat provinsi seperti Kalsel Expo.

Dari kedua program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.36
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan*	Koordinasi pasar, distribusi, dan stabilitas harga barang	Tersusunnya regulasi pasar, pembinaan pedagang, dan promosi, bazar serta kolaborasi ritel perdagangan.
		Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan Usaha dan Iklim Perdagangan	Penerbitan NIB dan izin usaha perdagangan, penyederhanaan prosedur perizinan, pendampingan legalitas usaha mikro dan kecil.
		Bapperida	Memastikan indikator kinerja terintegrasi dalam dokumen Perencanaan Daerah	Integrasi target pertumbuhan sektor perdagangan dalam dokumen RPJMD, Renstra dan RKPD, serta sinkronisasi program dan anggaran SKPD
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Infrastruktur Perdagangan	Revitalisasi pasar antara lain Pasar Paringin, Pasar Adaro Paringin, Pasar Dalam Adaro, Pasar S Lewan, Pasar Lampihong, Pasar Awayan,

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
				Pasar Bihara, dan Halaman Pasar Batumandi.
		Dinas Perhubungan	Transportasi dan kelancaran arus barang	Kelancaran arus barang dan orang, penataan lalu lintas kawasan perdagangan. Angkutan Gratis Sanggam : - Rute Paringin - Awayan - Tebing Tinggi (1 Mobil Apv) - Rute Paringin - Juai - Halong (1 Mobil Apv) - Rute Paringin - Lampihong - Batumandi (1 Mobil Apv)
		Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Pembinaan pedagang dan akses permodalan	Penguatan UMKM perdagangan desa, pengembangan BUMDes (unit perdagangan), dan pemberdayaan ekonomi lokal

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting kinerja SKPD:

Tabel 3.37
Monev Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Monev Offline	Monev Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	1. Monitoring harga barang di pasar ke 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Balangan	1. Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	
			2. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Pelaku Usaha Potensial Menuju Pasar Ekspor di Kabupaten Balangan		

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

- SDM dikelola secara lintas sektor.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, inovasi produk, dan pelayanan pelanggan meningkatkan efisiensi operasional pedagang dan UMKM.

b. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran dari program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dari anggaran sebesar 2,072,471,125,00 menunjukkan adanya penghematan anggaran sebesar 3.63% dari Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dari anggaran sebesar Rp. 1,481,508,000,00, Realisasi sebesar Rp. 1,434,849,832,00 menunjukkan adanya penghematan anggaran sebesar 3,15%.

c. Efisiensi Waktu

- Perencanaan terkoordinasi dan penjadwalan kegiatan lintas SKPD memastikan program berjalan simultan dan tepat waktu, mengurangi tumpang tindih.
- Monitoring dan evaluasi rutin memungkinkan penyesuaian strategi cepat jika capaian target belum optimal.
- Pemanfaatan platform digital, media sosial, dan aplikasi e-commerce mempercepat pemasaran, distribusi, dan transaksi pedagang.

B.3 Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Indikator 4 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)

Tabel 3.38
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator 4 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,34	12,59	150,96

Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2025 adalah 8,34. Realisasi tahun 2025 adalah 12,59, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 150,96 persen.

Tabel 3.39
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator 4 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,34	12,59	7,69	9,11	5,45

Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan tahun 2025 adalah 8,34. Realisasi tahun 2025 adalah 12,59, Realisasi Tahun 2024 adalah 7,69, Realisasi tahun 2023 adalah 911, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 5,45.

Tabel 3.40
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator 4 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,25	12,59	136,11

Target Akhir RPJMD untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah 9,25 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 12,59 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 136,11 persen.

Tabel 3.41
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator 4 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,59	9,22	9,88	2,68	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 12,59, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 9,22, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan sebesar 9,88, realisasi Nasional sebesar 2,68, sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.38, tabel 3.39, tabel 3.40, dan tabel 3.41 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.38 adalah target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2025 yaitu 8,34. Realisasi tahun 2025 adalah 12,59, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 150,96 persen. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dipengaruhi oleh PDRB sektor pariwisata di Kabupaten Balangan. Berikut rekomendasi kebijakan terkait pariwisata di Kabupaten Balangan antara lain:

1. Jangka Pendek 1-3 tahun :
 - Pembangunan Fasilitas Dasar Destinasi
 - Penyusunan Rencana Zonasi Pariwisata
 - Peningkatan Promosi Digital
 - Pelatihan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)
2. Jangka Menengah 4-6 tahun :
 - Penguatan Kelembagaan melalui Pembentukan BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah)
 - Pengembangan Desa Wisata Mandiri
 - Pelatihan SDM Pariwisata
 - Peningkatan Peran UMKM Kreatif

3. Jangka Panjang 7-10 tahun :

- Menjadikan Balangan sebagai Destinasi Wisata Unggulan Kalimantan Selatan
- Pengelolaan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat
- Sistem Pengelolaan yang Terintegrasi
- Diversifikasi Produk Wisata dan Pemasaran Global
- Perlindungan Lingkungan dan Kearifan Lokal

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,59 pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 150,96 persen dipengaruhi oleh berbagai faktor kinerja antara lain adalah:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

- **Kapabilitas SDM dan Manajemen Usaha**

Keberhasilan sektor ini sangat tergantung pada kemampuan pengelola hotel, restoran, dan usaha kuliner dalam manajemen operasional, pelayanan, dan inovasi produk. SDM yang terampil dapat meningkatkan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas, sehingga berdampak pada pertumbuhan volume transaksi dan pendapatan. Pemerintah Kabupaten Balangan dapat mendorong keberhasilan sektor ini melalui pelatihan manajemen usaha dan layanan hospitality, pendampingan inovasi produk kuliner dan akomodasi dan program sertifikasi atau standar kualitas untuk meningkatkan reputasi usaha.

- **Strategi Pemasaran dan Digitalisasi**

Pemanfaatan media sosial, platform pemesanan online, dan kerja sama dengan agen perjalanan merupakan strategi penting untuk memperluas pasar, meningkatkan visibilitas, dan mengoptimalkan pendapatan usaha akomodasi dan makan minum. Strategi ini berperan signifikan dalam mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Balangan Tahun 2025.

2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Balangan tahun 2025 sangat bergantung pada jumlah wisatawan, pengembangan destinasi wisata, event lokal, dan promosi pariwisata daerah. Transformasi ekonomi melalui arah kebijakan pengembangan destinasi wisata potensial termasuk wisata alam, budaya, dan olahraga, serta ekonomi kreatif; peningkatan pemasaran pariwisata terutama wisata budaya, religi, dan alam; Ketahanan Lingkungan Hidup melalui pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan, keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal dan peningkatan ruang terbuka hijau (RTH).
- Ketersediaan transportasi, akses jalan, fasilitas pendukung, serta lingkungan yang aman, bersih, dan nyaman menjadi faktor pendorong utama kunjungan wisatawan. Masih Minimnya akses jalan dan jembatan menuju destinasi wisata dan belum dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat, sehingga sangat diperlukan koordinasi dengan Dinas terkait terutama Dinas PUPRPERKIM untuk pembangunan jalan menuju destinasi wisata.
- Tren digitalisasi, pemesanan online, dan review media sosial dari wisatawan menjadi faktor pendorong penting dalam meningkatkan reputasi, permintaan, dan volume transaksi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Balangan. Optimalisasi penggunaan teknologi ini berkontribusi signifikan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2025.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.39 adalah target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2025 adalah 8,34. Realisasi tahun 2025 adalah 12,59, Realisasi tahun 2024 adalah 7,69, Realisasi tahun 2023 adalah 9,11, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 5,45. Berdasarkan data ini lonjakan tiap tahunnya jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 adalah sebesar 4,90 poin, dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 3,48 poin, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 7,14 poin, artinya secara simultan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan seluruh SKPD dan *stake holder* yang terlibat. Kebijakan terkait Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu:

- **Peningkatan Infrastruktur Pariwisata dan Transportasi**

Pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan akses jalan, transportasi, serta fasilitas pendukung wisata, untuk memudahkan kunjungan wisatawan. Di dalam Dokumen Masterplan Paringin Tahap II tahun 2024, terdapat rencana Pengembangan Taman Safari/ Balangan Park/ Taman Satwa. Kondisi sekarang, Kabupaten Balangan Sangat Kekurangan destinasi wisata Taman Kota, padahal potensi yang ditawarkan besar. Rencana Taman Kota yang ditawarkan dapat mengadopsi konsep wisata campuran, misal seperti Jatim Park di Jawa Timur.

- **Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Lokal**

Pelatihan manajemen, pelatihan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), pelayanan, dan digital marketing untuk pelaku usaha akomodasi dan kuliner. Pemberian akses permodalan dan bantuan sarana bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kuliner dan penginapan.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.40 adalah target akhir RPJMD untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah 9,25 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 12,59 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 136,11 persen. Berdasarkan data tabel di atas untuk target akhir RPJMD tahun 2030 yakni 9,25 telah tercapai. Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas agar Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum meningkat setiap tahunnya. Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan ini adalah

- Melaksanakan pemberdayaan pedagang dan UMKM melalui program pelatihan manajemen usaha, pelayanan pelanggan, dan strategi pemasaran bagi pedagang kecil dan UMKM dan melakukan kegiatan pendampingan usaha untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, sehingga mempercepat pertumbuhan volume transaksi.
- Melaksanakan penguatan produk lokal dan diversifikasi pasar melalui kegiatan promosi produk unggulan daerah seperti mengadakan pameran, festival, dan digital marketing dan mendorong pengembangan produk inovatif dan berkualitas untuk memenuhi permintaan pasar lokal maupun regional.
- Melaksanakan pengawasan stabilisasi harga dan perlindungan konsumen dengan cara melakukan kegiatan operasi pasar dan kebijakan harga untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah fluktuasi harga yang merugikan pedagang dan konsumen serta perlindungan sosial yang mendukung keberlanjutan konsumsi dan transaksi perdagangan.
- Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan sarana perdagangan dengan melaksanakan revitalisasi pasar tradisional, pengadaan kios, fasilitas logistik, dan penyediaan ruang usaha yang memadai, sehingga mempercepat aliran barang dari produsen ke konsumen, menekan biaya distribusi, dan meningkatkan ketersediaan produk.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.41 adalah menjelaskan bahwa realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 12,59, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 9,22, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan sebesar 9,88, realisasi Nasional sebesar 2,68, sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Balangan 12,59 jika dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Tabalong sebesar 3,37 poin Kabupaten Balangan berada di atas, dan jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 2,71 poin Kabupaten Balangan berada di atas realisasi Provinsi. Dibandingkan dengan realisasi Nasional 9,91 poin Kabupaten Balangan berada di atas realisasi Nasional.

Faktor dominan yang mempengaruhi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Pemerintah Kabupaten Balangan adalah :

- Aktivitas Pariwisata dan Kunjungan Orang. Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum sangat bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan (lokal maupun luar daerah) dan aktivitas perjalanan dinas dan kegiatan sosial ekonomi. Di Kabupaten Balangan aktivitas wisata masih berkembang dan kunjungan lebih di

dominasi kegiatan lokal dan regional. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2025 di Kabupaten Balangan sebesar 253.978 orang wisatawan.

- Skala dan diversifikasi usaha. Struktur usaha di Kabupaten Balangan masih di dominasi usaha kecil dan rumah tangga serta masih minimnya hotel besar dan restoran skala menengah-atas. Salah satu cara agar Pembangunan hotel dan restoran berskala besar di Kabupaten Balangan adalah dipermudahnya permohonan izin mendirikan bangunan dan izin untuk berusaha.

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.38 sampai dengan tabel 3.43 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu :**

- Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Pemerintah daerah meningkatkan kualitas akses jalan, transportasi, serta fasilitas pendukung pariwisata menuju dan di sekitar destinasi wisata, antara lain: mengembangkan konsep membangun selaras dengan alam atau konsep green concept, pengembangan potensi alam berprinsip sustainable development, mengajukan permohonan perubahan tata ruang dari Kawasan Permukiman dan Kawasan Pertanian menjadi Kawasan Wisata, perbaikan jalan, penambahan kapasitas jalan, perbaikan dan penambahan penerangan jalan, penambahan jaringan perpipaan air bersih menuju lokasi Balangan Park, pembangunan drainase, pembangunan TPS3R di area Balangan Park, penambahan jaringan Listrik menuju Balangan Park, dan meningkatkan sistem penghubung yang lebih berorientasi pada kendaraan umum. Infrastruktur yang memadai memudahkan mobilitas wisatawan, meningkatkan tingkat hunian akomodasi, serta mendorong peningkatan konsumsi jasa makan dan minum. Sebagaimana rencana yang ada di dalam Dokumen Masterplan Paringin Tahap II tahun 2024, terdapat rencana Pengembangan Taman Safari/ Balangan Park/ Taman Satwa.
- Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha. Dilakukan pelatihan manajemen usaha, pelayanan hospitality, kebersihan dan keamanan pangan, serta inovasi produk kuliner bagi pelaku usaha akomodasi dan kuliner. Upaya ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan daya saing usaha lokal.
- Promosi Pariwisata dan Destinasi Lokal. Kampanye promosi pariwisata daerah melalui media digital, event lokal, dan kerja sama dengan agen perjalanan. Meningkatkan kunjungan wisatawan dan permintaan layanan akomodasi serta makanan dan minuman. Promosi wisata melalui Calendar of Event (CoE), pemilihan putra putri pariwisata berperan dalam pembentukan duta wisata daerah yang memiliki fungsi sebagai *brand ambassador*, dan promosi melalui media cetak dan media elektronik, termasuk media sosial, website, dan platform digital lainnya



- Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif. Penyederhanaan perizinan, pembinaan standar usaha, serta dukungan regulasi dilakukan untuk mendorong investasi dan pengembangan usaha akomodasi dan kuliner. Iklim usaha yang kondusif meningkatkan minat investor dan mempercepat pertumbuhan sektor.

- Pendampingan kepada Pelaku UMKM. Melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM agar aktif memanfaatkan toko daring pemerintah, seperti Si Open dan E-Katalog, sebagai sarana pemasaran dan pengadaan barang/jasa pemesanan makan dan minum di instansi Pemerintah. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peluang transaksi, memperluas jaringan pemasaran, serta mendukung keberpihakan belanja pemerintah terhadap produk UMKM lokal. Seperti melaksanakan sosialisasi standarisasi usaha rumah makan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan, higienitas, dan kepastian standar usaha kuliner yang menjadi bagian dari rantai pelayanan pariwisata. Peningkatan standar usaha ini memperkuat amenitas destinasi, meningkatkan kepuasan wisatawan, serta mendukung tumbuhnya ekonomi kreatif lokal.



2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Adapun gambaran umum keterikatan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Program Pemasaran Pariwisata	Program pemasaran pariwisata menjadi instrumen utama dalam menarik wisatawan, meningkatkan kunjungan, dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi sektor terkait.
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Penguatan SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif dapat mendorong kualitas layanan, inovasi produk, dan pengalaman wisatawan, yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi di subsektor akomodasi dan makan minum.
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu:

- Program Pemasaran Pariwisata Kabupaten Balangan Tahun 2025 merupakan salah satu program strategis yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian Peningkatan Kunjungan Wisata. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan promosi dan publikasi destinasi wisata Kabupaten Balangan, antara lain pelaksanaan pameran pariwisata, penyelenggaraan event ethnic festival, pemilihan putra putri pariwisata, launching Calendar of Event (CoE), pelaksanaan Balangan Festival, serta kegiatan promosi melalui media cetak dan media elektronik.

- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan salah satu program pendukung utama dalam meningkatkan daya tarik destinasi serta mendorong pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Balangan. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengembangan minat, bakat, dan kreativitas masyarakat, antara lain pelaksanaan lomba band akustik, pentas seni, dan festival ekonomi kreatif.

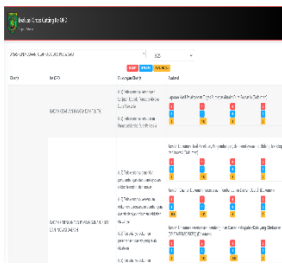
Dari kedua program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.42
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata*	Monitoring kunjungan wisatawan, event pariwisata, dan daya tarik destinasi.	Pendataan dan pembinaan pengusaha hotel, restoran, dan kuliner dan pelaksanaan promosi digital dan event kuliner/wisata
		Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatkan kapasitas usaha kecil dan menengah di sektor kuliner dan akomodasi.	Pelatihan dan pendampingan manajemen usaha, kebersihan, dan kualitas layanan.
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan dan Iklim Usaha.	Penerbitan NIB, izin usaha, dan izin operasional, pendampingan perizinan usaha kuliner dan akomodasi, penyederhanaan proses OSS.
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Monitoring ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta aksesibilitas wisata.	Penyediaan infrastruktur jalan dan akses wisata, sanitasi dan air bersih, penataan kawasan wisata dan kuliner.
		Dinas Kesehatan	Pengawasan pangan dan makanan	Penerbitan sertifikasi laik higiene sanitasi, pengawasan keamanan pangan, pembinaan usaha kuliner sehat.
		Dinas Perhubungan	Transportasi dan konektivitas antar wilayah	Kelancaran transportasi wisata, penataan lalu lintas kawasan wisata dan kuliner, dukungan konektivitas antarwilayah.
		Bapperida	Perencanaan Pengembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tersusunnya kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang mendukung pengembangan sektor pariwisata, usaha kuliner, dan jasa akomodasi.

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting kinerja SKPD:

Tabel 3.43
Money Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Money Offline	Money Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1. Rapat koordinasi penentuan target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Ruang Rapat Bapperida	1. Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	
			2. Asistensi Laporan Kinerja SKPD dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Selasa 13 Januari 2026 di Ruang Rapat Bagian Organisasi		
			3. Rapat terkait integrasi data, analisis capaian indikator, serta evaluasi efektivitas lintas program.		

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

Efisiensi SDM dicapai melalui:

- Pendekatan lintas SKPD (Pariwisata, Koperasi & UKM, PUPR, Kominfo, Bappeda) sehingga setiap tugas spesifik dikelola oleh instansi berkompeten, meminimalkan duplikasi pekerjaan.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi, sehingga tenaga kerja lebih produktif dan mampu mengelola destinasi, akomodasi, dan layanan kuliner dengan lebih efektif.

b. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran dicapai melalui: Integrasi program lintas sektor, misalnya promosi digital sekaligus pemberdayaan UMKM kuliner dan akomodasi, sehingga satu kegiatan menghasilkan multi-output. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata di alokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 2.901.212.518,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.844.024.354,- atau sebesar 98,03%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 57.188.164,-. Program Pemasaran Pariwisata memiliki pagu anggaran sebesar Rp 2.408.263.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.381.341.933,- atau 98,88%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 26.921.367,-.

c. Efisiensi Waktu

- Perencanaan dan koordinasi lintas SKPD memungkinkan penyelarasan jadwal kegiatan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan simultan dan menghindari tumpang tindih.

- Monitoring dan evaluasi rutin mempercepat identifikasi hambatan dan pengambilan keputusan, sehingga waktu pelaksanaan program lebih optimal.
- Pemanfaatan platform digital dan media sosial mempercepat promosi destinasi dan layanan, sehingga memperpendek siklus pemasaran dan meningkatkan respons pasar.

B.4 Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi (Indikator Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi)

Tabel 3.44
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi	Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	10	4,11	41,10

Target Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi tahun 2025 adalah 10. Realisasi tahun 2025 adalah 4,11, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 41,10 persen.

Tabel 3.45
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi	Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	10	4,11	9,72	17	248

Target Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi tahun 2025 adalah 10. Realisasi tahun 2025 adalah 4,11, Realisasi Tahun 2024 adalah 9,72, Realisasi tahun 2023 adalah 17, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 248.

Tabel 3.46
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi	Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	11	4,11	37,36

Target Akhir RPJMD untuk Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi adalah 11 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 4,11 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 37,36 persen.

Tabel 3.47
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi	Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	4,11	62	35	12,7	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 4,11, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 62, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 35, realisasi Nasional 12,7. Sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.44, tabel 3.45, tabel 3.46, dan tabel 3.47 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.44 adalah target Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi tahun 2025 yaitu 10. Realisasi tahun 2025 adalah 4,11, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 41,10 persen. Kondisi Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi tahun 2025 dipengaruhi oleh Nilai Investasi tahun 2025:

No	Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)	720	748,792	719,226	471,226	403,601

Jika kita melihat realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 maka realisasi kinerja ini mengalami kecenderungan naik. Realisasi Investasi Daerah Tahun 2022 sebesar 403.601.380.621, Tahun 2023 realisasi Investasi Daerah sebesar 471.226.861.079 sedangkan total Realisasi Investasi tahun 2024 berjumlah 719.226.207.247.

Tren realisasi investasi selama 4 (empat) tahun terakhir selalu meningkat. Pencapaian kinerja tahun 2024 didapat berdasarkan data yang didapat dari rilis LKPM oleh Kementerian Investasi/BKPM RI sampai dengan triwulan 4 Tahun 2024 adalah sebesar Rp.719.226.207.247 (Tujuh Ratus Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Sedangkan untuk tahun 2023 realisasi investasinya sebesar Rp.471.226.861.079 (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Pulu Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). Nilai realisasi investasi mengalami peningkatan sebesar Rp. 247.959.346.168 atau 52,63 persen.

Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi sebesar 4,11 pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 41,10 persen dipengaruhi oleh faktor kinerja antara lain:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

• Kualitas Perencanaan dan Kebijakan Daerah

Kejelasan arah kebijakan pembangunan daerah, konsistensi perencanaan, serta keselarasan antara RPJMD, Renstra perangkat daerah, dan RKPd menjadi faktor internal utama yang mempengaruhi realisasi investasi. Perencanaan yang jelas dan terintegrasi memberikan kepastian bagi investor serta mempermudah penyiapan proyek investasi daerah. Investasi merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah dan keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan kebijakan daerah.

• Kemudahan Perizinan dan Tata Kelola Investasi

Efektivitas sistem perizinan, termasuk pelayanan terpadu satu pintu dan penerapan perizinan berbasis elektronik, sangat mempengaruhi kecepatan realisasi investasi. Prosedur yang sederhana, waktu layanan yang pasti, serta kepastian regulasi daerah meningkatkan kepercayaan investor untuk merealisasikan rencana investasinya di Kabupaten Balangan. Adanya Perbup Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kab.Balangan Tahun 2019-2025, adanya Perbup Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat/Investor, adanya inovasi untuk percepatan perizinan seperti MARITAM Layanan mobil pelayanan perizinan hingga ke kecamatan untuk menjangkau pelaku usaha yang jauh dari pusat kota, sehingga akses layanan menjadi lebih mudah di daerah terpencil.

- **Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pemerintah Daerah**

Kemampuan aparat pemerintah daerah dalam promosi investasi, pendampingan investor, dan penyelesaian hambatan investasi menjadi faktor internal penting. SDM yang kompeten, responsif, dan profesional meningkatkan kualitas pelayanan investasi dan mempercepat proses realisasi. Struktur organisasi yang sesuai SOTK dan didukung oleh JF yang kompeten di PMPTSP merupakan faktor kelembagaan strategis dalam mendorong laju pertumbuhan realisasi investasi karena menciptakan pelayanan yang cepat, profesional dan akuntabel.

2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- **Kondisi Perekonomian Nasional dan Global**

Stabilitas ekonomi nasional, tingkat inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi global mempengaruhi keputusan investor dalam merealisasikan investasi. Perlambatan ekonomi atau ketidakpastian global dapat menurunkan minat dan menunda realisasi investasi, sedangkan kondisi ekonomi yang kondusif mendorong percepatan investasi di daerah. Tingkat inflasi Kabupaten Balangan mengacu pada tingkat inflasi Kabupaten Tabalong (Tanjung) sebagai wilayah terdekat yang menjadi lokasi survey IHK oleh BPS, pada Desember 2025 tingkat inflasi di Tanjung sebesar 3,15%. Dengan tingkat inflasi 3,15% kondisi ekonomi Kab.Balangan dapat dikategorikan stabil dan kondusif, namun tetap perlu diwaspadai terutama pada komoditas bahan pangan.

- **Kebijakan Pemerintah Pusat**

Kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi investasi dari pemerintah pusat, termasuk insentif investasi, kemudahan perizinan nasional, serta kebijakan sektor strategis, sangat mempengaruhi iklim investasi daerah. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan daya tarik Kabupaten Balangan, sementara perubahan regulasi dapat mempengaruhi keputusan investor. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU ini mereformasi besar-besaran sistem perizinan dan kemudahan investasi melalui penyederhanaan regulasi, perizinan berbasis risiko, integrasi sistem perizinan secara nasional, penyederhanaan persyaratan investasi, Perpres No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja yang mengatur penanaman modal, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), Sistem OSS (Online Single Submission), adanya insentif fiskal dan non fiskal. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah regulasi baru yang ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2025 untuk menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. PP ini menyempurnakan prosedur OSS-RBA, memberikan kepastian waktu (SLA), memperjelas persyaratan dasar, serta memperkuat pengawasan dan sanksi administratif

- **Perkembangan Harga Komoditas**

Fluktuasi harga komoditas, khususnya sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam, mempengaruhi kelayakan ekonomi proyek investasi. Harga komoditas yang menguntungkan mendorong investor untuk merealisasikan investasi, sedangkan penurunan harga dapat menunda atau mengurangi skala investasi. Pada 2025 hanya terdapat 2 kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan lebih lambat dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Balangan secara umum. Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) dan C (Industri Pengolahan) pada tahun ini memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi Balangan secara umum. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kategori B (Pertambangan dan Penggalian) dan E (Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang) mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi Balangan secara umum.

- **Kondisi Keamanan dan Stabilitas Sosial**

Stabilitas keamanan, ketertiban sosial, dan kepastian hukum di tingkat regional maupun nasional menjadi pertimbangan penting bagi investor. Lingkungan yang aman dan kondusif meningkatkan kepercayaan investor dalam merealisasikan kegiatan usaha di Kabupaten Balangan. Kondisi keamanan di Balangan terbilang kondusif, dengan upaya aparat hukum yang aktif dalam penanggulangan kriminalitas dan

peningkatan sinergi dengan pemerintah dalam menghadapi tantangan sosial maupun bencana alam. Akhir tahun 2025 Balangan mengalami banjir parah yang mempengaruhi ribuan warga, dan pemerintah menetapkan status *siaga darurat bencana*. Walau ini bukan kejahatan, bencana ini turut mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban publik di beberapa wilayah.

- **Persaingan Antar Daerah**

Persaingan dengan daerah lain dalam menarik investasi juga mempengaruhi laju realisasi investasi. Daerah yang menawarkan insentif lebih menarik, infrastruktur lebih siap, atau pelayanan lebih cepat dapat menjadi alternatif bagi investor.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.45 adalah target Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi tahun 2025 adalah 10. Realisasi tahun 2025 adalah 4,11, Realisasi tahun 2024 adalah 9,72, Realisasi tahun 2023 adalah 17, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 248. Terlihat adanya pola penurunan laju pertumbuhan realisasi investasi dari tahun ke tahun. Namun hal ini tidak berarti investasi menurun, tetapi menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan yang melambat. Kondisi ini wajar Ketika nilai investasi sudah berada pada level yang cukup tinggi sehingga ruang pertumbuhan persentase menjadi lebih terbatas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain basis nilai investasi yang sudah tinggi pada tahun 2024, tidak adanya proyek skala besar baru di tahun 2025, kondisi ekonomi nasional/global, fluktuasi harga komoditas dan penyesuaian regulasi atau kebijakan investasi. Berdasarkan data ini setiap tahunnya Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun.

Pengaruh Struktur PDRB menurut lapangan usaha tahun 2023-2025 Kabupaten Balangan terhadap realisasi investasi tidak terlalu banyak mengalami perubahan atau pergeseran. Perubahan harga batubara secara umum mempengaruhi *share* kategori pertambangan dan penggalian, dimana pada 2023 hingga 2025 terus terjadi penurunan jumlah *share* pada kategori ini. Pada 2023–2024 Kategori Konstruksi memberikan *share* PDRB yang lebih besar dibandingkan Kategori Administrasi Pemerintahan. Namun pada 2025 terjadi pergeseran dimana Kategori Konstruksi memberikan *share* yang lebih kecil dibandingkan Kategori Administrasi Pemerintahan.

Pada 2025, pengaruh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) terhadap realisasi investasi mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan secara umum. Perlambatan pertumbuhan ini terjadi karena adanya efisiensi anggaran. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan mengalami percepatan Dimana pada tahun 2024 sebesar 4,15% dan tahun 2025 sebesar 4,51%. Share Perekonomian Kabupaten Balangan terhadap Perekonomian Kalsel Tahun 2025 berada pada peringkat ke-6 dengan *share* sekitar 7,54 persen.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.46 adalah target akhir RPJMD untuk Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi adalah 11 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 4,11 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 37,36 persen. Berdasarkan data tabel di atas untuk menuju kepada pencapaian target akhir RPJMD tahun 2030 yakni 11, maka Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas baik dalam dokumen perencanaan umum maupun dokumen perencanaan khusus Pertumbuhan Realisasi Investasi. Karena saat ini Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi hanya berada di 4,11, itu artinya *harus melakukan gerakan percepatan setiap tahunnya*. Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi ini adalah percepatan realisasi Laju Pertumbuhan Investasi Kabupaten Balangan hingga tahun 2025 disusun secara terarah dan terintegrasi melalui penyederhanaan perizinan, penguatan promosi, penyiapan infrastruktur, koordinasi lintas perangkat daerah, serta monitoring berkelanjutan. Rencana aksi ini diharapkan mampu meningkatkan realisasi investasi secara signifikan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Balangan menerapkan rencana aksi berupa optimalisasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan pemanfaatan sistem perizinan berbasis elektronik dan pemanfaatan Sistem Informasi Peta Peluang Investasi. Langkah ini bertujuan mempercepat proses perizinan, meningkatkan kepastian waktu layanan, dan mengurangi biaya administrasi bagi investor, sehingga mendorong percepatan realisasi investasi.

Rencana aksi mencakup peningkatan promosi investasi daerah melalui penyusunan profil peluang investasi, penyediaan data potensi daerah yang akurat, serta partisipasi dalam forum dan pameran investasi. Pendekatan ini diarahkan untuk menarik investor baru sekaligus mendorong investor eksisting agar merealisasikan rencana pengembangan usaha. Selain itu promosi yang dilakukan Adalah mengikuti event /forum investasi sebanyak 2 kali sekaligus mempresentasikan proyek investasi unggulan Daerah (IPRO) didalam Borneo Investment Business Forum 2025.

Rencana aksi juga menekankan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam mendampingi investor, mulai dari tahap perencanaan hingga operasional. Memaksimalkan pendampingan pelaporan LKPM pada saat masa pelaporan. Upaya pemaksimalan yang dilakukan dalam pendampingan selama tahun 2025 dilakukan sebanyak 20 kali. Selain itu, melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas permasalahan dan kendala yang dihadapi pelaku usaha. Pertemuan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2025 dilakukan sebanyak 2 kali dengan matrik kendala secara umum adalah terkait pemenuhan komitmen perizinan berusaha. Pendampingan ini bertujuan untuk menyelesaikan kendala non-teknis dan administratif secara cepat dan terpadu.

Monitoring dan evaluasi realisasi investasi dilakukan secara berkala untuk memastikan rencana aksi berjalan efektif. Hasil monitoring digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan penyesuaian strategi percepatan agar target Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi dapat tercapai hingga tahun 2025. Pengawasan yang dilakukan selama tahun 2025 untuk Penanaman Modal sebanyak 44 kegiatan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatannya.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.47 adalah menjelaskan bahwa realisasi Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 4,11, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 62 persen, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 35 persen, realisasi Nasional adalah 12,7 persen, sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data. Realisasi Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Balangan tahun 2025 sebesar 4,11 jika dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan berada di bawah Kabupaten Tabalong dengan selisih sebesar 57,89 poin, dibandingkan dengan realisasi Propinsi Kalimantan Selatan 35 persen selisih sebesar 30,89 poin Kabupaten Balangan berada di bawah realisasi Provinsi Kalimantan Selatan dan dibandingkan dengan realisasi Nasional 12,7 Kabupaten Balangan juga berada dibawah dengan selisih 8,59 poin.

Faktor dominan yang mempengaruhi Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi Pemerintah Kabupaten Balangan adalah

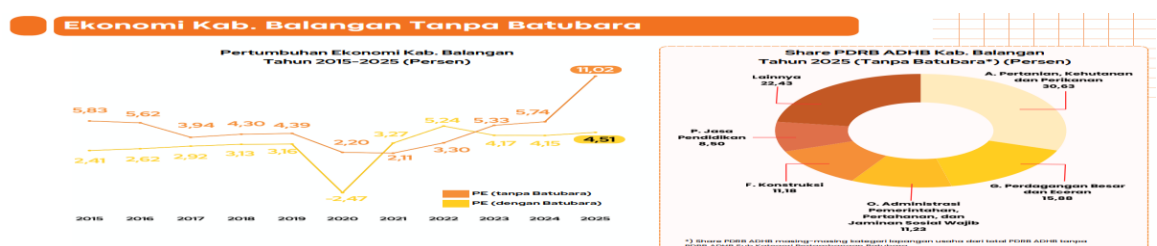
- Kebijakan Perizinan dan Fasilitasi Investasi. Kabupaten Balangan melalui strategi inovasi seperti layanan “Awat Nasa Jebol” (pengawasan perizinan berusaha jemput bola) diharapkan membantu meningkatkan realisasi investasi. Faktor dominan efektivitas layanan perizinan, kepastian regulasi lokal, dan kemudahan berusaha menjadi faktor utama peningkatan investasi tingkat daerah. Langkah konkret yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah mempermudah Perizinan Berusaha.
- Skala dan Diversifikasi Sektor Investasi. Provinsi Kalsel memiliki basis investasi yang lebih beragam (pertambangan, perdagangan, jasa, energi, hilirisasi pertanian) sehingga total investasi lebih tinggi dibanding kabupaten yang sektor ekonominya lebih sempit. Sektor tambang dan energi masih menjadi tulang punggung investasi besar di Kalsel, sementara sektor lain seperti pertanian, jasa, dan hilirisasi mulai mendapat perhatian strategis. Faktor dominan: Diversifikasi sektor yang luas dan potensi komoditas alam meningkatkan daya tarik investasi di tingkat provinsi.
- Kontribusi PMA vs PMDN. Di Balangan, investasi sektor menengah dan besar dominan tetapi volume PMA cenderung lebih kecil. Faktor dominan: Proporsi modal asing vs domestik menunjukkan bahwa kepercayaan investor internasional turut memengaruhi realisasi investasi terutama di wilayah yang mampu menawarkan prospek pasar dan infrastruktur yang menarik. Langkah konkret yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Percepatan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

- Potensi Lokal dan Infrastruktur. Balangan masih mengembangkan potensi mikro dan kecil serta investasi usaha menengah, dengan tantangan infrastruktur tertentu yang perlu ditingkatkan. Faktor dominan: Akses infrastruktur, kesiapan kawasan investasi, dan potensi komoditas lokal menjadi penentu utama keputusan investasi pihak swasta. Langkah konkret yang dilakukan Dinas PUPRPERKIM adalah Percepatan Realisasi Proyek Infrastruktur Daerah.

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.44 sampai dengan tabel 3.47 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi adalah melalui upaya-upaya percepatan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi yaitu :

- Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan berbagai kebijakan di bidang investasi antara lain :
 - Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam mendukung pertumbuhan realisasi investasi tahun 2025 diarahkan pada penciptaan iklim usaha yang kondusif, kepastian regulasi, dan peningkatan kemudahan berusaha. Penyederhanaan proses perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dan pemanfaatan sistem perizinan berbasis elektronik menjadi kebijakan utama untuk mempercepat realisasi investasi dan mengurangi hambatan administratif bagi investor.
 - Selain itu, pemerintah daerah menetapkan kebijakan penguatan promosi investasi daerah dengan menonjolkan potensi unggulan dan peluang usaha strategis. Melalui penyediaan data potensi daerah, forum bisnis, dan *investment meeting*. Dengan masuknya modal baru, kapasitas ekonomi daerah dapat meningkat. Penyediaan informasi investasi yang transparan serta pendampingan kepada investor sejak tahap perencanaan hingga operasional usaha turut meningkatkan kepercayaan dan minat investasi.
 - Kebijakan pendukung lainnya meliputi peningkatan kualitas infrastruktur dasar, kepastian tata ruang, serta sinergi lintas perangkat daerah dalam penyiapan kawasan dan proyek investasi. Secara keseluruhan, kebijakan yang diterapkan bersifat pro-investasi, terintegrasi, dan berorientasi pada percepatan realisasi, sehingga mendukung pencapaian target pertumbuhan realisasi investasi Kabupaten Balangan Tahun 2025.
- Pemerintah Kabupaten Balangan melakukan berbagai upaya strategis dan terintegrasi untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi tahun 2025. Upaya utama dilakukan melalui penyederhanaan dan percepatan pelayanan perizinan dengan optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu serta penerapan sistem perizinan berbasis elektronik, sehingga memberikan kepastian waktu dan kemudahan berusaha bagi investor.
- Melakukan Integrasi Pelayanan Publik/Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Mal Pelayanan Publik yang menghadirkan Dinas Teknis terkait Izin Usaha dan menjadikan Layanan dalam satu tempat.
- Keberhasilan investasi daerah meningkat karena kombinasi kebijakan pro-investasi (perizinan mudah, sinkronisasi pusat-daerah melalui OSS).
- Menyusun Proyek Investasi yang siap ditawarkan (IPRO) berupa daftar proyek unggulan (pariwisata, pertanian, energi, dll) sehingga investasi lebih terarah pada sektor unggulan yang memiliki multiplier tinggi yakni Hilirisasi Batubara dan Wisata Sungai Maranting pada Tahun 2025 serta sebelumnya adalah IPRO Beras Kemasan serta Pembangunan Hotel.
- Promosi penanaman modal yang menghasilkan nilai rencana investasi sektor prioritas Non Pertambangan sebesar 93 Milyar serta rencana Proyek Investasi Baru sektor Non Pertambangan berdasarkan penerbitan NIB Tahun 2025. Berikut PDRB ADHB Kabupaten Balangan Tahun 2025 tanpa Batubara:



- Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan terobosan-terobosan inovatif dalam rangka meningkatkan promosi investasi daerah dalam berbagai sektor, tidak tergantung pada sektor pertambangan batu bara yang sering mengalami fluktuasi harga.

2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi. Adapun gambaran umum keterikatan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program ini berperan strategis dalam meningkatkan minat investor serta mendorong percepatan realisasi penanaman modal yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program ini berperan penting dalam menjaga kepastian berusaha, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong percepatan realisasi investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.
		Program Promosi Penanaman Modal	Program ini berperan strategis dalam menarik investor baru serta mendorong investor eksisting untuk memperluas dan merealisasikan investasinya.
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program ini berperan strategis dalam meningkatkan kualitas perencanaan, promosi, pengendalian, dan monitoring realisasi penanaman modal di Kabupaten Balangan.
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi yaitu:

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kabupaten Balangan merupakan program strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing. Melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan transparansi, koordinasi lintas perangkat daerah, dan pendampingan investor, program ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan laju pertumbuhan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini dinilai efektif karena dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan, dengan fokus pada perbaikan sistem dan pelayanan. Penyederhanaan perizinan dan peningkatan transparansi terbukti mempercepat proses investasi dan meningkatkan daya saing Kabupaten Balangan dibandingkan daerah lain.
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Balangan Tahun 2025 berperan strategis dalam memastikan investasi berjalan tertib, sesuai ketentuan, dan tepat waktu. Melalui monitoring, pembinaan, dan koordinasi lintas sektor, program ini mendukung percepatan realisasi investasi, peningkatan kualitas penanaman modal, serta pencapaian target pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini dinilai efektif karena dilaksanakan secara proaktif dan terkoordinasi, tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga pada pembinaan. Pendekatan ini mengurangi potensi kendala dalam pelaksanaan investasi dan mendorong investor untuk merealisasikan investasinya tepat waktu.
- Program Promosi Penanaman Modal Kabupaten Balangan Tahun 2025 berperan penting dalam meningkatkan visibilitas dan daya tarik daerah sebagai tujuan investasi. Melalui promosi yang terarah, berbasis data, dan terintegrasi dengan program pendukung lainnya, program ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan laju pertumbuhan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan. Program ini dinilai efektif

karena mengedepankan promosi yang terarah, berbasis data, dan memanfaatkan teknologi digital, sehingga biaya promosi relatif efisien dengan jangkauan yang luas. Sinergi dengan program pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal memperkuat dampak promosi terhadap realisasi investasi.

- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Kabupaten Balangan Tahun 2025 merupakan fondasi penting dalam pengelolaan investasi daerah. Melalui data yang akurat, sistem informasi yang terintegrasi, dan SDM yang kompeten, program ini mendukung peningkatan efektivitas promosi, pengendalian, dan realisasi investasi serta pencapaian target pembangunan ekonomi daerah. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dinilai efektif karena mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan investasi. Data yang terintegrasi dan sistem informasi yang andal mempercepat proses pengambilan keputusan serta meningkatkan kepercayaan investor.

Dari keempat program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.48
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*	Fokus pada layanan perizinan, pembinaan investasi, dan inovasi pelayanan	Klasifikasi investasi, pembinaan layanan perizinan, pelaporan modal, pendampingan investor, sekaligus program inovasi pelayanan (seperti layanan Awas Nasa Jebol dan Ladang Porang Paman Limbat).
		Bapperida	Menyusun arah kebijakan pembangunan dan strategi investasi jangka menengah.	Menyelaraskan program lintas SKPD agar konsisten dengan RPJMD, Renstra dan RKPD.
		Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai sesuai kebutuhan	Pelatihan keterampilan sesuai sektor investasi, dan penyediaan data tenaga kerja yang siap diserap investor.
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengembangan Iklim Usaha dan Industri Daerah	Pembinaan dan penguatan perdagangan daerah melalui kegiatan pelatihan pedagang, promosi, bazar dan pameran produk lokal
		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Dampak Lingkungan	Penerbitan izin lingkungan dan pemantauan kepatuhan investor dan advokasi praktik investasi ramah lingkungan

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting kinerja SKPD:

Tabel 3.49
Monev Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Monev Offline	Monev Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi	Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	1. Rapat Tim Teknis Perizinan Bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan dan Dinas Koprasi UKM dan Tenaga Kerja, Rabu 18 Juni 2025 2. Rapat evaluasi pengawasan penanaman modal	1. Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target indikator kinerja Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

Efisiensi SDM dalam mendukung laju pertumbuhan realisasi investasi tahun 2025 ditunjukkan melalui:

- Optimalisasi peran aparatur pada perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai leading sektor, yang didukung oleh BPKPAD, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas PUPRPERKIM, dan Satpol PP.
- Penugasan SDM dilakukan secara terfokus pada fungsi strategis seperti pelayanan perizinan, promosi investasi, pengendalian pelaksanaan, dan pengelolaan data investasi.
- Pemanfaatan sistem perizinan dan pelaporan berbasis digital mengurangi beban kerja manual, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan produktivitas aparatur tanpa harus menambah jumlah SDM secara signifikan.

b. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran dicapai melalui :

- Sinergi dan crosscutting antar program dan kegiatan lintas SKPD, sehingga menghindari duplikasi belanja.
- Anggaran promosi investasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengendalian penanaman modal diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan realisasi investasi. Alokasi anggaran untuk program pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Rp. 255,214,300.00
- Pemanfaatan promosi digital, integrasi sistem informasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor memungkinkan pencapaian output dan outcome yang optimal dengan biaya relatif lebih efisien.

c. Efisiensi Waktu

Efisiensi waktu diwujudkan melalui :

- Penyederhanaan proses perizinan, penerapan pelayanan terpadu satu pintu, serta penggunaan sistem elektronik yang mempercepat alur pelayanan investasi.
- Koordinasi lintas perangkat daerah dalam satu mekanisme pengendalian dan pendampingan investor mengurangi waktu penyelesaian permasalahan teknis dan administratif. (<https://oss.go.id/id>)
- Monitoring dan evaluasi berkala memungkinkan penanganan hambatan secara cepat, sehingga realisasi investasi dapat dilakukan tepat waktu sesuai rencana.

B.5 Sasaran Strategis 5 Menurunnya Pengangguran Daerah (Indikator 1 : Tingkat Pengangguran Terbuka)

Tabel 3.50
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator 1 : Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
5.	Menurunnya Pengangguran Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,67	2,74	97,38

Target Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 adalah 2,67. Realisasi tahun 2025 adalah 2,74, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 97,38 persen.

Tabel 3.51
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator 1 : Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.	Menurunnya Pengangguran Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,67	2,74	2,69	2,70	3,98

Target Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 adalah 2,67. Realisasi tahun 2025 adalah 2,74, Realisasi Tahun 2024 adalah 2,69, Realisasi tahun 2023 adalah 2,70, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 3,98.

Tabel 3.52
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator 1 : Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
5.	Menurunnya Pengangguran Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,33	2,74	82,40

Target Akhir RPJMD untuk Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 2,33 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 2,74 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 82,40 persen.

Tabel 3.53
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator 1 : Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
5.	Menurunnya Pengangguran Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,74	3,48	4,16	4,85	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 2,74, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 3,48, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 4,16 realisasi Nasional adalah 4,85 dan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.50, tabel 3.51, tabel 3.52, dan tabel 3.53 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator 1 : Tingkat Pengangguran Terbuka)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.50 adalah target Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 yaitu 2,67. Realisasi tahun 2025 adalah 2,74, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 97,38 persen.

Pengangguran di Balangan tahun 2025 cenderung disebabkan mayoritas oleh penduduk usia muda yang baru menamatkan sekolah/kuliahnya (pengangguran terdidik/new comer), mereka menunggu/mencari pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Ada juga beberapa petani karet yang memutuskan berhenti menyadap sementara karena pendapatannya dirasa tidak mencukupi (harga karet relatif turun dibandingkan tahun lalu)

Fresh graduate yang tidak melanjutkan ke bangku kuliah, juga lulusan kuliah yang kembali ke Balangan tapi belum mendapat pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,74 pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 97,38 persen belum mencapai target kinerja tahun 2025. Hal-hal yang mempengaruhi dan harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka penanganan Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka dipengaruhi oleh:

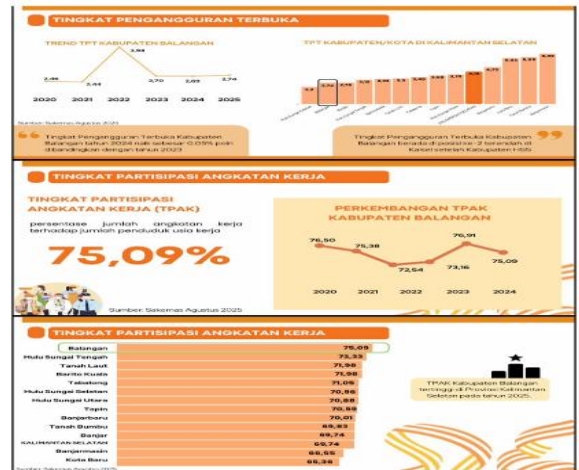
1. Faktor Internal sebagai berikut :

- Faktor utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, dan pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan permintaan pasar kerja meningkatkan peluang penempatan kerja dan menurunkan TPT.
- Perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan UMKM, yang memiliki daya serap tenaga kerja cukup besar. Dukungan pemerintah daerah terhadap kewirausahaan dan usaha produktif turut menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi angkatan kerja muda.
- Penguatan peran perangkat daerah dalam layanan ketenagakerjaan, termasuk penyediaan informasi pasar kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja, dan pendampingan pencari kerja, berkontribusi terhadap penurunan waktu tunggu kerja. Sinergi program lintas sektor serta monitoring kinerja ketenagakerjaan yang berkelanjutan menjadi faktor internal pendukung keberhasilan pengendalian TPT di Kabupaten Balangan tahun 2025.

2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- Faktor utama adalah kondisi perekonomian regional dan nasional yang relatif stabil, sehingga mendorong aktivitas usaha dan peningkatan permintaan tenaga kerja, khususnya di sektor perdagangan, industri pengolahan, dan jasa.
- Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, seperti program peningkatan keterampilan tenaga kerja, bantuan kewirausahaan, serta program padat karya dan penempatan tenaga kerja. Program-program tersebut memperluas kesempatan kerja dan membantu menyerap angkatan kerja di daerah.
- Pertumbuhan investasi swasta dan masuknya investor baru di Kabupaten Balangan menjadi faktor penunjang penting dalam penciptaan lapangan kerja. Perkembangan teknologi dan digitalisasi juga membuka peluang kerja baru, baik di sektor formal maupun informal. Dukungan pasar tenaga kerja yang lebih luas, termasuk mobilitas tenaga kerja antar daerah, turut memperkuat keberhasilan pengendalian TPT Kabupaten Balangan tahun 2025.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.51 adalah target Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 adalah 2,67. Realisasi tahun 2025 adalah 2,74, Realisasi tahun 2024 adalah 2,69, Realisasi tahun 2023 adalah 2,70, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 3,98. Berdasarkan data ini lonjakan tiap tahunnya berbeda-beda atau fluktuatif artinya secara simultan Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi untuk realisasi tahun 2025 tidak tercapai sesuai target. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2025



terkait pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka dirancang secara terpadu, lintas sektor, dan berorientasi pada peningkatan peluang kerja. Fokus utama kebijakan mencakup pengembangan SDM yang kompeten, fasilitasi penempatan kerja, pemberdayaan UMKM, dukungan investasi padat karya, kolaborasi dengan program lebih luas, serta perlindungan sosial. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan TPT secara signifikan dan mendukung dinamika pasar tenaga kerja yang lebih produktif serta pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Program Ketenagakerjaan Kabupaten Balangan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Kartu Balangan Pintar. Pemberian beasiswa sebanyak 1.658 siswa SD/MI dan SMP/MTs dengan total bantuan 2,1 Milyar (Tingkat SD/Mi 1,1 juta per siswa Tingkat SMP/MTs 1,5 juta per siswa).
2. Seribu Sarjana bekerjasama dengan 19 Kampus Banjarmasin, Balangan, Banjarbaru dan Hulu Sungai Utara dan di daerah Jawa, NTB dan Bali.
3. Bantuan modal usaha sebesar 5 juta oleh CSR Adaro (PT. SIS bersama Dinas Koperasi UKM, dan Tenaga Kerja kepada UMKM).
4. *Entrepreneur capacity building*, pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) dan penyaluran bantuan alat usaha)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.52 adalah target akhir RPJMD untuk Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 2,33 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 2,74 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 82,40 persen. Berdasarkan data tabel di atas untuk menuju kepada pencapaian target akhir RPJMD tahun 2030 yakni 2,33 diperlukan 0,42 poin, maka Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas. Karena saat ini Tingkat Pengangguran Terbuka hanya berada di 2,74 itu artinya harus melakukan gerakan percepatan setiap tahunnya.

Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka ini adalah:

- Tahap Awal difokuskan pada penyediaan data ketenagakerjaan yang akurat, pemetaan pengangguran berdasarkan usia, pendidikan, dan wilayah, serta penguatan kelembagaan layanan ketenagakerjaan. Langkah ini menjadi dasar dalam merancang program pelatihan, penempatan kerja, dan pemberdayaan ekonomi yang sesuai kebutuhan daerah.
- Tahap Menengah diarahkan pada peningkatan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, fasilitasi penempatan kerja, serta penguatan UMKM dan kewirausahaan. Pada fase ini, pemerintah daerah mulai mendorong sinergi lintas sektor, termasuk keterkaitan dengan program investasi dan pengembangan sektor unggulan daerah yang bersifat padat karya.
- Tahap Akhir difokuskan pada percepatan realisasi penurunan TPT dan konsolidasi hasil program. Penekanan dilakukan pada optimalisasi investasi penciptaan lapangan kerja, perluasan jejaring kerja sama dengan dunia usaha, serta monitoring dan evaluasi kinerja ketenagakerjaan secara intensif. Upaya ini bertujuan memastikan penurunan TPT berkelanjutan dan sesuai target akhir RPJMD.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.53 adalah menjelaskan bahwa realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 2,74, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 3,48, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 4,16 realisasi Nasional adalah 4,85 dan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan tahun 2025 sebesar 2,74 jika dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Tabalong, maka Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan berada di bawah Kabupaten Tabalong dengan selisih sebesar 0,74 poin, dibandingkan dengan realisasi Propinsi Kalimantan Selatan 4,16 selisih poin sebesar 1,42 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut Grafik Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan:

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					
Dalam satuan persen (%)					
Kabupaten/Kota	Agustus 2024	Agustus 2025	Kabupaten/Kota	Agustus 2024	Agustus 2025
6301 Tanah Laut	3,43	3,30	6308 Hulu Sungai Utara	3,72	3,79
6302 Kotabaru	6,05	5,93	6309 Tabalong	3,44	3,48
6303 Banjar	2,71	2,76	6310 Tanah Bumbu	6,37	6,05
6304 Barito Kuala	3,41	3,23	6311 Balangan	2,69	2,74
6305 Tapin	3,86	3,69	6371 Banjarmasin	6,56	6,49
6306 Hulu Sungai Selatan	2,11	2,20	6372 Banjarbaru	4,93	4,75
6307 Hulu Sungai Tengah	3,20	3,12	6300 Kalimantan Selatan	4,20	4,16

Dibanding Agustus 2024

- Kabupaten/Kota dengan peningkatan TPT tertinggi : Hulu Sungai Selatan
- Kabupaten/Kota dengan penurunan TPT tertinggi : Tanah Bumbu

Pada gambar diatas menunjukkan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Balangan berada di posisi nomor 2 (dua) terendah se-Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 2,74% dan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tingkat pengangguran Kabupaten Balangan masih menjadi penyumbang positif penurunan angka pengangguran Provinsi Kalimantan Selatan.

Faktor dominan yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Pemerintah Kabupaten Balangan adalah

- Struktur Ekonomi Kabupaten Balangan didominasi sektor primer yaitu banyak pekerja informal. Basis pekerjaan agraris yang tinggi. Banyak penduduk bekerja di sektor pertanian yang informal namun cenderung menyerap tenaga kerja lokal (petani, buruh tani, usaha rumah tangga). Sedangkan di Kabupaten Tabalong campuran sektor primer dan sekunder sehingga peluang kerja formal bertambah.
- Pemerintah Kabupaten Balangan punya jumlah angkatan kerja lebih sedikit, sehingga serapan terhadap pekerjaan informal relatif tinggi. Sedangkan di Kabupaten Tabalong dan Kalimantan Selatan menghadapi peningkatan angkatan kerja dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja formal dapat menaikkan nilai TPT.
- Variasi keterampilan tenaga kerja memengaruhi seberapa cepat pencari kerja terserap ke pekerjaan produktif. Skala populasi tenaga kerja di Kabupaten Balangan lebih kecil. Jumlah penduduk usia kerja tidak sebesar di daerah urban sehingga persentase pengangguran relatif rendah kalau sebagian besar terserap dalam sektor primer. Sedangkan Pemerintah Provinsi yang memiliki pelatihan formal lebih banyak tidak serta-merta mengatasi *mismatch skill* jika peluang ekonomi tidak merata.

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.50 sampai dengan tabel 3.53 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu :**

- Peningkatan kompetensi SDM dengan penyelenggaraan pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi, dan sertifikasi kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, sehingga mengurangi ketidaksesuaian antara pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Program Beasiswa Seribu Sarjana, pelatihan kerja berbasis kompetensi dan vokasi.
- Pemerintah daerah memperkuat fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui penyediaan informasi pasar kerja, pelaksanaan job fair, dan kerja sama dengan pelaku usaha. Upaya ini mempercepat pertemuan antara pencari kerja dan pemberi kerja serta menurunkan waktu tunggu kerja. Dukungan terhadap pengembangan UMKM dan kewirausahaan juga menjadi strategi penting untuk menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi angkatan kerja muda dan masyarakat produktif. Program perluasan kesempatan kerja dan program BPJS ketenagakerjaan untuk 100% UCJ (*Universal Coverage Jamsostek*).

- Upaya lainnya mencakup penarikan investasi di sektor-sektor padat karya, penguatan sinergi lintas perangkat daerah, serta kolaborasi dengan program pemerintah provinsi dan pusat. Pemerintah Kabupaten Balangan juga melakukan monitoring dan evaluasi kinerja ketenagakerjaan secara berkala untuk memastikan efektivitas program dan melakukan penyesuaian kebijakan. Melalui pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan ini, diharapkan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan dapat ditekan sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Program pengembangan ekonomi dan sumber daya alam, program pembinaan pelatihan magang tenaga kerja.

2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator 1 : Tingkat Pengangguran Terbuka)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Menurunnya Pengangguran Daerah dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Adapun gambaran umum keterkaitan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
5.	Menurunnya Pengangguran Daerah	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program ini berperan strategis dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Program ini berperan strategis dalam memastikan tenaga kerja lokal terserap secara optimal pada berbagai sektor ekonomi.
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program ini berperan strategis dalam mengurangi ketidaksesuaian (mismatch) antara penawaran dan permintaan tenaga kerja serta mendukung penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Balangan.
		Program Hubungan Industrial	Program ini berperan strategis dalam mendukung penyerapan tenaga kerja serta menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Balangan.
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu:

- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2025 merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas SDM dan menurunkan pengangguran. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan pasar, kolaborasi dunia usaha, dan penguatan produktivitas, program ini berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Program dinilai efektif karena bersifat aplikatif dan berbasis kebutuhan pasar, sehingga hasil pelatihan lebih mudah terserap oleh dunia kerja. Sinergi dengan program penempatan tenaga kerja dan pengembangan UMKM memperkuat dampak program terhadap penurunan pengangguran.
- Program Penempatan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2025 berperan penting dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka melalui peningkatan akses informasi, fasilitasi penempatan, dan kerja sama dengan dunia usaha. Pendekatan yang terintegrasi dengan pelatihan kerja dan pengembangan ekonomi daerah menjadikan program ini efektif dalam mendukung pencapaian target ketenagakerjaan Kabupaten Balangan. Program ini dinilai efektif karena berfokus pada efisiensi penempatan dan akses informasi, sehingga mempercepat proses rekrutmen dan meningkatkan peluang kerja bagi tenaga kerja lokal. Sinergi dengan program pelatihan kerja meningkatkan kecocokan kompetensi dan kebutuhan pasar kerja.
- Program Perencanaan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2025 merupakan program kunci dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka secara berkelanjutan. Melalui perencanaan berbasis data, pemetaan kompetensi, dan sinkronisasi lintas sektor, program ini mendukung kebijakan ketenagakerjaan yang

tepat sasaran dan efektif. Program ini dinilai efektif karena menjadi fondasi kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis data dan kebutuhan riil pasar kerja. Dengan perencanaan yang tepat, intervensi pemerintah lebih terarah dan efisien, serta memberikan dampak yang berkelanjutan.

- Program Hubungan Industrial Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2025 berperan penting dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif dan produktif, menurunkan konflik industrial, serta mendukung penyerapan tenaga kerja. Dengan pendekatan mediasi, sosialisasi peraturan, dan penguatan lembaga tripartit, program ini mendukung pencapaian target ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini efektif karena meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan tenaga kerja, serta mendorong pengusaha dan pekerja berkolaborasi untuk produktivitas yang lebih tinggi. Sinergi dengan program pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, dan investasi daerah memperkuat dampak positif terhadap pasar kerja lokal.

Dari keempat program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

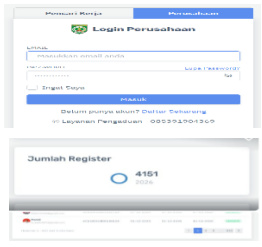
Tabel 3.54
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Menurunnya Pengangguran Daerah	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja*	Pengembangan kebijakan ketenagakerjaan, survei, dan intervensi pasar kerja	Pelatihan dan penyediaan informasi pasar kerja, pelaksanaan job fair serta pemberian bantuan modal usaha sebesar 5 juta oleh CSR Adaro kepada UMKM dan bantuan alat usaha.
		Dinas Sosial*	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Sosial	Pemberian bantuan sosial untuk keluarga miskin, penyandang disabilitas, gelandangan, dan masyarakat rentan, program rehabilitasi sosial, serta pelatihan keterampilan dasar untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata*	Pengembangan Lapangan Kerja di Sektor Pariwisata	Pengembangan destinasi wisata, event, dan fasilitas pendukung pariwisata yang membuka peluang kerja di bidang jasa, kuliner, akomodasi, dan transportasi wisata.
		Bapperida	Perencanaan dan Sinergi Kebijakan	Integrasi antar dokumen RPJMD, RKPD dan Renstra terkait target penyerapan tenaga kerja ke strategi pembangunan daerah.
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SDM dan Kewirausahaan Muda	Pendidikan vokasi, muatan kewirausahaan di sekolah dan pelatihan keterampilan produktif.

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau

komprehensif antar SKPD maka Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel money crosscutting SKPD:

Tabel 3.55
Money Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Money Offline	Money Online	Keterangan
1.	Menurunnya Pengangguran Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Rapat koordinasi penentuan target Tingkat Pengangguran Terbuka di Ruang Rapat Bapperida	1. Penggunaan Aplikasi SMART Kerja Balangan yang digunakan pencari kerja. Link Aplikasi (http://smartkerjabalangan.com/) 2. Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan money triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka	 

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator 1 : Tingkat Pengangguran Terbuka)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

- Pemanfaatan SDM difokuskan pada koordinasi lintas SKPD: Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Bapperida, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Satpol PP.
- SDM digunakan secara terintegrasi untuk pelatihan kerja, penempatan, perencanaan tenaga kerja, hubungan industrial, pengembangan UMKM, dan promosi investasi.
- Efisiensi dicapai karena satu petugas SDM dapat menangani beberapa program terkait TPT melalui sistem informasi ketenagakerjaan terpadu dan forum koordinasi lintas sektor.

b. Efisiensi Anggaran

- Anggaran dialokasikan untuk kegiatan utama yang memiliki dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja, seperti pelatihan, penempatan, pengembangan UMKM, dan investasi padat karya. Pagu anggaran sebesar Rp. 1.103.758.700, dengan realisasi sebesar Rp. 1.016.454.264 (92,09 %)
- Pemanfaatan sinergi program: misal, pelatihan kerja sekaligus diarahkan untuk kebutuhan UMKM dan investasi padat karya.
- Penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk monitoring peserta dan penempatan kerja, sehingga mengurangi biaya administrasi manual.

c. Efisiensi Waktu

- Program-program yang saling terkait dijadwalkan secara paralel dan terkoordinasi, sehingga:
 - Pelatihan peserta bisa langsung diarahkan ke penempatan kerja.
 - Monitoring dan evaluasi lintas SKPD dilakukan secara berkala dengan sistem informasi terpadu, mengurangi penundaan pelaporan.
- Efisiensi waktu dicapai karena setiap program saling mendukung, mengurangi duplikasi kegiatan, dan mempercepat realisasi penyerapan tenaga kerja.

B.5 Sasaran Strategis 5 Menurunnya Pengangguran Daerah (Indikator 2 : Rasio Kewirausahaan)

Tabel 3.56
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator 2 : Rasio Kewirausahaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
5.	Menurunnya Pengangguran Daerah	Rasio Kewirausahaan	2,40	1,74	72,50

Target Rasio Kewirausahaan tahun 2025 adalah 2,40. Realisasi tahun 2025 adalah 1,74 sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 72,50 persen.

Tabel 3.57
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator 2 : Rasio Kewirausahaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.	Menurunnya Pengangguran Daerah	Rasio Kewirausahaan	2,40	1,74	2,38	-	-

Target Rasio Kewirausahaan tahun 2025 adalah 2,40. Realisasi tahun 2025 adalah 1,74 Realisasi Tahun 2024 adalah 2,38. Realisasi tahun 2023 dan tahun 2022 tidak ada karena belum menjadi indikator kinerja Kabupaten Balangan.

Tabel 3.58
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator 2 : Rasio Kewirausahaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
5.	Menurunnya Pengangguran Daerah	Rasio Kewirausahaan	2,80	1,74	62,14

Target Akhir RPJMD untuk Rasio Kewirausahaan adalah 2,80 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 1,74 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 62,14 persen.

Tabel 3.59
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator 2 : Rasio Kewirausahaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
5.	Menurunnya Pengangguran Daerah	Rasio Kewirausahaan	1,74	-	3,40	3,02	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Rasio Kewirausahaan Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 1,74 realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 3,40, realisasi Nasional 3,02. Realisasi Kabupaten Tabalong tidak bisa dibandingkan karena berbeda indikator kinerja, sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.56, tabel 3.57, tabel 3.58, dan tabel 3.59 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator 2 : Rasio Kewirausahaan)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.56 adalah target Rasio Kewirausahaan tahun 2025 yaitu 2,40. Realisasi tahun 2025 adalah 1,74 sehingga capaian yang diperoleh sebesar 72,50 persen. Rasio Kewirausahaan sebesar 1,74 pada tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan, dan memperoleh capaian kinerja cukup rendah hanya 72,50 persen. Hal ini disebabkan oleh perubahan rumus perhitungan Rasio Kewirausahaan. Rumus Perhitungan Rasio Kewirausahaan sebelumnya yaitu Jumlah Wirausaha dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja x

100%, sedangkan rumus seharusnya untuk perhitungan Rasio Kewirausahaan yaitu Jumlah Berusaha Dibantu Buruh Tetap dibagi Jumlah Angkatan Kerja x 100%, sehingga terjadi kekeliruan dalam menentukan target kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Balangan. Selain kesalahan dalam merumuskan formulasi perhitungan, capaian indikator Rasio Kewirausahaan Tahun 2025 sebesar 1,74% belum mencapai target yang telah ditetapkan karena perhitungan rasio kewirausahaan tidak hanya didasarkan pada jumlah pelaku usaha yang ada, melainkan pada jumlah penduduk yang berusaha dengan dibantu buruh/tenaga kerja tetap dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja.

Meskipun jumlah UMKM di daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagian besar usaha tersebut masih berskala mikro dan dikelola secara mandiri oleh pemilik usaha maupun dibantu anggota keluarga. Dengan demikian, jumlah UMKM yang telah berkembang dan mampu mempekerjakan buruh atau tenaga kerja tetap masih relatif rendah. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan jumlah wirausaha yang memenuhi kriteria perhitungan rasio kewirausahaan tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang ada.

Selain itu, tantangan yang dihadapi pelaku UMKM, seperti keterbatasan modal usaha, kapasitas produksi, akses pasar, serta kemampuan manajerial, turut mempengaruhi kemampuan usaha untuk melakukan ekspansi dan menyerap tenaga kerja tetap. Akibatnya, peningkatan jumlah UMKM belum secara signifikan mendorong kenaikan rasio kewirausahaan sesuai target yang ditetapkan.

Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terfokus pada pengembangan skala usaha, peningkatan daya saing UMKM, serta fasilitasi akses pembiayaan dan pasar agar lebih banyak usaha yang mampu tumbuh dan menciptakan lapangan kerja tetap sehingga dapat meningkatkan rasio kewirausahaan daerah secara berkelanjutan.

Capaian kinerja Rasio Kewirausahaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor kinerja antara lain adalah:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

- **Kompetensi dan Kapasitas SDM Wirausaha**

- Kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal, termasuk kemampuan manajerial, inovasi produk, dan kemampuan pemasaran, menjadi faktor utama dalam mendorong wirausaha baru.
- Pelatihan, mentoring, dan pendampingan dari pemerintah daerah memperkuat kapasitas SDM sehingga usaha dapat tumbuh berkelanjutan. Pelatihan yang dilaksanakan sebagai berikut :
 1. Temu Kemitraan Antara Pelaku UMKM Balangan dengan Ritel Modern
 2. Kewirausahaan, Leadership dan Manajemen Bisnis
 3. Legalitas Usaha dan Manajemen Keuangan Bagi Pelaku UMKM
 4. Peningkatan Legalitas, Kapasitas dan Produktivitas UMKM
 5. Penguatan Kapasitas UMKM Unggulan dan Potensial Ekspor UMKM
 6. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 7. Seminar Kewirausahaan GKN Kabupaten Balangan

- **Akses Modal dan Pembiayaan**

- Ketersediaan modal dari pemerintah, koperasi, dan lembaga keuangan mikro memudahkan masyarakat untuk memulai atau mengembangkan usaha.
- Program bantuan modal, subsidi, atau kredit usaha rakyat (KUR) menjadi salah satu pendorong utama peningkatan jumlah wirausaha. Pemerintah Kabupaten Balangan mengembangkan inovasi pemberian bantuan modal usaha melalui inovasi Sanggam Bakabun dan Sanggam Babungas.
- Kemanfaatan Sanggam Bakabun (Bahutang Kada Babunga) merupakan program inovatif Pemerintah Kabupaten Balangan yang memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM melalui skema kredit tanpa bunga, biaya administrasi, biaya provisi, dan biaya lainnya. Program Sanggam Bakabun pada Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan besaran pinjaman antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,- dan target sasaran Debitur/UMKM sejumlah 50 Unit (nilai pinjaman maksimal). Pada Tahun 2024, Inovasi Sanggam Bakabun telah berhasil disalurkan kepada 114 unit UMKM. Pada tahun 2025 Inovasi Sanggam Bakabun telah berhasil disalurkan kepada 123 unit UMKM.

- Kemanfaatan Sanggam Babungas (Bausaha Bebas Bunga dan Biaya Administrasi) merupakan program inovatif Pemerintah Kabupaten Balangan yang memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM melalui skema kredit tanpa bunga, biaya administrasi, biaya provisi, dan biaya lainnya. Program Sanggam Babungas pada Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp.8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah) dengan besaran pinjaman antara Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- dan target sasaran Debitur/UMKM sejumlah 160 Unit (nilai pinjaman maksimal). Pada Tahun 2024, Inovasi Sanggam Babungas telah berhasil disalurkan kepada 210 unit UMKM. Pada tahun 2025 Inovasi Sanggam Babungas telah berhasil disalurkan kepada 246 unit UMKM.
 - **Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Usaha**
 - Infrastruktur yang memadai (jalan, listrik, internet, fasilitas produksi) mempermudah operasional usaha dan efisiensi distribusi produk.
 - Fasilitas seperti sentra UMKM, inkubator bisnis, dan ruang pemasaran lokal meningkatkan daya saing wirausaha.
 - **Dukungan Kebijakan dan Regulasi Daerah**
 - Kebijakan pemerintah yang mempermudah perizinan usaha, memberikan insentif, serta menyelenggarakan program pemberdayaan wirausaha, meningkatkan minat dan keberhasilan usaha baru yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mengatur tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM; penyelenggaraan inkubasi; dan dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.
 - Keterpaduan program lintas SKPD (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bapperida) menciptakan ekosistem wirausaha yang kondusif.
2. Faktor Eksternal sebagai berikut :
- **Akses Pasar dan Permintaan Produk**
 - Permintaan pasar yang tinggi untuk produk lokal dan UMKM mendorong motivasi masyarakat untuk berwirausaha. Permintaan pasar terhadap produk UMKM menunjukkan tren yang cukup tinggi, baik pada momen tertentu maupun melalui platform digital. Menjelang perayaan hari besar seperti Ramadhan dan Hari Raya, permintaan terhadap produk UMKM, khususnya sektor makanan dan minuman, mengalami peningkatan signifikan karena tingginya kebutuhan konsumsi masyarakat untuk keperluan tradisi dan kegiatan keluarga. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga mendorong peningkatan permintaan, yang ditunjukkan dengan tingginya volume penjualan produk UMKM melalui *platform e-commerce*. Hal ini mencerminkan bahwa produk UMKM semakin diminati dan memiliki peluang pasar yang luas, sehingga menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk memulai dan mengembangkan usaha.
 - Akses pasar yang luas, baik lokal, regional, maupun melalui *platform* digital, meningkatkan peluang keberhasilan usaha.
 - **Dukungan Lembaga Keuangan dan Investasi**
 - Ketersediaan pembiayaan dari bank, koperasi, dan lembaga mikro mempermudah pengembangan usaha. Kerjasama dengan Bank Kalsel dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk pemberian pinjaman modal usaha.
 - Program investasi padat karya dan dukungan modal dari sektor swasta mendorong peningkatan jumlah wirausaha baru.
 - **Infrastruktur dan Fasilitas Publik**
 - Infrastruktur transportasi, logistik, internet, dan energi yang memadai memudahkan distribusi produk dan operasional usaha.

- Fasilitas publik seperti sentra UMKM, pasar tradisional, dan pusat kreatif lokal mendukung promosi dan penjualan produk wirausaha. Di Kabupaten Balangan, dukungan fasilitas publik terhadap promosi dan penjualan produk wirausaha telah difasilitasi melalui berbagai sarana, antara lain sentra oleh-oleh UMKM di wilayah Paringin, Paringin Selatan dan Batumandi, serta gerai yang dikelola oleh Dekranasda Kabupaten Balangan sebagai wadah pemasaran produk kerajinan dan olahan lokal. Selain itu, produk UMKM juga telah dipasarkan melalui jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart yang tersebar di wilayah kabupaten, sehingga memperluas akses pasar dan meningkatkan visibilitas produk lokal. Dukungan ini juga diperkuat dengan keberadaan pasar-pasar tradisional yang tersebar di 8 kecamatan, yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat dan sarana utama bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen.

- **Kebijakan dan Regulasi Nasional**

- Kebijakan nasional terkait kemudahan berusaha, perlindungan UMKM, insentif pajak, dan akses teknologi mempengaruhi peluang wirausaha di tingkat lokal.
- Sinkronisasi kebijakan nasional dengan program daerah meningkatkan efektivitas intervensi Pemerintah Kabupaten. Koperasi Merah Putih berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha mikro dan kecil dengan akses permodalan, bahan baku, pemasaran, hingga kemitraan dengan sektor swasta maupun BUMN. Dengan adanya sinkronisasi antara kebijakan nasional ini dan program daerah (seperti pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi pemasaran UMKM), Pemerintah Kabupaten dapat memperkuat ekosistem usaha secara terintegrasi. Artinya, UMKM tidak hanya dibina secara individu, tetapi juga diperkuat melalui kelembagaan koperasi sehingga lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.57 adalah target Rasio Kewirausahaan tahun 2025 adalah 2,40. Realisasi tahun 2025 adalah 1,74 Realisasi tahun 2024 adalah 2,38. Realisasi tahun 2023 dan tahun 2022 tidak ada karena belum menjadi indikator kinerja Kabupaten Balangan. Berdasarkan data ini yang bisa dibandingkan realisasi kinerja per tahunnya hanya Rasio Kewirausahaan tahun 2024 yaitu 2,38. Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 1,74 tahun 2025 ini mengalami penurunan sebesar 0,64 poin. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2025 terkait Rasio Kewirausahaan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi mencakup:

- **Pembinaan dan fasilitasi UMKM dan wirausaha lokal;**
Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan kebijakan yang memperkuat UMKM dan kewirausahaan sebagai tulang punggung penciptaan lapangan kerja dan penggerak ekonomi lokal. Kebijakan ini mencakup fasilitasi pembentukan usaha baru, penyediaan akses modal usaha, inkubasi bisnis, dan pendampingan usaha mikro hingga kecil terutama bagi pemuda, perempuan, dan kelompok rentan.
- **Akses pembiayaan yang lebih luas;**
Pemerintah Kabupaten Balangan mendorong kemitraan dengan lembaga keuangan, koperasi, dan program kredit usaha rakyat (KUR) untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi calon dan pelaku usaha. Termasuk di dalamnya insentif untuk investasi wirausaha dengan skema bunga terjangkau atau dana bergulir.
- **Pengembangan kapasitas SDM kewirausahaan;**
Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan kebijakan pelatihan keterampilan kewirausahaan, manajemen usaha, pemasaran digital, dan inovasi produk bekerja sama dengan perguruan tinggi, LKP, dan pelatih profesional.
- **Peningkatan akses pasar;**
Kebijakan ini memberi dukungan kepada pelaku wirausaha untuk menembus pasar lebih luas melalui:
 - Promosi produk lokal pada event, festival, dan pameran.
 - Fasilitasi akses ke platform pemasaran digital (marketplace).
 - Kolaborasi dengan sektor pariwisata untuk memasarkan produk lokal.

- Kemudahan berusaha;
Pemerintah Kabupaten Balangan menyederhanakan perizinan usaha mikro. Kemudahan akses perizinan usaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) yang semakin dipahami oleh pelaku usaha, sehingga menurunkan hambatan administratif bagi masyarakat untuk berwirausaha secara formal.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.58 adalah target akhir RPJMD untuk Rasio Kewirausahaan adalah 2,80 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 1,74 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 62,14 persen. Berdasarkan data tabel di atas untuk menuju kepada pencapaian target akhir RPJMD tahun 2030 yakni 2,80 diperlukan 1,06 poin, maka Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas. Karena saat ini Rasio Kewirausahaan hanya berada di 1,74 itu artinya harus melakukan gerakan percepatan setiap tahunnya. Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi Rasio Kewirausahaan ini adalah :

- Persiapan dan Pembentukan Ekosistem Wirausaha dengan fokus kegiatan pendataan potensi wirausaha lokal dan identifikasi segmen UMKM, pembentukan pusat inkubasi bisnis dan sentra UMKM di beberapa kecamatan, penguatan regulasi dan kebijakan kemudahan berusaha di tingkat kabupaten dan sosialisasi program pembiayaan dan pelatihan kewirausahaan.
- Implementasi Program dan Perluasan Cakupan dengan fokus kegiatan pelaksanaan program pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha secara massif, penyaluran bantuan modal usaha, kredit bergulir, dan kemitraan dengan lembaga keuangan, peningkatan akses pasar, baik melalui pameran, festival UMKM, maupun digital marketplace, dan pendampingan wirausaha melalui mentor profesional dan monitoring keberhasilan usaha.
- Pelaku UMKM di Kabupaten Balangan terus melakukan inovasi untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas usaha, antara lain melalui penggunaan peralatan produksi yang lebih modern seperti mesin pengolah, alat pengemas, dan freezer guna meningkatkan kualitas serta efisiensi produksi. Selain itu, UMKM juga memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran melalui media sosial dan marketplace sehingga jangkauan pasar menjadi lebih luas. Kemitraan dengan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart turut membuka akses distribusi yang lebih profesional, sementara penerapan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan transfer perbankan memberikan kemudahan transaksi serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Inovasi tersebut menunjukkan transformasi UMKM Balangan menuju usaha yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.59 adalah menjelaskan bahwa realisasi Rasio Kewirausahaan Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 1,74 realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 3,40, realisasi Nasional 3,02. Realisasi Kabupaten Barito Kuala tidak bisa dibandingkan karena berbeda indikator kinerja sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Realisasi Rasio Kewirausahaan Kabupaten Balangan tahun 2025 sebesar 1,74 jika dibandingkan dengan realisasi Propinsi Kalimantan Selatan 3,40 selisih sebesar 1,66 poin Kabupaten Balangan berada di bawah realisasi Provinsi Kalimantan Selatan, jika dibandingkan dengan realisasi Nasional selisih sebesar 1,28 poin Kabupaten Balangan berada di bawah realisasi Nasional.

Faktor dominan yang mempengaruhi Rasio Kewirausahaan Pemerintah Kabupaten Balangan adalah

- Data UMKM dan Basis Statistik. Kepemilikan data UMKM yang akurasi tinggi menjadi prasyarat penting untuk menghitung rasio kewirausahaan. Pengumpulan data yang masih dalam proses seperti di Balangan dapat menyebabkan indikator ini tidak terukur secara tepat.
- Kebijakan dan Program Pemerintah. Program pelatihan dan bantuan modal (contoh: *Wiramuda* Provinsi Kalsel) membantu pemuda wirausaha mengembangkan usaha mereka berkontribusi pada rasio kewirausahaan terutama di kelompok pemuda. Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan program pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan melalui pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi perizinan, serta bantuan peralatan produksi, sehingga mendorong masyarakat usia kerja untuk memulai dan mengembangkan usaha.

- Kondisi Ekonomi Makro. Pertumbuhan ekonomi yang stabil mendorong keberlangsungan usaha dan penciptaan peluang wirausaha. Selain itu, kemudahan akses perizinan usaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) yang semakin dipahami oleh pelaku usaha, sehingga menurunkan hambatan administratif bagi masyarakat untuk berwirausaha secara formal.
- Infrastruktur dan Akses Permodalan. Akses modal yang mudah serta infrastruktur yang memadai (transportasi, teknologi digital) akan membantu UMKM berkembang dan meningkatkan rasio kewirausahaan. Perkembangan teknologi digital dan pemasaran online, yang membuka peluang usaha baru, khususnya bagi generasi muda dan pelaku usaha mikro, serta memperluas akses pasar tanpa harus memiliki modal besar. Selain itu, dukungan akses pembiayaan dan kemitraan usaha, baik melalui perbankan, lembaga keuangan, maupun program bantuan pemerintah, yang meningkatkan keberanian masyarakat untuk terjun ke dunia usaha.

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.56 sampai dengan tabel 3.59 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Rasio Kewirausahaan adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Rasio Kewirausahaan yaitu :**

- **Pemberdayaan UMKM dan Wirausaha Lokal**

Pemerintah daerah menjalankan program pemberdayaan wirausaha melalui pelatihan, pendampingan usaha, dan inkubasi bisnis. Fokusnya pada pengembangan wirausaha pemula, pemuda, perempuan, dan kelompok masyarakat rentan. Dampaknya meningkatkan kemampuan manajerial, inovasi produk, dan daya saing usaha sehingga lebih banyak wirausaha berhasil dan bertahan. Di Kabupaten Balangan, jumlah UMKM tahun 2025 tercatat sebanyak 11.237 unit yang didominasi oleh usaha mikro. Untuk menentukan tingkat kemandirian usaha, dilakukan pendekatan berdasarkan rasio kewirausahaan sebesar 14,60%. Berdasarkan rasio tersebut, diperkirakan sekitar 1.641 UMKM telah mencapai tingkat kemandirian usaha, yaitu mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan, memiliki pasar, dan mengelola usaha secara mandiri. Sementara itu, sebagian besar UMKM lainnya masih berada pada tahap berkembang dan rintisan, sehingga masih memerlukan pembinaan dan dukungan dari pemerintah daerah.

- **Facilitasi Akses Pembiayaan**

Penyediaan skema bantuan modal, kredit bergulir, dan kemitraan dengan lembaga keuangan mikro. Pemerintah Kabupaten Balangan memberikan dukungan melalui insentif bunga rendah dan kemudahan administrasi. Dampaknya mengurangi kendala modal usaha bagi calon wirausaha dan mempercepat pendirian usaha baru. Pada tahun 2025 Inovasi Sanggam Bakabun dan Babungas telah berhasil menyalurkan pembiayaan usaha kepada 369 unit UMKM.

- **Peningkatan Kapasitas SDM Wirausaha**

Program pelatihan keterampilan kewirausahaan, manajemen usaha, pemasaran digital, dan inovasi produk. Kerjasama dengan perguruan tinggi, LKP, dan mentor profesional meningkatkan kompetensi wirausaha lokal. Dampaknya SDM lebih siap menjalankan usaha secara efektif, meningkatkan peluang keberhasilan usaha baru. PT. Adaro bersama Alam Tri Geo dan Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar ADARO SPECTAPRENEUR 2025 Balangan dengan tema “UMKM Berinovasi, Berkolaborasi dan Berdampak” pada 5 Oktober 2025. Program tahunan ini bertujuan sebagai wadah pengembangan potensi masyarakat Balangan dalam melahirkan ide, inovasi, dan usaha kreatif yang berdampak nyata bagi ekonomi daerah. Program ADARO SPECTAPRENEUR 2025 Balangan menampilkan dua agenda utama, yaitu Lomba Ide dan Inovasi Bisnis serta Bazar UMKM yang akan digelar di akhir kegiatan. Melalui program ini, masyarakat Balangan diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan. Salah satu bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Balangan adalah melalui bantuan permodalan pengembangan usaha dari PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (PT BUMA) kepada 5 UMKM yang bergerak di bidang olahan produk makanan. Bantuan permodalan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas jangkauan pemasaran. Melalui dukungan ini, pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya secara lebih optimal, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kemandirian usaha. Program ini

juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

- **Peningkatan Akses Pasar**

Dukungan pemasaran produk lokal melalui pameran, festival UMKM, digital marketplace, dan integrasi dengan sektor pariwisata. Dampaknya produk wirausaha lebih mudah dijangkau konsumen, meningkatkan pendapatan usaha, dan menumbuhkan wirausaha baru. Produk UMKM di Kabupaten Balangan saat ini telah dipasarkan secara online melalui berbagai platform digital sebagai bagian dari upaya peningkatan akses pasar dan daya saing usaha. Pelaku UMKM memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp Business untuk mempromosikan dan menjual produk secara langsung kepada konsumen. Selain itu, beberapa UMKM juga telah memasarkan produknya melalui marketplace seperti Tokopedia dan Shopee, sehingga memungkinkan produk lokal Balangan menjangkau konsumen yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun nasional.

- **Penyederhanaan Regulasi dan Kemudahan Berusaha**

Pemerintah Kabupaten Balangan menyederhanakan perizinan usaha mikro, memberikan relaksasi biaya administrasi, dan mempercepat pelayanan terpadu. Dampaknya hambatan birokrasi berkurang sehingga lebih banyak usaha baru didirikan dan Rasio Kewirausahaan meningkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mengatur tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM; penyelenggaraan inkubasi; dan dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

- **Sinergi Lintas SKPD**

Integrasi program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bapperida. Dampaknya program berjalan efektif dan efisien, mempercepat tercapainya target Rasio Kewirausahaan. Lebih detail dijelaskan pada crosscutting.

2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator 2 : Rasio Kewirausahaan)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Menurunnya Pengangguran Daerah dengan indikator kinerja Rasio Kewirausahaan. Adapun gambaran umum keterikatan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
5.	Menurunnya Pengangguran Daerah	Program Pemberdayaan UMKM dan Kewirausahaan	Fokus pada pembinaan, mentoring usaha, dan pendampingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah.
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Rasio Kewirausahaan yaitu: Program Pelatihan Kewirausahaan dan Peningkatan Kapasitas SDM, yang berfokus pada pembinaan, mentoring usaha, dan pendampingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, inovasi produk, dan kewirausahaan berbasis UMKM. Dampak dari pelaksanaan program ini untuk meningkatkan kompetensi wirausaha lokal, meminimalisasi risiko kegagalan usaha, serta meningkatkan keberlanjutan usaha baru. Dengan dukungan SDM yang terampil menjadi faktor internal utama keberhasilan Rasio Kewirausahaan.

Dari program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.60
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Menurunnya Pengangguran Daerah	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja*	Kegiatan pelatihan dan mentoring	Pembinaan UMKM dan wirausaha baru, fasilitasi legalitas usaha (NIB, izin usaha mikro), pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, pemasaran dan akses pembiayaan (KUR, koperasi, kemitraan).
		Bapperida	Integrasi perencanaan dan anggaran	Integrasi target rasio kewirausahaan dalam dokumen RPJMD, Renstra dan RKPD, serta sinkronisasi program lintas SKPD.
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SDM dan Kewirausahaan Muda	Pendidikan vokasi, muatan kewirausahaan di sekolah dan pelatihan keterampilan produktif
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Fasilitasi Investasi dan Izin Usaha Wirausaha Baru	Memberikan kemudahan dalam perizinan dan akses investasi

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting SKPD:

Tabel 3.61
Monev Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Monev Offline	Monev Online	Keterangan
1.	Menurunnya Pengangguran Daerah	Rasio Kewirausahaan	1. Rapat koordinasi penentuan target Rasio Kewirausahaan di Ruang Rapat Bapperida	1. Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Rasio Kewirausahaan	 
			2. Asistensi Laporan Kinerja SKPD dengan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Rabu 14 Januari 2026 di Ruang Rapat Bagian Organisasi		
			3. Rapat koordinasi keikutsertaan dalam pameran Kalsel expo		
			4. Rapat koordinasi keikutsertaan produk UMKM pada acara celerangan		

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator 2 : Rasio Kewirausahaan)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target indikator kinerja Rasio Kewirausahaan tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

- Program-program kewirausahaan melibatkan beberapa SKPD, seperti Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Bapperida.
- Crosscutting memungkinkan pembagian tugas yang jelas misal Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja fokus pada pelatihan, dan pendampingan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada perizinan usaha.
 - Temu Kemitraan Antara Pelaku UMKM Balangan dengan Ritel Modern
 - Kewirausahaan, Leadership dan Manajemen Bisnis
 - Legalitas Usaha dan Manajemen Keuangan Bagi Pelaku UMKM
 - Peningkatan Legalitas, Kapasitas dan Produktivitas UMKM
 - Penguatan Kapasitas UMKM Unggulan dan Potensial Ekspor UMKM
 - Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - Seminar Kewirausahaan Gkn Kabupaten Balangan
- Efisiensi tercapai karena SDM diarahkan sesuai keahlian masing-masing, mengurangi tumpang tindih pekerjaan dan memastikan intervensi lebih tepat sasaran.

b. Efisiensi Anggaran

- Pendanaan untuk pelatihan, pendampingan, akses pembiayaan, promosi produk, dan perizinan disinergikan antar SKPD, sehingga satu anggaran dapat mendukung beberapa output sekaligus. Misalnya, pelatihan wirausaha sekaligus dapat digunakan sebagai kegiatan promosi produk lokal, meminimalkan biaya tambahan. Pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.617.379.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.616.280.300,-
- Efisiensi anggaran juga dicapai melalui pemanfaatan platform digital untuk pelatihan online, pendaftaran UMKM, dan pemasaran produk, sehingga biaya operasional dapat ditekan.

c. Efisiensi Waktu

- Crosscutting mempercepat alur kegiatan: pelatihan → pembiayaan → pendampingan → pemasaran → evaluasi, sehingga wirausaha dapat segera produktif.
- Proses perizinan usaha menjadi lebih cepat dengan adanya Mall Pelayanan Publik.
- Monitoring dan evaluasi secara terpadu memungkinkan penyesuaian program secara real-time, sehingga waktu implementasi lebih efektif.

B.6 Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Kemajuan Perekonomian dan Kemandirian Desa (Indikator Indeks Desa)

Tabel 3.62
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator Indeks Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
6.	Meningkatnya Kemajuan Perekonomian dan Kemandirian Desa	Indeks Desa	69,35	80,08	115,47

Target Indeks Desa tahun 2025 adalah 69,35. Realisasi tahun 2025 adalah 80,08, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 115,47 persen.

Tabel 3.63
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator Indeks Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
6.	Meningkatnya Kemajuan Perekonomian dan Kemandirian Desa	Indeks Desa	69,35	80,08	-	-	-

Target Indeks Desa tahun 2025 adalah 69,35. Realisasi tahun 2025 adalah 80,08, sedangkan realisasi tahun 2024, tahun 2023 dan 2022 belum menjadi indikator kinerja di sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Balangan.

Tabel 3.64
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator Indeks Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
6.	Meningkatnya Kemajuan Perekonomian dan Kemandirian Desa	Indeks Desa	79,76	80,08	101,28

Target Akhir RPJMD untuk Indeks Desa adalah 79,76 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 80,08 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 101,28 persen.

Tabel 3.65
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator Indeks Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
6.	Meningkatnya Kemajuan Perekonomian dan Kemandirian Desa	Indeks Desa	80,08	83,28	79,18	23,29	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Indeks Desa Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 80,08, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 83,28, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 79,18, realisasi Nasional 23,29. Sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.62, tabel 3.63, tabel 3.64, dan tabel 3.65 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator Indeks Desa)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.62 adalah target Indeks Desa tahun 2025 yaitu 69,35. Realisasi tahun 2025 adalah 80,08, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 115,47 persen. Indeks Desa sebesar 80,08 pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 115,47 persen dipengaruhi oleh berbagai faktor pendongkrak kinerja antara lain adalah:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

• Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Desa

Keberhasilan pengelolaan desa sangat bergantung pada SDM aparatur desa, baik kepala desa, perangkat desa, maupun tenaga teknis. Kemampuan SDM aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa serta meningkatkan efektivitas kegiatan dan pencapaian indikator Indeks Desa. karena diantara enam dimensi sebagai indikator penilaian pada Indeks Desa tersebut ada dua dimensi yang sangat berhubungan erat dengan kapasitas dan kompetensi Aparatur Desa, yakni Layanan Dasar (salah satunya layanan terhadap Kesehatan, tersedianya mobil ambulan di setiap desa), dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Semakin baik kapasitas dan kompetensi Aparatur Desa maka

semakin baik pula layanan dasar, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. SOP Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia nomor 554/PDP.03.04/III/2025 tentang Pentahapan Dalam Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025, disana termuat skor total untuk Layanan Dasar adalah 170, dan realisasi pencapaian skor Layanan Dasar di Setiap Desa di Kabupaten Balangan sangat baik, tercatat skor rata-rata 148, dengan skor terendah yang di dapat 116 yakni Desa Guha Kecamatan Batumandi, dan skor yang tertinggi 168 yakni Desa Suryatama Kecamatan Halong. Untuk Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam SOP skor totalnya 80, dan realisasi pencapaian skor Tata Kelola Pemerintahan Desa di kabupaten Balangan rata-rata skor 64.

- **Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Desa**

Efisiensi penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan sumber pendapatan desa lainnya mempengaruhi kualitas pembangunan dan pelayanan. Desa yang mampu merencanakan prioritas pembangunan secara tepat dan transparan menunjukkan pencapaian Indeks Desa lebih tinggi. Terkait hal ini, Desa mampu memiliki fasilitas-fasilitas yang mendorong kemajuan desa, yang pada akhirnya mampu mendongkrak angka Indeks Desa. Contoh fasilitas tempat sampah di setiap rumah dan mobil angkutan sampah satu desa satu mobil angkutan sampah sangat mendongkrak skor dimensi Lingkungan Hidup. Tersedianya mobil ambulan di setiap desa memberikan pengaruh positif terhadap Dimensi Aksesibilitas. Dan fasilitas-fasilitas lain untuk kemajuan desa. Dalam SOP terkait Dimensi Lingkungan Hidup skor totalnya adalah 90, dan realisasi yang didapat oleh desa di Kabupaten Balangan rata-rata mencapai skor 65. Sementara Dimensi Aksesibilitas dalam SOP tercatat skor total 50, dan realisasi yang dicapai desa di Kabupaten Balangan rata-rata mencapai skor 46.

- **Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat**

Tingkat partisipasi warga dalam musyawarah desa, pengawasan, dan pelaksanaan program memengaruhi keberhasilan pembangunan. Desa dengan dukungan masyarakat yang aktif mampu mengoptimalkan program pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan mempercepat pencapaian indikator Indeks Desa. Dalam Indeks Desa hal ini termuat dalam Dimensi Sosial. Dalam SOP skor total Dimensi Sosial adalah 85, dan realisasi di dimensi ini mencapai rata-rata 69. Dengan keterlibatan masyarakat secara di setiap jenjang program kegiatan, juga mempengaruhi angka Indeks Desa. Hal ini terkait juga dengan Dimensi Tata Kelola Pemerintahan.

- **Manajemen Program dan Kegiatan Desa**

Desa yang menerapkan manajemen kegiatan yang terstruktur, monitoring internal, dan evaluasi rutin menunjukkan kinerja pembangunan yang lebih baik. Koordinasi internal antar perangkat desa serta dengan lembaga kemasyarakatan seperti BPD, LPM, PKK, dan Karang Taruna memperkuat implementasi program. Adanya Program aktif Posyandu, program PKK, Program BUMDesa dan BUMDesma juga mendorong naiknya skor Indeks Desa. Hal ini terkait dengan Dimensi Layanan Dasar, juga Dimensi Ekonomi. Pada Dimensi Ekonomi di Desa yang ada di Kabupaten Balangan menyumbang skor rata-rata 116, dan SOP Dimensi Ekonomi skor totalnya 160.

2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- **Dukungan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi**

Kebijakan daerah, pendampingan teknis, dan supervisi dari Pemkab Balangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan arahan yang jelas untuk pembangunan desa. Ketersediaan regulasi, pedoman pembangunan desa, dan alokasi anggaran tambahan mendukung desa mencapai indikator Indeks Desa. Secara terstruktur dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi menindaklanjuti Amanah dari Pemerintah Pusat agar pemerintah pusat dan daerah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan desa secara terarah dan terukur. Hal tersebut termuat dalam :

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
2. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa,

3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No.52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No. 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

- **Ketersediaan Infrastruktur dan Aksesibilitas**

Akses jalan, jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, dan transportasi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program desa di Kabupaten Balangan. Desa dengan infrastruktur memadai lebih mudah melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik, sehingga meningkatkan nilai Indeks Desa. Di Kabupaten Balangan, infrastruktur jalan-jalan di desa semakin banyak di bangun, pembangunan Gedung posyandu. Untuk memudahkan aksesibilitas kebersihan lingkungan hidup disediakan mobil angkutan sampah satu desa satu mobil angkutan sampah, untuk layanan Kesehatan disediakan mobil ambulan disetiap desa, untuk kelancaran urusan aparatur desa disediakan mobil dan kendaraan roda dua untuk kepala desa, kendaraan roda dua untuk BPD, Ketua RT, dan Linmas.

- **Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat**

Tingkat pendidikan, pendapatan, dan mobilitas masyarakat di Kabupaten Balangan memengaruhi partisipasi warga dalam pembangunan desa. Desa dengan masyarakat yang aktif, terdidik, dan memiliki kapasitas ekonomi cukup cenderung lebih cepat mencapai indikator Indeks Desa. Untuk melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Balangan ini bisa kita lihat datanya dari Indeks Desa Tahun 2026 pada Dimensi Sosial dan Dimensi Ekonomi. Dalam SOP skor total Dimensi Sosial adalah 85, dan realisasi di deminsi ini mencapai rata-rata 69. Selanjutnya pada Dimensi Ekonomi, kondisi di Kabupaten Balangan menyumbang skor rata-rata 116 dari SOP Dimensi Ekonomi skor totalnya 160

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.63 adalah target Indeks Desa tahun 2025 adalah 69,35. Realisasi tahun 2025 adalah 80,08. Tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2024, 2023 dan 2022 karena berbeda indikator penilaian kinerjanya dengan tahun 2025 yaitu Indeks Desa Membangun. Tercapainya target kinerja tahun 2025 ini disebabkan oleh komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan seluruh SKPD dan *stake holder* yang terlibat. Kebijakan terkait Indeks Desa di Kabupaten Balangan berkembang secara progresif hingga lahirnya inisiatif Perbup tahun 2025, yang mempermudah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan. Perbup ini memperkuat landasan hukum, koordinasi lintas SKPD, dan akuntabilitas program, sehingga mendukung pencapaian Indeks Desa yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Tahapan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan mengeluarkan pedoman teknis, arahan strategis, dan sosialisasi indikator Indeks Desa ke seluruh desa. Kegiatan ini dipermudah dengan dukungan anggaran, pembinaan SDM desa, dan pendampingan teknis dari SKPD terkait.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.64 adalah target akhir RPJMD untuk Indeks Desa adalah 79,76 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 80,08 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 100,40 persen. Berdasarkan data tabel di atas untuk pencapaian target akhir RPJMD tahun 2030 yakni 79,76 telah tercapai sesuai target, maka Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas agar pencapaian kinerja Indeks Desa ini tidak mengalami penurunan di tahun berikutnya. Karena saat ini Indeks Desa sudah berada di 80,08 melebihi target akhir renstra. Adapun *milestone* yang disusun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi realisasi Indeks Desa ini agar tidak menurun ditahun berikutnya adalah keberlanjutan program, bukan sekadar realisasi anggaran, data desa valid dan diperbarui, ekonomi desa hidup (BUMDes dan UMKM), lingkungan dan sosial dijaga bersamaan serta monitoring aktif dan intervensi cepat.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.65 adalah menjelaskan bahwa realisasi Indeks Desa Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 80,08, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 83,28, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 79,18, realisasi Nasional 23,29. Sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data. Realisasi Indeks Desa Kabupaten Balangan tahun 2025 sebesar 80,08 jika dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Tabalong Kabupaten Balangan berada di bawah dengan selisih poin sebesar 3,20 poin, dibandingkan dengan

realisasi Propinsi Kalimantan Selatan dengan selisih sebesar 0,90 poin Kabupaten Balangan berada di atas. Sedangkan dengan realisasi Nasional 56,79 poin Indeks Desa Kabupaten Balangan berada di atas realisasi Nasional.

Faktor dominan yang mempengaruhi Indeks Desa Pemerintah Kabupaten Balangan adalah :

- **Ketahanan Sosial.** Pendidikan dasar, kesehatan, dan modal sosial relatif stabil di Kabupaten Balangan dan jarang menjadi penyebab penurunan IDM. Berfungsi sebagai penjaga stabilitas, bukan pendorong kenaikan. Melibatkan masyarakat secara aktif, fasilitas dan pelayanan Pendidikan Dasar rata-rata dari rumah peserta didik ke sekolah tidak terlalu jauh (dibawah dari 1 KM), Layanan kesehatan dengan tersedianya layanan bidan desa, aktifnya program posyandu, tersedianya angkutan Kesehatan (mobil ambulan).
- **Ketahanan Lingkungan.** Pengelolaan sampah desa harus optimal, sanitasi dan air bersih harus merata dan mitigasi bencana desa harus kuat karena ketahanan lingkungan sering menjadi pemicu turunnya IDM, bukan karena ekonomi turun, tetapi karena TPS3R tidak berjalan, sanitasi stagnan dan desa rawan bencana tanpa mitigasi. Untuk menjaga kebersihan lingkungan, tersedia satu desa satu mobil angkutan sampah, tersedianya tempat pembuangan sampah di masing-masih dekat rumah warga. Pembuatan saluran-saluran air di perkampungan.
- **Tata Kelola dan Data Desa.** Update data IDM dan SDGs Desa harus rutin, perencanaan desa sudah sepenuhnya berbasis indikator IDM dan kapasitas aparatur desa merata. Apabila ini tidak dilakukan akan menyebabkan banyak desa secara faktual tidak menurun, tetapi secara skor IDM bisa turun karena data tidak terbaru. Terbentuknya dan aktifnya kelembagaan-kelembagaan desa, pelaksanaan musyawarah desa, Pengelolaan data dan aset desa yang cukup baik.

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.62 sampai dengan tabel 3.65 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks Desa adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks Desa yaitu :**

- **Peningkatan Kapasitas SDM Desa** melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan aparatur desa, Pemkab. Balangan meningkatkan kemampuan perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program pembangunan. Selain itu kegiatan difokus pada kepemimpinan desa, manajemen administrasi, dan pelayanan publik untuk memastikan program berjalan efektif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Terkait Peningkatan Kapasitas SDM Desa ini dilakukan pembinaan melalui Bimtek/Pelatihan, sosialisasi, dan juga pendampingan secara langsung.
- **Optimalisasi Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Desa** Pemerintah Kabupaten Balangan mendorong desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang selaras dengan prioritas pembangunan kabupaten, termasuk target Indeks Desa yang dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Balangan. Pemanfaatan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan pendapatan desa lainnya diarahkan secara efisien untuk kegiatan yang berdampak langsung pada indikator Indeks Desa.
- **Pendampingan Teknis dan Monitoring Lintas SKPD** terkait, seperti Bapperida, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas PUPRPERKIM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan, melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan pembangunan desa. Pendekatan crosscutting ini memastikan sinergi program lintas sektor, menghindari duplikasi, dan mempercepat pencapaian indikator Indeks Desa. Pendampingan ini berfungsi sebagai transfer pengetahuan, sdesa tidak lagi hanya menjadi objek Pembangunan, tetapi subjek yang kompeten. Pendampingan dari Dinas PPPAPKBPMD yang dibarengi dengan asistensi teknis sektoral meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih teknokratis dan akuntabel.
- **Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Publik** Pemerintah Kabupaten Balangan menyalurkan program pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan, irigasi, listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan/pendidikan, untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa. Infrastruktur yang memadai mendukung percepatan pencapaian indikator Indeks Desa yang terkait akses layanan dan kualitas lingkungan. Dalam Indeks Desa, jarak

tempuh dan waktu tempuh ke fasilitas pelayanan dasar adalah parameter utama. Dengan mendekatkan fasilitas ini, Kabupaten Balangan secara otomatis meningkatkan skor Dimensi Ketahanan Sosial. Hal ini juga memastikan bahwa warga desa memiliki kesempatan yang sama dengan warga perkotaan dalam mengakses hak dasar. Pembangunan yang masif tanpa skema pemeliharaan yang jelas hanya akan meningkatkan skor Indeks Desa secara sementara.

- **Pembinaan Partisipasi Masyarakat** Pemerintah Kabupaten Balangan mendorong masyarakat desa untuk aktif dalam musyawarah, pengawasan, dan implementasi program pembangunan, sehingga program lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, partisipasi masyarakat juga meningkatkan keberlanjutan program dan kualitas pencapaian Indeks Desa. Partisipasi aktif dalam Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) memastikan bahwa usulan pembangunan lahir dari masalah nyata, bukan sekadar keinginan elite politik. Pengawasan masyarakat menjamin kualitas fisik bangunan (misalnya jalan atau irigasi) sesuai standar. Hal ini berdampak pada efisiensi anggaran, di mana dana yang ada benar-benar terkonversi menjadi aset desa yang tahan lama, sehingga Indeks Desa tidak turun di tahun-tahun berikutnya akibat kerusakan infrastruktur yang prematur. Masyarakat yang merasa dilibatkan akan sukarela menjaga dan memelihara fasilitas publik (seperti sanitasi atau posyandu). Dalam analisis Indeks Desa, aspek pemeliharaan ini krusial untuk menjaga skor Dimensi Ketahanan Lingkungan tetap stabil dan tidak fluktuatif.
- **Inovasi** untuk meningkatkan status desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu melalui inovasi KAI BULANG dan SIPEDAS. Manfaat inovasi KAI BULANG adalah memberikan informasi yang bisa di akses masyarakat ataupun Pemerinta Desa mengenai apa itu BUMDesa, dasar hukum pembentukan BUMDesa dan bagaimana tata kelola BUMDesa yang baik, serta sebagai wadah informasi bagi Pemerintah Desa dan pengurus BUMDesa mengenai dokumen apa saja yang diperlukan untuk melakukan ekspose atau asistensi kelayakan usaha sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan dokumen untuk asistensi tersebut. Sedangkan inovasi SIPEDAS memberikan manfaat dalam pengajuan data desa menjadi lebih efisiensi, transparan dan akuntabel karena desa dapat mengetahui perkembangan pengajuan secara real time. Inovasi KAI BULANG bermanfaat memberikan informasi yang bisa di akses Masyarakat ataupun Pemerintah Desa mengenai apa itu BUMDesa, dasar hukum pembentukan BUMDesa dan bagaimana tata kelola BUMDesa yang baik, serta sebagai wadah informasi bagi Pemerintah Desa dan pengurus BUMDesa mengenai dokumen apa saja yang diperlukan untuk melakukan ekspose atau asistensi kelayakan usaha sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan dokumen untuk asistensi tersebut. Dan dengan adanya aplikasi SIPEDAS ini, pengajuan menjadi lebih efisiensi, transparan dan akuntabel karena desa dpat mengetahui perkembangan pengajuan secara real time.

2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator Indeks Desa)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kemajuan Perekonomian dan Kemandirian Desa dengan indikator kinerja Indeks Desa. Adapun gambaran umum keterikatan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
6.	Meningkatnya Kemajuan Perekonomian dan Kemandirian Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program ini mendorong untuk meningkatkan kedisiplinan, transparansi, dan akuntabilitas administrasi desa, yang menjadi salah satu komponen utama Indeks Desa.
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program ini mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, tata kelola desa, pelestarian budaya, kemandirian desa, dan efektivitas monitoring.

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa memberikan dampak positif terhadap efisiensi sumber daya, kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, kemandirian desa, dan kualitas pelayanan publik
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Desa yaitu:

- Program Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Balangan 2025 memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian Indeks Desa, melalui peningkatan tata kelola, efisiensi koordinasi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan anggaran desa. Dampak ini menjadikan desa lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel, sehingga target Indeks Desa 2025 dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Administrasi yang baik mempermudah koordinasi lintas SKPD dan pendampingan teknis, sehingga pelaksanaan program pembangunan desa lebih efisien dan tepat sasaran. Efisiensi ini berdampak langsung pada pencapaian indikator Indeks Desa, khususnya pada aspek efektivitas program pembangunan dan layanan publik.
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat tahun 2025 berdampak signifikan pada peningkatan partisipasi masyarakat, melalui program ini mendorong warga desa untuk aktif dalam musyawarah, perencanaan, dan pengawasan program pembangunan, sehingga partisipasi masyarakat meningkat. Peningkatan tata kelola desa lembaga kemasyarakatan dan adat berperan dalam menyelaraskan pembangunan desa dengan kepentingan warga dan kearifan lokal, serta mendukung Kepala Desa dalam pengelolaan program. Kegiatan pelestarian budaya melalui pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat hukum adat, nilai-nilai budaya, tradisi, dan hukum adat tetap dijaga. Kegiatan kemandirian desa melalui lembaga kemasyarakatan dan adat yang diberdayakan mampu mengelola konflik, memanfaatkan sumber daya lokal, dan mendukung program pembangunan secara mandiri. Melalui kegiatan efektivitas monitoring program ini mempermudah pengawasan pelaksanaan kegiatan desa melalui peran aktif lembaga kemasyarakatan dan adat, sehingga secara langsung berdampak untuk meningkatkan Indeks Desa Kabupaten Balangan dan mempercepat pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan.
- Program Peningkatan Kerjasama Desa tahun 2025 memberikan dampak positif terhadap efisiensi sumber daya program ini mendorong desa-desa membangun kemitraan, baik antar desa maupun dengan pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat untuk pelaksanaan program pembangunan. Meningkatnya kapasitas kelembagaan melalui kerjasama, desa mendapatkan akses ke pelatihan, pendampingan teknis, dan sumber daya tambahan dari mitra. Kegiatan partisipasi masyarakat kerjasama antar desa dan lembaga terkait membuka peluang masyarakat berpartisipasi aktif dalam proyek lintas desa dan kegiatan pembangunan bersama. Meningkatkan kemandirian desa melalui kemitraan, desa dapat mengakses sumber daya eksternal, teknologi, dan dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan kerjasama antar desa dan lembaga pendukung mempermudah koordinasi monitoring dan evaluasi program, sehingga kendala atau hambatan pembangunan cepat teridentifikasi dan diatasi. Dampak program Peningkatan Kerjasama Desa yang secara langsung mendukung peningkatan Indeks Desa Kabupaten Balangan dan percepatan pencapaian target pembangunan desa yang berkelanjutan.

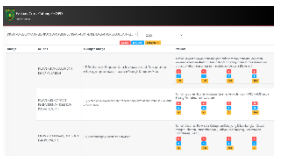
Dari ketiga program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.66
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Kemajuan Perekonomian dan Kemandirian Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*	Melaksanakan kegiatan pendampingan desa, administrasi, penguatan kelembagaan.	Pembinaan aparatur desa, pendampingan pengelolaan dana desa dan evaluasi dan pemutakhiran data Indeks Desa
		Bapperida	Memastikan perencanaan pembangunan desa terintegrasi antar SKPD	Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan desa agar selaras dengan RPJMD, Renstra dan RKPD serta terintegrasi antar SKPD
		Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan dasar	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di desa melalui Puskesmas, Posyandu, dan program kesehatan masyarakat
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Infrastruktur di Desa	Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan layak huni
		Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Pengembangan UMKM di Desa	Pelatihan kewirausahaan desa dan pendampingan pengelolaan BUMDes
		Dinas Sosial	Perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan	Penyaluran bantuan sosial dan pendataan terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Sebagai pendukung digitalisasi dan sistem informasi desa.	Penyediaan jaringan internet desa dan pelatihan literasi digital aparatur dan masyarakat desa.
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Desa	Menjamin akses pendidikan dasar dan menengah di desa, termasuk fasilitas sekolah dan tenaga pendidik

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Indeks Desa di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting kinerja SKPD:

Tabel 3.67
Monev Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Monev Offline	Monev Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Kemajuan Perekonomian dan Kemandirian Desa	Indeks Desa	Rapat koordinasi penentuan target Indeks Desa di Ruang Rapat Bapperida	Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Indeks Desa	

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator Indeks Desa)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target dari indikator kinerja Indeks Desa tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

- Peningkatan Indeks Desa membutuhkan tenaga pendamping desa, fasilitator pemberdayaan masyarakat, dan pengurus lembaga kemasyarakatan yang memiliki kompetensi sesuai tugas.
- Optimalisasi SDM dilakukan melalui pelatihan, pendampingan terpadu, dan distribusi tugas berbasis prioritas desa. Dampaknya meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat pelaksanaan program, dan mengurangi beban kerja ganda.

b. Efisiensi Anggaran

- Anggaran program Indeks Desa dialokasikan untuk administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat, serta peningkatan kerjasama desa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami efisiensi sebesar Rp. 5.324.786.000.
- Efisiensi tercapai dengan perencanaan anggaran berbasis kebutuhan prioritas, penggunaan dana lintas program, dan monitoring berkala. Dampaknya mengurangi pemborosan, memastikan dana digunakan tepat sasaran, dan mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Desa.

c. Efisiensi Waktu

- Koordinasi lintas SKPD dan pemanfaatan sistem informasi desa mempercepat proses pelaksanaan program dan monitoring. Perencanaan kegiatan berbasis milestone tahunan dan kuartalan membantu meminimalkan keterlambatan. Dampaknya waktu pelaksanaan lebih singkat, program berjalan lancar, dan target Indeks Desa lebih cepat tercapai.

B.7 Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Indikator 1 : Umur Harapan Hidup)

Tabel 3.68
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator 1 : Umur Harapan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,26	74,14	99,84

Target Usia Harapan Hidup tahun 2025 adalah 74,26. Realisasi tahun 2025 adalah 74,14, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 99,84 persen.

Tabel 3.69
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator 1 : Umur Harapan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,26	74,14	73,87	73,69	68,13

Target Usia Harapan Hidup tahun 2025 adalah 74,26. Realisasi tahun 2025 adalah 74,14, Realisasi Tahun 2024 adalah 73,87, Realisasi tahun 2023 adalah 73,69, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 68,13.

Tabel 3.70
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator 1 : Umur Harapan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,41	74,14	98,32

Target Akhir RPJMD untuk Usia Harapan Hidup adalah 75,41 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 74,14 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 98,32 persen.

Tabel 3.71
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator 1 : Umur Harapan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,14	74,95	74,49	74,47	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 74,14, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 74,95, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 74,49, realisasi Nasional 74,47. Sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.68, tabel 3.69, tabel 3.70, dan tabel 3.71 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator 1 : Umur Harapan Hidup)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.68 adalah target Usia Harapan Hidup tahun 2025 yaitu 74,26. Realisasi tahun 2025 adalah 74,14, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 99,84 persen. Usia Harapan Hidup sebesar 74,14 pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 99,84 persen belum tercapai sesuai target. Faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

- Keterbatasan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan.
Masih terdapat wilayah dengan akses pelayanan kesehatan yang terbatas, terutama pada daerah terpencil atau anak desa, sehingga pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum optimal dan berdampak pada keterlambatan penanganan masalah kesehatan masyarakat.
- Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan
Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata dari sisi jumlah masih menjadi kendala dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dari 12 jenis tenaga kesehatan, hanya 5 jenis tenaga kesehatan yang terpenuhi sesuai standar rasio yang dikeluarkan oleh menteri kesehatan.
- Belum Optimalnya Upaya Promotif dan Preventif
Implementasi program promotif dan preventif, seperti peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pencegahan penyakit tidak menular, serta pengendalian faktor risiko kesehatan, belum sepenuhnya berjalan optimal dan berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat.
- Tingginya kematian bayi
Dalam perhitungan umur harapan hidup, angka kematian pada semua usia diperhitungkan, termasuk **usia bayi (0–1 tahun)**. Jika banyak bayi meninggal, maka rata-rata usia hidup turun drastis karena ada umur yang sangat pendek dalam perhitungannya.
- Masih ditemukannya gizi buruk pada Balita
Gizi buruk menyebabkan tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, seperti protein, vitamin, dan mineral, sehingga kondisi tersebut meningkatkan risiko kematian pada kelompok umur Balita.
- Tingginya Beban Penyakit Tertentu
Masih ditemukannya penyakit menular dan meningkatnya penyakit tidak menular, seperti hipertensi dan diabetes melitus, berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat dan berdampak pada lambatnya peningkatan umur harapan hidup.

Langkat perbaikan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan

1. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar

Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kesehatan terus mendorong penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan optimalisasi peran puskesmas dan jejaringnya, termasuk peningkatan layanan promotif, preventif, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak, sehingga masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkesinambungan. Pada tahun 2025, ada 4 Puskesmas berstatus rawat inap yaitu Puskesmas Halong, Puskesmas Batu Mandi, Puskesmas Lampihong dan Puskesmas Awayan. Dengan adanya Puskesmas Rawat Inap ini diharapkan masyarakat dapat mendapatkan pertolongan kesehatan lebih dini.

2. Penguatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan dilakukan melalui pelayanan kesehatan tingkat lanjutan serta perbaikan sistem rujukan, sehingga kasus-kasus kesehatan yang memerlukan penanganan lanjutan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

3. Pelaksanaan Program Promotif dan Preventif

Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kesehatan secara konsisten melaksanakan program promotif dan preventif, antara lain edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), aksi bergizi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta deteksi dini penyakit tidak menular, yang berkontribusi dalam menekan faktor risiko kesehatan masyarakat.

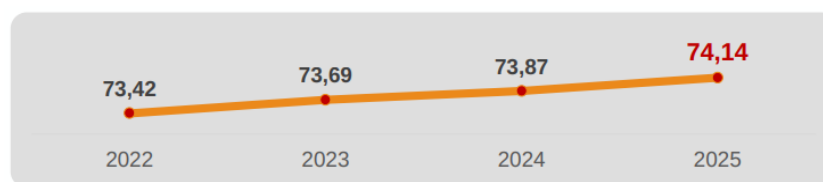
4. Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak

Fokus pada peningkatan layanan kesehatan ibu, bayi, dan anak, termasuk pemantauan kehamilan, persalinan oleh tenaga kesehatan, imunisasi dasar lengkap, serta pemantauan tumbuh kembang balita, turut berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dan umur harapan hidup masyarakat.

5. Dukungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui UHC
Pemanfaatan JKN yang semakin luas mendorong masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan secara lebih mudah dan terjangkau, sehingga penanganan masalah kesehatan dapat dilakukan lebih dini dan berkelanjutan. Kabupaten Balangan terus meningkatkan cakupan kepesertaan aktif dimana tahun 2025 adalah 95%.
 6. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Kesehatan
Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pendampingan, yang berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa pelatihan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu Pelatihan Asuhan Persalinan Normal untuk Bidan, Penatalaksanaan Kasus Emergensi Meternal dan Neonatal, Peningkatan Teknis Tenaga Laboratorium di Puskesmas, Peningkatan Kapasitas Pengelola Program PTM, dan Peningkatan petugas Surveilans dan Epidemiologi Puskesmas.
 7. Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor
Melaksanakan koordinasi dan mendorong perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya pada aspek lingkungan sehat, sanitasi, dan edukasi masyarakat.
 8. Perbaikan Kebijakan Distribusi Tenaga Kesehatan
 - Pemetaan Kebutuhan Berbasis Data dengan melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan per wilayah (berdasarkan rasio penduduk, beban penyakit, geografis). Menggunakan sistem informasi kesehatan terintegrasi untuk memonitor kekurangan tenaga secara real-time.
 - Redistribusi dan Penempatan Wajib. Optimalisasi program penempatan wajib kerja (misalnya internship, PTT, atau kontrak daerah). Penempatan berbasis kebutuhan prioritas, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
2. Faktor Eksternal yang mempengaruhi capaian kinerja Usia Harapan Hidup sebagai berikut :
- **Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.** Pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan berpengaruh pada akses makanan bergizi, layanan, dan perilaku hidup sehat Masyarakat. Pendidikan rendah juga bisa memengaruhi pemahaman dan adopsi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). *Dampak:* Orang kurang mampu cenderung menunda pemeriksaan kesehatan, membuat pencegahan penyakit kurang optimal.
 - **Lingkungan Fisik dan Sanitasi.** Kualitas sanitasi rumah dan ketersediaan air bersih di beberapa wilayah masih menjadi tantangan, yang merupakan determinan kesehatan penting (misalnya yang tampak dalam studi kasus sanitasi dan stunting). *Dampak:* Lingkungan yang kurang sehat dapat meningkatkan risiko penyakit menular, menghambat peningkatan UHH.
 - **Budaya dan Perilaku Masyarakat.** Ketergantungan pada praktik tradisional serta rendahnya adopsi perilaku hidup sehat dapat menghambat penggunaan layanan kesehatan modern. (hubungan budaya & imunisasi di komunitas tertentu). *Dampak:* Masyarakat yang enggan melakukan pemeriksaan/pencegahan modern dapat memperlambat perbaikan indikator kesehatan.
- Solusi untuk mengatasi permasalahan eksternal tersebut antara lain:
- **Penguatan Intervensi Sosial Pemerintah.** Memperluas program bantuan sosial/gizi untuk kelompok rawan, dan pemberian subsidi layanan kesehatan bagi masyarakat berpendapatan rendah.
 - **Program Perbaikan Sanitasi dan Lingkungan.** Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi melalui kerja sama lintas sektor dan edukasi PHBS berbasis komunitas untuk meningkatkan kebiasaan hidup sehat.
 - **Edukasi Budaya dan Promosi Kesehatan yang Kontekstual.** Integrasi kampanye kesehatan yang sensitif budaya dan bahasa local dan melibatkan tokoh adat dan pemimpin masyarakat untuk mengubah perilaku kesehatan.
 - **Akses Layanan yang Lebih Luas dan Fleksibel.** Pengembangan layanan jemput bola seperti *home care* dan unit kesehatan bergerak dan pemanfaatan telemedicine untuk menjangkau wilayah yang sulit terlayani.

- **Perbaikan Ekonomi Daerah dan Kebijakan Anggaran.** Mengoptimalkan alokasi APBD untuk sektor kesehatan, termasuk pencegahan dan rehabilitasi dan mendorong investasi di sektor kesehatan dan sektor pendukung (air bersih, transportasi).

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.69 adalah target Usia Harapan Hidup tahun 2025 adalah 74,26. Realisasi tahun 2025 adalah 74,14, Realisasi tahun 2024 adalah 73,87, Realisasi tahun 2023 adalah 73,69, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 68,13. Berdasarkan tabel 3.69 diatas menunjukkan bahwa UHH di Kabupaten Balangan setiap tahunnya terjadi peningkatan dan signifikan meningkat pada tahun 2023 yaitu terjadi peningkatan sebesar 5,56 tahun atau menjadi 73,69 tahun. sedangkan untuk tahun 2024 ke tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar 0,27 poin, walaupun mengalami peningkatan dari tahun 2024 namun masih belum mencapai target yang diharapkan yaitu 74,26 tahun pada tahun 2025. Peningkatan sebesar 0,27 tahun (tumbuh 0,37%) dibandingkan dengan tahun 2024. Pertumbuhan pada tahun 2025 melambat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan selama periode 2022–2024 yang mencapai 0,31%. Berikut grafik perkembangan Usia Harapan Hidup dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 :



Secara simultan Usia Harapan Hidup mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan seluruh SKPD dan *stake holder* yang terlibat. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2025 terkait peningkatan Usia Harapan Hidup diarahkan pada penguatan layanan kesehatan yang komprehensif, berkelanjutan, dan merata. Kebijakan daerah difokuskan pada peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar melalui optimalisasi puskesmas, posyandu, serta layanan kesehatan ibu dan anak sebagai upaya menekan angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah mendorong kebijakan promotif dan preventif melalui penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peningkatan cakupan imunisasi, perbaikan gizi ibu dan balita, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Kebijakan tersebut diperkuat dengan sinergi lintas sektor, termasuk dukungan penyediaan air bersih, sanitasi layak, dan infrastruktur pendukung kesehatan, serta pemanfaatan program jaminan kesehatan untuk menjamin akses layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2025 telah mendukung pencapaian target Usia Harapan Hidup melalui pendekatan terintegrasi antara pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan perlindungan sosial.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.70 adalah target akhir RPJMD untuk Usia Harapan Hidup adalah 75,41 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 74,14 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 98,32 persen. Berdasarkan data tabel di atas untuk menuju kepada pencapaian target akhir RPJMD tahun 2030 yakni 75,41 diperlukan 1,27 poin, maka Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas. Karena saat ini Usia Harapan Hidup hanya berada di 74,14, itu artinya harus melakukan gerakan percepatan setiap tahunnya. Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi Usia Harapan Hidup ini adalah difokuskan pada penguatan intervensi kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terintegrasi. Pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar melalui optimalisasi fungsi puskesmas, posyandu, dan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menekan angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Percepatan juga dilakukan melalui penguatan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peningkatan cakupan imunisasi, perbaikan gizi ibu dan balita, serta deteksi dini dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Selain sektor kesehatan, rencana aksi didukung oleh kolaborasi lintas sektor melalui peningkatan akses air bersih, sanitasi layak, perbaikan infrastruktur jalan, serta pemanfaatan program perlindungan sosial dan jaminan

kesehatan guna memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Pelaksanaan rencana aksi disertai dengan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program, ketepatan sasaran, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan pendekatan terintegrasi dan lintas sektor tersebut, rencana aksi percepatan diharapkan mampu mendorong pencapaian target Usia Harapan Hidup Kabupaten Balangan tahun 2025 sesuai dengan sasaran RPJMD dan Renstra perangkat daerah.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.71 adalah menjelaskan bahwa realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 74,14, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 74,95, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 74,49, realisasi Nasional 74,47. Sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Dalam perbandingan dengan kabupaten terdekat, Kabupaten Balangan masih tertinggal dibandingkan Kabupaten Tabalong yang memiliki UHH sebesar 74,95 tahun, dengan selisih 0,81 tahun. Hal ini menunjukkan adanya peluang peningkatan kinerja melalui optimalisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta penguatan upaya promotif dan preventif yang telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Tabalong. Namun demikian, capaian UHH Kabupaten Balangan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mencatat UHH sebesar 72,95 tahun, dengan selisih 1,19 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Balangan telah memberikan hasil yang relatif lebih baik dibandingkan beberapa wilayah lain di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan perbandingan capaian Umur Harapan Hidup (UHH) kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan mencatat UHH sebesar 74,14 tahun dan berada pada peringkat ke-8 dari 13 kabupaten/kota. Posisi ini menunjukkan bahwa capaian derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Balangan berada pada kelompok menengah, lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten lain, namun masih tertinggal dari sejumlah kabupaten/kota dengan capaian lebih tinggi.

Berikut tabel perbandingan realisasi Umur Harapan Hidup se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dan Tahun 2025:

No	Kabupaten/Kota	UHH Tahun 2024	UHH Tahun 2025
1	Tanah Laut	74,64	74,49
2	Kotabaru	73,88	74,88
3	Banjar	73,55	74,03
4	Barito Kuala	72,52	72,85
5	Tapin	74,72	75,09
6	Hulu Sungai Selatan	72,82	73,27
7	Hulu Sungai Tengah	72,60	73,02
8	Hulu Sungai Utara	72,49	72,95
9	Tabalong	74,76	74,95
10	Tanah Bumbu	74,44	74,68
11	Balangan	73,87	74,14
12	Banjarmasin	75,07	75,38
13	Banjarbaru	75,11	75,44
	Kalimantan Selatan	74,18	74,49

Sumber : BPS Kalimantan Selatan

Jika dibandingkan dengan rata-rata UHH Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 74,49 tahun, capaian Kabupaten Balangan masih berada di bawah rata-rata provinsi dengan selisih 0,35 tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hasil pembangunan kesehatan di Kabupaten Balangan belum sepenuhnya menyamai

capaian provinsi, sehingga memerlukan penguatan intervensi pembangunan kesehatan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Faktor dominan yang mempengaruhi Usia Harapan Hidup Pemerintah Kabupaten Balangan yaitu layanan kesehatan dasar (puskesmas, posyandu, jaminan kesehatan) adalah penentu utama UHH di Balangan. Status gizi dan Kesehatan ibu anak sangat mempengaruhi UHH jangka panjang. Implikasi Kebijakan untuk Balangan berfokus pada kebijakan paling berdampak pada penguatan layanan kesehatan primer, pencegahan stunting dan penyakit tidak menular, integrasi Kesehatan sanitasi lingkungan desa.

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.68 sampai dengan tabel 3.71 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup yaitu :**

- Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan upaya percepatan peningkatan Usia Harapan Hidup tahun 2025 melalui strategi terpadu yang mengoptimalkan intervensi kesehatan dan dukungan lintas sektor. Upaya percepatan ini mencakup peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar, termasuk puskesmas, posyandu, serta layanan kesehatan ibu dan anak, dengan fokus pada peningkatan cakupan imunisasi, gizi ibu dan balita, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- Selain intervensi sektor kesehatan, Pemkab Balangan mempercepat pencapaian target UHH melalui edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), kampanye kesehatan masyarakat, serta peningkatan kesadaran akan pola hidup sehat. Dukungan lintas sektor juga diperkuat, meliputi penyediaan air bersih, sanitasi layak, perbaikan infrastruktur transportasi untuk mempermudah akses ke fasilitas kesehatan, serta pemanfaatan program jaminan kesehatan dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
- Seluruh upaya percepatan ini didukung mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis, sehingga efektivitas intervensi, ketepatan sasaran, dan efisiensi penggunaan sumber daya dapat terjaga. Pendekatan terintegrasi dan lintas sektor ini diharapkan mampu secara signifikan menurunkan angka kematian, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pencapaian target Usia Harapan Hidup Kabupaten Balangan tahun 2025 sesuai RPJMD dan Renstra perangkat daerah.
- Inovasi unggulan dari Dinas Kesehatan dalam meningkatkan UHH adalah HOMECARE SANGGAM. Homecare Sanggam merupakan pelayanan kesehatan berkelompok/tim yang terdiri atas dokter, perawat, bidan desa, nutrisionis, sanitarian, penyuluh kesehatan dan tenaga medis lainnya. Pelayanan kesehatan ini bersifat promotif, preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu. Untuk memberikan pelayanan kesehatan, Puskesmas mengambil data dari data basis di Puskesmas yaitu data PRB (Program Rujuk Balik), data PTM (Penyakit Tidak Menular), data USILA, dan PIS-PK. Dari data basis, tim Homecare Sanggam akan menganalisis masyarakat mana saja yang akan diprioritaskan dilakukan pelayanan Homecare Sanggam. Dari hasil analisis tersebut akan diberikan sesuai permasalahan kesehatan yang didapat dan akan dibuat rencana tindak lanjut untuk kunjungan berikutnya sampai pelayanan Homecare Sanggam dihentikan atau dilakukan tindakan rujukan.

2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator 1 : Umur Harapan Hidup)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja Usia Harapan Hidup. Adapun gambaran umum keterikatan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) melalui penyediaan layanan kesehatan yang komprehensif, merata, dan berkualitas.

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan, sebagai salah satu upaya strategis untuk mendorong peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH).
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mendorong peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat.
		Program Pengendalian Penduduk	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengaturan jumlah dan distribusi penduduk, sehingga berdampak positif terhadap kesehatan, gizi, dan kesejahteraan keluarga, yang merupakan faktor penting dalam peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH).
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Memperkuat peran keluarga sebagai unit utama dalam mewujudkan kesehatan, gizi, dan kesejahteraan anggota keluarga, yang berdampak langsung pada peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH).
		Program Pemenuhan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian jumlah dan jarak kelahiran, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH)
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup yaitu:

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Balangan tahun 2025 berperan strategis dalam meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) melalui penyediaan layanan kesehatan yang komprehensif, merata, dan berkualitas. Upaya kesehatan perorangan difokuskan pada pelayanan klinis langsung kepada individu, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, penanganan penyakit menular dan tidak menular, serta manajemen gizi dan kesehatan lansia. Sementara itu, upaya kesehatan masyarakat diarahkan pada intervensi promotif dan preventif yang menjangkau komunitas luas, seperti edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peningkatan kesadaran masyarakat tentang gizi dan sanitasi, pengendalian penyakit menular melalui program vaksinasi massal, serta penanggulangan masalah kesehatan lingkungan. Program ini didukung oleh jaringan puskesmas, posyandu, dan tenaga kesehatan yang terlatih, serta dilengkapi mekanisme monitoring dan evaluasi untuk menjamin efektivitas, pemerataan, dan keberlanjutan intervensi. Dengan implementasi terpadu antara upaya kesehatan perorangan dan masyarakat, program ini diharapkan mampu menurunkan angka kematian, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pencapaian target Usia Harapan Hidup Kabupaten Balangan tahun 2025 sesuai RPJMD dan Renstra perangkat daerah.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten Balangan tahun 2025 bertujuan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan, sebagai salah satu upaya strategis untuk mendorong peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH). Program ini mencakup penguatan kapasitas kader kesehatan, pelatihan komunitas mengenai praktik hidup bersih dan sehat (PHBS), advokasi gizi keluarga, serta edukasi tentang pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Selain itu, program mendorong pembentukan kelompok masyarakat peduli kesehatan, pengembangan posyandu dan layanan kesehatan berbasis masyarakat, serta sosialisasi program jaminan kesehatan dan layanan kesehatan promotif. Pemberdayaan masyarakat juga melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah desa, Dinas Kesehatan, dan lembaga masyarakat, untuk memastikan keberlanjutan intervensi dan pemerataan akses pelayanan kesehatan. Dengan pendekatan partisipatif ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar dan proaktif dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga, menurunkan risiko penyakit, meningkatkan kualitas

hidup, dan secara langsung mendukung pencapaian target Usia Harapan Hidup Kabupaten Balangan tahun 2025 sesuai RPJMD dan Renstra perangkat daerah.

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Kabupaten Balangan tahun 2025 bertujuan memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mendorong peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat. Program ini mencakup pelatihan teknis bagi tenaga medis dan paramedis, peningkatan kapasitas manajemen dan pelayanan puskesmas serta posyandu, serta pengembangan keterampilan dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selain itu, program mendorong distribusi SDM kesehatan secara merata di seluruh wilayah kabupaten, termasuk kecamatan dan desa terpencil, serta meningkatkan motivasi dan retensi tenaga kesehatan melalui program insentif dan pembinaan berkelanjutan. Sinergi dengan dinas kesehatan, lembaga pendidikan kesehatan, dan pemangku kepentingan lintas sektor memastikan efektivitas intervensi dan keberlanjutan program. Dengan peningkatan kapasitas SDM kesehatan, layanan kesehatan menjadi lebih berkualitas, akses lebih merata, serta efektivitas intervensi promotif dan preventif meningkat, sehingga berkontribusi pada penurunan angka kematian, peningkatan kualitas hidup, dan pencapaian target Usia Harapan Hidup Kabupaten Balangan tahun 2025 sesuai RPJMD dan Renstra perangkat daerah.
- Program Pengendalian Penduduk di Kabupaten Balangan tahun 2025 bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengaturan jumlah dan distribusi penduduk, sehingga berdampak positif terhadap kesehatan, gizi, dan kesejahteraan keluarga, yang merupakan faktor penting dalam peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH). Program ini mencakup sosialisasi dan layanan keluarga berencana (KB), edukasi kesadaran reproduksi, serta penguatan kapasitas keluarga dalam merencanakan pertumbuhan anggota keluarga secara sehat dan seimbang. Intervensi program dilakukan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, serta pemerintah desa, dengan pendekatan promotif dan preventif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Program juga mendukung pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, sehingga menurunkan risiko kematian ibu dan bayi, mencegah stunting, dan memperkuat ketahanan keluarga. Dengan pelaksanaan program yang terintegrasi ini, diharapkan pengendalian penduduk memberikan kontribusi terhadap tercapainya penurunan angka kematian, peningkatan kualitas hidup, dan pencapaian target Usia Harapan Hidup Kabupaten Balangan tahun 2025 sesuai RPJMD dan Renstra perangkat daerah.
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga di Kabupaten Balangan tahun 2025 bertujuan memperkuat peran keluarga sebagai unit utama dalam mewujudkan kesehatan, gizi, dan kesejahteraan anggota keluarga, yang berdampak langsung pada peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH). Program ini mencakup edukasi keluarga tentang kesehatan ibu dan anak, gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), perencanaan keluarga, serta pembinaan mental dan sosial keluarga. Selain itu, program mendorong pemberdayaan keluarga melalui penguatan kemandirian ekonomi, pengelolaan pangan rumah tangga, pembentukan kelompok keluarga berkualitas, dan peningkatan kapasitas orang tua dalam membimbing perilaku sehat anggota keluarga. Sinergi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pemerintah desa memastikan keberlanjutan, pemerataan akses, dan efektivitas program. Dengan implementasi program ini, keluarga diharapkan lebih mampu menjaga kesehatan, memenuhi gizi seimbang, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung pencapaian target Usia Harapan Hidup Kabupaten Balangan tahun 2025 sesuai RPJMD dan Renstra perangkat daerah.
- Program Pemenuhan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Balangan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian jumlah dan jarak kelahiran, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH). Program ini meliputi sosialisasi dan edukasi keluarga tentang perencanaan jumlah anak, penggunaan alat kontrasepsi yang aman dan efektif, serta pemantauan dan pendampingan pasangan usia subur dalam penerapan KB. Intervensi program dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, serta pemerintah desa, dengan pendekatan promotif dan preventif. Program ini juga mendukung

peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, serta penguatan ketahanan keluarga melalui pemenuhan gizi dan akses layanan kesehatan yang memadai. Dengan implementasi program yang terintegrasi, diharapkan program KB dapat menurunkan risiko kematian ibu dan bayi, meningkatkan kualitas hidup keluarga, serta secara langsung mendukung pencapaian target Usia Harapan Hidup Kabupaten Balangan tahun 2025 sesuai RPJMD dan Renstra perangkat daerah.

Dari keenam program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.72
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan*	Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Penguatan pelayanan Puskesmas dan RSUD, program pencegahan stunting dan gizi buruk, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan cakupan imunisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*	Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Desa	Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes, fasilitas sosial, dan pendampingan program kesehatan serta ekonomi desa
		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*	Peningkatan Ketersediaan Pangan Bergizi	Melaksanakan program peningkatan produksi pangan, keamanan pangan, dan diversifikasi gizi untuk masyarakat.
		Bapperida	Perencanaan dan Integrasi Kebijakan	Terintegrasi dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, RKPD dan Renstra SKPD
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Menyediakan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, drainase, dan perumahan layak huni
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Literasi dan Edukasi Kesehatan	Meningkatkan kesadaran hidup sehat melalui pendidikan formal dan nonformal seperti program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), edukasi gizi,

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
				kebersihan, dan kesehatan reproduksi dan peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah.
		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, serta Pengendalian Pencemaran dan Perbaikan Lingkungan	Pengelolaan sampah dan limbah domestik, pengawasan kualitas air dan udara, dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting kinerja SKPD:

Tabel 3.73
Monev Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Monev Offline	Monev Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	1. Rapat pertemuan Hasil Verifikasi dan Analisis Data MPDN	1. Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Usia Harapan Hidup	 
			2. Asistensi Laporan Kinerja SKPD dengan Dinas Kesehatan Senin 12 Januari 2026 di Ruang Rapat Bagian Organisasi		

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator 1 : Umur Harapan Hidup)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target indikator kinerja Usia Harapan Hidup tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

Dari aspek SDM, efisiensi dicapai melalui pemanfaatan tenaga kesehatan, kader posyandu, penyuluh KB, dan aparatur desa secara sinergis. Pendekatan ini mengurangi duplikasi tugas, memperluas jangkauan layanan promotif dan preventif, serta meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan dasar, khususnya pada pelayanan ibu dan anak, gizi, imunisasi, dan pengendalian penyakit. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan secara selektif dan berkelanjutan, sehingga kompetensi meningkat tanpa membebani anggaran secara berlebihan.

b. Efisiensi Anggaran

Dari sisi anggaran, efisiensi diwujudkan melalui integrasi pendanaan antarprogram dan antar-SKPD, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta dukungan program provinsi dan nasional. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran mencegah tumpang tindih kegiatan, mengarahkan belanja pada

program prioritas yang berdampak langsung terhadap UHH, serta meningkatkan nilai manfaat setiap rupiah yang dibelanjakan. Pagu dinkes tahun 2025 adalah Rp 348.567.007.011 dan Anggaran Perubahan sebesar Rp 373.594.375.254 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 306.239.600.731,42 atau 81,97%.

c. Efisiensi Waktu

Sementara itu, dari aspek waktu, efisiensi dicapai melalui penjadwalan program yang terkoordinasi, pelaksanaan kegiatan secara simultan di tingkat desa dan kecamatan, serta monitoring berkala berbasis kinerja. Pendekatan ini mempercepat pelaksanaan intervensi, memungkinkan deteksi dini kendala, dan memastikan capaian program tetap selaras dengan target RPJMD dan Renstra perangkat daerah.

B.7 Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Indikator 2 : Prevalensi Stunting)

Tabel 3.74
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator 2 : Prevalensi Stunting

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	11,88	14,53	77,69

Target Prevalensi Stunting tahun 2025 adalah 11,88. Realisasi tahun 2025 adalah 14,53, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 77,69 persen.

Tabel 3.75
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator 2 : Prevalensi Stunting

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	11,88	14,53	14,58	14,61	14,91

Target Prevalensi Stunting tahun 2025 adalah 11,88. Realisasi tahun 2025 adalah 14,53, Realisasi Tahun 2024 adalah 14,58, Realisasi tahun 2023 adalah 14,61, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 14,91.

Tabel 3.76
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator 2 : Prevalensi Stunting

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	7,28	14,53	0,41

Target Akhir RPJMD untuk Prevalensi Stunting adalah 7,28 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 14,53 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 0,41 persen.

Tabel 3.77
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator 2 : Prevalensi Stunting

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	14,53	22	22,90	18,8	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Prevalensi Stunting Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 14,53, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 22, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 22,90, realisasi Nasional adalah 18,8. Sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.74, tabel 3.75, tabel 3.76, dan tabel 3.77 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator 2 : Prevalensi Stunting)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.74 adalah target Prevalensi Stunting tahun 2025 yaitu 11,88. Realisasi tahun 2025 adalah 14,53, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 77,69 persen. Prevalensi Stunting sebesar 14,53 pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 77,60 persen belum tercapai sesuai target. Faktor yang mempengaruhi Prevalensi Stunting antara lain:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

- Kelemahan SDM dan Kader Kesehatan yaitu jumlah Dokter Spesialis anak masih terbatas hanya berjumlah 1 orang. Jumlah tenaga gizi tidak merata di puskesmas ada 2 puskesmas yang petugas gizi berjumlah 1 orang. Kompetensi kader kesehatan, belum semua kader mengikuti pelatihan 25 kompetensi kader.
- Lemahnya intervensi spesifik dan sensitive yaitu koordinasi lintas program dan lintas sektor belum terintegrasi. Tidak ada monitoring sasaran berisiko.
- Penyakit penyerta Balita stunting dengan penyakit penyerta dari Penyakit penyerta pada anak stunting, menyebabkan prevalensi stunting belum ada progress penurunan, dari balita yang di periksa dokter spesialis Anak dari 174 anak yang bermasalah gizi sekitar 114 anak terduga Tuberkulosis (TB) atau sekitar 65,62%.
- Masih banyaknya ibu hamil resiko tinggi yang kekurangan gizi seperti anemia dan Kekurangan Energi Kronik (KEK) yang berisiko melahirkan prematur atau Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sehingga akan berdampak kekurangan gizi kronik pada 1.000 HPK apabila tidak mendapatkan penanganan yang komprehensif.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah penghambat pencapaian kinerja Prevalensi Stunting yaitu:

- Penguatan kompetensi dengan melatih dokter umum dalam tata laksana stunting dan TB anak, pelatihan refresh tenaga gizi terkait manajemen kasus stunting + komorbid, pelatihan percepatan 25 kompetensi kader (target 100% kader terlatih tahun 2025). Supervisi dan Mobile Team dengan membentuk Tim Gizi dan TB Kabupaten untuk kunjungan rutin ke puskesmas dengan tenaga terbatas, sistem pendampingan kasus stunting berat. Telekonsultasi Spesialis Anak yaitu kerja sama dengan RS Provinsi untuk telemedicine kasus stunting dan TB. Usulan tambahan formasi dokter spesialis anak (kontrak/PPPK). Pemerataan tenaga gizi melalui redistribusi atau pengangkatan tenaga kontrak. Beasiswa ikatan dinas spesialis anak dan gizi klinik bagi putra daerah.
- Pembentukan Tim Percepatan Stunting Terpadu (Stunting-TB) melibatkan: Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPRPERKIM (sanitasi dan air bersih), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan dan Desa, Rapat koordinasi minimal 1x per bulan. Sistem Data **"By Name By Address"**. Membuat dashboard data sasaran: Ibu hamil KEK, Balita stunting, Balita dengan komorbid TB dan Keluarga risiko tinggi.
- Solusi untuk permasalahan ketiga yaitu wajib Skrining TB pada Semua Balita Stunting, pemeriksaan klinis + TCM jika tersedia dan Kolaborasi erat Program TB dan Gizi. Tatalaksana Terpadu Balita Stunting + TB harus mendapat: Pengobatan TB sesuai pedoman, PMT khusus anak TB, pemantauan berat badan tiap bulan, kunjungan rumah oleh kader. Pelacakan Kontak Serumah dan Intervensi Lingkungan perbaikan ventilasi rumah, edukasi rumah sehat, kolaborasi dengan desa untuk bedah rumah keluarga risiko.
- Intervensi perbaikan gizi melalui pemantauan status gizi balita, peningkatan cakupan ASI eksklusif dan MP-ASI sesuai standar, peningkatan cakupan pemberian vitamin A pada Balita, pemberian Tablet Tambah Darah (TDD) pada remaja putri dan ibu hamil, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan prematur atas rekomendasi dokter, Balita dengan status gizi buruk, Balita dengan status gizi kurang dan stunting baik berupa susu formula ataupun makanan berbasis pangan lokal, serta penanganan langsung terhadap ibu hamil dengan kurang energi kronis (KEK) dan anemia menjadi fokus utama. Data

laporan media menunjukkan penurunan prevalensi stunting dari 27,7 % menjadi 19,7 % dalam jeda pendek karena program intensif ini di beberapa lokus.

- Kerja sama dengan pihak swasta seperti Adaro Group, YABN, dan mitra CSR lain mendukung kegiatan edukasi, penyuluhan, pendampingan keluarga, serta pengadaan makanan tambahan. Keterlibatan masyarakat ikut dimaksimalkan melalui kader Posyandu dan fasilitator lokal untuk menjangkau keluarga di desa. *Dampak:* Kolaborasi lintas pemangku kepentingan memperluas kapasitas internal daerah dalam menjangkau target sasaran.
- Pemerintah Kabupaten Balangan secara konsisten melakukan pengukuran status gizi balita, pelaporan, dan publikasi data stunting melalui puskesmas dan sistem E-PPGBM. Data yang akurat ini menjadi dasar perencanaan tindakan korektif langsung di lapangan. *Dampak:* Sistem informasi yang baik membantu pemerintah mengidentifikasi prioritas sasaran (lokus desa), serta melakukan evaluasi efektif terhadap progres dan hambatan.

2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- Faktor sosial ekonomi masyarakat masih beragam dan masih adanya masyarakat dalam kategori miskin dan miskin ekstrem.
- Pendidikan Masyarakat. Menurut BPS rata rata tingkat pendidikan di kabupaten Balangan setingkat SMP atau sekitar 7,85.
- Budaya dan perilaku masyarakat. Tahun 2025 jumlah yang di survei sebanyak 7.886 dengan presentasi yang ber PHBS sebanyak 3.603 atau 45,7%. Yang tidak ber PHBS sebanyak 4.283 atau 54,3%. Dari 10 indikator PHBS yang paling sulit untuk untuk di capai adalah indikator tidak merokok di dalam rumah yaitu 71,3%.
- Kondisi geografis. Akses daerah sulit untuk daerah tertentu yaitu Puskesmas Uren dan Puskesmas Tebing Tinggi.
- Pola Asuh dan perilaku keluarga. Pengetahuan gizi ibu masih rendah dan praktek pemberian makan bayi dan anak belum sesuai standar.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah penghambat pencapaian kinerja Prevalensi Stunting yaitu:

- Integrasi Data Kemiskinan dan Stunting yaitu sinkronisasi data balita stunting dengan DTKS dan prioritaskan keluarga stunting dalam PKH, BLT Desa, dan bantuan sembako. Bantuan Pangan Bergizi Berbasis Lokal yaitu Program telur/ikan minimal 2-3 kali/minggu untuk keluarga risiko dan pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan keluarga (kebun gizi, ternak kecil). Pemberdayaan Ekonomi Ibu yaitu pelatihan UMKM pangan lokal bergizi dan kredit mikro tanpa bunga untuk ibu balita.
- Edukasi Gizi Sederhana dan Praktis yaitu modul berbasis gambar dan praktik langsung, kelas ibu hamil dan ibu balita rutin di Posyandu. Program Remaja Putri Cegah Stunting yaitu edukasi anemia dan gizi remaja, tablet tambah darah rutin di sekolah. Gerakan “Orang Tua Cerdas Gizi” yaitu Kampanye masal melalui media desa, pengajian, dan PKK.
- Gerakan Rumah Tanpa Asap Rokok yaitu Perdes Kawasan Tanpa Rokok, stiker dan deklarasi rumah bebas asap rokok, edukasi dampak rokok pada stunting dan TB. Libatkan Tokoh Agama dan Adat untuk memberikan ceramah tematik tentang bahaya rokok bagi anak, kampanye “Ayah Peduli 1000 HPK”.
- Lomba Desa PHBS yaitu Insentif desa sehat, penghargaan keluarga teladan. Posyandu dan Klinik Mobile yaitu jadwal kunjungan terpadu minimal 1x/bulan, layanan skrining gizi dan TB. Rumah Tunggu Ibu Hamil untuk ibu risiko tinggi menjelang persalinan. Penguatan kader lokal yaitu pelatihan kader desa terpencil sebagai ujung tombak monitoring.
- Kelas Praktik PMBA yaitu demo memasak MP-ASI lokal murah dan bergizi, simulasi jadwal makan sesuai usia. Kunjungan Rumah Intensif yaitu pendampingan keluarga risiko, dan monitoring berat badan bulanan. Libatkan Ayah dan Keluarga untuk memberikan edukasi peran ayah dalam gizi anak dan kampanye “Keluarga Sadar Gizi”.

- Dukungan organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga komunitas juga memperkuat efektivitas penanganan stunting. Misalnya, mitra seperti Rumah Zakat terlibat dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan keluarga balita. Keterlibatan kader posyandu, relawan komunitas, serta organisasi perempuan (seperti PKK) merupakan kekuatan eksternal di luar struktur pemerintahan formal yang sangat penting dalam mengubah perilaku kesehatan masyarakat. Dukungan dari jaringan komunitas membantu memperluas *social outreach* dan memperkuat pesan program di level keluarga.
- Pelatihan guru PAUD terkait parenting pada anak.
- Penghargaan Peringkat II Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang diterima Balangan menunjukkan adanya dukungan eksternal dari tingkat pemerintahan provinsi dalam bentuk insentif moral dan advokasi. Pengakuan ini juga berfungsi sebagai pendorong motivasi serta memperkuat legitimasi program di tingkat lokal. *Penghargaan dan dukungan dari level provinsi memberi insentif tambahan bagi pemerintah dan masyarakat untuk mempertahankan keharmonisan dan komitmen program stunting.*



Balangan Raih Peringkat II Penurunan Stunting se-Kalimantan Selatan

• Balangan Raih Peringkat II Penurunan Stunting se-Kalimantan Selatan

Olleh MC KAB BALANGAN, Jumat, 15 Agustus 2025 | 09:00 WIB - Redaktur: Juli - IK



- Penghargaan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas Prestasi Daerah Berkinerja Baik dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting



Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.75 adalah target Prevalensi Stunting tahun 2025 adalah 11,88. Realisasi tahun 2025 adalah 14,53, Realisasi tahun 2024 adalah 14,58, Realisasi tahun 2023 adalah 14,61, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 14,91. Berdasarkan data ini lonjakan tiap tahunnya adalah dari tahun 2024 ke 2025 sebesar -0,05, dari tahun 2023 ke 2025 sebesar -0,08 dari tahun 2022 ke tahun 2025 sebesar -0,38 artinya secara simultan Prevalensi Stunting mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan seluruh SKPD dan *stake holder* yang terlibat.

Pemerintah Kabupaten Balangan menerapkan kebijakan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang selaras dengan prioritas nasional dan provinsi. Konvergensi ini mencakup sinergi program dari sektor kesehatan, pemberdayaan keluarga, dan pemangku kepentingan lain yang diarahkan untuk menekan determinan stunting secara komprehensif. Inti Kebijakannya adalah:

- Pendekatan multisektoral, bukan sekadar intervensi kesehatan, tetapi termasuk edukasi, gizi, perilaku hidup bersih sehat, hingga penguatan kapasitas masyarakat.
- Melibatkan *perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi* bersama seluruh perangkat daerah dan stakeholder. Kebijakan ini memberi kerangka yang kuat untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya dalam upaya menurunkan stunting di Balangan secara efektif. Selain itu Pemerintah Kabupaten Balangan juga menjalin Kemitraan Lintas Sektor sebagai Kebijakan Eksternal Terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Balangan memformalkan kolaborasi dengan pihak swasta, lembaga CSR, dan komunitas dalam kebijakan percepatan stunting. Contoh nyata: Deklarasi Stunting Free Village antara Pemerintah Kabupaten Balangan dan pihak swasta seperti PT. Adaro Indonesia dan mitra menunjukkan strategi kolaboratif yang menjadi bagian dari kebijakan implementasi stunting. Intervensi melalui mitra CSR termasuk pendidikan gizi, pemberian makanan tambahan, hingga program sanitasi layak. Kebijakan ini memperluas kapasitas pemerintah daerah melalui peran aktif sektor non-pemerintah, memberikan sumber daya dan dukungan program yang komplet.
- Inovasi Balanting (singkatan dari Balangan Lawan Stunting) adalah sebuah program inovasi daerah di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, yang difokuskan pada sektor kesehatan untuk mempercepat penurunan angka stunting. Inovasi ini diimplementasikan melalui pendekatan kolaboratif dan intervensi langsung untuk meningkatkan kesadaran serta kesehatan masyarakat, khususnya balita. Balanting dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Balangan untuk menangani stunting dimulai pada 27 Januari 2022. Keunggulan dari dibentuknya inovasi Balanting, antara lain terciptanya kerjasama antara pemerintah daerah, swasta, dan Lembaga masyarakat yang berkomitmen dalam percepatan penurunan angka stunting sehingga lebih terkonsentrasi, tepat sasaran, dan inovasi berupa gerakan dimasing-masing wilayah. Sebagai bukti dari keseriusan Pemerintah Balangan dan pihak swasta melalui Balanting untuk menurunkan stunting dari tahun ketahun, sehingga tahun 2022 terjadi penurunan *prevalensi stunting* sebesar 3% atau menjadi 14,91% dari 17,91%. Jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga yang berdekatan seperti Hulu Sungai Utara sebesar 19,4%, maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya lebih baik.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.76 adalah target akhir RPJMD untuk Prevalensi Stunting adalah 7,28 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 14,53 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 0,41 persen, untuk mencapai target akhir RPJMD maka Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas baik dalam dokumen perencanaan umum maupun dokumen perencanaan khusus Prevalensi Stunting. Karena saat ini Prevalensi Stunting hanya berada di 14,53, itu artinya harus melakukan gerakan percepatan setiap tahunnya. Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi Prevalensi Stunting ini adalah Rencana aksi percepatan stunting Kabupaten Balangan hingga 2025 disusun dalam kerangka:

- Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting
- Integrasi ke dalam RPJMD Kabupaten Balangan
- Pendekatan multisektor dan berbasis siklus kehidupan (*life cycle approach*)

Tujuan utama rencana aksi: Menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan melalui intervensi terintegrasi pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta penguatan faktor pendukung (sanitasi, pangan, edukasi, dan perilaku).

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.77 adalah menjelaskan bahwa realisasi Prevalensi Stunting Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 14,53, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 22, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 22,90. realisasi Nasional adalah 18,80 sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Realisasi Prevalensi Stunting Kabupaten Balangan tahun 2025 sebesar 14,53 jika dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Tabalong sebesar 22, Kabupaten Balangan berada pada selisih angka Prevalensi Stunting sebesar 7,47 poin lebih rendah. Dibandingkan dengan realisasi Propinsi Kalimantan Selatan 22,90 selisih poin sebesar 8,37 poin Kabupaten Balangan berada di bawah realisasi Provinsi dan jika dibandingkan dengan realisasi

Nasional Kabupaten Balangan berada di bawah dengan selisih 4,27 poin. Jadi berdasarkan selisih perolehan angka Prevalensi Stunting tahun 2025 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi Prevalensi Stunting Kabupaten Balangan lebih rendah dari Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

Berikut tabel realisasi Prevalensi Stunting seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 dan tahun 2025:

No	Kabupaten/Kota	Prevalensi Stunting	
		2024	2025
1	Tanah Laut	5,6%	6,36%
2	Kotabaru	6,8%	8,9%
3	Banjar	24,6%	26,87%
4	Barito Kuala	9,0%	8,26%
5	Tapin	12,7%	12,62%
6	Hulu Sungai Selatan	5,1%	4,44%
7	Hulu Sungai Tengah	9,3%	12,1%
8	Hulu Sungai Utara	18,6%	19,55%
9	Tabalong	7,8%	8,32%
10	Tanah Bumbu	2,7%	3,02%
11	Balangan	14,58%	14,53%
12	Banjarmasin	3,0%	3,59%
13	Banjarbaru	8,9%	10,19%
	Kalimantan Selatan	9,4%	10%

Secara data capaian kinerja dapat dikatakan bahwa Prevalensi Stunting Pemerintah Kabupaten Balangan capaian kinerjanya di atas Kabupaten Tabalong dan Pemerintah Provinsi serta Nasional. *Faktor dominan yang mempengaruhi* Prevalensi Stunting Kabupaten Balangan adalah

- Konvergensi Intervensi Stunting yang Efektif. Kunci Balangan adalah Intervensi spesifik (kesehatan) dan sensitif (non-kesehatan) berjalan bersamaan, dan program lintas sektor tidak berjalan sendiri-sendiri.
- Penguatan Layanan Kesehatan Primer. Kondisi Balangan Posyandu aktif dan berfungsi, cakupan layanan ibu hamil dan balita relatif baik serta pemantauan tumbuh kembang balita lebih rutin
- Fokus pada 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Balangan menaruh perhatian kuat pada kesehatan ibu hamil, ASI eksklusif, pemberian MP-ASI berkualitas dan edukasi gizi keluarga.
- Peran Pemerintah Desa dan Dana Desa. Di Kabupaten Balangan Dana Desa dimanfaatkan untuk PMT berbasis pangan lokal, sanitasi dan air bersih dan edukasi gizi keluarga. Desa menjadi ujung tombak, bukan hanya objek program.
- Perbaikan Sanitasi dan Lingkungan. Akses jamban sehat meningkat, air bersih lebih terjamin dan edukasi PHBS berjalan.
- Kualitas Data dan Targeting Program. Data sasaran lebih akurat (by name by address), intervensi tepat pada keluarga berisiko stunting dan monitoring rutin berbasis data desa

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.74 sampai dengan tabel 3.77 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Prevalensi Stunting adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk menurunkan Prevalensi Stunting yaitu :**

1. Didukung kebijakan dan kepemimpinan daerah yang kuat:

Upaya ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan menempatkan stunting bukan sebagai isu sektoral kesehatan semata, tetapi sebagai isu strategis pembangunan manusia. Komitmen kebijakan yang kuat menjadi dasar bagi kesinambungan program hingga 2025. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan antara lain:

- Menetapkan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan daerah.

- Integrasi target stunting ke dalam RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD.
 - Pembentukan dan penguatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat kabupaten hingga desa.
2. Mengedepankan konvergensi lintas sektor;
Pendekatan konvergensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi intervensi, karena:
- Menghindari tumpang tindih program.
 - Menyasar determinan stunting secara menyeluruh (gizi, sanitasi, pola asuh, ekonomi).
- Upaya ini menjadi tulang punggung keberhasilan penurunan prevalensi stunting Balangan. Implementasi 8 Aksi Konvergensi Stunting, meliputi: Analisis situasi, perencanaan terintegrasi, penganggaran berbasis kebutuhan, pemantauan dan evaluasi. Sinkronisasi lintas SKPD (Dinas Kesehatan, Dinas PUPRPERKIM, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Sosial).
3. Fokus pada intervensi 1.000 HPK;
Intervensi spesifik ini langsung menyasar akar biologis stunting. Fokus pada kelompok sasaran berisiko tinggi membuat dampak program lebih cepat terlihat dalam penurunan prevalensi. Upaya yang dilakukan antara lain:
- Pemantauan status gizi balita secara rutin.
 - Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita stunting dan ibu hamil KEK.
 - Peningkatan kualitas layanan Posyandu dan Puskesmas.
 - Intervensi kesehatan ibu dan anak pada periode 1.000 HPK.
4. Melibatkan desa, masyarakat, dan pihak eksternal;
Upaya ini memperkuat hasil intervensi gizi dengan memperbaiki kondisi lingkungan dan sosial. Stunting dipahami sebagai masalah multidimensi, sehingga intervensi sensitif menjadi faktor penentu keberlanjutan penurunan prevalensi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan yaitu :
- Peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak.
 - Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - Program ketahanan pangan dan konsumsi protein hewani.
 - Dukungan sosial bagi keluarga berisiko stunting.
5. Menggunakan pendekatan berbasis data dan evaluasi berkelanjutan.
Pendekatan berbasis data memungkinkan penajaman sasaran intervensi, deteksi dini permasalahan dan penyesuaian strategi secara cepat dan tepat. Hal ini meningkatkan akurasi dan dampak program. Dengan kombinasi upaya tersebut, penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Balangan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi membangun fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
6. Percepatan Program Penurunan Angka Stunting
Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan peningkatan koordinasi dan kolaborasi antardinas hingga Tingkat desa, terutama dalam menjangkau wilayah terpencil, mengingat target penurunan angka anak gagal tumbuh (stunting) belum tercapai sesuai rencana.

2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator 2 : Prevalensi Stunting)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja Prevalensi Stunting. Adapun gambaran umum keterikatan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Merupakan program inti dan paling strategis dalam menurunkan prevalensi stunting Kabupaten Balangan tahun 2025
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Membangun sistem kesehatan masyarakat berbasis komunitas yang berkelanjutan.
		Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program ini akan mendukung perlindungan konsumen, peningkatan standar pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan UMKM setempat dalam produksi pangan yang aman dan berdampak positif bagi ekonomi lokal.
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Prevalensi Stunting yaitu:

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan program inti dan paling strategis dalam menurunkan prevalensi stunting Kabupaten Balangan tahun 2025 karena:
 1. Menyasar langsung akar masalah biologis dan sosial stunting
 2. Menggabungkan pendekatan kuratif, preventif, dan promotif
 3. Memperkuat intervensi 1.000 HPK
 4. Mendukung aksi konvergensi lintas sektor
 5. Menjamin keberlanjutan penurunan prevalensi stunting

Dengan optimalisasi UKP dan UKM Kabupaten Balangan tidak hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan masyarakat jangka panjang. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat penyediaan layanan Kesehatan UKM dan UKP rujukan Tingkat daerah kabupaten/kota terdiri dari beberapa kegiatan yang menunjang dalam upaya penurunan stunting, dukungan anggaran digunakan untuk kelas ibu hamil, pendampingan tim ahli spesialis obgyn dan spesialis anak, kelas bayi baru lahir, kelas balita, lomba balita sehat, surveilans gizi, pemberian PMT balita, bermasalah gizi dan ibu hamil KEK dan anemia.



- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan untuk membangun sistem kesehatan masyarakat berbasis komunitas yang berkelanjutan. Peran program ini dalam penurunan Prevalensi Stunting di Kabupaten Balangan 2025:

1. Memperkuat partisipasi dan kapasitas masyarakat.
2. Menjawab determinan stunting berupa perilaku, pola asuh, dan lingkungan.
3. Mengintegrasikan kegiatan promotif dan preventif di tingkat keluarga dan desa.
4. Membantu tercapainya desa lokus stunting yang mandiri dan berkelanjutan.
5. Bersinergi dengan UKP, UKM, dan program lintas sektor → mempercepat penurunan prevalensi stunting.

Dengan pendekatan ini, Balangan tidak hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga membangun sistem kesehatan masyarakat berbasis komunitas yang berkelanjutan. Fokus utama dari program ini adalah pencegahan stunting melalui penguatan kapasitas masyarakat. Tujuan dari program ini untuk:

- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.
- Memperkuat peran desa, kader, dan organisasi masyarakat dalam intervensi stunting.
- Mengurangi determinan stunting berupa perilaku keluarga, sanitasi, dan pola asuh.

Dukungan program ini untuk beberapa kegiatan yang menunjang penurunan stunting antara lain pertemuan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Balangan) dalam percepatan penurunan stunting, Survei PHBS rumah tangga, KIE melalui media masa (video tron dan radio lokal).

Foto kegiatan pertemuan FKUB
(Forum Kerukunan Umat Beragama kab. Balangan)



Foto kegiatan Survei PHBS rumah tangga



Foto kegiatan KIE melalui media masa
(vidio tron dan radio lokal).



- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman di Kabupaten Balangan tahun 2025 menitikberatkan pada penjaminan mutu, keamanan, legalitas, dan pengawasan obat, alat kesehatan, serta produk *makanan dan minuman* yang beredar di masyarakat—terutama melalui perizinan fasilitas kesehatan dan sertifikasi pangan industri rumah tangga (P-IRT). Keberhasilan program ini akan mendukung perlindungan konsumen, peningkatan standar pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan UMKM setempat dalam produksi pangan yang aman dan berdampak positif bagi ekonomi lokal. Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman / penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan NOPIRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh industri rumah tangga terdiri beberapa kegiatan yang menunjang penurunan stunting dukungan anggaran di gunakan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga, pemeriksaan sarana IRTTP dalam rangka pengawalan pemenuhan komitmen penerbitan SPP-IRT, Bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan ke pelaku usaha, Bimtek penilaian mandiri cara produksi pangan olahan yang baik IRTTP bagi pelaku usaha, pengawasan dan pengujian produk IRTTP.

Foto kegiatan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga dan pemeriksaan sarana IRTTP



Bimtek penilaian mandiri cara produksi pangan olahan yang baik IRTTP bagi pelaku usaha



Bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan



Dari ketiga program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.78
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan*	Melaksanakan intervensi spesifik penurunan stunting melalui peningkatan layanan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita	Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil KEK, pemantauan pertumbuhan balita melalui Posyandu, peningkatan cakupan imunisasi dan pemeriksaan

No	Kinerja	Crosscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
				kehamilan <i>Antenatal Care</i> (ANC) dan edukasi gizi dan ASI eksklusif.
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*	Optimalisasi Dana Desa untuk program penanganan stunting di tingkat desa	Pembinaan desa dalam perencanaan program stunting dan monitoring penggunaan Dana Desa untuk kegiatan kesehatan dan gizi
		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*	Meningkatkan ketersediaan dan akses pangan bergizi	Program diversifikasi pangan lokal, pengembangan pekarangan pangan lestari (P2L) dan pembinaan kelompok tani dan ketahanan pangan desa
		Bapperida	Integrasi APBD/APBDes	Mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran program percepatan penurunan stunting agar selaras dengan RPJMD, RKPD dan Renstra SKPD
		Dinas PUPRPERKIM	Pengelolaan Air Bersih, Sanitasi dan Permukiman	Penyediaan air minum layak, sanitasi dasar (jamban sehat), drainase dan lingkungan permukiman
		Dinas Sosial	Program bantuan sosial dan pendampingan keluarga stunting	Penyaluran bantuan sosial dan program keluarga harapan (PKH) serta pendampingan keluarga risiko stunting
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah sehat, penyuluhan gizi, PHBS di sekolah	Program edukasi gizi dan kesehatan reproduksi, penguatan PAUD sebagai bagian intervensi pencegahan stunting

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Prevalensi Stunting di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting kinerja SKPD:

Tabel 3.79
Monev Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Monev Offline	Monev Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	1. Bimtek 8 konvergensi percepatan penurunan stunting	1. Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Prevalensi Stunting	
			2. Rapat koordinasi penentuan target Prevalensi Stunting di Ruang Rapat Bapperida		
			3. Monev laporan capaian program dan Data triwulan dan tahunan untuk evaluasi prevalensi stunting.		

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator 2 : Prevalensi Stunting)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target dari indikator kinerja Prevalensi Stunting tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

- Tenaga kesehatan di Puskesmas tersebar di seluruh kecamatan, cukup untuk melakukan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) karena kegiatan seperti pemeriksaan ANC, imunisasi, PMT, pemantauan pertumbuhan balita, dan penyuluhan gizi rutin dilakukan sesuai jadwal. Efisiensi tinggi, karena SDM dapat menjalankan tugas utama secara konsisten dan merata di seluruh wilayah.
- Jumlah kader per desa cukup, tetapi tugas ganda: pendataan balita, penyuluhan, pemberian PMT, edukasi PHBS, membuat beban kerja tinggi. Efisiensi sedang, karena keterbatasan waktu dan kemampuan multitugas membatasi cakupan kegiatan di desa lokus stunting. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilaksanakan pelatihan tambahan dan pemberdayaan relawan dapat meningkatkan efektivitas.
- Petugas Lintas SKPD (PUPR, Pangan, Sosial, Pendidikan). Tugas lintas sektor meliputi pembangunan SPAM, jamban, pemberdayaan keluarga, edukasi gizi, dan ketahanan pangan. Tingkat efisiensi sedang-rendah, karena koordinasi antar SKPD belum optimal, beberapa desa lokus stunting mengalami keterlambatan implementasi program. Rekomendasi: pelatihan lintas sektor dan penjadwalan terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas dan kolaborasi.

b. Efisiensi Anggaran

• APBD Kabupaten

Digunakan untuk program SPAM, jambanisasi, penyuluhan gizi, dan Posyandu. Efisiensi sedang, karena alokasi cukup, tetapi beberapa desa lokus stunting belum optimal pemanfaatannya. Risiko overlap antar SKPD masih ada, sehingga beberapa kegiatan memerlukan evaluasi dan penyusunan rencana anggaran terpadu. Digunakan untuk program SPAM, jambanisasi, penyuluhan gizi, dan Posyandu. Efisiensi sedang, karena alokasi cukup, tetapi beberapa desa lokus stunting belum optimal pemanfaatannya. Risiko overlap antar SKPD masih ada, sehingga beberapa kegiatan memerlukan evaluasi dan penyusunan rencana anggaran terpadu. Anggaran yang digunakan tahun 2025 sebelum efisiensi yaitu Rp. 157.512.945.069 dan setelah efisiensi yaitu Rp. 172.002.925.202 dengan selisih yaitu Rp. 14.489.980.133.

- **APBDes**

Digunakan untuk pemberdayaan keluarga, rencana aksi desa, rembug stunting, dan pendampingan keluarga berisiko. Efisiensi tinggi, karena alokasi lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan prioritas desa. Program-program ini terbukti mendukung pencapaian target desa lokus stunting.

- **Bantuan Pusat dan NGO**

Digunakan untuk PMT, pelatihan kader, penyuluhan gizi, dan pendampingan balita. Efisiensi tinggi, karena mendukung intervensi spesifik dan sensitif stunting. Tantangan: koordinasi distribusi agar tidak ada desa atau keluarga yang tertinggal. Secara keseluruhan anggaran cukup efisien, namun sinkronisasi antar SKPD dan desa sangat dibutuhkan agar tidak terjadi pemborosan atau overlap program.

c. Efisiensi Waktu

- **Posyandu dan Pemantauan Balita**

Dilaksanakan bulanan secara rutin, termasuk pengukuran gizi balita, pemberian PMT, imunisasi, dan edukasi gizi. Efisiensi tinggi, karena kegiatan berjalan sesuai jadwal dan cakupan merata.

- **Penyuluhan Gizi dan PHBS**

Dilaksanakan triwulan di desa lokus stunting. Efisiensi sedang, karena kadang bersamaan dengan kegiatan desa lain → perlu integrasi jadwal agar lebih optimal.

- **Pemeliharaan SPAM dan Jamban**

Dilaksanakan tahunan atau sesekali, tergantung ketersediaan SDM dan anggaran. Efisiensi rendah-sedang, karena beberapa desa mengalami keterlambatan pemeliharaan, memengaruhi akses air bersih dan sanitasi.

- **Rembug Stunting dan Koordinasi Lintas SKPD**

Dilaksanakan triwulan untuk evaluasi capaian program dan pengambilan keputusan berbasis data. Efisiensi tinggi, karena memudahkan monitoring dan tindak lanjut desa lokus stunting.

**B.8 Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata
(Indikator 1 : Harapan Lama Sekolah)**

Tabel 3.80
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator 1 : Harapan Lama Sekolah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
8.	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	Harapan Lama Sekolah	13,17	13,35	101,37

Target Harapan Lama Sekolah tahun 2025 adalah 13,17. Realisasi tahun 2025 adalah 13,35, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 101,37 persen.

Tabel 3.81
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator 1 : Harapan Lama Sekolah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
8.	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	Harapan Lama Sekolah	13,17	13,35	13,09	12,82	12,61

Target Harapan Lama Sekolah tahun 2025 adalah 13,17. Realisasi tahun 2025 adalah 13,35, Realisasi Tahun 2024 adalah 13,09, Realisasi tahun 2023 adalah 12,82, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 12,61.

Tabel 3.82
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator 1 : Harapan Lama Sekolah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
8.	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	Harapan Lama Sekolah	13,77	13,35	96,95

Target Akhir RPJMD untuk Harapan Lama Sekolah adalah 13,77 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 13,35 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 96,95 persen.

Tabel 3.83
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator 1 : Harapan Lama Sekolah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
8.	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	Harapan Lama Sekolah	13,35	13,18	13,12	13,30	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 13,35, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 13,18, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 13,12, realisasi Nasional 13,30. Sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.80, tabel 3.81, tabel 3.82, dan tabel 3.83 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator 1 : Harapan Lama Sekolah)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.80 adalah target Harapan Lama Sekolah tahun 2025 yaitu 13,17. Realisasi tahun 2025 adalah 13,35, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 101,37 persen tercapai sesuai target kinerja. Harapan Lama Sekolah sebesar 13,35 pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 101,37 persen berarti secara rata-rata penduduk usia 7 tahun akan mampu mengenyam pendidikan formal selama kurang lebih 13,35 tahun (atau setara tingkat 1 Perguruan Tinggi). Harapan Lama Sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor kinerja antara lain adalah:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

Kebijakan lokal yang mendukung pendidikan misalnya program pendidikan gratis, peningkatan fasilitas, pengembangan sumber daya guru, dan kerjasama dengan perguruan tinggi juga merupakan faktor internal organisasi yang membantu memperpanjang masa sekolah. Walaupun evaluasi program *free education* di Balangan menunjukkan beberapa kendala, keberadaan kebijakan ini sendiri menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Salah satu program pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2025 ini adalah pelaksanaan program Kartu Balangan Pintar yaitu memberikan bantuan operasional kepada siswa SD/MI dan SMP/MTS yang tergolong dalam siswa kurang mampu dalam bentuk barang kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas dan buku tulis yang diharapkan meringankan beban untuk sekolah.

Penyerahan Beasiswa Program Kartu Balangan Pintar



Pada tahun 2025, penerima Beasiswa Program Kartu Balangan Pintar tercatat sebanyak 969 pelajar SD/MI dan 542 pelajar SMP/MTs dengan realisasi anggaran sebesar Rp. Beasiswa tersebut diserahkan dalam bentuk perlengkapan sekolah serta tabungan pendidikan yang disalurkan melalui rekening masing-masing siswa. Penyalurannya bekerja sama dengan Bank Kalsel untuk menjamin proses yang transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Untuk pelajar SD/MI mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 1.100.000,00 per orang sedangkan pelajar SMP/MTs mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 1.500.000,00. Beasiswa ini bersumber dari APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025. Melalui Program Kartu Balangan Pintar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan berkomitmen mendorong pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Upaya ini dilakukan guna menciptakan generasi Balangan yang cerdas, berakarakter, dan berdaya saing.

Selain bersumber dari APBD Kabupaten Balangan, Beasiswa Kartu Balangan Pintar juga didukung oleh PT. Adaro melalui pemberian bantuan berupa perlengkapan sekolah. Sebanyak 126 siswa dari jenjang SD, MI, SMP, dan MTs menerima bantuan tersebut. Bantuan diberikan dalam bentuk perlengkapan sekolah, seperti tas, sepatu, seragam, dan kebutuhan penunjang pendidikan lainnya. Dalam pelaksanaannya, program ini turut menggandeng pelaku UMKM di Balangan sebagai mitra. Dana CSR disalurkan langsung kepada UMKM untuk menyiapkan paket perlengkapan sekolah yang kemudian didistribusikan kepada para siswa penerima manfaat. Para siswa yang menerima bantuan merupakan usulan dari pihak sekolah karena berasal dari keluarga kurang mampu dan berisiko putus sekolah. Program ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam memperluas akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di Balangan sekaligus menekan angka putus sekolah.

Penyerahan Beasiswa Program Kartu Balangan Pintar oleh PT ADARO



2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga

Faktor ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor *eksternal* paling dominan yang mempengaruhi kelanjutan pendidikan anak. Ketika kondisi ekonomi keluarga membaik, keluarga cenderung:

- Mampu menanggung biaya pendidikan tambahan (buku, transportasi, seragam).
- Tidak memaksa anak berhenti sekolah karena harus bekerja membantu ekonomi keluarga.

Penelitian lain menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita dan pendapatan rumah tangga berpengaruh kuat terhadap durasi sekolah masyarakat semakin tinggi pendapatan, semakin besar peluang anak

melanjutkan pendidikan lebih tinggi dan meningkatkan HLS. Di Balangan, meningkatnya pendapatan lokal dan pertumbuhan ekonomi daerah (misalnya hasil pertanian, perdagangan) berpotensi memberi ruang keluarga untuk fokus pada pendidikan anak daripada kebutuhan ekonomi jangka pendek.

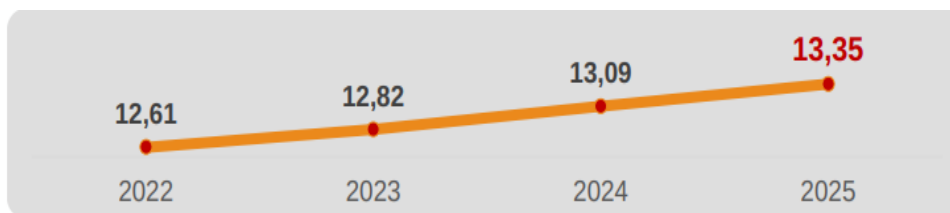
- Kebijakan Pendidikan dan Program Pemerintah di Luar Sekolah

Selain faktor internal sekolah, program sosial dan kebijakan luar sekolah berperan:

- Program wajib belajar dan kebijakan subsidi pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah meningkatkan akses dan mengurangi biaya sekolah.
- Program sosialisasi pentingnya 12 tahun wajib belajar dari pemerintah dan komunitas lokal membantu membentuk persepsi positif terhadap pendidikan lanjutan.

Di Balangan, dukungan kebijakan lokal seperti anggaran pendidikan yang lebih tinggi atau insentif bagi keluarga berpenghasilan rendah membantu menurunkan angka putus sekolah.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.81 adalah target Harapan Lama Sekolah tahun 2025 adalah 13,17. Realisasi tahun 2025 adalah 13,35, Realisasi tahun 2024 adalah 13,09, Realisasi tahun 2023 adalah 12,82, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 12,61. Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024 yaitu 13,09 Harapan Lama Sekolah tahun 2025 mengalami kenaikan realisasi sebesar 0,26 poin, dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 adalah 12,82 Harapan Lama Sekolah tahun 2025 mengalami kenaikan realisasi sebesar 0,53 poin dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 Harapan Lama Sekolah tahun 2025 mengalami kenaikan realisasi sebesar 0,74 poin. Peningkatan sebesar 0,26 tahun (tumbuh 1,99%) dibandingkan dengan tahun 2024. Pertumbuhan pada tahun 2025 meningkat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan selama periode 2022–2024 (1,89%). Berikut grafik perkembangan Harapan Lama Sekolah dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 :



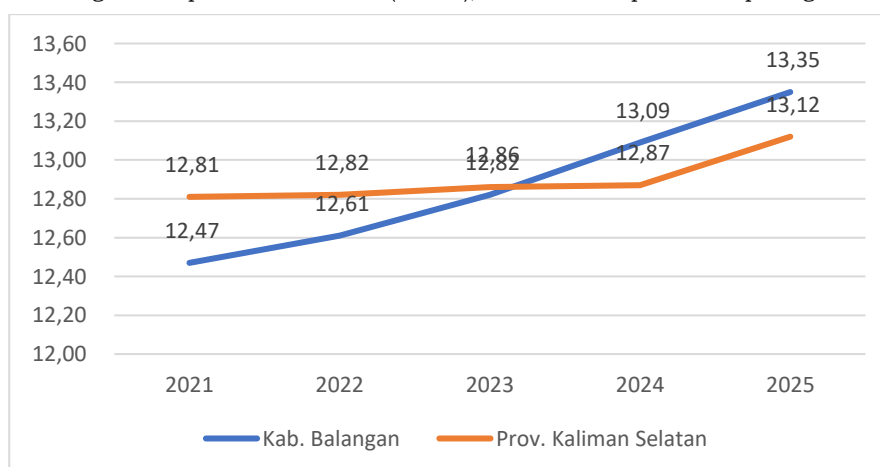
Berdasarkan data ini Harapan Lama Sekolah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan seluruh SKPD dan *stake holder* yang terlibat. Kebijakan Kurikulum Muatan Lokal merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kurikulum Muatan Lokal, yakni kebijakan yang mendorong integrasi konten lokal ke dalam kurikulum sekolah. Integrasi kurikulum lokal bertujuan untuk:

- Memperkuat relevansi pendidikan dengan konteks daerah.
- Meningkatkan keterikatan siswa dengan pembelajaran karena materi yang diajarkan sesuai dengan budaya dan kebutuhan lokal.
- Potensial menurunkan angka putus sekolah karena pendidikan terasa lebih “bermakna” bagi siswa.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.82 adalah target akhir RPJMD untuk Harapan Lama Sekolah adalah 13,77 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 13,35 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 96,95 persen. Berdasarkan data tabel di atas untuk menuju kepada pencapaian target akhir RPJMD tahun 2030 yakni 13,87 diperlukan 0,42 poin, maka Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas baik dalam dokumen perencanaan umum maupun dokumen perencanaan khusus Harapan Lama Sekolah. Karena saat ini Harapan Lama Sekolah hanya berada di 13,35, itu artinya harus melakukan gerakan percepatan setiap tahunnya. Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi Harapan Lama Sekolah ini adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan sosialisasi pentingnya pendidikan ke masyarakat luas untuk mengubah persepsi orang tua dan pelajar terhadap pendidikan lanjutan.
- Program deteksi dini risiko putus sekolah, misalnya melalui pelibatan guru, tokoh masyarakat, dan kader pendidikan di desa.
- Dukungan bantuan berupa beasiswa akan membantu mengurangi beban biaya keluarga sehingga siswa mampu meneruskan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi. Renja Disdikbud menyebutkan peningkatan bantuan beasiswa sebagai bagian dari program prioritas 2025. Langkah percepatan:
 - Penyaluran beasiswa untuk siswa kurang mampu secara lebih cepat dan tepat sasaran. Pada tahun 2024 sebanyak 1.523 peserta didik SD, MI, SMP dan MTs yang telah menerima beasiswa Kartu Balangan Pintar dengan rincian 967 peserta didik SD dan MI serta 556 peserta didik SMP dan MTs. Sedangkan pada tahun 2025 terdapat 1.511 peserta didik penerima beasiswa KBP dengan rincian 969 peserta didik SD dan MI serta 542 peserta didik SMP dan MTs. Pada tahun 2026 telah dianggarkan kembali untuk program beasiswa Kartu Balangan Pintar sebanyak 1000 peserta didik SD dan MI dan 580 peserta didik SMP dan MTs.
- Peningkatan Pelaksanaan Pendidikan Nonformal: Kejar Paket A, B dan C. Selain jalur formal, program *kejar paket* menjadi bagian strategi akselerasi yang membantu kelompok yang tidak mampu atau tidak dapat melanjutkan pendidikan secara formal untuk tetap mendapatkan ijazah dan melanjutkan pendidikan atau kerja. Langkah percepatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan adalah
 - Perluasan akses lokasi layanan Kejar Paket di kecamatan-kecamatan. Pada tahun 2025 terdapat 12 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan dengan jumlah Kelompok Belajar (KEJAR) sebanyak 109 kelompok belajar yang terdiri dari 9 (sembilan) KEJAR PAKET A, 41 (empat puluh satu) KEJAR PAKET B dan 65 (enam puluh lima) KEJAR PAKET C
 - Pendampingan belajar tambahan bagi peserta kejar paket agar lebih siap mengikuti ujian setara formal.
- Percepatan Melalui Kolaborasi dan Kegiatan Pendukung. Kerja sama dengan perguruan tinggi seperti rencana pembukaan kampus ULM di Balangan akan memperluas akses pendidikan tinggi lokal dan meningkatkan motivasi pendidikan lanjutan. Keberadaan perguruan tinggi di wilayah secara realistis dapat meningkatkan jumlah siswa yang menyelesaikan pendidikan hingga tingkat lebih tinggi.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.83 adalah menjelaskan bahwa realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 13,35, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 13,18, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 13,12 realisasi Nasional 13,30. Sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (Tahun), 2021-2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Harapan Lama Sekolah Balangan jika dibandingkan dengan Kalimantan Selatan tergolong cukup baik. Pada tahun 2025, pencapaian angka harapan lama sekolah Kabupaten Balangan meningkat cukup pesat dengan

kenaikan sebesar 0,26 tahun (1,95 persen) dari tahun sebelumnya. Angka ini berada di atas Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 13,12 persen. Dalam rentang waktu tahun 2021 hingga 2024, terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Balangan cenderung mendekati Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan yang cenderung kurang berfluktuatif selama tiga tahun terakhir. Namun, pada tahun 2024 dan 2025 Angka Harapan Lama Sekolah Balangan meningkat hingga berada di atas Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2025 Kabupaten Balangan berada pada urutan ke-4 tertinggi setelah Banjarbaru, Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)					Ranking HLS				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	KALIMANTAN SELATAN	Tanah Laut	12,31	12,32	12,41	12,43	12,70	10	10	10	10	9
2	KALIMANTAN SELATAN	Kotabaru	11,95	12,06	12,07	12,08	12,23	12	12	13	13	13
3	KALIMANTAN SELATAN	Banjar	12,73	13,02	13,03	13,04	13,05	5	3	4	5	6
4	KALIMANTAN SELATAN	Barito Kuala	12,4	12,54	12,55	12,56	12,69	8	7	8	8	10
5	KALIMANTAN SELATAN	Tapin	11,95	12,04	12,33	12,34	12,60	12	13	11	11	11
6	KALIMANTAN SELATAN	Hulu Sungai Selatan	12,38	12,4	12,46	12,48	12,78	9	9	9	9	8
7	KALIMANTAN SELATAN	Hulu Sungai Tengah	12,21	12,22	12,24	12,31	12,58	11	11	12	12	12
8	KALIMANTAN SELATAN	Hulu Sungai Utara	12,92	12,93	13,19	13,21	13,47	3	4	3	3	3
9	KALIMANTAN SELATAN	Tabalong	12,89	12,9	12,91	12,92	13,18	4	5	5	6	5
10	KALIMANTAN SELATAN	Tanah Bumbu	12,48	12,49	12,6	12,61	12,80	6	8	7	7	7
11	KALIMANTAN SELATAN	Balangan	12,47	12,61	12,82	13,09	13,35	7	6	6	4	4
12	KALIMANTAN SELATAN	Kota Banjarmasin	13,94	13,95	13,97	14,01	14,02	2	2	2	2	2
13	KALIMANTAN SELATAN	Kota Banjar Baru	14,82	14,83	14,85	14,86	14,87	1	1	1	1	1

Faktor dominan yang mempengaruhi Harapan Lama Sekolah Pemerintah Kabupaten Balangan adalah

- Akses Pendidikan yang Merata dan Terjangkau. Kondisi Balangan ketersediaan sekolah dasar dan menengah relatif merata, rarak tempuh dan hambatan geografis bukan faktor penghambat utama dan dukungan transportasi dan zonasi berjalan cukup efektif karena akses pendidikan adalah faktor penentu utama HLS.
- Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan. Balangan menunjukkan prioritas anggaran pendidikan yang konsisten, program afirmatif bagi siswa kurang mampu, intervensi pencegahan putus sekolah sejak dini dan ketika pemerintah daerah aktif menjaga keberlanjutan sekolah, HLS meningkat secara struktural.
- Kondisi Sosial Keluarga yang Mendukung Sekolah Anak. Kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan relatif tinggi, anak didorong untuk melanjutkan sekolah, bukan masuk pasar kerja dini, perkawinan usia anak dapat ditekan. Dibandingkan beberapa wilayah lain, faktor ekonomi masih mendorong anak putus sekolah lebih cepat karena budaya pendidikan berpengaruh kuat terhadap HLS.
- Keberhasilan Program Wajib Belajar dan Pendidikan Menengah. Wajib belajar tidak berhenti di jenjang dasar, dorongan melanjutkan ke SMA/SMK cukup kuat, dan pendidikan nonformal (PKBM) berfungsi sebagai jaring pengaman.
- Stabilitas Sosial dan Perlindungan Anak. Lingkungan sosial relatif kondusif, kasus pekerja anak dan masalah sosial dapat ditekan dan perlindungan anak mendukung keberlanjutan sekolah.

- Melanjutkan inovasi pulpendacil untuk pemerataan akses Pendidikan jelaskan sedikit progres dari kinerja ini sampai tahun 2025

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.80 sampai dengan tabel 3.83 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah yaitu :**

- **Peningkatan Akses dan Partisipasi Pendidikan**

Pemerintah Kabupaten Balangan menargetkan peningkatan HLS melalui peningkatan akses pendidikan di semua jenjang:

- Program bantuan biaya pendidikan dan beasiswa: Bantuan finansial seperti *Kartu Balangan Pintar* dan program beasiswa bagi siswa berprestasi atau keluarga kurang mampu mendorong anak tetap sekolah hingga jenjang lebih tinggi.
- Perluasan layanan sekolah di kecamatan/kecamatan terpencil: Memastikan fasilitas pendidikan, terutama SMP/SMA/SMK, tersedia di wilayah yang sebelumnya minim akses.

Dampak terhadap HLS: Mengurangi putus sekolah akibat kendala ekonomi dan jarak, sehingga anak dapat menyelesaikan lebih banyak tahun pendidikan.

- **Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Peningkatan kualitas guru dan pembelajaran merupakan faktor utama agar siswa betah bersekolah lebih lama:

- Pelatihan dan sertifikasi guru untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik.
- Program “Satu Guru, Satu Laptop” untuk mendukung pembelajaran digital dan inovatif di kelas.
- Renovasi dan peningkatan fasilitas sekolah agar lingkungan belajar nyaman dan mendukung prestasi akademik.

Dampak terhadap HLS: Siswa termotivasi melanjutkan sekolah karena kualitas belajar lebih baik dan menarik.

- **Program Pendidikan Nonformal dan Alternatif**

Pemerintah menekankan jalur pendidikan alternatif untuk mereka yang putus sekolah atau tertinggal:

- Program Kejar Paket A, B, C untuk memberikan kesempatan setara SD, SMP, SMA bagi anak-anak dan remaja yang tidak menempuh pendidikan formal.
- Pendampingan belajar dan ujian setara formal untuk memastikan kelulusan dan kesempatan melanjutkan pendidikan.

Dampak terhadap HLS: Menambah jumlah tahun pendidikan yang ditempuh masyarakat, khususnya bagi mereka yang sebelumnya berhenti sekolah.

- **Kebijakan dan Rencana Strategis Pendidikan**

Pemerintah daerah menjadikan HLS sebagai indikator prioritas dalam RPJMD dan Renstra Disdikbud 2021-2026:

- Penetapan target HLS 2025 yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
- Integrasi target HLS ke dalam rencana kerja tahunan Disdikbud (Renja 2025) sehingga seluruh program, anggaran, dan monitoring diarahkan untuk pencapaian HLS.

Dampak terhadap HLS: Kebijakan formal menjadikan HLS sebagai fokus evaluasi dan pengambilan keputusan, sehingga program lebih terarah dan terukur.

- **Kolaborasi dan Dukungan Lingkungan Pendidikan**

Upaya pemerintah juga mencakup kolaborasi lintas sektor:

- Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk memperluas akses pendidikan tinggi lokal, memotivasi siswa melanjutkan pendidikan.
- Lingkungan sekolah yang aman dan mendukung melalui program Kab. Layak Anak (KLA) dan kegiatan anti-bullying.
- Sosialisasi pentingnya pendidikan ke masyarakat dan orang tua untuk mendorong budaya pendidikan yang kuat.

Dampak terhadap HLS: Lingkungan sosial dan pendidikan yang kondusif meningkatkan kemungkinan siswa menyelesaikan pendidikan lebih lama.

- **Monitoring, Evaluasi, dan Percepatan Program**

Pemerintah mengimplementasikan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala untuk menilai efektivitas program:

- Memastikan program bantuan, kejar paket, dan pelatihan guru berjalan sesuai rencana.
- Deteksi dini masalah putus sekolah agar tindakan cepat bisa dilakukan.

Dampak terhadap HLS: Memastikan upaya yang dilakukan efektif dan berkontribusi langsung pada peningkatan Harapan Lama Sekolah.

2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator 1 : Harapan Lama Sekolah)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata dengan indikator kinerja Harapan Lama Sekolah. Adapun gambaran umum keterkaitan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
8.	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	Program Pengelolaan Pendidikan	Menyediakan akses, kualitas, relevansi, alternatif, dan pengawasan yang secara langsung mempengaruhi lamanya anak-anak menyelesaikan pendidikan.
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Menciptakan lingkungan belajar yang efektif sehingga siswa dapat menyelesaikan pendidikan lebih lama.
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah yaitu:

- Program Pengelolaan Pendidikan merupakan program yang menyediakan akses, kualitas, relevansi, alternatif, dan pengawasan yang secara langsung mempengaruhi lamanya anak-anak menyelesaikan pendidikan. Akses Pendidikan program terkait melalui perluasan fasilitas pendidikan hingga ke wilayah terpencil dan bantuan biaya pendidikan melalui *Kartu Balangan Pintar* dan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Dengan tersedianya sekolah di setiap kecamatan dan dukungan finansial, anak-anak tidak lagi terkendala jarak atau biaya untuk melanjutkan pendidikan. Kualitas Pendidikan program terkait yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan melalui pelatihan dan sertifikasi guru, inovasi pembelajaran berbasis teknologi (misal “Satu Guru, Satu Laptop”). Relevansi Kurikulum program terkait adalah implementasi kurikulum berbasis muatan lokal sesuai Perbup No. 21 tahun 2025. Kurikulum yang relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa membuat pembelajaran lebih bermakna. Alternatif Pendidikan Nonformal Program terkait yaitu Program Kejar Paket A, B, C bagi anak-anak dan remaja yang putus sekolah. Program ini menyediakan jalur pendidikan alternatif bagi mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Pengawasan dan Monitoring program terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) berkala terhadap pelaksanaan program pendidikan dan indikator HLS dan deteksi dini risiko putus sekolah dan intervensi cepat. Pengawasan memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran, serta hambatan siswa (ekonomi, sosial, akademik) segera diatasi.
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini mencakup peningkatan kualitas, kompetensi, dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan formal dan nonformal. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif sehingga siswa dapat menyelesaikan pendidikan lebih lama. Komponen utama program PTK di Kabupaten Balangan 2025 meliputi:
 1. Pelatihan dan sertifikasi guru (kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian).

2. Pengembangan kapasitas tenaga kependidikan (kepala sekolah, administrasi, pembina sekolah).
3. Pemberian insentif dan tunjangan untuk motivasi dan kesejahteraan guru.
4. Pendampingan dan supervisi untuk meningkatkan kinerja guru dan sekolah.

Dampak Terhadap Harapan Lama Sekolah yaitu peningkatan motivasi dan retensi siswa dengan adanya Guru yang kompeten dan terlatih dapat mengelola kelas dengan lebih baik dan menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Siswa merasa pembelajaran lebih menantang namun menyenangkan → tidak mudah putus sekolah.

Dari kedua program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.84
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*	Meningkatkan partisipasi sekolah melalui pemerataan layanan pendidikan dasar dan menengah	Pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan, program wajib belajar dan pencegahan anak putus sekolah dan penyediaan bantuan pendidikan (beasiswa dan perlengkapan sekolah).
		Dinas Sosial	Program bantuan keluarga miskin	Penyaluran bantuan sosial pendidikan dan Program Keluarga Harapan (PKH), pendampingan keluarga rentan dan anak berisiko putus sekolah.
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Infrastruktur Pendidikan dan Aksesibilitas	Pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah dan peningkatan akses jalan dan fasilitas pendukung sekolah.
		Dinas Perhubungan	Memastikan ketersediaan dan kelancaran transportasi bagi pelajar	Penyediaan dan pengawasan angkutan pelajar, dan pengaturan lalu lintas di kawasan sekolah. Angkutan pelajar : - Untuk SDN Paringin Selatan 2 mobil Elf - Untuk SMPN 4 PARINGIN 6 mobil Apv 1 mobil Elf 2 mobil Bis

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting kinerja SKPD:

Tabel 3.85
Monev Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Monev Offline	Monev Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata Sasaran Strategis Pemda	Harapan Lama Sekolah	1. Rapat Rapat tim verifikasi beasiswa seribu sarjana	1. Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Harapan Lama Sekolah	

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator 1 : Harapan Lama Sekolah)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target indikator kinerja Harapan Lama Sekolah tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

Fokus pada pemanfaatan guru, tenaga kependidikan, dan pendamping pendidikan secara optimal.

- Distribusi dan Kompetensi Guru. Guru dan tenaga kependidikan telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi, sehingga kompetensi meningkat. Namun, distribusi guru di wilayah terpencil masih terbatas → sebagian siswa tidak mendapatkan layanan pendidikan optimal.
- Pemanfaatan Tenaga Pendamping dan Nonformal. Pendamping Kejar Paket dan guru nonformal digunakan sesuai jumlah peserta. Redistribusi tenaga pendamping telah meningkatkan jangkauan siswa putus sekolah, namun kapasitas di desa terpencil masih perlu diperluas.
- Efisiensi Supervisi dan Monitoring SDM. Supervisi rutin mengurangi tumpang tindih tugas dan memastikan kualitas pembelajaran. Dampak pada HLS optimalisasi SDM meningkatkan kualitas pembelajaran → siswa bertahan lebih lama → HLS meningkat. Kekurangan tenaga di daerah terpencil menjadi tantangan yang menurunkan efisiensi potensial.

b. Efisiensi Anggaran

Fokus: Pemanfaatan dana pendidikan, beasiswa, insentif guru, dan program nonformal.

- Bantuan Biaya Pendidikan. Dana disalurkan berdasarkan data anak usia sekolah → tepat sasaran. Mengurangi risiko putus sekolah akibat kendala ekonomi → HLS meningkat.
- Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan. Insentif diberikan berdasarkan kinerja dan lokasi → meningkatkan motivasi guru. Guru termotivasi → pembelajaran lebih berkualitas → siswa bertahan lebih lama.
- Program Pendidikan Nonformal. Dana dialokasikan sesuai jumlah peserta dan kebutuhan wilayah → mencegah pemborosan. Anak putus sekolah tetap dapat menyelesaikan pendidikan → menambah total tahun sekolah.
- Monitoring dan Evaluasi. Dana monev digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program → alokasi sumber daya lebih efisien. Dampak pada HLS: Penggunaan anggaran efisien → lebih banyak anak terjangkau program pendidikan → lama pendidikan meningkat.
- Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja Harapan Lama sekolah sebesar Rp. 280.522.151.916,00 dan terealisasi sebesar Rp. 210.560.699.329,00 atau sebesar 75,06%.

c. Efisiensi Waktu

Fokus: Kecepatan implementasi program, pendaftaran siswa, dan pelaksanaan pendidikan nonformal.

- Digitalisasi Pendaftaran dan Data Siswa. Mempercepat proses masuk sekolah → anak tidak kehilangan tahun pendidikan.
- Pelaksanaan Program Nonformal. Jadwal fleksibel (sore, weekend) memungkinkan anak pekerja atau remaja putus sekolah tetap mengikuti pendidikan.
- Monitoring dan Intervensi Cepat. Identifikasi anak berisiko putus sekolah → intervensi lebih cepat → mencegah hilangnya waktu pendidikan. Dampak pada HLS: Optimalisasi waktu penggunaan sumber daya memastikan anak menyelesaikan pendidikan tepat waktu → HLS meningkat.

**B.8 Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata
(Indikator 2 : Rata-rata Lama Sekolah)**

Tabel 3.86
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator 2 : Rata-rata Lama Sekolah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
8.	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	Rata-rata Lama Sekolah	8,37	8,34	99,64

Target Rata-rata Lama Sekolah tahun 2025 adalah 8,37. Realisasi tahun 2025 adalah 8,34, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 99,64 persen.

Tabel 3.87
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator 2 : Rata-rata Lama Sekolah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
8.	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	Rata-rata Lama Sekolah	8,37	8,34	8,13	8,03	7,85

Target Rata-rata Lama Sekolah tahun 2025 adalah 8,37. Realisasi tahun 2025 adalah 8,34, Realisasi Tahun 2024 adalah 8,13, Realisasi tahun 2023 adalah 8,03, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 7,85.

Tabel 3.88
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator 2 : Rata Lama Sekolah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
8.	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	Rata-rata Lama Sekolah	9,05	8,34	92,15

Target Akhir RPJMD untuk Rata-rata Lama Sekolah adalah 9,05 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 8,34 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 92,15 persen.

Tabel 3.89
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator 2 : Rata-rata Lama Sekolah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
8.	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	Rata-rata Lama Sekolah	8,34	9,37	8,82	9,07	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 8,34, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 9,37, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 8,82, realisasi Nasional adalah 9,07 dan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.86, tabel 3.87, tabel 3.88, dan tabel 3.89 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator 2 : Rata-rata Lama Sekolah)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.86 adalah target Rata-rata Lama Sekolah tahun 2025 yaitu 8,37. Realisasi tahun 2025 adalah 8,34, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 99,64 persen belum mencapai target kinerja. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah, yaitu rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk di seluruh jenjang pendidikan formal yang telah dijalani. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Balangan pada tahun berjalan sebesar 8,34%, belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 8,37%. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Balangan masih menempuh pendidikan hingga jenjang kelas VIII–IX SMP, sehingga peningkatan keberlanjutan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah masih menjadi tantangan pembangunan daerah.

Belum tercapainya target RLS dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih adanya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang disebabkan oleh keterbatasan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kebutuhan bekerja pada usia sekolah, serta rendahnya motivasi melanjutkan pendidikan. Selain itu, aspek aksesibilitas dan pemerataan layanan pendidikan menengah di beberapa wilayah, termasuk jarak tempuh dan keterbatasan sarana pendukung pendidikan, turut memengaruhi keberlanjutan pendidikan peserta didik. Faktor sosial budaya seperti perkawinan usia dini serta persepsi masyarakat yang menganggap pendidikan dasar atau menengah pertama telah cukup juga menjadi kendala dalam peningkatan lama sekolah.

Di samping itu, perhitungan RLS yang mencakup penduduk usia 25 tahun ke atas menyebabkan tingkat pendidikan penduduk usia dewasa yang relatif rendah pada masa lalu masih memberikan pengaruh terhadap capaian indikator secara agregat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan RLS memerlukan upaya yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan penguatan kebijakan peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah, penanganan peserta didik berisiko putus sekolah, pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan berkelanjutan guna mendorong peningkatan capaian RLS pada periode selanjutnya.

Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,34 pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 99,64 persen dipengaruhi oleh berbagai faktor kinerja antara lain adalah:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

- Komitmen dan Kepemimpinan Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Balangan menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah sebagaimana target peningkatan Rata-rata Lama Sekolah dimasukkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan). Dampak terhadap Rata-rata Lama Sekolah sebagai target RPJMD Pemerintah Kabupaten

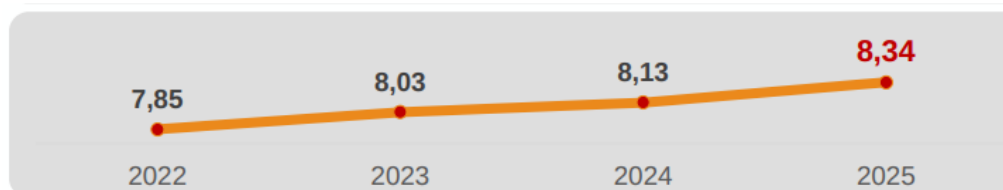
Balangan untuk periode 2025-2029 yaitu kebijakan dan anggaran pendidikan lebih konsisten dan program berkelanjutan memastikan penduduk usia sekolah dan dewasa menyelesaikan jenjang pendidikan lebih tinggi.

- Ketersediaan dan Kualitas Pendidik serta Tenaga Kependidikan. Ketersediaan guru dan tenaga kependidikan relatif mencukupi di sebagian besar wilayah Pemerintah Kabupaten Balangan. Program pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi guru terus dilaksanakan setiap tahunnya. Dampak terhadap realisasi target kinerja Rata-rata Lama Sekolah dengan ketersediaan dan kualitas pendidik dan kependidikan ini diharapkan kualitas pembelajaran meningkat → siswa dan warga belajar mampu menyelesaikan jenjang Pendidikan dan menurunkan angka tinggal kelas dan putus sekolah yang berpengaruh langsung pada Rata-rata Lama Sekolah.
- Program Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan. Pemerintah Kabupaten Balangan secara terus menerus menyediakan program Kejar Paket A, B, dan C yang menjadi instrumen strategis untuk menaikkan Rata-rata Lama Sekolah. Program ini menjangkau penduduk usia produktif dan dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Kabupaten Balangan. Dampak dari program Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan terhadap meningkatnya Nilai Rata-rata Lama Sekolah yaitu menambah jumlah tahun sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan secara langsung meningkatkan nilai Rata-rata lama sekolah kabupaten.
- Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendidikan. Pemerintah Daerah Balangan terus melakukan monitoring capaian pendidikan secara rutin melalui data pendidikan inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dan kelompok dengan Rata-rata Lama Sekolah rendah. Dampak monitoring dan evaluasi ini terhadap Nilai Rata-rata Lama Sekolah Intervensi lebih tepat sasaran dan program perbaikan cepat dilakukan pada daerah atau kelompok yang tertinggal.

2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- Kondisi Sosial dan Kesadaran Masyarakat. Kesadaran masyarakat Balangan terhadap pentingnya pendidikan semakin meningkat hal ini dapat dilihat dari dampak meningkatnya kinerja Nilai Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya. Pendidikan sekarang sudah dipandang sebagai sarana mobilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dampak Kondisi Sosial dan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai Rata-rata Lama Sekolah adalah orang tua mendorong anak menyelesaikan pendidikan hingga SMP/SMA, hal ini terlihat dari jumlah anak di Kabupaten Balangan yang lulus SMP dan SMA meningkat di tahun 2025. Masyarakat dewasa lebih terbuka untuk mengikuti pendidikan kesetaraan karena sekarang syarat untuk mencari kerja yang lebih layak membutuhkan ijazah dengan pendidikan minimal SMA. Rata-rata Lama Sekolah meningkat karena partisipasi belajar semakin luas.
- Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Provinsi. Program Nasional dan Provinsi seperti BOS, KIP, dan bantuan pendidikan lainnya berjalan efektif. Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun memberikan dorongan struktural bagi masyarakat. Dampak Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap Rata-rata Lama Sekolah seperti hambatan biaya pendidikan berkurang dan transisi dari SMP ke SMA/SMK meningkat sehingga Nilai Rata-rata Lama Sekolah menjadi naik.
- Peran Dunia Usaha dan Industri. Dunia usaha mulai mensyaratkan pendidikan minimal SMP/SMA sehingga masyarakat usia kerja yang putus sekolah giat untuk mengikuti program sekolah kesetaraan melalui sekolah kejar Paket A, B dan C. Selain itu untuk mengikuti dunia perpolitikan seperti mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan Aparat Desa harus memiliki ijazah SMA/SMK. Kerja sama industri dengan sekolah menengah dan SMK semakin berkembang. Di Kabupaten Balangan tersedia 3 (tiga) sekolah kejuruan dengan berbagai macam jurusan atau keahlian yang siap untuk terjun di dunia kerja. Dampak peran dunia usaha dan industri ini terhadap Rata-rata Lama Sekolah masyarakat termotivasi menyelesaikan pendidikan agar memenuhi syarat kerja dan anak serta remaja terdorong menyelesaikan jenjang pendidikan lebih tinggi.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.87 adalah target Rata-rata Lama Sekolah tahun 2025 adalah 8,37. Realisasi tahun 2025 adalah 8,34, Realisasi tahun 2024 adalah 8,13, Realisasi tahun 2023 adalah 8,03, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 7,85. Berdasarkan data ini lonjakan tiap tahunnya dari tahun 2024 sebesar 0,21 poin, dari tahun 2023 sebesar 0,31 poin dan dari tahun 2022 sebesar 0,49 poin artinya secara simultan Rata-rata Sekolah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan seluruh SKPD dan *stake holder* yang terlibat. Peningkatan sebesar 0,21 tahun (tumbuh 2,58%) dibandingkan dengan tahun 2024. Pertumbuhan pada tahun 2025 meningkat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan selama periode 2022–2024 yang sebesar 1,77%. Berikut grafik perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025:



Kebijakan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Balangan tahun 2025 tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dalam beberapa dokumen dan regulasi daerah, antara lain dokumen RPJMD Kabupaten Balangan yang menetapkan Rata-rata Lama Sekolah sebagai indikator kinerja utama pembangunan manusia. Rata-rata Lama Sekolah juga tertuang ke dalam dokumen RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025 yang menjabarkan target tahunan peningkatan Rata-rata Lama Sekolah. Setelah tertuang ke dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Balangan Rata-rata Lama Sekolah ini dituangkan ke dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun program dan kegiatan yang secara langsung berdampak pada Rata-rata Lama Sekolah. Kemudian diturunkan lagi kebijakan Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan untuk mengatur pelaksanaan Paket A, B, dan C bagi penduduk dewasa.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.88 adalah target akhir RPJMD untuk Rata-rata Lama Sekolah adalah 9,05 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 8,34 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 92,15 persen. Untuk mencapai target akhir RPJMD 9,05, maka Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas. Karena saat ini Rata-rata Lama Sekolah hanya berada di 8,34, itu artinya harus melakukan gerakan percepatan setiap tahunnya. Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi Rata-rata Lama Sekolah ini adalah rencana aksi yang diarahkan pada kelompok yang paling berpengaruh terhadap peningkatan Rata-rata Lama Sekolah, yaitu:

1. Penduduk usia 15–24 tahun yang belum lulus SMP/SMA.
2. Penduduk usia produktif (25–44 tahun) yang putus sekolah.
3. Wilayah dengan capaian RLS relatif rendah.
4. Kelompok rentan secara sosial dan ekonomi.

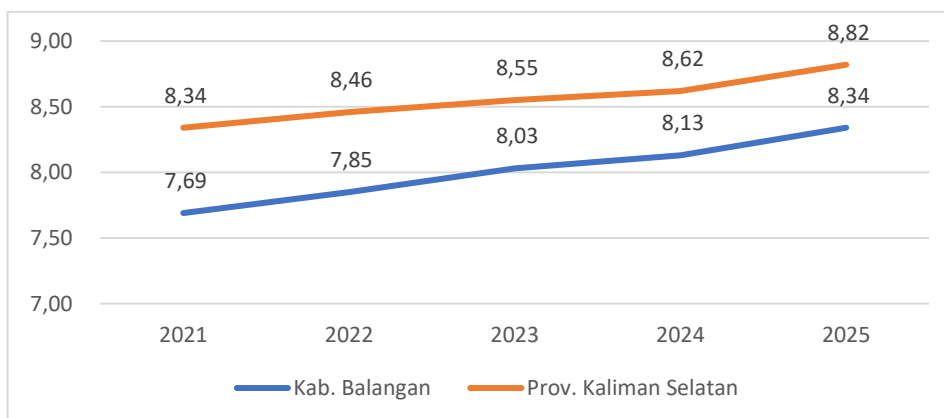
Rencana aksi percepatan realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Balangan tahun 2025:

1. Fokus pada pendidikan kesetaraan sebagai pengungkit utama RLS. Rencana aksinya yaitu penambahan kuota peserta Paket A/B/C. Jadwal belajar fleksibel (malam/hari libur). Pendekatan berbasis desa dan komunitas.
2. Didukung pendataan sasaran yang akurat dan pendekatan aktif. Rencana aksinya yaitu pemutakhiran data penduduk usia 15+ yang belum menyelesaikan sekolah. Kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, desa/kelurahan.
3. Mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Rencana aksinya Adalah sinkronisasi bantuan sosial dengan kewajiban mengikuti pendidikan kesetaraan dan pemberian insentif kehadiran dan kelulusan.
4. Mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan monitoring ketat. Faktor non-akademik sangat memengaruhi keberhasilan penyelesaian Pendidikan dan pendekatan lintas sektor mempercepat hasil. Rencana aksinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana utama. Dinas Sosial dukungan ekonomi. Dinas Kesehatan untuk dukungan kesehatan warga belajar. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk pencegahan putus sekolah dini. Bapperida untuk integrasi perencanaan dan target. Rencana aksi monitoring ketat dilakukan monitoring bulanan peserta pendidikan kesetaraan. Setelah dilakukan monitoring bulanan dilakukan evaluasi capaian Rata-rata Lama Sekolah per kecamatan. Monitoring ketat dilakukan untuk mencegah kegagalan program di tengah jalan.

Dengan implementasi konsisten dan terfokus, rencana aksi ini mampu memberikan percepatan signifikan terhadap capaian Rata-rata Lama Sekolah dan mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia Kabupaten Balangan.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.89 adalah menjelaskan bahwa realisasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 8,34, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 9,37, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 8,82, realisasi Nasional adalah 9,07 dan realisasi Internasional tidak ada sumber data. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 2021-2025 sebagaimana gambar grafik di bawah ini:



Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Balangan tahun 2025 sebesar 8,34 tahun. Artinya, rata-rata penduduk di Kabupaten Balangan yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SMP/ sederajat atau masih belum bisa menikmati program wajib belajar (WAJAR) 13 tahun. Sama kondisinya dengan capaian angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Balangan masih lebih rendah dibandingkan Angka Rata-rata Lama Sekolah provinsi sebesar 8,82 tahun. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Balangan sudah cukup meningkat dari tahun sebelumnya, yakni dengan peningkatan sebesar 0,21 tahun (2,52 persen) dan Balangan menempati urutan ke-7 dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)					Rangking				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	KALIMANTAN SELATAN	Tanah Laut	7,89	7,9	7,92	7,94	8,09	6	7	9	10	10
2	KALIMANTAN SELATAN	Kotabaru	7,46	7,47	7,55	7,56	7,71	13	13	13	13	13
3	KALIMANTAN SELATAN	Banjar	7,52	7,71	7,94	7,95	8,15	12	11	8	9	9
4	KALIMANTAN SELATAN	Barito Kuala	7,55	7,63	7,74	7,92	7,99	11	12	12	11	12
5	KALIMANTAN SELATAN	Tapin	7,77	7,95	8,05	8,15	8,38	7	6	6	6	6
6	KALIMANTAN SELATAN	Hulu Sungai Selatan	7,76	7,79	7,86	8,09	8,18	8	9	10	8	8
7	KALIMANTAN SELATAN	Hulu Sungai Tengah	8,01	8,28	8,29	8,35	8,45	4	4	5	5	4
8	KALIMANTAN SELATAN	Hulu Sungai Utara	7,75	7,76	7,77	7,78	8,00	9	10	11	12	11
9	KALIMANTAN SELATAN	Tabalong	9,11	9,12	9,14	9,15	9,37	3	3	3	3	3
10	KALIMANTAN SELATAN	Tanah Bumbu	7,97	8,25	8,3	8,43	8,44	5	5	4	4	5

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)					Rangking				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
11	KALIMANTAN SELATAN	Balangan	7,69	7,85	8,03	8,13	8,34	10	8	7	7	7
12	KALIMANTAN SELATAN	Kota Banjarmasin	10,2	10,21	10,24	10,35	10,36	2	2	2	2	2
13	KALIMANTAN SELATAN	Kota Banjar Baru	10,96	10,98	10,99	11	11,07	1	1	1	1	1

Faktor dominan yang mempengaruhi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Balangan adalah

- Keberlanjutan Pendidikan Penduduk Dewasa. Kondisi Balangan proporsi penduduk yang menamatkan SMP dan SMA relatif tinggi, generasi dewasa tidak berhenti di pendidikan dasar dibandingkan di Tabalong dan sebagian wilayah Kalsel, masih terdapat penduduk dewasa dengan pendidikan SD atau tidak tamat SD, secara nasional, ketimpangan pendidikan dewasa masih cukup besar. Capaian pendidikan masa lalu menjadi faktor paling dominan RLS.
- Akses Pendidikan Menengah di Masa Lampau. RLS Balangan dipengaruhi oleh ketersediaan SMP dan SMA sejak tahun-tahun sebelumnya, hambatan geografis yang relatif lebih kecil, dan kebijakan pendidikan daerah yang berkelanjutan. Makna penting RLS tinggi hari ini adalah “warisan” dari akses pendidikan yang baik 10–20 tahun lalu.
- Peran Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan. Program Paket A, B, dan C berperan signifikan meningkatkan RLS dan PKBM di Kabupaten Balangan serta menjadi alternatif bagi warga yang sempat putus sekolah dan pekerja usia produktif karena tidak semua daerah mengoptimalkan pendidikan kesetaraan. Balangan relatif konsisten menjadikan PKBM sebagai *second chance education*.
- Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk. Stabilitas ekonomi rumah tangga, ketersediaan pekerjaan yang tidak memaksa putus sekolah dini dan dukungan keluarga terhadap Pendidikan. Balangan tekanan ekonomi terhadap pendidikan relatif terkendali sedangkan daerah lain sebagian penduduk masuk pasar kerja lebih dini.
- Budaya dan Persepsi terhadap Pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka Panjang, sarana mobilitas sosial dan perkawinan usia dini relatif terkendali. Faktor budaya ini berpengaruh besar pada keputusan melanjutkan sekolah dan keberhasilan pendidikan lintas generasi

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.86 sampai dengan tabel 3.89 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah yaitu :**

- Penuntasan pendidikan dasar dan menengah. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan adalah Penguatan program wajib belajar 12 tahun. Melaksanakan monitoring siswa berisiko putus sekolah. Pendampingan transisi dari SMP ke SMA/SMK.
- Penjangkauan penduduk dewasa yang putus sekolah. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan adalah Penguatan Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan melalui penyelenggaraan Program Paket A, B, dan C secara berkelanjutan. Penambahan kuota peserta dan jadwal belajar fleksibel. Pendekatan berbasis desa dan komunitas.
- Pengurangan ketimpangan pendidikan antarwilayah dan kelompok sosial dan terintegrasi lintas sektor (crosscutting SKPD). Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan melalui kolaborasi dengan Dinas Sosial (dukungan ekonomi), Dinas Kesehatan (kesehatan warga belajar), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (perlindungan anak), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (data kependudukan), dan Bapperida (perencanaan dan target).

- Inovasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan terkait Rata-rata Lama Sekolah adalah inovasi Kartu Balangan Pintar (KBP). Inovasi Beasiswa Kartu Balangan Pintar merupakan salah satu strategi intervensi pemerintah daerah yang berperan signifikan dalam mendongkrak capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Program ini dirancang untuk mengurangi hambatan ekonomi yang menjadi penyebab utama anak putus sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Melalui pemberian bantuan biaya pendidikan secara berkelanjutan, siswa dari keluarga kurang mampu memperoleh jaminan untuk tetap melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator 2 : Rata-rata Lama Sekolah)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata dengan indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah. Adapun gambaran umum keterikatan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
8.	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini menyentuh faktor-faktor kunci yang secara langsung menentukan lamanya penduduk menempuh pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program ini berperan langsung dalam meningkatkan keberlangsungan, kualitas, dan keberhasilan penyelesaian pendidikan, yang merupakan faktor kunci pembentuk RLS
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah yaitu:

- Program Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Balangan tahun 2025 merupakan program yang menyentuh faktor-faktor kunci yang secara langsung menentukan lamanya penduduk menempuh Pendidikan. Program ini relevan dan selaras dengan indikator kinerja Rata-Rata Lama Sekolah. Memberikan dampak langsung melalui pendidikan kesetaraan. Peningkatan pelayanan pendidikan kesetaraan antara lain pemberian dan dukungan Dana dari Pemerintah Daerah dan APBN untuk Operasional Pendidikan Kesetaraan dengan jumlah PKBM sebanyak 12 lembaga dan Kelompok Belajar yang tersebar hampir pada setiap Desa di Kecamatan sebanyak (Paket A, 6 Pokjar, Paket B, 12 Pokjar dan Paket C ada 12 Pokjar). Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan prasarana pendidikan, pada tahun 2025 ada 258 paket pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah dari jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan. Menjaga keberlanjutan pendidikan melalui pencegahan putus sekolah. Didukung oleh peningkatan kualitas pendidik, akses, dan data. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan tepat sasaran, Program Pengelolaan Pendidikan menjadi instrumen utama pencapaian target Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Balangan tahun 2025.
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan program yang berperan langsung dalam meningkatkan keberlangsungan, kualitas, dan keberhasilan penyelesaian pendidikan, yang merupakan faktor kunci pembentuk RLS. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Balangan 2025 mendorong peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah melalui:
 - Peningkatan program beasiswa prestasi melalui beasiswa bagi Siswa Nilai Tertinggi Kelulusan Peringkat 1 s.d. 3 Jenjang SD/MI dan Jenjang SMP/MTS.
 - Pelaksanaan program Kartu Balangan Pintar yaitu memberikan bantuan operasional kepada 1.580 siswa SD/MI dan SMP/MTS yang tergolong dalam siswa kurang mampu dalam bentuk barang kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas dan buku tulis yang diharapkan meringankan beban untuk sekolah.

Dari kedua program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.90
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*	Perluasan akses pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan kesetaraan paket A/B/C.	Pencegahan dan penanganan anak putus sekolah, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat dewasa, peningkatan mutu pembelajaran dan sarana pendidikan, program kejar paket dan literasi masyarakat.
		Bapperida	Integrasi program lintas sektor dalam RKPD dan APBD.	Melaksanakan Musrenbang dan forum lintas perangkat daerah untuk menetapkan prioritas program penuntasan wajib belajar, pendidikan kesetaraan, dan pengurangan angka putus sekolah
		Dinas Sosial	Bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.	Menyalurkan bantuan sosial dan PKH komponen Pendidikan, pendampingan keluarga rentan dan anak berisiko putus sekolah
		Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Pelatihan berbasis kompetensi	Pelatihan kerja berbasis kompetensi, sertifikasi keterampilan bagi lulusan pendidikan kesetaraan.
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program pendidikan untuk anak terlantar, remaja putus sekolah, dan perempuan dewasa.	Pembinaan PKBM dan kegiatan literasi desa, optimalisasi Dana Desa untuk mendukung kegiatan pendidikan masyarakat.
		Dinas PUPRPERKIM	Pendukung Infrastruktur Sosial	Rehabilitasi gedung sekolah rusak, peningkatan akses jalan menuju sekolah.

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting kinerja SKPD:

Tabel 3.91
Monev Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Monev Offline	Monev Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	Rata-rata Lama Sekolah	Rapat Rapat tim verifikasi beasiswa seribu sarjana	Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Rata-rata Lama Sekolah	

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator 2 : Rata-rata Lama Sekolah)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

SDM yang terlibat: guru, tutor pendidikan nonformal, tenaga administrasi, pengawas, kepala sekolah. Strategi Efisiensi:

1. Optimalisasi jumlah guru dan tutor: penempatan merata sesuai kebutuhan wilayah.
2. Peningkatan kompetensi SDM: pelatihan terpadu agar satu tenaga pendidik dapat mengajar lebih efektif dan menangani berbagai jenjang pendidikan.

b. Efisiensi Anggaran

Anggaran pendidikan digunakan untuk: gaji guru, operasional sekolah, pendidikan nonformal, beasiswa, sarana-prasarana, dan program pendukung. Strategi Efisiensi:

1. Prioritas kegiatan berdampak langsung pada RLS: misalnya pendidikan kesetaraan dan bantuan biaya pendidikan bagi keluarga miskin.
2. Integrasi program lintas SKPD: meminimalkan tumpang tindih anggaran, misal Dinas Sosial dan Disdikbud bersinergi dalam bantuan siswa.
3. Pemanfaatan teknologi: e-learning, monitoring online, dan pendataan digital mengurangi biaya operasional manual.
4. Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja Rata rata Lama sekolah sebesar Rp. 280.522.151.916,00 dan terealisasi sebesar Rp. 210.560.699.329,00 atau sebesar 75,06%

c. Efisiensi Waktu

Waktu menjadi sumber daya penting, terutama bagi:

- Peserta didik dewasa yang bekerja,
- Guru dan tutor nonformal yang melayani lebih dari satu lokasi.

Strategi Efisiensi:

1. Jadwal belajar fleksibel: kelas malam atau weekend bagi warga dewasa.
2. Pembelajaran berbasis modul dan daring: mengurangi waktu perjalanan dan memastikan kelancaran proses belajar.
3. Perencanaan terpusat: mengurangi waktu koordinasi yang tidak produktif antar SKPD.

B.9 Sasaran Strategis 9 Menurunnya Kemiskinan Daerah (Indikator Angka Kemiskinan)

Tabel 3.92
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator Angka Kemiskinan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
9.	Menurunnya Kemiskinan Daerah	Angka Kemiskinan	4,62	4,64	99,57

Target Angka Kemiskinan tahun 2025 adalah 4,62. Realisasi tahun 2025 adalah 4,64, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 99,57 persen.

Tabel 3.93
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator Angka Kemiskinan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
9.	Menurunnya Kemiskinan Daerah	Angka Kemiskinan	4,62	4,64	4,87	5,22	5,83

Target Angka Kemiskinan tahun 2025 adalah 4,62. Realisasi tahun 2025 adalah 4,64, Realisasi Tahun 2024 adalah 4,87, Realisasi tahun 2023 adalah 5,22, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 5,83.

Tabel 3.94
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator Angka Kemiskinan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
9.	Menurunnya Kemiskinan Daerah	Angka Kemiskinan	3,55	4,64	69,30

Target Akhir RPJMD untuk Angka Kemiskinan adalah 3,55 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 4,64 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 69,30 persen.

Tabel 3.95
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator Angka Kemiskinan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
9.	Menurunnya Kemiskinan Daerah	Angka Kemiskinan	4,64	4,67	3,84	8,25	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Angka Kemiskinan Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 4,64, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 4,67, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 3,84 realisasi Nasional adalah 8,25. Sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.92, tabel 3.93, tabel 3.94, dan tabel 3.95 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator Angka Kemiskinan)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.92 adalah target Angka Kemiskinan tahun 2025 yaitu 4,62. Realisasi tahun 2025 adalah 4,64, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 99,57 persen. Angka Kemiskinan sebesar 4,64 pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 99,57 persen. Analisa faktor-faktor yang menyebabkan kinerja belum tercapai sesuai target dan Angka Kemiskinan masih relatif tinggi adalah:

1. Akses terbatas terhadap sumber-sumber ekonomi, seperti modal dan pasar, sehingga membatasi peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Terutama di Kecamatan Halong dan Kecamatan Tebing Tinggi.
2. Kualitas pendidikan rendah: Rata-rata lama sekolah yang masih rendah dapat membatasi peluang dan persaingan dunia kerja terkait kualitas sumber daya manusia.
3. Akses infrastruktur dan transportasi: Keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan transportasi dapat menghambat distribusi barang dan jasa, serta membatasi mobilitas penduduk untuk mencari pekerjaan atau peluang ekonomi lainnya. (Desa desa di Halong dan Tebing Tinggi)
4. Keterbatasan akses kesehatan dan gizi: Kurangnya akses ke layanan kesehatan dan pemenuhan gizi seimbang dapat berdampak negatif pada produktivitas dan kesehatan masyarakat, serta memperburuk kondisi kemiskinan.
5. Masih tingginya Angka Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan di level Nasional dan Kabupaten Balangan di level Kalsel

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi kinerja Angka Kemiskinan antara lain adalah:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

- Keberhasilan dari Program dan Kebijakan Daerah. Program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan memberikan bantuan modal usaha dan akses perbankan bagi pelaku usaha kecil. Dampak yang diharapkan dari program ini meningkatnya pendapatan rumah tangga miskin yang membuka usaha mikro kecil menengah.
- Program Bantuan Sosial Terarah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), sembako, dan subsidi pendidikan/Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Balangan. Dampak dari bantuan ini membantu mengurangi beban ekonomi sehari-hari dan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi sehingga penduduk miskin tidak semakin jatuh miskin. Keberhasilan dari beberapa program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan ini tidak terlepas dari Monitoring dan Evaluasi Program yang berkelanjutan setiap tahunnya. Monitoring dilakukan rutin terhadap program pengentasan kemiskinan serta dilakukan perbaikan program berbasis data aktual penduduk miskin di Kabupaten Balangan.

2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- Kondisi Ekonomi Makro yaitu pertumbuhan ekonomi nasional dan regional yang positif dan inflasi terkendali sehingga daya beli masyarakat stabil. Dengan kondisi ekonomi yang stabil dan inflasi terkendali berdampak pada penduduk miskin lebih mudah mendapat peluang kerja atau usaha lebih besar.
- Dukungan Pemerintah Provinsi dan Pusat melalui program Dana Desa, BLT Pusat, dan program Kartu Prakerja dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan sehingga memperbesar cakupan bantuan dan akses layanan kepada penduduk miskin di Kabupaten Balangan.
- Peran Lembaga Non-Pemerintah dan Swasta berupa bantuan NGO dan perusahaan dalam bentuk pelatihan, modal, dan program CSR dengan menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk program pengentasan kemiskinan. Dengan bantuan dari Lembaga non pemerintahan ini diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui dukungan tambahan.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.93 adalah target Angka Kemiskinan tahun 2025 adalah 4,62. Realisasi tahun 2025 adalah 4,64, Realisasi tahun 2024 adalah 4,87, Realisasi tahun 2023 adalah 5,22, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 5,83. Berdasarkan data ini lonjakan tiap tahunnya dari tahun 2025 ke 2024 adalah sebesar 0,23 poin, tahun 2023 sebesar 0,58 poin, tahun 2022 sebesar 1,19 poin artinya secara simultan Angka Kemiskinan mengalami penurunan dari tahun ke tahun meskipun tahun 2025 Angka Kemiskinan belum mencapai target kinerja. Hal ini disebabkan oleh komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan seluruh SKPD dan *stake holder* yang terlibat. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan terkait Angka Kemiskinan antara lain melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan kegiatan melaksanakan pelatihan kewirausahaan dan UMKM untuk meningkatkan keterampilan ekonomi warga miskin dan pemberian akses modal usaha dan program pendampingan agar usaha kecil berkelanjutan. Selain itu ada juga Bantuan Sosial

Terpadu berupa BLT, sembako, dan subsidi pendidikan/kesehatan bagi keluarga miskin serta program bedah rumah layak huni dan penyediaan air bersih.

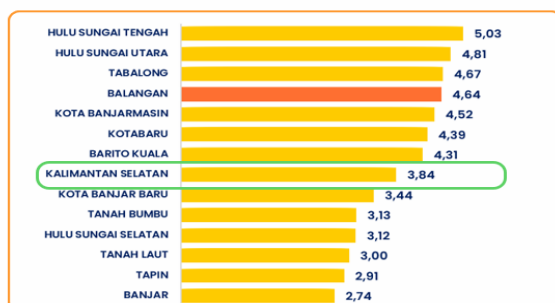
Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.94 adalah target akhir RPJMD untuk Angka Kemiskinan adalah 3,55 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 4,64 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 69,30 persen diperlukan 1,09 poin untuk mencapai target akhir RPJMD. Berdasarkan data tabel di atas untuk menuju kepada pencapaian target akhir RPJMD tahun 2030 yakni 3,55, maka Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas. Karena saat ini Kemiskinan hanya berada di 4,64, itu artinya harus melakukan gerakan percepatan setiap tahunnya. Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi Angka Kemiskinan ini adalah agar target penurunan Angka Kemiskinan tercapai lebih cepat dan berkelanjutan, melalui intervensi multisektoral yang melibatkan Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat, dan pemangku kepentingan lainnya. Data penduduk miskin di Kabupaten Balangan menggunakan DTKS untuk target tepat sasaran, selain itu koordinasi antar SKPD dan pemantauan rutin mempercepat pencapaian target dan melibatkan NGO, dunia usaha, dan masyarakat untuk mendukung implementasi rencana aksi tersebut. Rencana aksi difokuskan pada pendapatan, akses sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.95 adalah menjelaskan bahwa realisasi Angka Kemiskinan Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 4,64, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 4,67, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 3,84 dan realisasi Nasional adalah 8,25. Sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Realisasi Angka Kemiskinan Kabupaten Balangan tahun 2025 sebesar Angka Kemiskinan jika dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan berada di bawah dengan selisih poin sebesar -0,03, dibandingkan dengan realisasi Propinsi selisih poin sebesar 0,80 Kabupaten Balangan berada di atas realisasi Provinsi. Berikut data realisasi Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2025:

Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalsel 2025 (%)

SENSUS EKONOMI 2025



- **Persentase Penduduk Miskin Balangan** tahun 2025 sebesar **4,64 persen** menduduki peringkat ke **4 dari 13** kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai kemiskinan tertinggi.
- Persentase Penduduk Miskin Balangan tahun 2025 masih berada diatas persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 3,84 persen.

Kabupaten/Kota & Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)		
	2024	2025	Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)
TANAH LAUT	3.74	3.00	-0.74
KOTABARU	4.45	4.39	-0.06
BANJAR	2.36	2.74	0.38
BARITO KUALA	4.36	4.31	-0.05
TAPIN	3.33	2.91	-0.42
HULU SUNGAI SELATAN	3.38	3.12	-0.26
HULU SUNGAI TENGAH	5.81	5.03	-0.78
HULU SUNGAI UTARA	5.75	4.81	-0.94
TABALONG	5.64	4.67	-0.97
TANAH BUMBU	3.41	3.13	-0.28
BALANGAN	4.87	4.64	-0.23
KOTA BANJARMASIN	4.58	4.52	-0.06
KOTA BANJAR BARU	3.79	3.44	-0.35
KALIMANTAN SELATAN	4.11	3.84	-0.27

Faktor dominan yang mempengaruhi Angka Kemiskinan Kabupaten Balangan adalah:

- Struktur dan Kualitas Lapangan Kerja. Kondisi Balangan lapangan kerja didominasi sektor pertanian tradisional, jasa informal dan UMKM skala kecil. Banyak pekerja berada pada upah rendah dan pekerjaan tidak tetap sehingga berdampak terhadap kemiskinan pendapatan rumah tangga rentan fluktuasi dan keluar-masuk garis kemiskinan (*near poor*).
- Produktivitas Ekonomi Lokal dan UMKM. UMKM Balangan cukup banyak, namun produktivitas rendah, pasar terbatas dan nilai tambah kecil karena BUMDes belum sepenuhnya menjadi pengungkit ekonomi desa jika dibandingkan dengan Kabupaten Tabalong lebih terhubung ke pasar regional. Ekonomi hidup tapi belum cukup kuat mengangkat rumah tangga miskin secara permanen.

- Akses dan Efektivitas Perlindungan Sosial. Kondisi Balangan bantuan sosial relatif tepat sasaran, kemiskinan ekstrem dapat ditekan namun bantuan masih bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya produktif. Bansos efektif menahan kemiskinan agar tidak naik, tetapi tidak cukup untuk menurunkannya signifikan.
- Pendidikan dan Kualitas SDM. Rata-rata lama sekolah dan HLS Balangan relatif baik namun mismatch dengan kebutuhan kerja, keterampilan teknis dan wirausaha masih terbatas sehingga dampak pendidikan belum sepenuhnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan dan penduduk berpendidikan menengah masih masuk sektor informal.
- Karakteristik Kemiskinan Desa. Kemiskinan Balangan banyak terkonsentrasi di desa akses ekonomi terbatas dan ketergantungan sektor primer, biaya hidup relatif rendah untuk menekan angka kemiskinan namun pendapatan juga rendah sehingga sulit naik kelas. Dibandingkan Nasional kemiskinan perkotaan lebih mahal, dan Provinsi untuk desa-desa terpencil masih menjadi kantong kemiskinan.
- Akses Infrastruktur dan Konektivitas. Infrastruktur dasar relatif membaik namun konektivitas ekonomi (pasar, logistik, digital) belum optimal. Infrastruktur fisik yang ada tetapi infrastruktur ekonomi belum maksimal.

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.92 sampai dengan tabel 3.95 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk menurunkan Angka Kemiskinan adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk menurunkan Angka Kemiskinan yaitu :**

- Upaya Pemerintah Kabupaten Balangan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat bersifat komprehensif dan terintegrasi, mencakup:
 1. Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan. Fokus pada keterampilan yang dibutuhkan di pasar lokal, seperti pertanian modern, kerajinan, perdagangan, dan jasa.
 2. Fasilitas modal usaha dan pendampingan teknis. Bantuan modal berbasis program pemerintah daerah dan pusat, disertai pendampingan pengelolaan usaha.
 3. Pengembangan usaha lokal melalui inkubasi dan manajemen kualitas. Program pendampingan usaha lokal untuk meningkatkan kualitas produk, pemasaran, dan manajemen bisnis.
 4. Fasilitasi akses pasar untuk produk lokal. Fasilitasi pemasaran produk lokal melalui pameran, online marketplace, dan kerjasama dengan toko/ritel regional.

Sinergi seluruh upaya ini mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga, kemandirian ekonomi masyarakat, dan berkontribusi langsung pada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Balangan.

- Melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Koordinasi Lintas SKPD sehingga berdampak pada program tepat sasaran dan penggunaan anggaran dan SDM lebih efisien yaitu :
 - Data Terpadu Keluarga Miskin (DTKS) untuk target program yang tepat sasaran.
 - Koordinasi antar SKPD dalam program sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi.
 - Evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.
- Melaksanakan dan melanjutkan program pengentasan kemiskinan Kabupaten Balangan Tahun 2025 sebagai berikut:
 - Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Kabupaten Balangan melalui Dinas PUPRPERKIM, Dinas Sosial telah melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni sepanjang tahun 2025, peningkatan sanitasi layak, peningkatan perpipaan air bersih dan lain-lain.
 - Beasiswa Pendidikan. Program beasiswa seribu sarjana kepada penduduk berKTP Balangan yang bekerja sama dengan 19 Kampus di Banjarmasin, Balangan, Banjarbaru, HSU. Beasiswa Kartu Balangan Pintar untuk siswa SD/MI dan SMP/MTs dengan total bantuan mencapai 21 Milyar.
 - Bantuan Modal Usaha dan Peningkatan Skill SDM. Bantuan usaha sebesar 5 juta oleh CSRAdaro (PT. SIS bersama Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja) kepada UMKM Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar entrepreneur capacity building UMKM yang diikuti 41 UMKM bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) sebanyak 200 orang dengan 3.000.000/orang.
 - Rehabilitasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, UHC berupa BPJS PBI, Jaminan Kematian. Rehabilitasi fasilitas

pelayanan Kesehatan seperti rehabilitasi bangunan puskesmas, TPS B3, perluasan Gedung, rehabilitasi Gedung apotek dan rumah dinas dokter. Pemberian BPJS PBI kepada seluruh penduduk ber-KTP Balangan. Jaminan kematian melalui BPJS ketenagakerjaan.

- Penyaluran Bantuan Permakanan dan Alat Bantu. Pemberian pemakanan kepada disabilitas anak terlantar dan lansia terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Balangan (Program Rehabilitasi Sosial). Penyediaan alat bantu kepada Masyarakat rentan terutama disabilitas terlantar, lansia terlantar dan anak terlantar yang memerlukan bantuan alat bantu Dinas Sosial Kabupaten Balangan (Program Rehabilitasi Sosial).
- Pelaksanaan Pasar Murah yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- Pelaksanaan Koordinasi antar SKPD dan instansi vertikal untuk pencegahan pernikahan usia dini.

Berbagai macam bantuan dan program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan Bersama dengan K/L/Instansi lainnya. Pada tahun 2025 dengan adanya berbagai program pengentasan kemiskinan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi perekonomian rumah tangga yang ditunjukkan adanya penurunan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Namun perlu menjadi perhatian bahwa program bantuan dan peningkatan kualitas hidup tidak cukup hanya diberikan kepada rumah tangga miskin saja melainkan perlu perhatian lebih kepada kelompok rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan agar dapat meningkatkan perekonomian mereka sehingga ekonomi semakin tumbuh dan kesejahteraan semakin merata yang dapat menurunkan angka kemiskinan lebih signifikan lagi.

2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator Angka Kemiskinan)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Menurunnya Kemiskinan Daerah dengan indikator kinerja Angka Kemiskinan. Adapun gambaran umum keterikatan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
9.	Menurunnya Kemiskinan Daerah	Program Pemberdayaan Sosial	Pendapatan naik, lapangan kerja terbuka
		Program Rehabilitasi Sosial	Kebutuhan dasar terpenuhi, risiko miskin ekstrem rendah
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Keterampilan naik → peluang kerja dan pendapatan meningkat
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Angka Kemiskinan yaitu:

- Program Pemberdayaan Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2025 merupakan program yang menyentuh faktor-faktor kunci yang secara langsung menentukan tingkat kesejahteraan dan kemampuan masyarakat keluar dari garis kemiskinan. Program ini relevan dan selaras dengan indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin serta mendukung penurunan kemiskinan ekstrem secara terukur dan berkelanjutan. Program ini memberikan dampak langsung melalui penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat miskin dan rentan miskin. Dukungan intervensi dilakukan melalui sinergi program nasional dan daerah, antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menjaga daya beli dan stabilitas konsumsi rumah tangga miskin. Bantuan ini berfungsi sebagai pengaman sosial (*social safety net*) agar keluarga miskin tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan pangan. Selain perlindungan sosial, program ini diperkuat dengan pemberdayaan ekonomi melalui pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pelatihan keterampilan kerja, serta bantuan modal usaha bagi keluarga penerima manfaat. Pada Tahun 2025, pemberdayaan difokuskan pada peningkatan kapasitas usaha mikro berbasis potensi desa seperti usaha perdagangan kecil, pengolahan hasil pertanian, serta usaha rumah tangga produktif. Pendampingan sosial dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan usaha dan mendorong

graduasi mandiri penerima bantuan. Program ini juga didukung oleh peningkatan kualitas pendamping sosial, validasi dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Melalui pendekatan berbasis data dan verifikasi lapangan, ketepatan sasaran program semakin meningkat sehingga meminimalkan inclusion error dan exclusion error.

- Program Rehabilitasi Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2025 merupakan program yang menyasar kelompok rentan dan bermasalah sosial yang berpotensi terjerumus atau berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Program ini berperan penting dalam mendukung pencapaian indikator kinerja penurunan angka kemiskinan melalui pemulihan fungsi sosial, peningkatan kemandirian, dan reintegrasi sosial masyarakat. Program ini relevan dengan indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin karena menyentuh kelompok sasaran seperti lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar, korban kekerasan, serta masyarakat miskin yang mengalami kerentanan sosial. Tanpa intervensi rehabilitatif, kelompok ini berisiko mengalami kemiskinan kronis dan ketergantungan jangka panjang. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial dilakukan melalui beberapa bentuk intervensi, antara lain:
 1. Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga dan Komunitas. Pendampingan sosial kepada individu dan keluarga bermasalah sosial untuk memulihkan fungsi sosialnya. Pendekatan ini bertujuan agar penerima manfaat dapat kembali menjalankan peran sosial dan ekonomi secara mandiri.
 2. Bantuan Sosial dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas berat sebagai bentuk perlindungan sosial. Bantuan ini menjaga keberlangsungan hidup serta mencegah penurunan kondisi kesejahteraan.
 3. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan. Pelatihan keterampilan sederhana bagi kelompok rentan produktif guna meningkatkan peluang usaha atau pekerjaan. Intervensi ini mendorong transformasi dari ketergantungan menjadi kemandirian.
 4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Rehabilitasi rumah bagi keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas hunian yang layak dan sehat. Perbaikan kondisi tempat tinggal berdampak langsung terhadap kualitas hidup dan kesehatan keluarga.
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ini juga didukung oleh validasi data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pendamping sosial lapangan, serta koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2025 merupakan program yang berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan miskin. Program ini menyentuh faktor-faktor mendasar yang secara langsung mempengaruhi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar serta mencegah terjadinya kemiskinan ekstrem. Program ini relevan dan selaras dengan indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin karena berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) untuk melindungi rumah tangga dari risiko sosial dan ekonomi seperti kehilangan pendapatan, sakit, disabilitas, lanjut usia terlantar, maupun dampak bencana. Keberhasilan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2025 didukung oleh pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pendampingan sosial yang intensif, serta koordinasi lintas sektor dan pemerintah desa untuk memastikan ketepatan sasaran

Dari ketiga program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.96
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Menurunnya Kemiskinan Daerah	Dinas Sosial*	Memberikan bantuan dan perlindungan sosial	Penyaluran bantuan sosial, BLT, sembako, rumah layak huni, dan perlindungan sosial

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
			kepada masyarakat miskin dan rentan.	lainnya, serta pengelolaan data kemiskinan seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pendampingan keluarga miskin dan kelompok rentan.
		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*	Melaksanakan Pelatihan dan Penyuluhan kepada petani serta penyediaan bibit dan infrastruktur pertanian	Penyuluh ataupun PPL di lapangan memberikan edukasi kepada petani, terutama petani kecil, sistem irigasi, JUT, gudang penyimpanan yang memadai, alsintan, penyediaan bibit, benih, dan pupuk
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.*	Pemanfaatan dana desa untuk pengentasan kemiskinan	Pembinaan BUMDes dan usaha ekonomi desa, program pemberdayaan masyarakat desa.
		Bapperida	Koordinasi program antar SKPD, perencanaan berbasis data, evaluasi, dan monitoring.	Melaksanakan Musrenbang, forum TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), dan konsultasi lintas sektor untuk menetapkan prioritas wilayah dan kelompok sasaran intervensi kemiskinan
		Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pemberdayaan UMKM, pelatihan kewirausahaan, akses pasar, dan modal usaha.	Pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, pengembangan wirausaha baru dan akses permodalan dan pemasaran
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program beasiswa, paket pendidikan A/B/C, dan pelatihan keterampilan.	Beasiswa prestasi melalui beasiswa bagi Siswa Nilai Tertinggi Kelulusan Peringkat 1 s.d. 3 Jenjang SD/MI dan Jenjang SMP/MTS. Kartu Balangan Pintar yaitu memberikan bantuan operasional kepada 1.580 siswa SD/MI dan SMP/MTS yang tergolong dalam siswa kurang mampu dalam bentuk barang

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
				kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas dan buku tulis.
		Dinas Kesehatan	Layanan kesehatan gratis atau subsidi bagi masyarakat miskin	95,07 penduduk telah memiliki akses terhadap jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan.
		Dinas PUPRPERKIM	Infrastruktur Dasar dan Permukiman	98,8 persen rumah tangga telah memiliki ketahanan bangunan yang baik, 98,9 persen rumah tangga telah memiliki kecukupan luas tempat tinggal yang baik, 84,8 persen rumah tangga telah memiliki akses sanitasi yang layak, dan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Angka Kemiskinan di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel money crosscutting kinerja SKPD:

Tabel 3.97
Money Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Money Offline	Money Online	Keterangan
1.	Menurunnya Kemiskinan Daerah	Angka Kemiskinan	1. Rapat koodinasi TKPKD dengan Instansi Vertikal dan dengan CSR PT. Adari 2. FGD penyusunan RPKD dengan narasumber dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan Unlam terkait Penyampaian Garis Besar Kajian Kemiskinannya 3. Koordinasi antar SKPD dalam rangka Sinkronisasi program dan jadwal kegiatan, pembagian wilayah sasaran dan penentuan indikator capaian bersama. 4. Evaluasi triwulan dan tahunan oleh Bapperida dan SKPD terkait	1. Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Angka Kemiskinan	  

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator Angka Kemiskinan)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target indikator kinerja Angka Kemiskinan tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

- SDM dikelola secara lintas sektor melalui OPD terkait, termasuk Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, dan tim pendamping keluarga miskin, sehingga koordinasi program penanggulangan kemiskinan lebih efektif.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis pendataan keluarga miskin, manajemen program bantuan sosial, dan pendampingan usaha produktif meningkatkan kemampuan petugas dalam merencanakan intervensi tepat sasaran dan mempercepat penanganan masalah kemiskinan.

b. Efisiensi Anggaran

- Alokasi anggaran difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan, seperti bantuan rumah layak huni, modal usaha mikro, pelatihan keterampilan kerja, dan akses layanan dasar (kesehatan dan pendidikan).
- Tabel anggaran Kemiskinan dari SKPD yang terlibat tahun 2025 sebagai berikut:

NO	SKPD	PAGU ANGGARAN AKTIFITAS Mendukung PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2025
1	Dinas PUPRPERKIM	56.796.500.000
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.970.000.000
3	Dinas Sosial	7.294.300.000
4	Dinas KesehatanINKES	35.132.719.400
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	800.800.000
6	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	280.000.000
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	170.118.000
TOTAL		102.444.437.400

Diatas merupakan SKPD yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan dan diantaranya mendukung secara langsung tiga strategi pensasaran pengentasan kemiskinan sesuai Inpres Nomor 08 Tahun 2025. Adapun yang tidak mendukung secara langsung yaitu SKPD DP3APPKBPMD.

- Integrasi lintas program memungkinkan satu alokasi anggaran menghasilkan multi-output, misal pemberdayaan UMKM sekaligus peningkatan pendapatan rumah tangga dan akses layanan sosial.
- Kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah mengurangi beban anggaran pemerintah sekaligus memperluas cakupan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

c. Efisiensi Waktu

- Perencanaan terkoordinasi dan penjadwalan kegiatan lintas OPD memastikan program berjalan simultan dan tepat waktu, mengurangi tumpang tindih atau keterlambatan intervensi.
- Monitoring dan evaluasi rutin memungkinkan penyesuaian strategi jika capaian target pengurangan angka kemiskinan belum optimal. Pelaporan rutin pada tahun 2025 dilaksanakan per triwulan melalui inovasi Si Madu Lebah yang menjadi media untuk memudahkan input dan pemantauan pelaporan yang rekapitulasinya terdata dalam link <https://bit.ly/datapelaporankemiskinan>, serta pelaporan dalam bentuk semester yang diupload ke link <https://bangda.kemendagri.go.id/oppkpke/>.
- Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem pendataan keluarga miskin online dan aplikasi pelaporan bantuan, mempercepat proses identifikasi sasaran, penyaluran bantuan, dan pelaporan capaian program.

B.10 Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
(Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum)

Tabel 3.98
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
10.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	70	81,15	115,93

Target Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2025 adalah 70. Realisasi tahun 2025 adalah 81,15, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 115,93 persen.

Tabel 3.99
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
10.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	70	81,15	-	-	-

Target Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2025 adalah 70. Realisasi tahun 2025 adalah 81,15, sedangkan tahun 2024, tahun 2023 dan tahun 2022 belum menjadi indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Balangan.

Tabel 3.100
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
10.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	90	81,15	90,17

Target Akhir RPJMD untuk Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah 90 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 81,15 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 90,17 persen.

Tabel 3.101
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
10	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	81,15	72,24	75,82	-	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 81,15, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 72,24, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 75,82. Sedangkan realisasi Nasional dan Internasional tidak ada sumber data karena penilaian kinerjanya hanya sampai Tingkat Provinsi.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.98, tabel 3.99, tabel 3.100, dan tabel 3.101 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.98 adalah target Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2025 yaitu 70. Realisasi tahun 2025 adalah 81,15, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 115,93 persen. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 81,15 pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 115,93 persen dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung kinerja antara lain adalah:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

- Kepemimpinan dan Komitmen Pimpinan Daerah yaitu komitmen kuat pimpinan daerah (Kepala Daerah dan pimpinan SKPD) terhadap penciptaan kondisi daerah yang aman dan tertib dan arahan kebijakan yang jelas dalam penegakan Perda dan ketertiban umum. Dampak dari komitmen pimpinan ini menjadi dasar konsistensi pelaksanaan program trantibum dan meningkatkan motivasi dan disiplin aparatur pelaksana.
- Kelembagaan Satpol PP yang Efektif yaitu Struktur organisasi Satpol PP yang jelas dan sesuai tugas fungsi. serta pembagian peran internal (penegakan Perda, patroli, pengamanan kegiatan, pembinaan Linmas) berjalan optimal. Dampak dari faktor kelembagaan Satpol PP yang efektif ini adalah pelaksanaan tugas lebih fokus dan tidak tumpang tindih dan respons terhadap gangguan trantibum lebih cepat dan terkoordinasi.
- Kualitas dan Kapasitas SDM Aparatur yaitu peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, pembinaan disiplin, dan peningkatan kompetensi penanganan konflik dan pengalaman aparatur dalam penanganan gangguan ketertiban. Dampak dari kualitas dan kapasitas SDM ini sehingga Aparatur mampu bertindak profesional dan humanis serta penanganan masalah trantibum lebih tepat, terukur, dan minim konflik.
- Ketersediaan dan Efektivitas Anggaran yaitu tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk operasional Satpol PP dan kegiatan trantibum serta penggunaan anggaran relatif efisien dan tepat sasaran. Dampak dari tersedianya anggaran ini kegiatan patroli, penertiban, dan pengamanan dapat dilaksanakan sesuai rencana dan tidak terjadi hambatan signifikan akibat keterbatasan anggaran.
- Perencanaan dan Pengendalian Kinerja yang Baik yaitu perencanaan program dan kegiatan trantibum selaras dengan RPJMD, RKPD, dan Renstra SKPD serta indikator kinerja dan target capaian ditetapkan secara jelas dan terukur. Selain itu terlaksananya monitoring dan evaluasi internal dilakukan secara berkala. Dampak dari terlaksananya perencanaan dan pengendalian kinerja ini adalah program berjalan terarah dan fokus pada capaian indikator serta permasalahan lapangan cepat teridentifikasi dan ditindaklanjuti.
- Ketersediaan SOP dan Mekanisme Kerja yaitu SOP penegakan Perda, patroli, pengamanan, dan penanganan gangguan ketertiban telah tersedia dan diterapkan sehingga mekanisme kerja internal dipahami oleh seluruh personel. Dampak dari ketersediaan SOP ini yaitu Pelaksanaan tugas lebih tertib dan konsisten serta mengurangi kesalahan prosedur dan potensi konflik di lapangan.
- Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur yang dapat dilihat pada disiplin kerja aparatur Satpol PP dan perangkat pendukung relatif baik dan budaya kerja yang mengedepankan tanggung jawab, loyalitas, dan pelayanan kepada masyarakat. Dampak dari meningkatnya budaya kerja dan disiplin aparatur ini adalah konsistensi pelaksanaan kegiatan trantibum terjaga dan kinerja organisasi meningkat secara berkelanjutan

2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- Kondisi Sosial Masyarakat yang Relatif Kondusif dapat dilihat pada tingkat konflik sosial di Kabupaten Balangan relatif rendah dan hubungan antar masyarakat, antar kelompok, dan antar umat beragama berlangsung harmonis. Dampak dari kondisi sosial yang relative kondusif ini yaitu memudahkan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman serta menurunkan intensitas gangguan trantibum yang harus ditangani.

- Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban umum dan dukungan masyarakat terhadap penegakan Perda dan aturan daerah serta peran aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan (ronda, siskamling). Dampak dari partisipasi dan kesadaran Masyarakat ini adalah pencegahan gangguan trantibum lebih efektif dan penegakan ketertiban berjalan lebih persuasif dan minim resistensi.
- Dukungan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Adat. Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menjaga kondusivitas wilayah serta peran tokoh adat dalam meredam potensi konflik sosial di tingkat lokal sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan dalam mencapai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai target kinerja tahun 2025. Dampak dari dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan adat ini adalah penyelesaian masalah ketertiban lebih cepat dan damai serta meningkatkan legitimasi kebijakan dan tindakan pemerintah di mata masyarakat.
- Sinergi dengan Lembaga Vertikal (TNI-Polri) yaitu terseleenggaranya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Pemkab Balangan dengan Polri dan TNI yang membantu dalam memberikan dukungan pengamanan dalam kegiatan masyarakat, penanganan konflik, dan patroli bersama. Dampak dari terlaksananya sinergi dengan Lembaga vertikal ini adalah penanganan gangguan keamanan lebih cepat dan efektif serta meningkatkan rasa aman masyarakat secara luas.
- Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah yaitu dapat dilihat bahwa di Kabupaten Balangan tahun 2025 situasi politik daerah yang relatif stabil dan kondusif serta tidak adanya konflik politik yang berdampak luas terhadap ketertiban umum. Dampak dari stabilitas dan keamanan daerah ini pemerintah dapat fokus pada pelaksanaan program trantibum dan risiko gangguan keamanan akibat dinamika politik dapat ditekan.
- Dukungan Regulasi Nasional dan Provinsi. Adanya regulasi nasional dan provinsi yang mendukung penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sejalan dengan kebijakan daerah. Dampak dari dukungan regulasi ini memberikan kepastian hukum dan legitimasi pelaksanaan trantibum di daerah dan mempermudah koordinasi lintas level pemerintahan.
- Kondisi Ekonomi dan Aktivitas Masyarakat yang Stabil yaitu aktivitas ekonomi masyarakat relatif stabil dan tingkat pengangguran dan tekanan ekonomi tidak memicu gangguan sosial yang signifikan. Dampak dari kondisi ekonomi dan aktivitas masyarakat yang stabil ini menurunkan potensi konflik sosial dan gangguan ketertibandi Kabupaten Balangan sebagaimana diketahui tidak ada catatan konflik yang terjadi di Kabupaten Balangan sepanjang tahun 2025 dan masyarakat lebih fokus pada kegiatan produktif.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.99 adalah target Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2025 adalah 70. Realisasi tahun 2025 adalah 81,15, sedangkan tahun 2024, tahun 2023 dan tahun 2022 belum menjadi indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Balangan sehingga tidak bisa dibandingkan.

Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum agar tidak mengalami penurunan di tahun berikutnya diperlukan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan seluruh SKPD dan *stake holder* yang terlibat. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan terkait Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 memiliki karakteristik:

1. Terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah.
2. Berorientasi preventif dan humanis dalam penegakan aturan.
3. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas Satpol PP.
4. Mendorong sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat.
5. Inovasi terkait pencapaian kinerja Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) ini antara lain:

- LAYANAN ADUAN ONLINE WHATSHAPP (LA-LISA);
- Satuan Polisi Pamong Praja Rollinf To School (SPARCO);
- TRECKK (Tim Reaksi Cepat Ketenetraman dan Ketertiban Umum);
- Sisbinsik Pol PP (Sistem Pembinaan Mental Fisik) Polisi Pamong Praja

Kebijakan ini terbukti mendukung terciptanya kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif, sehingga capaian kinerja Indeks Trantibum Kabupaten Balangan tahun 2025 dapat diraih dengan baik.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.100 adalah target akhir RPJMD untuk Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah 90 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 81,15, dalam upaya pencapaian target akhir RPJMD, maka Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas baik dalam dokumen perencanaan umum maupun dokumen perencanaan khusus Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.101 adalah menjelaskan bahwa realisasi Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 81,15, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 72,24, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 75,82. Sedangkan realisasi Nasional dan Internasional tidak ada sumber data karena penilaian kinerjanya hanya sampai Tingkat Provinsi.

Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Balangan 81,15 kategori Sangat Baik jika dibandingkan dengan Kabupaten Tabalong 72,24 dengan kategori Baik Kabupaten Balangan lebih tinggi 8,91 poin dan jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan 75,82 kategori baik, Kabupaten Balangan 5,33 poin lebih tinggi. Secara data dikatakan bahwa Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Kabupaten Balangan berada di atas Propinsi Kalimantan Selatan. Berikut tabel data Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi di Kalimantan Selatan Tahun 2025:

Provinsi/Kabupaten/Kota	IPKKU	Kategori
Provinsi Kalimantan Selatan	75,8285	Baik
Kabupaten Tanah Laut	39,3696	Kurang Baik
Kabupaten Kotabaru	46,9139	Cukup Baik
Kabupaten Banjar	67,8615	Baik
Kabupaten Barito Kuala	59,8053	Cukup Baik
Kabupaten Tapin	33,3300	Kurang Baik
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	90,8167	Sangat Baik
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	33,3300	Kurang Baik
Kabupaten Hulu Sungai Utara	77,8185	Baik
Kabupaten Tabalong	72,2451	Baik
Kabupaten Tanah Bumbu	75,8735	Baik
Kabupaten Balangan	81,1519	Sangat Baik
Kota Banjarmasin	65,0819	Baik
Kota Banjarbaru	33,3300	Kurang Baik

Faktor dominan yang mempengaruhi Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Balangan adalah

- Karakter Sosial Masyarakat dan Modal Sosial. Kondisi Balangan kohesi sosial relatif kuat, konflik horizontal jarang dan cepat diselesaikan serta peran tokoh masyarakat dan adat masih efektif. Dampak terhadap indeks tingkat gangguan ketertiban relatif rendah dan stabilitas sosial terjaga tanpa intervensi represif berlebihan. Perbandingan dengan Kabupaten Tabalong modal sosial juga kuat, namun dinamika ekonomi lebih tinggi sehingga potensi gangguan lebih kompleks sedangkan dengan Provinsi dan Nasional: wilayah heterogen sehingga konflik sosial lebih beragam. Modal sosial menjadi penopang utama Trantibum Balangan.

- Efektivitas Penyelenggaraan Satpol PP dan Linmas. Respons Satpol PP relatif cepat, penegakan Perda berjalan cukup konsisten dan Linmas berperan aktif di tingkat desa/kelurahan. Kinerja aparaturnya cukup efektif, meski belum sepenuhnya optimal dari sisi jumlah dan sarana.
- Tingkat Aktivitas Ekonomi dan Urbanisasi Balangan aktivitas ekonomi relatif moderat, tekanan urbanisasi rendah dan minim kawasan rawan ketertiban (PKL, konflik ruang publik) dampaknya beban pengendalian trantibum lebih ringan dan risiko gangguan berskala besar relatif kecil.
- Sinergi Lintas Sektor (Satpol PP–Polri–TNI–Desa). Koordinasi penanganan gangguan berjalan baik, Desa dilibatkan dalam pencegahan dini dan penanganan lebih bersifat persuasif. Sinergi menjadi faktor pembeda penting antara daerah dengan indeks stabil dan yang fluktuatif.
- Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah. Tingkat pelanggaran Perda relatif rendah, kesadaran hukum masyarakat cukup baik dan sosialisasi Perda berjalan dengan tertib dan lancar di Kabupaten Balangan.

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.98 sampai dengan tabel 3.101 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu :**

- **Penguatan Peran dan Kinerja Satpol PP.** Upaya yang dilakukan optimalisasi fungsi Satpol PP sebagai penegak Perda dan penjaga ketertiban umum. Peningkatan intensitas patroli rutin dan patroli terpadu. Penempatan personel berbasis wilayah rawan gangguan trantibum. Dampak dari Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan ini penurunan gangguan ketertiban umum, respon cepat terhadap potensi pelanggaran Perda dan Peningkatan rasa aman masyarakat.
- **Pendekatan Preventif dan Humanis dalam Penegakan Perda.** Upaya yang dilakukan terlaksananya sosialisasi Perda dan Perkada secara masif kepada masyarakat. Peringatan dan pembinaan sebagai langkah awal sebelum penindakan. Penegakan hukum yang mengedepankan dialog dan edukasi. Dampak dari upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan, mengurangi konflik sosial akibat penertiban dan menciptakan ketertiban yang berkelanjutan.
- **Penguatan Koordinasi Lintas Sektor.** Upaya yang dilakukan adalah sinergi antara Satpol PP dengan TNI, Polri, kecamatan, desa, dan perangkat daerah terkait. Patroli dan pengamanan bersama dalam kegiatan masyarakat dan daerah rawan. Dampak dari terlaksananya penguatan koordinasi lintas sektor ini penanganan gangguan ketertiban lebih cepat dan efektif, efisiensi penggunaan SDM dan anggaran dan penguatan stabilitas keamanan wilayah.
- **Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Linmas.** Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Balangan yaitu terselenggaranya pelatihan teknis penegakan Perda, penanganan konflik, dan pelayanan public serta pembinaan dan pemberdayaan Linmas di desa/kelurahan. Dampak dari Upaya yang telah dilakukan Pemerintah kabupaten Balangan ini Aparatur lebih profesional, responsif, dan humanis serta Deteksi dini gangguan ketertiban di tingkat lingkungan.
- **Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.** Upaya yang dilakukan adalah pelibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan, kerja sama dengan tokoh agama, adat, dan Masyarakat serta terlaksananya kampanye sadar ketertiban umum. Dampak dari meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Balangan ini sebagai upaya untuk pencegahan gangguan trantibum lebih efektif dan beban penanganan pemerintah berkurang.

2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Adapun gambaran umum keterikatan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
10.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Program Satpol PP)	Dukungan penurunan gangguan ketertiban umum, seperti pelanggaran Perda, ketidaktertiban ruang publik, dan potensi konflik sosial.
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (Program Badan Kesbangpol)	Program strategis Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjaga stabilitas daerah, ketahanan sosial, dan keharmonisan kehidupan masyarakat.
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu:

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program strategis Pemerintah Kabupaten Balangan yang bertujuan menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif. Pada tahun 2025, implementasi program ini tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga memberikan dampak luas (multidimensi) terhadap sosial (menurunnya gangguan ketertiban umum dan konflik sosial, meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat dalam beraktivitas dan terjaganya harmoni sosial dan kohesi antarwarga), ekonomi (aktivitas ekonomi masyarakat berjalan lebih lancar dan aman, lingkungan usaha dan investasi menjadi lebih kondusif dan biaya sosial dan ekonomi akibat gangguan keamanan dapat ditekan), tata kelola pemerintahan (meningkatnya efektivitas dan profesionalisme Satpol PP. terbangunnya koordinasi lintas sektor yang solid (TNI-Polri-SKPD-Masyarakat dan penggunaan SDM, anggaran, dan waktu menjadi lebih efisien) dan pembangunan daerah (pembangunan fisik dan nonfisik dapat berjalan tanpa gangguan berarti, stabilitas daerah mendukung pencapaian indikator pembangunan lainnya (pendidikan, ekonomi, kesejahteraan).
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial merupakan program strategis Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjaga stabilitas daerah (meningkatnya kewaspadaan daerah terhadap potensi gangguan dan konflik sosial, deteksi dini yang efektif mencegah konflik berkembang menjadi gangguan keamanan dan kondisi daerah tetap aman, tertib, dan kondusif), ketahanan sosial (meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai persatuan, toleransi, dan kebangsaan serta terbangunnya jejaring sosial antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga), dan keharmonisan kehidupan Masyarakat (stabilitas sosial mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, aktivitas ekonomi masyarakat berjalan tanpa gangguan konflik sosial dan iklim investasi menjadi lebih kondusif). Pada tahun 2025, implementasi program ini menunjukkan bahwa dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga menyentuh berbagai dimensi sosial, ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan daerah.

Dari kedua program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.102
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja*	Penegakan Perda dan Peraturan Daerah	Menegakkan Perda dan peraturan daerah, menyelenggarakan operasi penertiban rutin, membina ketertiban masyarakat, serta melakukan monitoring dan evaluasi ketertiban publik.
		Badan Kesbangpol*	Merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Memetakan wilayah rawan gangguan, dan menyelenggarakan forum kewaspadaan dini masyarakat serta rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
		Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan kelompok rentan	Penanganan PMKS, gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan kelompok rentan, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi untuk mendukung stabilitas sosial
		Bapperida	Integrasi Kebijakan dan Perencanaan	Program penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum agar selaras dengan RPJMD dan RKPD
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Membina siswa memahami aturan dan etika sosial	Kebijakan pendidikan karakter, pembinaan wawasan kebangsaan, dan pencegahan kenakalan remaja melalui sekolah dan kegiatan pendidikan nonformal
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kebijakan ketertiban di desa	Penguatan kapasitas desa dan Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lokal, pencegahan konflik berbasis komunitas, dan koordinasi pengelolaan desa.
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Penyebaran informasi, edukasi masyarakat	Memastikan literasi digital, pengendalian hoaks, dan penyebaran informasi resmi mendukung pencegahan konflik dan ketertiban publik

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting kinerja SKPD:

Tabel 3.103
Monev Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Monev Offline	Monev Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rapat evaluasi capaian kinerja tahun 2025	Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target dari indikator kinerja Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

- SDM dikelola secara lintas sektor, melibatkan kepolisian, Satpol PP, linmas, dan aparat terkait untuk memastikan koordinasi penanganan gangguan Kamtibmas.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis patroli, manajemen konflik, mediasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi meningkatkan kemampuan petugas, efisiensi penanganan gangguan, dan kepuasan masyarakat.
 - Pelatihan pengendalian Massa (Dalmas) sebanyak 4 kali kegiatan / tahun dengan peserta 50 orang perkegiatan
 - Pembinaan mental dan Fisik (Karate) setiap minggu dengan peserta 100 Orang
 - Bimtek PPNS (2 Orang)

b. Efisiensi Anggaran

- Alokasi anggaran difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban, seperti patroli terpadu, pengadaan alat monitoring, dan pelatihan SDM. Pagu Anggaran Program Prioritas sebesar Rp.9,800,446,612 dan terealisasikan sebesar Rp. 8,891,859,734 dengan efisiensi sebesar anggaran sebesar Rp. 908,586,878
- Integrasi lintas program memungkinkan satu alokasi anggaran menghasilkan multi-output, misal pengadaan CCTV sekaligus peningkatan monitoring gangguan dan pendataan laporan masyarakat.
- Kemitraan dengan sektor swasta, lembaga komunitas, dan organisasi masyarakat mengurangi beban anggaran pemerintah sekaligus memperluas jangkauan kegiatan penanganan gangguan keamanan.

c. Efisiensi Waktu

- Perencanaan terkoordinasi dan penjadwalan patroli serta program keamanan lintas SKPD memastikan kegiatan berjalan simultan dan tepat waktu, mengurangi tumpang tindih atau keterlambatan penanganan gangguan.

- Monitoring dan evaluasi rutin memungkinkan penyesuaian strategi jika capaian target keamanan dan ketertiban belum optimal.
- Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem pengaduan masyarakat online, aplikasi monitoring patroli, dan database kejadian kriminal, mempercepat proses penanganan gangguan dan pelaporan masyarakat.

B.11 Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Kemajuan Budaya (Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan)

Tabel 3.104
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
11.	Meningkatnya Kemajuan Budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	60,34	60,64	100,50

Target Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2025 adalah 60,34. Realisasi tahun 2025 adalah 60,64, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100,50 persen.

Tabel 3.105
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
11.	Meningkatnya Kemajuan Budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	60,34	60,64	-	-	-

Target Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2025 adalah 60,34. Realisasi tahun 2025 adalah 60,64, realisasi tahun 2024, realisasi tahun 2023 dan realisasi tahun 2022 tidak dapat dibandingkan karena Indeks Pembangunan Kebudayaan RPJMD Lama berbeda komponen penilaiannya dengan RPJMD Baru.

Tabel 3.106
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
11.	Meningkatnya Kemajuan Budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	67,52	60,64	89,81

Target Akhir RPJMD untuk Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah 67,52 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 60,64 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 89,81 persen.

Tabel 3.107
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
11.	Meningkatnya Kemajuan Budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	60,64	Belum rilis	59,19	Belum rilis	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 60,64, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan 59,19, realisasi Kabupaten Tabalong, realisasi Nasional belum rilis sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.104, tabel 3.105, tabel 3.106, dan tabel 3.107 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.104 adalah target Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2025 yaitu 67,52. Realisasi tahun 2025 adalah 60,64, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di daerah telah berjalan cukup baik dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Berikut rincian komponen dari penilaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2025:

DIMENSI	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
Dimensi 1. Ekonomi Budaya (D1)	34,77	35,25	101,38
Dimensi 2. Pendidikan (D2)	71,68	66,91	93,34
Dimensi 3. Ketahanan Sosial Budaya (D3)	75,04	76,00	101,28
Dimensi 4. Warisan Budaya (D4)	60,25	62,42	103,60
Dimensi 5. Kebebasan Ekspresi Budaya (D5)	34,74	40,38	116,23
Dimensi 6. Budaya Literasi (D6)	60,75	61,33	100,95
Dimensi 7. Gender (D7)	58,23	55,19	94,78
IPK	60,34	60,64	100,50

Dimensi dengan capaian tertinggi adalah Dimensi Kebebasan Ekspresi Budaya (D5) dengan persentase capaian 116,23%. Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ruang yang cukup luas dalam mengekspresikan budaya melalui kegiatan seni, tradisi, dan aktivitas komunitas budaya. Berbagai kegiatan festival budaya, pertunjukan seni tradisional, dan kegiatan komunitas turut mendorong peningkatan nilai pada dimensi ini. Selanjutnya Dimensi Warisan Budaya (D4) mencapai 103,60% dari target, yang menunjukkan bahwa upaya pelestarian warisan budaya berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh kegiatan inventarisasi objek pemajuan kebudayaan, pelestarian tradisi lokal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga warisan budaya daerah.

Dimensi Ekonomi Budaya (D1) dan Dimensi Ketahanan Sosial Budaya (D3) juga berhasil melampaui target dengan capaian masing-masing 101,38% dan 101,28%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki solidaritas sosial yang kuat serta mulai memanfaatkan potensi budaya sebagai sumber kegiatan ekonomi, seperti kerajinan, seni pertunjukan, dan produk budaya lokal.

Sementara itu Dimensi Budaya Literasi (D6) mencapai 100,95%, yang berarti target telah tercapai meskipun peningkatannya relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap literasi budaya mulai berkembang namun masih memerlukan penguatan melalui program edukasi budaya dan peningkatan akses informasi budaya.

Di sisi lain, terdapat dua dimensi yang belum mencapai target, yaitu Dimensi Pendidikan (D2) dengan capaian 93,34% dan Dimensi Gender (D7) dengan capaian 94,78%. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi budaya dalam pendidikan serta partisipasi perempuan dalam kegiatan kebudayaan masih perlu ditingkatkan melalui program yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Secara umum, capaian IPK tahun 2025 menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di Kabupaten telah berjalan cukup baik dengan sebagian besar dimensi telah mencapai bahkan melampaui target. Namun demikian, peningkatan pada dimensi pendidikan dan gender perlu menjadi perhatian agar pembangunan kebudayaan dapat berlangsung lebih merata dan berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 60,64 pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 100,50 persen dipengaruhi oleh berbagai faktor kinerja antara lain adalah:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

a. Adanya upaya pelestarian warisan budaya

Pemerintah Daerah bersama masyarakat telah melakukan berbagai kegiatan pelestarian budaya seperti inventarisasi objek pemajuan kebudayaan, kegiatan seni tradisional, serta dokumentasi budaya lokal. Hal ini berkontribusi pada peningkatan nilai dimensi warisan budaya. Sebagai contoh kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah melalui Pelestarian Cagar Budaya yang merupakan bentuk perlindungan terhadap warisan budaya fisik yang memiliki nilai sejarah dan identitas daerah. Pelestarian cagar budaya disini meliputi : penetapan status cagar budaya, pemugaran dan perawatan, perlindungan serta pendokumentasian. Pada tahun 2025 terdapat 14 (empat belas) cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Balangan. Berikut cagar budaya yang dilestarikan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2025:

1. Piring Keramik Warna Hijau Celadon Motif Lundang Lundang Dan Bunga Teratai jenis warisan berupa Benda di Desa Teluk Bayur Kecamatan Juai;
2. Piring Keramik Warna Hijau Celadon Motif Hias Suluran dan Naga Lung jenis warisan berupa Benda di Desa Teluk Bayur Kecamatan Juai;
3. Piring Keramik Warna Biru Cobalt Motif Hias Suluran dan Naga Lung jenis warisan berupa Benda di Desa Teluk Bayur Kecamatan Juai;
4. Parang Nabur jenis warisan berupa Benda di Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong;
5. Timbangan Gantung (Dacin) jenis warisan berupa Benda di Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong;
6. Brankas Besi Haji Sjoekoer jenis warisan berupa Benda di Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong;
7. Rumah Haji Sjoekoer jenis warisan berupa Bangunan di Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong;
8. Rumah Batu Muara Ninian jenis warisan berupa Bangunan di Desa Muara Ninian Kecamatan Juai;
9. Mesjid Syuhada jenis warisan berupa Bangunan di Desa Hujan Mas Kecamatan Paringin;
10. Rumah Palimasan Desa Riwa jenis warisan berupa Bangunan di Desa Riwa Kecamatan Batumandi;
11. Rumah Banjar Bubungan Tinggi jenis warisan berupa Bangunan di Desa Tarangan Kecamatan Paringin;
12. Jembatan Belanda jenis warisan berupa Struktur di Desa Hilir Pasar Kecamatan Lampihong;
13. Makam Datu Kandang Haji jenis warisan berupa Struktur di Desa Teluk Bayur Kecamatan Juai;
14. Benteng Tundakan jenis warisan berupa Situs di Desa Tundakan Kecamatan Awayan.

b. Dukungan kegiatan seni dan festival budaya

Pelaksanaan berbagai kegiatan budaya seperti festival seni, pertunjukan budaya, lomba tradisional, dan kegiatan komunitas budaya memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas budaya. Kondisi ini turut mendorong peningkatan dimensi kebebasan ekspresi budaya. Pelaksanaan event rutin Festival budaya daerah. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan Festival Budaya Meratus yang merupakan ajang pelestarian seni dan tradisi Dayak Meratus bertempat di Desa Kapul Kecamatan Halong dengan mengambil tema “Anrawat Seni Budaya Amak Panyangga Banua Jaya Rakat Mufakat Huang Pabelum Basatu Taam Nuju Kamajuan”. Festival ini menawarkan rangkaian kegiatan berupa parade tari dan musik tradisional, bazar kerajinan serta kuliner khas desa, hingga workshop interaktif yang mengajak pengunjung mengalami langsung proses kreasi budaya. Dengan demikian, pengunjung tidak sekedar menyaksikan, tetapi juga ikut merasakan bagaimana tradisi tersebut hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam era modernisasi yang bergerak pesat, tradisi-lokal seringkali terpinggirkan. Melalui festival ini, Desa Kapul mengambil langkah nyata untuk melestarikan seni dan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Kegiatan ini bekerja sama dengan Desa Kapul beserta komunitas adat serta sanggar seni setempat. Penampil festival berasal dari warga desa, sanggar tari, musisi lokal, dan anak-muda yang terlibat aktif.

Festival Budaya Meratus



c. Meningkatnya kesadaran literasi budaya masyarakat

Akses terhadap informasi budaya melalui perpustakaan, media digital, dan kegiatan edukasi budaya mulai berkembang sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya lokal. Hal ini berkontribusi terhadap capaian dimensi budaya literasi.

d. Berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis budaya

Sebagian masyarakat mulai memanfaatkan potensi budaya sebagai sumber ekonomi, seperti kerajinan tradisional, kuliner khas daerah, serta kegiatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Hal ini mendorong peningkatan dimensi ekonomi budaya.

e. Pameran/promosi budaya.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan Calendar Of Event yang diselenggarakan di Yogyakarta yang tujuannya untuk memperkenalkan budaya Balangan di panggung global, salah satunya yang ditampilkan dalam acara tersebut adalah Tarian Mandau Apui.



2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- Kuatnya nilai sosial dan tradisi masyarakat

Masyarakat masih mempertahankan nilai-nilai adat istiadat, gotong royong, serta tradisi budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi ini memperkuat dimensi ketahanan sosial budaya, yang tercermin dari capaian nilai yang relatif tinggi. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mempertahankan nilai adat istiadat, gotong royong serta tradisi budaya lokal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Pembinaan Lembaga Adat berupa pemberian hibah bantuan uang untuk sarana kegiatan adat kepada Balai Adat Setia Sahabat di Desa Ajung. Selain itu juga melakukan fasilitasi pelaksanaan ritus dan tradisi. Pada tahun 2025 terdapat, terdapat 5 (lima) ritus yang dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya diantaranya :

1. Aruh Adat Baharin



2. Ritus Melatu Wini (Budaya Ketahanan Dayak Deah Liu Halong)



3. Masewah Pare Gumboh



4. Tanglong



5. Aruh Bawanang



- Peran Aktif Komunitas Budaya dan Lembaga Nonpemerintah. Keberadaan sanggar seni, komunitas budaya, dan tokoh adat yang aktif melestarikan budaya lokal serta keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat dalam kegiatan budaya. Dampak dari peran aktif komunitas budaya dan lembaga nonpemerintah ini sehingga pembangunan kebudayaan tidak hanya bergantung pada pemerintah dan keberlanjutan budaya lebih terjamin. Pembinaan sanggar seni ini diatur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 800/75/BUD/DISDIKBUD/2025 tentang Penetapan Peserta Pembinaan Kesenian Tradisional Tahun 2025, telah ditetapkan peserta pembinaan kesenian tradisional.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.105 adalah target Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2025 adalah 60,34. Realisasi tahun 2025 adalah 60,64, sedangkan realisasi tahun 2024, realisasi tahun 2023 dan realisasi tahun 2022 tidak diperbandingkan karena belum menjadi indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Balangan. Agar Indeks Pembangunan Kebudayaan dapat meningkat setiap tahunnya perlu adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan seluruh SKPD dan *stake holder* yang terlibat. Pada tahun 2025, kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan terkait IPK diarahkan untuk memastikan kebudayaan menjadi pondasi pembangunan karakter, identitas daerah, dan kohesi sosial, sejalan dengan pembangunan manusia dan ekonomi daerah.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.106 adalah target akhir RPJMD untuk Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah 67,52 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 60,64 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 89,81 persen. Berdasarkan data tabel di atas untuk menuju kepada pencapaian target akhir RPJMD tahun 2030 yakni 67,52, maka Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas. Karena saat ini Pembangunan Kebudayaan hanya berada di 60,64, itu artinya harus melakukan gerakan percepatan setiap tahunnya. Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan ini adalah

- Penguatan Program Pelestarian Budaya Prioritas. Rencana aksi memfokuskan kegiatan pada seni, tradisi, adat istiadat, dan warisan budaya yang memiliki dampak langsung terhadap komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan dan kegiatan bersifat berkelanjutan dan tidak hanya seremonial.
- Percepatan Partisipasi Masyarakat dan Komunitas Budaya. Rencana aksi mendorong pelibatan aktif tokoh adat, seniman, sanggar, dan komunitas budaya serta pendekatan partisipatif meningkatkan rasa memiliki terhadap program kebudayaan. Kontribusi dari rencana aksi terhadap Indeks Pembangunan Kebudayaan meningkatkan tingkat partisipasi budaya masyarakat dan memperkuat ekosistem kebudayaan berbasis komunitas.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.107 adalah menjelaskan bahwa realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 60,64, realisasi Kabupaten Tabalong, realisasi Nasional belum rilis sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.104 sampai dengan tabel 3.107 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan yaitu :**

- Percepatan inventarisasi dan pendataan budaya dengan melakukan pemetaan potensi budaya secara menyeluruh, mendokumentasikan ritual, tradisi, kesenian, serta situs budaya dengan melibatkan komunitas budaya dan masyarakat dalam proses pendataan.
- Percepatan peningkatan perlindungan budaya melalui penetapan objek budaya sebagai warisan budaya daerah, pengusulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) ke tingkat provinsi dan nasional, penetapan dan perlindungan cagar budaya serta penyusunan regulasi dan kebijakan pelestarian budaya.
- Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan penguatan praktik budaya melalui pembinaan lembaga adat dan komunitas budaya serta fasilitasi kegiatan seni dan budaya daerah.
- Peningkatan promosi dan pemanfaatan budaya melalui penyelenggaraan event dan festival budaya daerah, promosi budaya melalui media digital.
- Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah melalui cetak buku Sejarah/kebudayaan. Kegiatan ini dalam rangka mencegah hilangnya informasi budaya lokal serta menjadi media pewarisan pengetahuan kepada generasi berikutnya.

2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kemajuan Budaya dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan. Adapun gambaran umum keterkaitan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
11.	Meningkatnya Kemajuan Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Program ini diarahkan tidak hanya untuk melestarikan budaya, tetapi juga mengembangkan ekosistem kebudayaan agar berdaya, berkelanjutan, dan memberi dampak sosial serta ekonomi.
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program ini berkontribusi signifikan mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Balangan, terutama pada aspek ekspresi budaya, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan seni tradisional.
		Program Pembinaan Sejarah	Program ini berperan dalam pelestarian nilai sejarah, penguatan identitas kolektif, dan pembentukan karakter masyarakat. Pada tahun 2025, pelaksanaan program ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Balangan, terutama pada dimensi pelestarian warisan budaya, pendidikan budaya, dan kohesi sosial.
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program ini memberikan kontribusi strategis terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Balangan, khususnya pada dimensi pelestarian warisan budaya, tata kelola kebudayaan, dan identitas daerah.
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan yaitu:

- Program Pengembangan Kebudayaan merupakan program strategis yang secara langsung memengaruhi capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Balangan. Pada tahun 2025, program ini diarahkan tidak hanya untuk melestarikan budaya, tetapi juga mengembangkan ekosistem kebudayaan agar berdaya, berkelanjutan, dan memberi dampak sosial serta ekonomi. Dampak terhadap pelestarian dan keberlanjutan

budaya, program pengembangan kebudayaan memperkuat pelestarian seni, tradisi, adat istiadat, dan warisan budaya lokal.

- Program Pengembangan Kesenian Tradisional merupakan bagian penting dari pembangunan kebudayaan daerah karena berfokus pada pelestarian, pembinaan, dan penguatan seni tradisi lokal. Pada tahun 2025, program ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Balangan, terutama pada aspek ekspresi budaya, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan seni tradisional. Dampak terhadap Pelestarian Seni Tradisional program ini mendorong pelestarian berbagai bentuk kesenian tradisional daerah melalui pembinaan, pementasan, dan pendokumentasian dan seni tradisi tidak hanya dipertahankan, tetapi juga direvitalisasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.
- Program Pembinaan Sejarah merupakan bagian penting dari pembangunan kebudayaan karena berperan dalam pelestarian nilai sejarah, penguatan identitas kolektif, dan pembentukan karakter masyarakat. Pada tahun 2025, pelaksanaan program ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Balangan, terutama pada dimensi pelestarian warisan budaya, pendidikan budaya, dan kohesi sosial.
- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya merupakan pilar penting dalam pembangunan kebudayaan karena berfokus pada perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengelolaan warisan budaya berwujud. Pada tahun 2025, program ini memberikan kontribusi strategis terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Balangan, khususnya pada dimensi pelestarian warisan budaya, tata kelola kebudayaan, dan identitas daerah.

Dari keempat program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

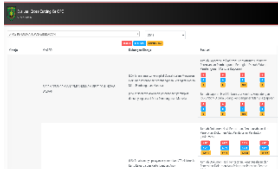
Tabel 3.108
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Kemajuan Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*	Muatan lokal budaya	Pembinaan sanggar seni, dan pelestarian budaya lokal melalui sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler
		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Mengembangkan destinasi wisata budaya, event budaya, dan promosi budaya lokal	Penguatan partisipasi generasi muda dalam kegiatan budaya, pengembangan bakat seni dan olahraga tradisional, serta penyelenggaraan event budaya.
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penguatan lembaga adat dan budaya desa	Penguatan kapasitas desa dalam pelestarian budaya lokal, pembinaan komunitas seni, dan integrasi budaya ke pembangunan desa
		Bapperida	Perencanaan dan Integrasi Kebijakan	Fasilitasi forum perencanaan, Musrenbang, konsultasi lintas sektor,

No	Kinerja	Crosscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
				dan program selaras dengan RPJMD, Renstra dan RKPD
		Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya	Meningkatkan dimensi ekonomi budaya, menjamin keberlanjutan pelaku budaya dan menjadikan budaya sebagai sumber penghidupan
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Memastikan promosi budaya mencapai masyarakat luas dan generasi muda.	Publikasi dan dokumentasi budaya, penguatan literasi digital budaya, serta pengendalian informasi terkait nilai budaya

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting kinerja SKPD:

Tabel 3.109
Monev Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Monev Offline	Monev Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Kemajuan Budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	1. Rapat koordinasi penentuan target Indeks Pembangunan Kebudayaan di Ruang Rapat Bapperida	Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan	

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target dari indikator kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

- SDM kebudayaan dikelola secara lintas sektor melalui koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, komunitas seni, lembaga adat, serta pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Balangan, sehingga pelaksanaan program budaya lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pengelolaan event budaya, dokumentasi warisan budaya, penguatan kelembagaan adat, dan digitalisasi seni tradisional meningkatkan profesionalisme pengelolaan kebudayaan serta mendukung pencapaian indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).
- Pemanfaatan pelaku seni dan budaya lokal dalam setiap kegiatan mendorong pemberdayaan masyarakat, mengurangi ketergantungan pada tenaga eksternal, serta meningkatkan efisiensi operasional program kebudayaan daerah.

b. Efisiensi Anggaran

Efisiensi dari Program Anggaran sebesar Rp. 12.844.502.240,00,-, setelah mengalami efisiensi anggaran menjadi Rp. 7.637.823.190,00. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.206.679.050,,00. Hal ini menunjukkan adanya penghematan anggaran sebesar 40,53%.

c. Efisiensi Waktu

- Perencanaan kegiatan budaya yang terstruktur dalam kalender event tahunan Kabupaten Balangan memastikan pelaksanaan program berjalan tepat waktu dan menghindari tumpang tindih antar kegiatan.
- Monitoring dan evaluasi rutin terhadap capaian indikator IPK memungkinkan penyesuaian strategi secara cepat apabila terdapat dimensi yang belum mencapai target.
- Pemanfaatan teknologi digital untuk publikasi, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan budaya mempercepat proses administrasi, memperluas jangkauan promosi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

B.12 Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

(Indikator 1 : Indeks Pelayanan Publik)

Tabel 3.110
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator 1 : Indeks Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,49 (-A)	4,57 (-A)	101,78

Target Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 adalah 4,49 (-A). Realisasi tahun 2025 adalah 4,57 (-A), sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 101,78 persen.

Tabel 3.111
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator 1 : Indeks Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,49 (-A)	4,57 (-A)	4,29 (-A)	4,01 (-A)	3,52 (B)

Target Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 adalah 4,49 (-A). Realisasi tahun 2025 adalah 4,57 (-A), Realisasi Tahun 2024 adalah 4,29 (-A), Realisasi tahun 2023 adalah 4,01 (-A), sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 3,52 (B).

Tabel 3.112
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator 1 : Indeks Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,89 (A)	4,57 (-A)	93,46

Target Akhir RPJMD untuk Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah 4,89 (A) tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 4,57(-A) dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 93,46 persen.

Tabel 3.113
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator 1 : Indeks Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
12	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,57	4,46	4,56	4,57	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 4,57, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 4,46, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 4,56, realisasi Nasional 4,57, sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.110, tabel 3.111, tabel 3.112, dan tabel 3.113 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator 1 : Indeks Pelayanan Publik)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.110 adalah target Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 yaitu 4,49 (-A). Realisasi tahun 2025 adalah 4,57 (-A), sehingga capaian yang diperoleh sebesar 101,78 persen tercapai sesuai target.

Seluruh perangkat daerah, termasuk 1 RSUD dan 12 UPTD Puskesmas, telah melaksanakan penilaian secara mandiri sebagai bagian dari penguatan budaya kinerja dan akuntabilitas. Dari sisi komparatif, capaian IPP Kabupaten Balangan sebesar 4,57 (A) Katagori (Prima) menempatkan daerah ini pada peringkat keempat di antara pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,57 (-A) pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 101,78 persen dipengaruhi oleh berbagai faktor pendongkrak kinerja antara lain adalah:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

- Penguatan Kebijakan dan Standar Pelayanan Internal

Salah satu faktor internal utama adalah upaya pemerintah kabupaten dalam menyusun dan mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik yang jelas kepada seluruh perangkat daerah. Pemerintah Balangan melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana telah melakukan sosialisasi opini pelayanan publik dan penilaian pelayanan kepada SKPD, termasuk kegiatan bersama Ombudsman RI untuk memperkuat pemahaman dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik nasional. Dampak dari kebijakan ini memastikan seluruh unit pelayanan memahami standar pelayanan yang ditetapkan sehingga proses layanan menjadi lebih konsisten dan sesuai regulasi.



- Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur

Peningkatan kapasitas internal aparatur pemerintahan melalui pelatihan dan pendampingan menjadi faktor pendorong penting. Pendampingan dari Ombudsman RI dalam pemenuhan standar pelayanan publik membantu memperkuat pemahaman teknis SDM terhadap prosedur pelayanan yang benar dan cara menangani pengaduan secara efektif. Dampaknya Aparatur yang lebih terlatih dan profesional cenderung memberikan pelayanan yang efisien, akurat dan ramah kepada masyarakat.



- **Standarisasi Prosedur dan Proses Layanan**
Kabupaten Balangan telah mendorong dan mengimplementasikan standarisasi prosedur pelayanan publik, termasuk pengelolaan pengaduan dan mekanisme konsultasi. Ini terlihat dari laporan evaluasi RPJMD yang menyebut perangkat daerah melakukan peningkatan dalam hal sistem informasi pelayanan publik dan mekanisme konsultasi-pengaduan. Dampak dari standarisasi internal membantu mempercepat proses layanan dan mengurangi variasi kualitas pelayanan yang mungkin terjadi antar unit kerja.
- **Sistem Informasi Pelayanan dan Data Internal**
Peningkatan sistem informasi pelayanan publik di internal pemerintah daerah, termasuk pengelolaan data dan pelaporan layanan, menjadi fondasi dalam penyelenggaraan layanan publik yang efektif. Internal Balangan mencatat perbaikan dalam sistem informasi pelayanan publik sebagai bagian dari faktor keberhasilan IPP. Dampaknya sistem yang baik mendukung monitoring kinerja, evaluasi, serta perencanaan perbaikan layanan berbasis data.



- **Budaya Organisasi dan Internalisasi Nilai Pelayanan**
Meskipun data spesifik terkait budaya organisasi di Balangan belum banyak dipublikasikan, indikator di laporan internal menunjukkan adanya orientasi terhadap nilai-nilai pelayanan (seperti prinsip *BerAKHLAK*: Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang diterapkan dalam pelayanan publik dan internal pemerintahan daerah. Hal ini mirip dengan praksis di daerah lain yang menempatkan budaya organisasi pelayanan sebagai faktor penting dalam meningkatkan integritas dan kualitas layanan. Dampak budaya pelayanan yang baik mendorong aparatur untuk bersikap proaktif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.



- Evaluasi Internal melalui Survei Kepuasan Masyarakat

Walaupun survei ini melibatkan eksternal masyarakat, implementasi dan tindak lanjut hasil survei merupakan proses internal yang penting. Pemerintah Balangan rutin melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada unit layanan untuk memperbaiki proses dan layanan, sekaligus menjadi alat kontrol internal untuk peningkatan kualitas layanan.

2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- Pengawasan dan Pendampingan Lembaga Eksternal (Ombudsman)

Salah satu faktor eksternal yang kuat adalah peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam memberikan pendampingan, verifikasi, dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Balangan. Lembaga ini secara aktif melakukan verifikasi pemenuhan standar pelayanan publik dan mendorong upaya pencegahan maladministrasi. Pendampingan yang dilakukan termasuk pelatihan dan pembinaan desa untuk menjadi *Desa Anti-Maladministrasi*, serta peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan nasional. Dampak pengawasan eksternal memperkuat akuntabilitas, memberikan legitimasi kebijakan, serta memicu birokrasi untuk menyesuaikan praktik layanan dengan standar nasional.



- Partisipasi dan Tekanan Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengaduan layanan publik turut mendorong kualitas penyelenggaraan layanan. Kegiatan seperti sosialisasi akses pengaduan dan peningkatan pemahaman hak-hak pengguna layanan mendukung warga untuk lebih aktif terlibat dalam menilai dan memberi umpan balik terhadap layanan publik. Upaya memperluas kesadaran masyarakat tentang mekanisme pengaduan ini merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi penilaian IPP. Dampak Tekanan dan *feedback* masyarakat menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah untuk merespons dan memperbaiki layanan.

- Regulasi dan Standar Nasional Pelayanan Publik

Pengaruh faktor eksternal juga datang dari regulasi dan standar pelayanan publik di tingkat nasional, termasuk mandat dari Undang-Undang Pelayanan Publik dan pedoman dari Kementerian PAN-RB. Regulasi semacam ini memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikan mekanisme layanan mereka agar sesuai dengan nilai-nilai yang diukur dalam IPP. Dampak Keberadaan aturan nasional menjadi acuan eksternal yang mendorong konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.111 adalah target Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 adalah 4,49 (-A). Realisasi tahun 2025 adalah 4,57, Realisasi tahun 2024 adalah 4,29 (-A), Realisasi tahun 2023 adalah 4,01 (-A), sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 3,52 (B). Berdasarkan data ini lonjakan tiap tahunnya dari tahun 2024 sebesar 0,28 poin, tahun 2023 sebesar 0,56 poin dan tahun 2022 sebesar 1,05 poin artinya secara simultan Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan seluruh SKPD dan *stake holder* yang terlibat.

Pemerintah Kabupaten Balangan menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pedoman Permenpan-RB untuk memenuhi standar pelayanan yang jelas, cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ini terwujud dalam berbagai forum pembinaan dan sosialisasi yang

diselenggarakan bersama Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan untuk memperkuat pemahaman aparatur terhadap standar pelayanan yang ditetapkan secara nasional.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri kepada seluruh perangkat daerah, baik yang menjadi lokus penilaian nasional maupun yang dinilai secara mandiri. Upaya ini diperkuat dengan penerbitan Surat Edaran Pelaksanaan PEKPPP Mandiri sebagai pedoman teknis bagi seluruh unit kerja. Selain itu, dilakukan Forum Group Discussion (FGD) untuk memperkuat pemahaman perangkat daerah terhadap indikator penilaian, sekaligus menyamakan persepsi dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Pemerintah daerah juga melaksanakan pendampingan intensif dalam pengumpulan data dukung PEKPPP, sehingga kualitas eviden kinerja yang disampaikan menjadi lebih akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.112 adalah target akhir RPJMD untuk Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah 4,89 (A) tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 4,57 (-A) dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 101,78 persen. Berdasarkan data tabel di atas untuk menuju kepada pencapaian target akhir RPJMD tahun 2030 yakni 4,89 (A), masih kurang 0,32 poin untuk mencapai target akhir RPJMD. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas. Karena saat ini Pelayanan Publik hanya berada di 4,57 (-A), itu artinya harus melakukan gerakan percepatan setiap tahunnya. Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) ini adalah :

- Pertama penyiapan dan penguatan dasar (2023–awal 2024). Pada tahap ini, *milestone* difokuskan pada penyamaan persepsi dan kesiapan kelembagaan. Pemetaan unit layanan, identifikasi gap standar pelayanan, serta pembentukan tim IPP menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa rencana aksi berbasis kondisi riil lapangan. Nilai strategisnya
 - Menghindari kebijakan yang bersifat seragam tanpa mempertimbangkan kapasitas masing-masing SKPD.
 - Menjadi dasar penentuan unit layanan prioritas dalam penilaian IPP.
- Kedua penguatan implementasi (Tahun 2024). *Milestone* tahap kedua diarahkan pada pemenuhan standar pelayanan dan peningkatan kapasitas aparatur. Penyusunan standar pelayanan, pelatihan SDM, penguatan mekanisme pengaduan, serta pelaksanaan SKM merupakan inti dari pemenuhan indikator IPP. Nilai strategis:
 - Meningkatkan kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik.
 - Mengubah orientasi birokrasi dari prosedural ke pelayanan.
- Ketiga akselerasi dan inovasi (Awal–Pertengahan 2025). Tahap akselerasi menekankan pada percepatan kinerja layanan dan kualitas hasil. Optimalisasi digitalisasi, replikasi praktik baik, dan penguatan desa sebagai unit pelayanan dasar berfungsi untuk meningkatkan pengalaman pengguna layanan (*user experience*). Nilai strategis:
 - Mendorong peningkatan IPP secara signifikan, bukan inkremental.
 - Menjadikan inovasi sebagai instrumen percepatan, bukan sekadar pelengkap.
- Keempat konsolidasi dan evaluasi (Akhir 2025). *Milestone* konsolidasi bertujuan untuk mengunci capaian IPP agar tidak bersifat temporer. Evaluasi menyeluruh dan integrasi hasil IPP ke dokumen perencanaan daerah menjadi kunci keberlanjutan kebijakan pelayanan publik. Nilai strategis:
 - Menjamin kesinambungan program lintas tahun.
 - Menjadikan IPP sebagai bagian dari sistem kinerja daerah.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.113 adalah menjelaskan bahwa realisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 4,57, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 4,46, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 4,56, realisasi Nasional 4,57, sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Secara data dikatakan bahwa Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Kabupaten Balangan jika dibandingkan dengan Kabupaten Tabalong realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 4,46 (-A) Kabupaten Balangan berada di atas Kabupaten Tabalong yaitu 0,11 poin lebih tinggi. Kabupaten Balangan masuk peringkat ke 4 (empat) hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025. Jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan juga berada di atas Pemerintah Provinsi yaitu 0,01 lebih tinggi dan

Pemerintah Provinsi berada di urutan ke 5 (lima). Berikut tabel perbandingan hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) :

No	Instansi	Nilai		Keterangan
		2024	2025	
1	Pemerintah Kabupaten Banjar	4,49	4,66	0,17
2	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	4,46	4,64	0,18
3	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4,55	4,61	0,06
4	Pemerintah Kabupaten Balangan	4,29	4,57	0,28
5	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	4,56	4,56	0
6	Pemerintah Kabupaten Tabalong	4,49	4,46	-0,03
7	Pemerintah Kota Banjarmasin	4,54	4,45	-0,09
8	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	4,28	4,35	0,07
9	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	3,79	4,32	0,53
10	Pemerintah Kabupaten Tapin	4,54	4,26	-0,28
11	Pemerintah Kota Banjarbaru	4,50	3,75	-0,75
12	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	4,23	3,71	-0,52
13	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,69	3,45	-0,24
14	Pemerintah Kabupaten Kota Baru	2,55	3,36	0,81

Faktor dominan yang mempengaruhi Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Balangan adalah:

- Standar Pelayanan dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Kondisi Balangan sdalah standar Pelayanan Minimal (SPM) telah disusun dan diterapkan, maklumat layanan tersedia di sebagian besar unit layanan, SOP pelayanan relatif jelas. Dampak terhadap IPP nilai kepatuhan layanan cukup tinggi dan pelayanan berjalan sesuai aturan, meski belum sepenuhnya berorientasi pengalaman pengguna.
- Kualitas dan Kapasitas SDM Pelayanan. Aparatur layanan cukup responsive, etika pelayanan relatif baik namun beban kerja tinggi dan kompetensi pelayanan digital belum merata.
- Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Layanan. Balangan untuk digitalisasi layanan mulai berjalan, beberapa layanan masih manual atau semi-digital dan integrasi antar aplikasi belum optimal. Dampaknya efisiensi meningkat, tetapi belum maksimal dan kepuasan pengguna belum meningkat signifikan.
- Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan. Fasilitas layanan dasar relatif memadai aksesibilitas (difabel, lansia) belum sepenuhnya optimal dan ruang tunggu dan kenyamanan masih variative.
- Mekanisme Pengaduan dan Umpan Balik Masyarakat. Kanal pengaduan tersedia, tindak lanjut aduan belum sepenuhnya cepat dan terdokumentasi serta evaluasi berbasis kepuasan pengguna masih terbatas. IPP tinggi membutuhkan loop perbaikan berkelanjutan.

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.110 sampai dengan tabel 3.113 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Pelayanan Publik (IPP) adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Pelayanan Publik (IPP) yaitu :**

- Penguatan Kebijakan dan Regulasi Pelayanan Publik. Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2025 terus memperkuat kerangka kebijakan pelayanan publik dengan menyesuaikan penyelenggaraan layanan terhadap:
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - Kebijakan Kementerian PAN-RB terkait Indeks Pelayanan Publik (IPP)
 - Prinsip reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik

Upaya konkret:

- Penyusunan dan penyempurnaan standar pelayanan di perangkat daerah
- Penegasan komitmen pimpinan SKPD terhadap peningkatan kualitas layanan
- Integrasi target pelayanan publik ke dalam dokumen perencanaan dan kinerja daerah
- Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur. Salah satu fokus utama tahun 2025 adalah penguatan sumber daya manusia pelayanan publik sebagai aktor utama penyelenggara layanan. Upaya konkret:
 - Pelatihan aparatur pelayanan (frontliner dan pengelola layanan)

- Penguatan pemahaman standar pelayanan dan etika pelayanan publik
- Internalisasi nilai ASN BerAKHLAK dalam budaya kerja pelayanan
- Pendampingan teknis oleh lembaga eksternal (Ombudsman RI)
- Pemenuhan dan Peningkatan Standar Pelayanan Publik. Pemkab Balangan secara aktif mendorong pemenuhan komponen standar pelayanan pada seluruh unit layanan, yang menjadi indikator utama dalam penilaian IPP. Upaya konkret:
 - Penetapan dan publikasi standar pelayanan
 - Penyediaan maklumat pelayanan
 - Penyesuaian SOP pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
 - Penataan alur dan waktu pelayanan agar lebih pasti
- Penguatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. Pada tahun 2025, pengelolaan pengaduan menjadi instrumen penting untuk peningkatan kualitas layanan. Upaya konkret:
 - Optimalisasi kanal pengaduan masyarakat (online dan offline)
 - Penunjukan unit pengelola pengaduan di SKPD
 - Peningkatan kecepatan dan kualitas tindak lanjut pengaduan
 - Pemanfaatan data pengaduan sebagai bahan evaluasi layanan
- Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik. Pemerintah Kabupaten Balangan memanfaatkan teknologi informasi dan inovasi layanan sebagai strategi percepatan pelayanan. Upaya konkret:
 - Pengembangan dan optimalisasi layanan berbasis elektronik (e-government)
 - Penyederhanaan prosedur melalui pemanfaatan aplikasi
 - Replikasi inovasi pelayanan yang efektif antar SKPD
 - Peningkatan akses informasi layanan kepada masyarakat
- Peningkatan Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat. Masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama evaluasi pelayanan publik. Upaya konkret:
 - Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - Sosialisasi hak dan kewajiban pengguna layanan
 - Pelibatan masyarakat dalam evaluasi dan perbaikan layanan
 - Respons aktif terhadap aspirasi publik
- Penguatan Pelayanan Publik di Tingkat Desa
 Sebagai daerah dengan karakteristik wilayah yang luas, Pemerintah Kabupaten Balangan memperkuat pelayanan publik hingga tingkat desa. Upaya konkret:
 - Pembinaan desa sebagai unit pelayanan publik dasar
 - Program Desa Anti-Maladministrasi
 - Pendampingan aparatur desa dalam pelayanan administratif
 - Standarisasi pelayanan desa
 Dampaknya masyarakat desa mendapatkan pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan berkualitas.
- Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Berkelanjutan
 Upaya peningkatan pelayanan publik diperkuat melalui monitoring dan evaluasi yang sistematis. Upaya konkret:
 - Evaluasi berkala capaian pelayanan publik
 - Pendampingan dan pengawasan eksternal
 - Perbaikan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi
 - Integrasi hasil evaluasi ke perencanaan tahun berikutnya

2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator 1 : Indeks Pelayanan Publik)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator

kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP). Adapun gambaran umum keterikatan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program ini berfungsi sebagai pengungkit (<i>leveraging factor</i>) yang memastikan kebijakan, SDM, tata kelola, dan sistem kerja pelayanan publik berjalan efektif dan berkelanjutan.
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki peran strategis dan determinan terhadap capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Balangan tahun 2025. Program ini berfungsi sebagai pengungkit (*leveraging factor*) yang memastikan kebijakan, SDM, tata kelola, dan sistem kerja pelayanan publik berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan IPP 2025 tidak hanya ditentukan oleh program pelayanan langsung, tetapi sangat bergantung pada kualitas perencanaan, koordinasi, dan dukungan internal yang disediakan oleh program penunjang.

- Dukungan terhadap Kebijakan Pelayanan Publik terhadap program penunjang mendukung perumusan, harmonisasi, dan implementasi kebijakan pelayanan publik melalui fungsi perencanaan, organisasi, dan tata laksana. Kontribusi terhadap Indeks Pelayanan Publik:
 - Menjamin kebijakan pelayanan publik selaras dengan regulasi nasional
 - Menghindari tumpang tindih SOP dan standar pelayanan
 - Memastikan seluruh SKPD memiliki arah kebijakan yang sama
- Dukungan terhadap Profesionalisme SDM Pelayanan. Melalui kegiatan kepegawaian, pelatihan, dan pengembangan kompetensi, program penunjang berperan langsung dalam membentuk kualitas aparatur pelayanan publik. Kontribusi terhadap IPP:
 - Meningkatkan kompetensi teknis dan etika pelayanan
 - Menumbuhkan budaya kerja ASN yang berorientasi pelayanan
 - Mengurangi potensi maladministrasi akibat ketidaktahuan prosedur
- Dukungan terhadap Tata Kelola dan Kelembagaan Pelayanan. Program penunjang memperkuat struktur organisasi, pembagian peran, dan mekanisme koordinasi unit layanan. Kontribusi terhadap IPP:
 - Kejelasan tugas dan fungsi unit pelayanan
 - Efektivitas koordinasi antar SKPD
 - Konsistensi pelaksanaan standar pelayanan
- Dukungan terhadap Sistem Informasi dan Administrasi Pelayanan. Program penunjang menyediakan dukungan administrasi, dokumentasi, dan sistem informasi internal yang menjadi tulang punggung pelayanan publik. Kontribusi terhadap IPP:
 - Ketersediaan data pelayanan yang akurat
 - Mendukung digitalisasi dan transparansi layanan
 - Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan
- Dukungan terhadap Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian. Melalui fungsi perencanaan dan evaluasi kinerja, program penunjang memastikan bahwa pelayanan publik tidak hanya berjalan, tetapi dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan. Kontribusi terhadap IPP:
 - Identifikasi dini masalah pelayanan
 - Tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat
 - Penyesuaian kebijakan berbasis hasil evaluasi

Dari program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.114
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah*	Pembinaan dan evaluasi standar pelayanan	Tersusunnya kebijakan standar pelayanan, evaluasi SOP, penguatan Zona Integritas, serta pembinaan tata kelola pelayanan publik di seluruh perangkat daerah.
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*	Pelayanan publik terintegrasi, inovasi layanan	Pelayanan perizinan dan non-perizinan, penyederhanaan prosedur, serta percepatan layanan berbasis OSS dan sistem digital
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	Integrasi Data Kependudukan	Pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dan berbasis NIK sebagai fondasi integrasi layanan publik
		Dinas Sosial*	Integrasi data untuk pelayanan bantuan sosial	Pelayanan kesejahteraan sosial, bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan
		Sekretariat DPRD	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Menyediakan dukungan administratif, teknis, serta penyediaan informasi yang diperlukan oleh DPRD dalam menjalankan fungsi representasi masyarakat dan pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik.
		Dinas Kesehatan dan RSUD	Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Peningkatan standar pelayanan medis, serta pemenuhan standar

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
				akreditasi fasilitas kesehatan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelayanan pendidikan dasar	Pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang merata dan berkualitas, termasuk standar layanan sekolah, pengelolaan sarana prasarana, dan peningkatan mutu layanan peserta didik.
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Digitalisasi layanan, sistem informasi, transparansi	Digitalisasi pelayanan publik, pengelolaan SPBE dan aplikasi layanan, pengaduan masyarakat (SP4N-LAPOR!)
		Inspektorat	Pengawasan, akuntabilitas, dan pengelolaan anggaran	Pengawasan internal, revidu kinerja pelayanan publik, audit kepatuhan, dan pengendalian risiko.
		Bapperida	Perencanaan dan penganggaran	Sinkronisasi kebijakan, integrasi program pelayanan publik dalam RPJMD dan RKPD
		Seluruh SKPD Teknis	Pelayanan sektoral	Pelaksana langsung pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi masing-masing, memastikan standar pelayanan terpenuhi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting kinerja SKPD:

Tabel 3.115
Monev Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Monev Offline	Monev Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	1. Rapat koordinasi Penilaian PEKKP Mandiri	1. Monitoring Data Pelayanan Publik by Aplikasi E-Kino	

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Money Offline	Money Online	Keterangan
			2. Monitoring Hasil Penilaian PEKPP Mandiri melalui Surat Edaran Percepatan Pemenuhan Data Dukung	2. Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Indeks Pelayanan Publik	
			3. Rapat Koordinasi terkait Penilaian Opini Pelayanan Publik oleh Ombudsman	3. Admin SKPD (Penelaah Teknis Kebijakan terkait Pelayanan Publik) melakukan monev secara online melalui Aplikasi E-Kino	

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator 1 : Indeks Pelayanan Publik)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

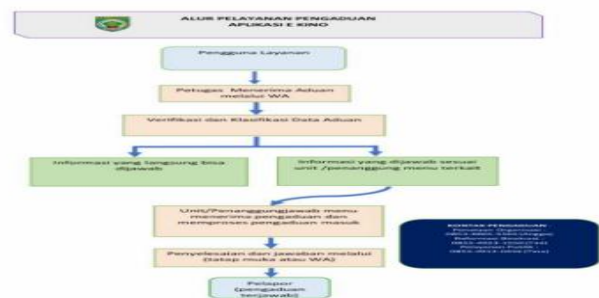
- SDM pelayanan publik dikelola secara terintegrasi melalui koordinasi antar perangkat daerah, khususnya unit pelayanan front office dan back office, sehingga proses layanan lebih sinkron, mengurangi duplikasi pekerjaan, dan meningkatkan ketepatan penyelesaian layanan di Kabupaten Balangan.
- Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, serta pemanfaatan sistem layanan berbasis digital mendorong profesionalisme petugas dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas serta nilai IPP Tahun 2025. Misalnya zoom meeting dengan Kementerian PANRB, Pelatihan Penyusunan Proses Bisnis di BKPSDM Provinsi Kalimantan Selatan.
- Optimalisasi penempatan pegawai sesuai analisis beban kerja serta penerapan multi-tasking pada unit pelayanan mampu meningkatkan produktivitas tanpa penambahan signifikan jumlah ASN, sehingga efisiensi operasional pelayanan publik dapat terjaga.

b. Efisiensi Anggaran

- Pengalokasian anggaran pelayanan publik difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan, seperti penguatan sarana pelayanan, pengembangan sistem informasi, dan peningkatan kompetensi aparatur. Anggaran yang digunakan adalah untuk honorarium narasumber dan makan minum. Anggaran Jumlah Anggaran Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana sebesar Rp. 239.557.300,- dengan realisasi sebesar 235.117.276,- (98,14%).
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelayanan mengurangi belanja operasional rutin (ATK, penggandaan dokumen, dan biaya koordinasi tatap muka), sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih hemat dan tepat guna. Monitoring menggunakan Aplikasi E-Kino.
- Peningkatan capaian IPP Tahun 2025 tanpa lonjakan signifikan pada belanja pelayanan menunjukkan adanya prinsip value for money, dimana output layanan meningkat dengan biaya yang relatif terkendali. Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Balangan berhasil mencapai Predikat Pelayanan Prima dengan Nilai 4,57.

c. Efisiensi Waktu

- Penyederhanaan SOP dan pemangkasan tahapan birokrasi pada layanan perizinan dan administrasi kependudukan mempercepat waktu penyelesaian layanan serta mengurangi waktu tunggu masyarakat. Proses Bisnis disusun mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029 yang akan diturunkan ke dalam CFM dan SOP.
- Implementasi sistem antrian dan layanan daring memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran dan pemantauan proses layanan secara mandiri, sehingga menekan potensi penumpukan permohonan. Sistem antrian ini di support melalui Aplikasi Mandiri Unit Penyelenggara pelayanan public seperti Rumah Sakit Datu Kandang Haji (SIDIRMAN)
- Peningkatan kepatuhan terhadap standar waktu pelayanan menunjukkan bahwa rata-rata penyelesaian layanan semakin sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat dan capaian IPP Kabupaten Balangan Tahun 2025. Database survey kepuasan Masyarakat Kabupaten Balangan dapat di monev melalui Aplikasi E-Kino pada Sub Menu Evaluasi Tindaklanjuti SKM.
- SOP Pengelolaan Pengaduan dibuat dalam rangka efisiensi waktu pelayanan pengaduan. Adapun alur layanan pengaduan pada Aplikasi E-Kino sebagaimana gambar disamping ini:



B.12 Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (Indikator 2 : Indeks Integritas)

Tabel 3.116
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator 2 : Indeks Integritas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Integritas	75,25	74,68	99,24

Target Indeks Integritas tahun 2025 adalah 75,25. Realisasi tahun 2025 adalah 74,68, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 99,24 persen.

Tabel 3.117
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator 2 : Indeks Integritas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Integritas	75,25	74,68	74,96	74,81	75,36

Target Indeks Integritas tahun 2025 adalah 75,25. Realisasi tahun 2025 adalah 74,68, Realisasi Tahun 2024 adalah 74,96, Realisasi tahun 2023 adalah 74,81, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 75,36.

Tabel 3.118
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator 2 : Indeks Integritas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Integritas	77	74,68	96,99

Target Akhir RPJMD untuk Indeks Integritas adalah 77 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 74,68 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 96,99 persen.

Tabel 3.119
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator 2 : Indeks Integritas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Integritas	74,68	76,18	72,04	72,32	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Indeks Integritas Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 74,68, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 76,18, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 72,04 realisasi Nasional adalah 72,32 sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.116, tabel 3.117, tabel 3.118, dan tabel 3.119 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator 2 : Indeks Integritas)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.116 adalah target Indeks Integritas tahun 2025 yaitu 75,25. Realisasi tahun 2025 adalah 74,68, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 99,24 persen belum tercapai sesuai target. Indeks Integritas sebesar 74,68 pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 99,24 persen. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja Indeks Integritas antara lain adalah:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

- **Kepemimpinan dan Budaya Organisasi.** Kepemimpinan di Kabupaten Balangan mendorong budaya integritas, etika kerja, dan kepatuhan pada peraturan melalui penerbitan surat edaran tentang kepatuhan terhadap regulasi anti-korupsi. Pemimpin aktif melakukan sosialisasi nilai integritas dan anti-korupsi di seluruh perangkat daerah melalui rapat rutin dengan seluruh SKPD dan melaksanakan pelatihan anti-korupsi, etika publik, SOP integritas. Budaya organisasi yang transparan dan akuntabel meningkatkan kepercayaan internal dan konsistensi perilaku ASN yaitu pemimpin memberi contoh perilaku transparan dan akuntabel. Dampak ke Indeks Integritas meningkatkan skor dimensi budaya integritas, kepatuhan, dan akuntabilitas perilaku. Sebagaimana telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Balangan melalui kegiatan sosialisasi anti korupsi untuk ASN, masyarakat, pelaku UMKM dan Media Massa serta pihak ketiga (vendor), dan hal ini dilakukan untuk meningkatkan indek integritas.
- **Kapasitas dan Kompetensi SDM.** Aparatur memiliki kompetensi profesional dan pemahaman regulasi terkait integritas dan anti-korupsi, serta Aparatur yang kompeten mampu menyelesaikan tugas sesuai prosedur dan tepat waktu. Pelatihan rutin dan pembinaan etika publik memperkuat kesadaran integritas sehingga Aparatur memiliki pengetahuan yang up-to-date terkait regulasi dan praktik integritas serta memperkuat kepatuhan terhadap SOP dan prosedur internal. SDM yang kompeten meminimalkan kesalahan administrasi, praktik maladministrasi, dan risiko penyalahgunaan wewenang melalui pengelolaan administrasi yang tepat, penerapan SOP dan prosedur sesuai regulasi dan pengambilan keputusan berbasis etika. Dampak ke Indeks Integritas meningkatkan dimensi kepatuhan regulasi, profesionalisme, dan kualitas layanan publik. Peraturan Bupati Nomor 103 tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan (fraud) di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Balangan merupakan salah satu regulasi yang ditetapkan untuk indeks integritas dan anti korupsi di Kabupaten Balangan.

- Pengawasan dan Akuntabilitas. Inspektorat, BPKPAD, dan unit pengawas internal menjalankan fungsi audit, monitoring, dan evaluasi rutin. Sistem pengaduan internal (*whistleblowing system*) tersedia dan ditindaklanjuti secara cepat dan penilaian kinerja berbasis hasil (*performance-based*) menekankan pada kepatuhan dan integritas. Dampak ke Indeks Integritas: meningkatkan skor dimensi pengawasan, akuntabilitas, dan penegakan aturan internal. Salah satu kelemahan tahun ini WBS (*whistleblowing system*) memang belum di implementasikan, Renaca ke depan untuk tahun 2026 ini WBS (*whistleblowing system*) akan di implementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai bentuk upaya untuk mendongkrak penilaian indeks integritas.
- Teknologi dan Sistem Informasi Pendukung. Penggunaan aplikasi dan sistem informasi terintegrasi mendukung transparansi, dokumentasi, dan audit trail serta digitalisasi layanan publik meminimalkan interaksi yang berpotensi praktik korupsi. Dampak ke Indeks Integritas meningkatkan skor dimensi transparansi, pengawasan, dan efisiensi proses. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk pencapaian indeks integritas ini adalah pemanfaatan aplikasi pelaporan gratifikasi sebagai salah satu media dalam mengendalikan pemberian gratifikasi yang melalui kanal GOL KPK RI. Aplikasi tersebut memberikan kemudahan dalam pelaporan gratifikasi yang diterima oleh penyelenggaran negara.

2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- Dukungan dan Partisipasi Masyarakat. Masyarakat yang aktif memberikan masukan, pengawasan, dan evaluasi layanan publik mendorong aparaturnya bekerja transparan melalui sistem pengaduan publik (Lapor SP4N, e-complaint) memaksa ASN untuk mematuhi prosedur sehingga partisipasi publik menciptakan efek pengawasan sosial yang mengurangi peluang maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang.
- Regulasi dan Kebijakan Nasional/Daerah. Kebijakan anti-korupsi, seperti UU Tipikor, Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan peraturan daerah terkait etika ASN, membentuk kerangka kerja kepatuhan dan Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Bupati mendorong penegakan integritas dan tata kelola bersih. Dengan adanya regulasi ini memberikan dasar hukum dan mekanisme pengawasan sehingga mempermudah implementasi integritas di semua SKPD.
- Pengawasan Eksternal (Audit dan Lembaga Independen). Pengawasan dari BPK, KPK, Inspektorat Provinsi, dan lembaga audit independen mendorong kepatuhan aparaturnya terhadap regulasi dan SOP. Laporan hasil audit dan rekomendasi memperbaiki prosedur internal sehingga meningkatkan skor dimensi akuntabilitas, kepatuhan regulasi, dan pengawasan eksternal.
- Media dan Opini Publik. Media massa dan media sosial berperan sebagai alat kontrol sosial. Adanya ekspos kasus maladministrasi atau praktik korupsi meningkatkan tekanan bagi aparaturnya untuk bersikap etis selain itu, media juga dapat menjadi sarana sosialisasi nilai integritas kepada masyarakat dan ASN hal ini memberikan dampak untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas sehingga memperkuat budaya integritas.
- Kerjasama Lintas Instansi dan Stakeholder. Kerjasama dengan lembaga pemerintah pusat, provinsi, perguruan tinggi, dan LSM meningkatkan transfer pengetahuan, benchmarking praktik integritas, dan inovasi pelayanan publik. Dukungan eksternal ini memperkuat kapasitas internal aparaturnya yang memberikan dampak untuk memperkuat kualitas pengawasan, pembelajaran organisasi, dan inovasi tata kelola. Salah satu bentuk Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan adalah terbentuknya Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan dan Pemerintah Daerah.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.117 adalah target Indeks Integritas tahun 2025 adalah 75,25. Realisasi tahun 2025 adalah 74,68, Realisasi Tahun 2024 adalah 74,96, Realisasi tahun 2023 adalah 74,81, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 75,36. Berdasarkan data ini Indeks Integritas tahun 2025 mengalami

penurunan sebesar -0,28 dibandingkan realisasi tahun 2024. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar -0,13 poin, dibandingkan dengan tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar -0,68. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Integritas mengalami fluktuasi naik turun setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh :

- *Partisipasi responden yang masih rendah.* Salah satu penyebab turunnya skor integritas SPI di Balangan adalah jumlah responden yang mengisi survei masih tergolong rendah. Rendahnya partisipasi ini memengaruhi kualitas dan representatifnya data yang diukur, sehingga nilai akhir indeks menjadi kurang optimal.
- *Pemahaman dan informasi tentang SPI yang belum merata.* Pejabat *Inspektorat* menyebutkan bahwa keraguan responden serta minimnya informasi tentang mekanisme pengisian survei turut berkontribusi pada nilai indeks yang tidak tinggi. Hal ini menandakan bahwa dalam praktiknya, banyak pegawai atau pemangku kepentingan belum sepenuhnya memahami tujuan dan cara SPI dijalankan.
- *Ketidakseimbangan antara upaya pencegahan dan persepsi responden.* Meskipun data *Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP)* Balangan menunjukkan capaian tinggi, hasil survei SPI justru menunjukkan skor yang lebih rendah. Ini menunjukkan ada perbedaan antara upaya pencegahan korupsi yang dilakukan dengan persepsi atau penilaian responden terhadap integritas pemerintahan.

Intinya, turunnya indeks integritas di Balangan pada tahun 2025 memiliki kecenderungan dipengaruhi oleh aspek teknis survei dan partisipasi responden, serta sejauh mana pemahaman internal tentang tujuan dan proses penilaian itu sendiri dapat dipenuhi. Untuk meningkatkan indeks integritas ke depan, pemerintah daerah harus *meningkatkan sosialisasi SPI, memperkuat pemahaman aparatur tentang proses penilaian, dan mendorong partisipasi lebih luas dari responden internal maupun eksternal.*

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.118 adalah target akhir RPJMD untuk Indeks Integritas adalah 77 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 74,68 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 99,24 persen. Berdasarkan data tabel di atas untuk menuju kepada pencapaian target akhir RPJMD tahun 2030 yakni 77 masih membutuhkan 2,32 poin untuk mencapai target akhir RPJMD, maka Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas. Karena saat ini Indeks Integritas hanya berada di 74,68, itu artinya harus melakukan gerakan percepatan setiap tahunnya. Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi Indeks Integritas ini adalah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- Tahap Persiapan (2023)
 - Penting untuk memetakan kondisi awal integritas aparatur dan prosedur SKPD.
 - Sosialisasi awal membangun pemahaman tentang integritas.
- Tahap Penguatan (2024)
 - Pelatihan dan pembinaan etika sehingga meningkatkan kompetensi profesional dan pemahaman regulasi.
 - Digitalisasi sistem yang mempermudah pengumpulan dan monitoring data.
 - Monitoring internal guna memperbaiki kesalahan lebih cepat, meminimalkan risiko maladministrasi.
- Tahap Evaluasi dan Optimalisasi (2025)
 - Audit internal/eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP dan regulasi.
 - Reward dan punishment untuk memperkuat budaya integritas.
 - Publikasi hasil untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.119 adalah menjelaskan bahwa realisasi Indeks Integritas Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 74,68, realisasi Kabupaten Tabalong adalah 76,18, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 72,04 realisasi Nasional adalah 72,32 sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Realisasi Indeks Integritas Kabupaten Balangan tahun 2025 sebesar 74,68 jika dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Tabalong 76,18 Kabupaten Balangan berada di bawah dengan selisih poin sebesar -1,50, dibandingkan dengan realisasi Propinsi Kalimantan Selatan 72,32 selisih poin sebesar 2,64 Kabupaten Balangan berada di atas realisasi Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan jika bandingkan dengan realisasi Nasional 72,32 Kabupaten

Balangan berada diatas dengan selisih sebesar 2,36 poin. Faktor dominan yang mempengaruhi Indeks Integritas adalah

- Sistem Pencegahan Korupsi dan Kepatuhan Tata Kelola. Kondisi Balangan regulasi dan kebijakan pengendalian internal tersedia, penerapan SOP dan aturan keuangan relatif patuh namun implementasi belum seragam antar SKPD. Dampak terhadap indeks risiko penyimpangan dapat ditekan dan skor belum maksimal karena konsistensi belum merata.
- Efektivitas Pengendalian Internal dan Peran APIP. APIP berfungsi dan aktif, Audit dan reviu rutin dilakukan dan tindak lanjut hasil pengawasan harus cepat dan tuntas.
- Integritas dalam Pengadaan Barang/Jasa. Proses pengadaan relatif terbuka, pemanfaatan sistem elektronik berjalan namun Pemerintah Daerah harus memiliki matrik risiko dan pengendalian konflik kepentingan.
- Budaya Integritas dan Etika Aparatur. Kesadaran aparatur terhadap nilai integritas cukup baik, internalisasi nilai antikorupsi harus merata dan teladan pimpinan SKPD sangat menentukan.
- Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. Informasi layanan dan anggaran relatif terbuka, mekanisme pengaduan tersedia dan perlindungan pelapor dilakukan sesuai regulasi serta kecepatan tindak lanjut harus sesuai SOP.

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.116 sampai dengan tabel 3.119 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks Integritas adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks Integritas yaitu :**

- Penguatan Kepemimpinan dan Budaya Integritas. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan yaitu pemimpin aktif menjadi role model integritas, memberikan teladan perilaku etis. Melaksanakan sosialisasi nilai-nilai integritas, anti-korupsi, dan etika pelayanan publik secara berkelanjutan serta penerapan reward dan punishment bagi aparatur yang patuh atau melanggar integritas. Dampaknya membentuk budaya kerja berbasis integritas, Aparatur lebih termotivasi untuk patuh SOP dan regulasi serta mengurangi praktik maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang. Salah satu pelatihan yang akan dilakukan untuk peningkatan integritas bagi JPT di Kabupaten Balangan adalah peningkatan kapasitas melalui pelatihan anti korupsi yang telah tersedia melalui pembelajaran online pengendalian gratifikasi yang dilakukan oleh KPK.
- Penguatan Kompetensi SDM dan Etika Aparatur. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan adalah menyelenggarakan pelatihan rutin terkait kompetensi profesional, regulasi, dan etika anti-korupsi, melaksanakan pembinaan etika publik untuk internalisasi perilaku etis serta melaksanakan monitoring kinerja aparatur berbasis indikator integritas. Dampaknya agar Aparatur mampu mengambil keputusan sesuai regulasi, meminimalkan kesalahan administrasi dan praktik korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan skor Indeks Integritas. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah ASN di Balangan dapat mengikuti kegiatan ceramah Pakar Kebijakan Pelayanan Publik dengan tema Penerapan Nilai Integritas Menakar Ulang RELasi antara Tunjangan Kinerja dan Praktik Korupsi di Organisasi yang diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategis Kebijakan Pelayanan Publik melalui zoommeeting.



- **Penyederhanaan Prosedur dan Digitalisasi Sistem.** Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan adalah melalui digitalisasi sistem pengukuran dan pelaporan Indeks Integritas, penyederhanaan SOP, formulir, dan prosedur administrasi dan penggunaan dashboard monitoring untuk evaluasi progres antar SKPD. Dampak mempercepat pengumpulan data dan pemantauan integritas, mengurangi beban administrasi dan kesalahan input data serta mempermudah audit internal maupun eksternal.
- **Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal.** Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan adalah melaksanakan audit internal rutin oleh Inspektorat dan SKPD terkait, melakukan kolaborasi dengan lembaga eksternal (BPK, KPK, provinsi) untuk pengawasan independent serta partisipasi masyarakat melalui sistem pengaduan publik (Lapor SP4N, e-complaint). Dampaknya menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan SOP, mengurangi praktik maladministrasi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan akuntabilitas aparatur dan transparansi proses.
- **Sosialisasi dan Partisipasi Publik.** Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan adalah sosialisasi rutin kepada masyarakat mengenai nilai integritas, hak dan kewajiban warga, serta mekanisme pengaduan, melibatkan masyarakat dalam penilaian dan pengawasan kualitas layanan publik. Dampaknya meningkatkan kontrol sosial dan feedback Masyarakat, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan mendukung pencapaian skor Indeks Integritas yang lebih tinggi.
- **Kolaborasi Lintas SKPD dan Stakeholder.** Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan adalah benchmarking praktik integritas dan manajemen risiko dengan daerah lain, workshop dan pelatihan lintas SKPD untuk transfer pengetahuan dan best practice. Dampaknya meningkatkan kapasitas internal organisasi dan memperkuat sinergi antar SKPD dan efisiensi pelaksanaan Indeks Integritas.

2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator 2 : Indeks Integritas)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator kinerja Indeks Integritas. Adapun gambaran umum keterikatan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan SOP, mengurangi risiko maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang dan mendorong akuntabilitas dan transparansi melalui audit, monitoring, dan kontrol sosial.
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program merupakan fondasi struktural pencapaian Indeks Integritas, karena menanamkan integritas sejak tahap perencanaan, mengendalikan pelaksanaan secara akuntabel dan mengevaluasi kinerja secara objektif dan transparan
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Integritas yaitu:

- Program Penyelenggaraan Pengawasan merupakan faktor kunci penunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Integritas karena menjamin kepatuhan SOP dan regulasi yaitu memastikan integritas procedural sehingga mengurangi kesalahan administrasi dan praktik maladministrasi dan memberikan data akurat untuk evaluasi kinerja SKPD. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan etika aparatur, serta memperkuat kontrol internal dan eksternal, termasuk partisipasi masyarakat. Efektivitas pengawasan ditentukan oleh integrasi digital, kompetensi SDM, komitmen pimpinan, dan tindak lanjut rekomendasi audit.
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan fondasi struktural pencapaian Indeks Integritas, karena menanamkan integritas sejak tahap perencanaan, mengendalikan

pelaksanaan secara akuntabel dan mengevaluasi kinerja secara objektif dan transparan. Kegiatan utama program ini terkait Penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja SKPD, integrasi indikator Indeks Integritas ke dokumen perencanaan, dan penyalarsan program SKPD dengan prioritas daerah. Kontribusi terhadap Indeks Integritas mencegah program tidak prioritas dan tumpang tindih, memastikan integritas sejak hulu kebijakan dan mendorong SKPD bertanggung jawab pada target integritas yang terukur

Dari kedua program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.120
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat*	Pengawasan internal, audit, dan monev	Memberikan rekomendasi perbaikan sistem, penguatan kontrol internal, dan evaluasi capaian indeks integritas
		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Pembinaan budaya kerja berintegritas	Regulasi internal, SOP, dan standar birokrasi untuk meningkatkan disiplin dan akuntabilitas ASN serta mendukung pembentukan Zona Integritas
		Bapperida	Perencanaan dan pengendalian kinerja	Integrasi program penguatan integritas dalam seluruh perangkat daerah, menyusun indikator integritas, dan melakukan evaluasi capaian indeks integritas sesuai RPJMD dan RKPD
		BPKPAD	Pengelolaan keuangan dan aset daerah	Transparansi anggaran, akuntabilitas penggunaan dana, serta penyediaan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Sistem informasi dan keterbukaan	Transparansi layanan publik melalui sistem informasi digital, portal pengaduan masyarakat, dan publikasi data pemerintahan yang akurat
		Bagian Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah.	Pengadaan barang/jasa yang transparan dan kompetitif	Penyusunan rencana kebutuhan barang/jasa (RKBJ), pengelolaan proses tender, kontrak, serta monitoring dan evaluasi pengadaan
		Seluruh SKPD	Implementasi nilai integritas dalam proses kerja	Kepatuhan terhadap regulasi, responsif terhadap pengawasan dan pengaduan

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Indeks Integritas di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting kinerja SKPD:

Tabel 3.121
Monev Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Monev Offline	Monev Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Integritas	1. Rapat koordinasi penentuan target Indeks Integritas di Ruang Rapat Bapperida	1. Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Indeks Integritas	
			2. Rapat koordinasi crosscutting untuk forum evaluasi lintas SKPD, pembahasan capaian, kendala, dan solusi serta penajaman peran masing-masing SKPD		
			3. Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring penyusunan rencana aksi perbaikan penetapan PIC lintas SKPD serta integrasi ke Renja dan PK SKPD.		

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator 2 : Indeks Integritas)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target dari indikator kinerja Indeks Integritas tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

- Penguatan budaya integritas dalam birokrasi dilaksanakan melalui pembinaan internal, seperti sosialisasi aturan pencegahan korupsi, mekanisme pelaporan gratifikasi, dan penguatan sikap antikorupsi bagi aparatur pemerintah sehingga perilaku kerja lebih konsisten terhadap standar integritas yang berlaku. Upaya ini mendukung terbentuknya work culture yang lebih akuntabel tanpa perlu penambahan jumlah SDM signifikan.
- Optimalisasi SDM pelayanan dipadukan dengan pelatihan peningkatan kompetensi, khususnya dalam mekanisme penegakan aturan, pencegahan konflik kepentingan, dan pengelolaan pengaduan internal-eksternal. Kondisi ini mendorong kinerja SDM yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus meminimalkan perilaku yang merusak kepercayaan publik.
- Efisiensi SDM juga tercermin dari pemanfaatan kolaborasi lintas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan integritas secara menyeluruh, sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan beban kerja lebih tersentralisasi.

b. Efisiensi Anggaran

- Komitmen akuntabilitas anggaran terlihat dari keberhasilan Kabupaten Balangan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024, yang menunjukkan standar pengelolaan keuangan yang transparan dan sesuai aturan hingga periode 2025.
- Efisiensi anggaran dalam konteks integritas tercapai dengan mengutamakan pembiayaan untuk program inti (pendidikan integritas internal, sistem pelaporan gratifikasi, sistem informasi internal) dan

mengefisienkan pembiayaan yang tidak langsung berdampak pada peningkatan kinerja pelayanan publik. Pengalokasian anggaran yang berfokus pada mekanisme penguatan sistem mendukung keberlanjutan reformasi birokrasi dan kredibilitas kelembagaan.

- Pengembangan sistem informasi dan layanan publik yang mendukung transparansi serta pengawasan internal meminimalkan potensi pemborosan anggaran, sekaligus mempercepat akuntabilitas realisasi anggaran yang berkontribusi terhadap budaya pemerintahan bersih.

c. Efisiensi Waktu

- Efisiensi waktu tercermin dari pengurangan birokrasi berbelit pada proses pelayanan publik yang rentan terhadap praktek maladministrasi, yang sebelumnya menjadi potensi risiko bagi integritas pelayanan. Kegiatan pelatihan dan pembentukan Desa Anti Maladministrasi menunjukkan langkah strategis mempercepat respons layanan di tingkat paling dasar pemerintahan.
- Penerapan mekanisme pelaporan kasus integritas dan pengaduan internal-eksternal dengan sistem yang terstruktur memperpendek waktu tindak lanjut kasus, sehingga respon terhadap potensi pelanggaran dapat dilakukan secara cepat dan tertata.
- Penyederhanaan SOP integritas internal dan pencegahan korupsi berdampak pada percepatan proses monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut pengawasan yang lebih cepat, terukur, dan sesuai standar tanpa perlu waktu yang panjang.

B.12 Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (Indikator 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Tabel 3.122
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	77	77,10	100,13

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 adalah 77. Realisasi tahun 2025 adalah 77,10, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100,13 persen.

Tabel 3.123
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	77	77,10	72,09	70,17	67,04

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 adalah 77. Realisasi tahun 2025 adalah 77,10, Realisasi Tahun 2024 adalah 72,09, Realisasi tahun 2023 adalah 70,17, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 67,04.

Tabel 3.124
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	87	77,10	88,62

Target Akhir RPJMD untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 87 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 77,10 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 88,62 persen.

Tabel 3.125
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Rata-rata Kementerian	Internasional
12	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	77,10	67,66	82,96	73,61	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2025 sebesar 77,10 realisasi Kabupaten Tabalong adalah 67,66, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 82,96 realisasi Rata-rata Kementerian 73,61 dan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.122, tabel 3.123, tabel 3.124, dan tabel 3.125 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.122 adalah target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 yaitu 77. Realisasi tahun 2025 adalah 77,10, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100,13 persen. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 77,10 pada tahun 2025 tercapai sesuai target kinerja yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja antara lain:

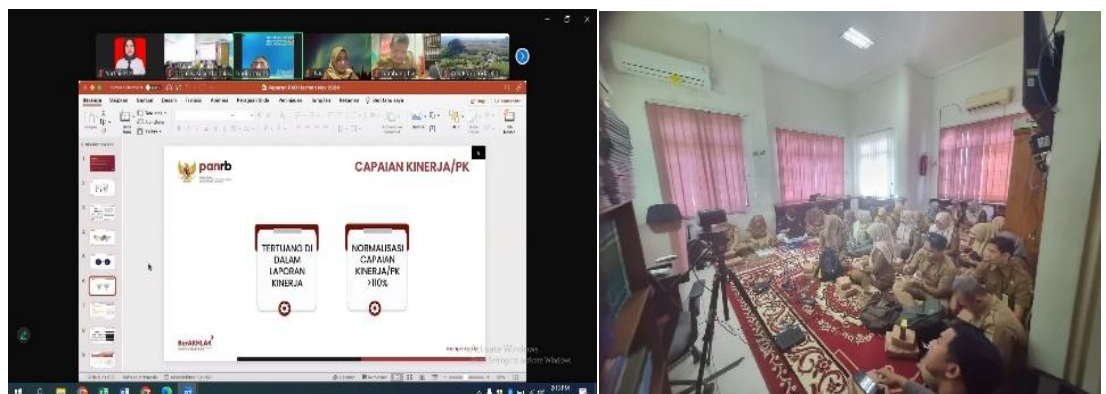
1. Faktor Internal sebagai berikut :

- Kuatnya komitmen dan kepemimpinan Bupati Balangan beserta Kepala SKPD terhadap penerapan SAKIP. Pimpinan aktif mengawal kinerja, melakukan monitoring, dan menindaklanjuti hasil evaluasi baik melalui rapat bulanan/triwulanan untuk membahas capaian indikator kinerja maupun melalui Aplikasi SAKIPRA sehingga berdampak ke Nilai AKIP.
- RPJMD, Renstra SKPD, RKPd, dan Renja telah diselaraskan secara vertikal dan horizontal melalui berbagai macam forum kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan pohon kinerja dengan indikator kinerja terukur dan berorientasi outcome sebagai dasar penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD periode 2025-2029 Kabupaten Balangan. RPJMD disusun berdasarkan pohon kinerja yang sudah tersedia di dalam aplikasi dan berbasis AI.
- Penetapan indikator kinerja utama (IKU) yang relevan dan terukur, target kinerja ditetapkan realistis dan berbasis data. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan dilaksanakan secara berkala per triwulan melalui penginputan data di Aplikasi SAKIPRA. Pengisian data kinerja dilakukan dari Jabatan Tinggi Pratama sampai ke Pelaksana.
- Tersedianya menu crosscutting, monev crosscutting dan cascading kinerja.

- Pengukuran Kinerja sudah dilakukan secara triwulan melalui Aplikasi SAKIPRA dengan pengisian menu monev TRC, pengisian Masalah dan Tindaklanjut triwulan dan dialog kinerja triwulan baik antara Tim Kabupaten dan Tim Sakip SKPD maupun internal SKPD dari JPT sampai Pelaksana.
- Pelaporan Kinerja SKPD tersedia menu yang dapat di download atau unduh langsung dari Aplikasi SAKIPRA yakni:
 - Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD ;
 - Tabel Indikator Kinerja Utama SKPD;
 - Tabel Perjanjian Kinerja SKPD;
 - Tabel Capaian Kinerja Sasaran SKPD;
 - Tabel Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kinerja SKPD 5 Tahun;
 - Tabel Perbandingan Kinerja Tahun N dengan Target Akhir Renstra;
 - Tabel Perbandingan Kinerja Tahun N dengan Realisasi Nasional dan Wilayah Sekitar;
 - Tabel Analisis Keberhasilan Tujuan dan Sasaran;
 - Tabel Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran;
 - Tabel Tingkat Efisiensi Pencapaian Program dan Kegiatan;
 - Tabel Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan;
 - Tabel Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan;
 - Tabel Rekap Masalah dan Tindaklanjut Triwulan.
- Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilakukan berbasis Aplikasi SAKIPRA dan tersedia monitoring evaluasi melalui dialog kinerja.

2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- Kebijakan dan regulasi nasional (PermenPANRB, Permendagri, dan kebijakan SAKIP) menjadi pedoman baku sehingga standar penilaian yang jelas memudahkan daerah menyesuaikan sistem kerjanya. Pemerintah Kabupaten Balangan memiliki Peraturan Bupati Balangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Nomor 188.45/22/Setda/Kum Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
- Pembinaan dan evaluasi dari KemenPANRB terhadap SAKIP untuk memberikan umpan balik objektif, berbagai dan rekomendasi hasil evaluasi yang menjadi acuan perbaikan kinerja daerah. Berbagai kegiatan pembinaan antara lain :
 - Sosialisasi Permen PANRB Nomor 22 Tahun 2024 dan Penyampaian Poin-poin Pokok Dalam Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 dengan Kementerian PANRB Selasa 14 Januari 2025 di Ruang Rapat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan:



- Melaksanakan Desk Finalisasi Review Pohon Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Kementerian PANRB di Hotel Lumire Jakarta Pusat tanggal 24 s/d 25 Februari 2025:



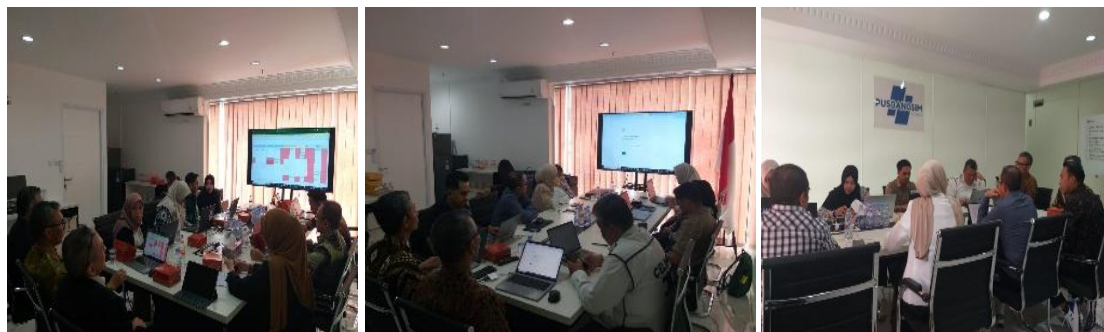
- Melaksanakan Workshop Peningkatan Evaluatur Dalam Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Berserta Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Internal tanggal 14 s/d 16 April 2025 di Hotel Best Western Banjarmasin:



- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian PANRB terkait Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk menuju Predikat Nilai SAKIP A tanggal 8 s/d 9 Mei 2025 di Kantor Kementerian PANRB:



- Melaksanakan koordinasi dalam rangka Penguatan SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Berbasis Aplikasi dan Kajian KAK Rancangan Aplikasi Pelayanan Publik Tahun 2026, ke PUSBANGSIM Indonesia di Jakarta tanggal 28 Juni s/d 1 Juli 2025:



- Melaksanakan Workshop Penguatan SAKIP Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Aplikasi e-SAKIP Kabupaten Balangan tanggal 19 s/d 20 Juli 2025 di Hotel Aeris Banjarbaru:



- Melaksanakan FGD Pemantapan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025-2029 tanggal 9 s/d 10 Agustus 2025 di Hotel Aeris Banjarbaru:



- Melaksanakan FGD Penyusunan Struktur Kinerja Terintegrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja melalui Sistem Informasi tanggal 3 s/d 4 September 2025 di Hotel Aeris Banjarbaru:



- Melaksanakan Asistensi Pra Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2025 dalam bentuk Desk dan Wawancara Penguasaan Pohon Kinerja dan Capaian Kinerja SKPD Sampai Triwulan 3 Tahun 2025 dengan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kementerian PANRB tanggal 6 September 2025 di Hotel Grand QIN Banjarbaru:



- Mengikuti kegiatan terkait Pelaksanaan Pra Evaluasi Implimentasi SAKIP Tahun 2025 oleh Kementerian PANRB tanggal 9 September 2025 di Hotel Grand QIN Banjarbaru:



- Melaksanakan Kegiatan terkait Tindaklanjut Atas Pra-Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2025 oleh Kementerian PANRB dan Monev Rencana Aksi RB General dan RB Tematik Berdasarkan Surat Edaran Kementerian PANRB di Hotel Lumire Jakarta Pusat tanggal 24 s/d 25 September 2025:



- Mengikuti Training of Basic Trainer Implementasi SAKIP Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan tanggal 7 s/d 8 Oktober 2025 di Ruang Rapat Syahrir YP Bappeda:



- Melaksanakan Workshop Penguatan Implementasi SAKIP di Aplikasi SAKIP PRO tanggal 8 s/d 9 Desember 2025 di Hotel Aeris Banjarbaru:



- Melaksanakan Asistensi LKj SKPD dari tanggal 12 s/d 20 Januari 2026 di Ruang Rapat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan:



- Melaksanakan Asistensi Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Balangan tanggal 26 Januari 2026 di Ruang Rapat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan:



- Pengawasan eksternal oleh APIP, BPK, dan Lembaga Pengawas. Temuan dan rekomendasi BPK dan pengawasan eksternal mendorong perbaikan sistem dan sinkronisasi hasil pengawasan dengan sistem kinerja daerah yang berdampak terhadap peningkatan kinerja SKPD. Pembinaan oleh BPKP terkait Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RPJMD.
- Perkembangan sistem informasi dan teknologi Nasional melalui dukungan aplikasi Nasional (SPIP, e-SAKIP, SIPD) sehingga dengan adanya standarisasi sistem informasi memudahkan integrasi data kinerja. Pemerintah Kabupaten Balangan menjadi salah satu percontohan evaluasi sakip berbasis AI oleh Universitas Indonesia.
- Dukungan dan koordinasi serta fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyingkronkan perencanaan dan evaluasi kinerja antar level pemerintahan. Fasilitasi Peraturan daerah RPJMD oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Balangan belum dapat meraih Predikat Sakip A dan upaya perbaikan antara lain adalah:

1. Budaya kerja Sakip belum diimplimentasikan secara holistik. Berdasarkan rekomendasi Kementerian PANRB dalam LHE Sakip Tahun 2025 untuk menjawab masalah ini :
 - Pemerintah Kabupaten Balangan harus membangun mekanisme knowledge management yang terdokumentasi dengan baik, termasuk SOP, catatan pembelajaran, template kerja, dan pedoman pelaksanaan SAKIP pada setiap tahap.
 - Mengembangkan inovasi yang benar-benar menyelesaikan masalah kinerja, misalnya penyederhanaan proses, perbaikan mekanisme pengukuran, penguatan dialog kinerja, atau modifikasi intervensi berdasarkan konteks lokal.
2. Mekanisme monitoring kinerja belum optimal. Berdasarkan rekomendasi Kementerian PANRB dalam LHE Sakip Tahun 2025 untuk menjawab masalah ini :
 - Melakukan pemetaan secara detail untuk kinerja crosscutting termasuk target serta monitoring dan evaluasinya, agar realisasi dari kinerja crosscutting yang sudah dipetakan memang terwujud sesuai dengan kebutuhan dari Perangkat Daerah.
 - Meningkatkan kualitas sistem Aplikasi SAKIP agar dapat saling terintegrasi di setiap komponen pembangunan SAKIP (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja).
 - Membentuk mekanisme pemeriksaan kedua atau komite validasi data (Bappeda atau Bagian Organisasi) secara formal untuk memastikan setiap data kinerja diverifikasi sebelum disahkan. Proses validasi harus mencakup pengecekan sumber data, keakuratan perhitungan, dan konsistensi definisi indikator.
 - Instansi perlu mewajibkan penyusunan rencana perbaikan untuk setiap penghambat yang diidentifikasi. Penghambat yang sama tidak boleh muncul kembali tanpa adanya bukti implementasi langkah korektif. Mekanisme monitoring harus memastikan bahwa hambatan yang berulang ditangani secara sistematis dan ditutup melalui tindakan konkret.
3. Laporan Kinerja belum disusun sepenuhnya berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014. Berdasarkan rekomendasi Kementerian PANRB dalam LHE Sakip Tahun 2025 untuk menjawab masalah ini :
 - Memperdalam analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah dengan menambahkan penjelasan langkah/upaya yang telah dilakukan sehingga efisiensi bisa terwujud.
 - Memperbaiki kedalaman analisis faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja pada dokumen LKJIP perangkat daerah, tidak hanya dengan menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh, tetapi juga penjelasan dampak/kontribusi faktor-faktor tersebut terhadap tercapai atau tidaknya kinerja yang ditargetkan.
 - Melengkapi setiap laporan kinerja dengan rencana tindak lanjut yang jelas, terukur, dan terkait langsung dengan hasil pengukuran. Setiap deviasi atau masalah yang teridentifikasi harus diikuti dengan langkah perbaikan yang spesifik dan memiliki tenggat waktu pelaksanaan.

4. Pelaksanaan evaluasi kinerja belum optimal. Berdasarkan rekomendasi Kementerian PANRB dalam LHE Sakip Tahun 2025 untuk menjawab masalah ini :
 - Memperluas cakupan evaluasi dengan menambahkan indikator atau kriteria yang mencerminkan budaya kinerja misalnya kedisiplinan pengukuran, kualitas dialog kinerja, konsistensi tindak lanjut, dan cara unit merespons masalah. Penilaian ini akan membantu memperjelas faktor non-teknis yang memengaruhi capaian kinerja.
 - Memastikan bahwa setiap riwayat perbaikan dan bukti dukung yang disampaikan oleh PD dapat didokumentasikan dengan baik sehingga saat evaluasi AKIP selanjutnya, bisa terpetakan mana rekomendasi yang sudah selesai dan memenuhi ekspektasi evaluator internal dan mana yang masih menjadi catatan berulang yang perlu diperbaiki dan diintervensi lebih lanjut.
5. Belum terintegrasinya kinerja harian individu sebagai basis pembayaran TPP dalam Aplikasi ASN Digital dan kinerja organisasi dalam Aplikasi SAKIPRA. Tahun 2026 melalui Bapperida Kabupaten Balangan telah dianggarkan pengembangan menu Aplikasi SAKIPRA salah satunya upaya integrasi ASN Digital dan SAKIPRA.
6. Memastikan kinerja makro daerah tercapai. Pemerintah Kabupaten Balangan akan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak terkait seperti BPS.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.123 adalah target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 adalah 77. Realisasi tahun 2025 adalah 77,10, Realisasi tahun 2024 adalah 72,09, Realisasi tahun 2023 adalah 70,17, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 67,04. Berdasarkan data Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan mengalami kenaikan setiap tahunnya.. Hal ini disebabkan oleh komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan seluruh SKPD dan *stake holder* yang terlibat. Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan kebijakan penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diarahkan pada peningkatan kualitas kinerja berbasis hasil (outcome), integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja serta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Adapun rincian hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 berdasarkan LHE Kemenpan RB Nomor : B/50/AA.05/2025 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 tanggal 20 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai			
		2022	2023	2024	2025
A. Perencanaan Kinerja	30	22,16	23,19	23,71	25,08
B. Pengukuran Kinerja	30	19,35	20,21	21,04	22,26
C. Pelaporan Kinerja	15	10,73	10,99	11,09	12,10
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,80	15,78	16,25	17,59
Nilai Hasil Evaluasi	100	67,04	70,17	72,09	77,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB	BB	BB

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.124 adalah target akhir RPJMD untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 87 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 77,10 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 100,13 persen. Berdasarkan data tabel di atas untuk menuju kepada pencapaian target akhir RPJMD tahun 2030 yakni 87, maka Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas. Karena saat ini Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hanya berada di 77,10, itu artinya harus melakukan gerakan percepatan setiap tahunnya. Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah

- Melaksanakan Evaluasi Kinerja melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan secara berkala (triwulan/tahunan), melakukan identifikasi capaian dan target serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja. Setelah melakukan identifikasi langkah selanjutnya melakukan evaluasi mencakup aspek efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kualitas output/outcome.

- Perbaikan kinerja dari hasil evaluasi kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana perbaikan (*action plan*) fokus pada SKPD yang belum mencapai target atau memiliki indikator rendah serta melakukan perbaikan meliputi: perencanaan ulang, penguatan kapasitas SDM, optimalisasi anggaran, dan pemanfaatan teknologi.
- Percepatan capaian kinerja dengan menetapkan prioritas program berdampak tinggi untuk percepatan, dan koordinasi lintas SKPD untuk sinergi program serta penggunaan sistem informasi kinerja (e-SAKIP, e-Monev) untuk monitoring real-time.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.125 adalah menjelaskan bahwa realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2025 sebesar 77,10 realisasi Kabupaten Tabalong adalah 67,66, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 82,96 realisasi Rata-rata Kementerian 73,61 dan realisasi Internasional tidak ada sumber data. Berikut peringkat Peringkat SAKIP se-Kalsel Tahun 2025 terlihat dalam tabel dibawah ini:

No	Kabupaten/Kota	Nilai AKIP 2024	Nilai AKIP 2025	Interval Kenaikan
1	Pemerintah Kabupaten HSS	84,07	84,19	0,12
2	Pemerintah Kabupaten Balangan	72,09	77,10	5,01
3	Pemerintah Kabupaten Tapin	71,00	74,24	3,24
4	Pemerintah Kota Banjarmasin	70,70	72,38	1,68
5	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	70,02	71,06	1,04
6	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	70,16	72,06	1,9
7	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	68,01	67,19	-0,82
8	Pemerintah Kabupaten Tabalong	67,10	67,66	0,56
9	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	67,09	68,22	1,13
10	Pemerintah Kabupaten Banjar	67,06	71,16	4,1
11	Pemerintah Kota Banjarbaru	66,83	68,91	2,08
12	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	64,82	65,85	1,03
13	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	61,78	64,79	3,01

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.122 sampai dengan tabel 3.125 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu :**

- Peningkatan budaya kerja bersakip melalui penguatan komitmen dan kepemimpinan dengan melakukan dialog kinerja dan menekankan Kepala SKPD untuk melakukan kontrol secara berjenjang.
- Melakukan penyusunan rencana aksi rekomendasi perbaikan Sakip berdasarkan LHE Sakip tahun 2025 meliputi aspek monitoring dan evaluasi kinerja, perbaikan penyusunan laporan kinerja, peningkatan kualitas evaluasi.
- Melakukan integrasi kinerja harian individu dan kinerja organisasi serta pengembangan menu Aplikasi SAKIPRA.
- Pengawasan kinerja makro daerah dengan melakukan koordinasi intensif antara Tim Sakip Pemerintah Kabupaten Balangan dan BPS.
- Memberikan reward dan punishment kepada 5 (lima) SKPD peraih nilai AKIP tertinggi dan terendah.

2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator

kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun gambaran umum keterikatan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program penunjang urusan pemerintahan daerah berperan strategis dalam memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja instansi pemerintah.
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program yang memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh tahapan siklus kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, hingga pelaporan berjalan sesuai ketentuan serta berorientasi pada pencapaian hasil.
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program kunci dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Nilai AKIP Kabupaten Balangan Tahun 2025. Melalui perencanaan yang berkualitas, pengendalian yang konsisten, serta evaluasi yang komprehensif, Pemerintah Kabupaten Balangan mampu mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Melalui koordinasi yang efektif, sinkronisasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan, serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan, Pemerintah Kabupaten Balangan mampu memperkuat akuntabilitas kinerja dan kualitas pembangunan daerah secara berkelanjutan.
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Melalui kebijakan yang jelas, pendampingan yang intensif, serta asistensi yang tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Balangan mampu memperkuat sistem akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan kualitas kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki peran strategis dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Nilai AKIP Kabupaten Balangan Tahun 2025. Sinergi antarprogram, penguatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengawasan internal yang efektif menjadi kunci utama dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah yang berkelanjutan. Pelaksanaan program dan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah secara konsisten dan terintegrasi berdampak positif terhadap:
 - Meningkatnya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja.
 - Membaiknya kualitas indikator kinerja dan capaian outcome.
 - Terwujudnya pelaporan kinerja yang lebih akuntabel, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - Meningkatnya nilai AKIP Kabupaten Balangan Tahun 2025 sebagai cerminan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Program Penyelenggaraan Pengawasan memiliki peran strategis dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Nilai AKIP Kabupaten Balangan Tahun 2025. Melalui pengawasan yang efektif, pembinaan yang berkelanjutan, serta peningkatan kapabilitas APIP, Pemerintah Kabupaten Balangan mampu memperkuat akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan secara konsisten dan terarah memberikan dampak positif berupa:
 - Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP pada seluruh perangkat daerah.
 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
 - Meningkatnya nilai AKIP Kabupaten Balangan Tahun 2025 sebagai hasil dari perbaikan sistemik dan berkelanjutan.

- Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan faktor kunci dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Nilai AKIP Kabupaten Balangan Tahun 2025. Melalui perencanaan yang berkualitas, pengendalian yang konsisten, serta evaluasi yang komprehensif, Pemerintah Kabupaten Balangan mampu mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan secara konsisten dan terarah memberikan dampak positif berupa:
 - Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP pada seluruh perangkat daerah.
 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
 - Meningkatnya nilai AKIP Kabupaten Balangan Tahun 2025 sebagai hasil dari perbaikan sistemik dan berkelanjutan.
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran strategis dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Nilai AKIP Kabupaten Balangan Tahun 2025. Melalui koordinasi yang efektif, sinkronisasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan, serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan, Pemerintah Kabupaten Balangan mampu memperkuat akuntabilitas kinerja dan kualitas pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah secara efektif memberikan dampak positif berupa:
 - Meningkatnya keterpaduan dan konsistensi dokumen perencanaan daerah.
 - Berkurangnya duplikasi program dan kegiatan pembangunan.
 - Meningkatnya kualitas penganggaran berbasis kinerja.
 - Meningkatnya nilai AKIP Kabupaten Balangan Tahun 2025 sebagai refleksi tata kelola perencanaan yang akuntabel.
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi memiliki peran strategis dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Nilai AKIP Kabupaten Balangan Tahun 2025. Melalui kebijakan yang jelas, pendampingan yang intensif, serta asistensi yang tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Balangan mampu memperkuat sistem akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan kualitas kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan. Pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi secara konsisten dan terarah memberikan dampak positif berupa:
 - Meningkatnya keseragaman dan kualitas implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah.
 - Berkurangnya kesalahan teknis dalam perencanaan dan pelaporan kinerja.
 - Terwujudnya perbaikan berkelanjutan dalam manajemen kinerja pemerintahan.
 - Meningkatnya nilai AKIP Kabupaten Balangan Tahun 2025 sebagai refleksi tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Dari kelima program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

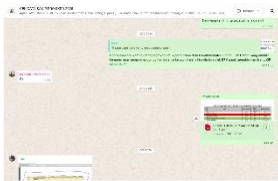
Tabel 3.126
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Bapperida*	Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan keterkaitan antar dokumen dan mengawal pengukuran kinerja	Penyusunan dokumen RKPD, Renstra, dan pengukuran kinerja handal, akurat, dan tepat waktu serta melakukan monitoring, evaluasi kinerja, dan mengawal pengukuran kinerja SKPD

No	Kinerja	Crosscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
		Inspektorat*	Memperkuat evaluasi kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan SAKIP.	Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan nilai AKIP
		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah*	Meningkatkan konsistensi dan kualitas pelaporan, penerapan SAKIP lintas SKPD.	Menyusun SOP, pedoman manajemen kinerja, kualitas pelaporan kinerja dan penguatan reformasi birokrasi.
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat keterkaitan perencanaan dan penganggaran	Mengelola keuangan dan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu sehingga mendukung capaian kinerja instansi
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Meningkatkan kualitas data dan sistem pengukuran kinerja	Digitalisasi sistem manajemen kinerja, pelaporan berbasis elektronik, dan transparansi data untuk seluruh SKPD
		BKPSDM	Memfasilitasi penyalarsan kinerja individu dengan kinerja SKPD	Mengelola ASN, penguatan kapasitas pegawai, pengembangan kompetensi, dan manajemen kinerja individu agar mendukung kinerja organisasi.
		Seluruh SKPD Teknis	Menyiapkan data realisasi kinerja	Melaksanakan tugas dan fungsi layanan publik sesuai standar manajemen kinerja, menyusun laporan kinerja, dan memastikan pencapaian target indikator kinerja SKPD

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting kinerja SKPD:

Tabel 3.127
Money Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Money Offline	Money Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Rapat koordinasi penentuan target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Ruang Rapat Bapperida	2. Komunikasi by WhattApp (pengumpulan data untuk penyusunan dokumen Pelaporan Kinerja Pemda)	
			3. Asistensi Laporan Kinerja SKPD antara Tim Sakip Kabupaten (Bagian Organisasi, Bapperida, Inspektorat SKPD)	4. Admin Kabupaten dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah (AKIP)	
			5. Melaksanakan Penguatan Menu-menu Penting dalam Implementasi Sakip dengan Konsep SMART C di Aplikasi Sakip Pro dan Capaian Kinerja Makro Daerah dan Implementasi Asta Cita Dalam Sakip Persiapan Panel Pimpinan Nopember di Hotel Lumire Jakarta tanggal 23 s/d 24 Oktober 2025;	6. Zoom meeting dengan Kementerian PANRB terkait Penguatan Implimentasi SAKIP di Kabupaten Balangan	
			7. Melaksanakan Kegiatan Penguatan Implimentasi SAKIP serta Sosialisasi Aplikasi e-SAKIPPRO tanggal 4 s/d 5 Nopember 2025;		

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

- Penguatan kapasitas SDM yang memiliki relevansi tupoksi dengan akuntabilitas kinerja seperti FGD bidang perencanaan, Bidang Pelaporan dan Evaluasi.
- Budaya kerja yang sudah terinternalisasi seperti kesadaran tentang pentingnya SAKIP sebagai bagian dari pola pikir dan tindakan sehari-hari berkontribusi meningkatnya kualitas pelaporan kinerja serta pengendalian pelaksanaan tugas.

b. Efisiensi Anggaran

- Pada tahun 2025 terjadi pengurangan anggaran makan minum sehingga kegiatan lebih difokuskan pada zoom meeting dengan tetap memperhatikan kualitas rapat koordinasi.
- Rapat koordinasi ataupun fasilitasi pembinaan sakin dilaksanakan sesuai aliran kas.
- Realisasi kegiatan penyelenggaraan terkait Indikator Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan Belanja Cetak, Belanja Honorarium Narasumber, Belanja Makan dan Minum Rapat serta Paket Meeting Full Day sebesar Rp. 336.930.000,-

c. Efisiensi Waktu

- Efisiensi waktu tercermin dalam besarnya perbaikan performa yang terekam melalui evaluasi SAKIP sudah berdasarkan Aplikasi SAKIPRA.
- Penguatan koordinasi antar unit kerja serta mekanisme internal yang lebih sistematis mempercepat siklus perencanaan hingga pelaporan kinerja tahunan. Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja (LKjIP/LAKIP) kepada publik dan lembaga evaluasi merupakan salah satu indikator akuntabilitas yang juga berdampak pada predikat yang lebih tinggi dalam penilaian SAKIP.

B.12 Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (Indikator 4 : Indeks SPBE)

Tabel 3.128
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator 4 : Indeks SPBE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks SPBE	3,40	3,82	112,65

Target Indeks SPBE tahun 2025 adalah 3,40. Realisasi tahun 2025 adalah 3,82, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 112,35 persen.

Tabel 3.129
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator 4 : Indeks SPBE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks SPBE	3,40	3,82	3,34	2,69	2,44

Target Indeks SPBE tahun 2025 adalah 3,40. Realisasi tahun 2025 adalah 3,82, Realisasi Tahun 2024 adalah 3,34, Realisasi tahun 2023 adalah 2,69, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 2,44.

Tabel 3.130
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator 4 : Indeks SPBE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks SPBE	0	3,82	0

Target Akhir RPJMD untuk Indeks SPBE adalah 0 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 3,82 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 0 persen.

Tabel 3.131
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator 4 : Indeks SPBE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks SPBE	3,82	3,48	3,69	-	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Indeks SPBE Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 3,82, realisasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah 3,48, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan 3,69. Sedangkan realisasi Nasional dan Internasional tidak ada sumber data.

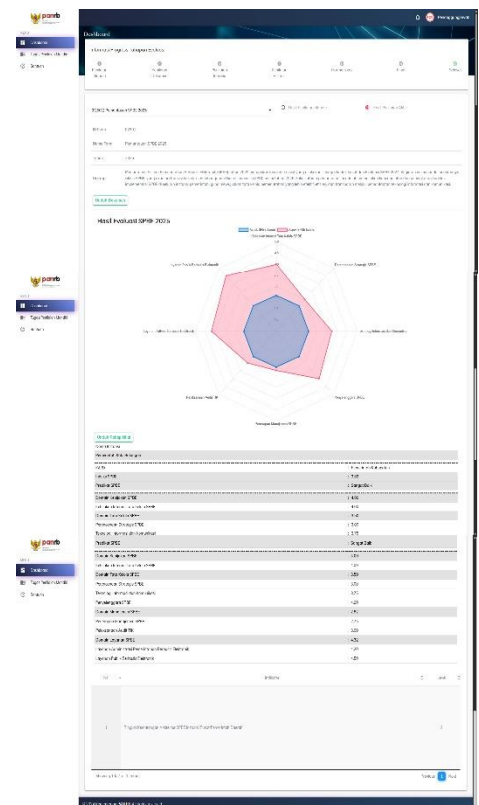
Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.128, tabel 3.129, tabel 3.130, dan tabel 3.131 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator 4 : Indeks SPBE)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.128 adalah target Indeks SPBE tahun 2025 yaitu 3,40. Realisasi tahun 2025 adalah 3,83, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 112,35 persen tercapai sesuai target. Indeks SPBE sebesar 3,82 pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 112,35 persen dipengaruhi oleh berbagai faktor pendongkrak kinerja antara lain adalah:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

- Adanya regulasi terkait SPBE yang telah dibuat dan disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, yaitu Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Balangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Dibentuknya Tim Koordinasi SPBE dan Tim Evaluasi Mandiri SPBE yang didukung dengan SK Tim Koordinasi SPBE 2025 Kabupaten Balangan dan SK Tim Evaluasi Mandiri SPBE 2025 Kabupaten Balangan.
- Kompetensi, keterampilan, dan kapasitas SDM pengelola TIK serta aparatur sipil negara (ASN) dalam menggunakan dan mengelola sistem elektronik.
- Komponen atau substansi yang meliputi empat domain utama yakni domain kebijakan SPBE, domain tatakelola SPBE, domain manajemen SPBE, dan domain layanan SPBE dapat dipenuhi data dukungnya sehingga output penilaian masuk kategori Sangat Baik. Penilaian ini mengindikasikan bahwa tatakelola SPBE sudah berjalan cukup matang, layanan digital sudah tersedia dan dimanfaatkan, integrasi sudah mulai terbentuk.



2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- Adanya kerangka hukum dan peraturan yang jelas dari pemerintah pusat, seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang mendorong dan mengatur implementasi di seluruh instansi.
- Laju perkembangan teknologi yang cepat yang menuntut institusi untuk terus beradaptasi dan meningkatkan sistem.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.129 adalah target Indeks SPBE tahun 2025 adalah 3,40. Realisasi tahun 2025 adalah 3,82, Realisasi tahun 2024 adalah 3,34, Realisasi tahun 2023 adalah 2,69, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 2,44. Berdasarkan data ini lonjakan tiap tahunnya dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 0,48 poin, tahun 2023 sebesar 1,13 poin dan tahun 2022 sebesar 1,38 poin artinya secara simultan Indeks SPBE mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan seluruh SKPD dan *stake holder* yang terlibat. Pada Tahun 2025, kebijakan SPBE Kabupaten Balangan difokuskan pada peningkatan tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE guna mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan :

- Keselarasan dengan Kebijakan Nasional. Kebijakan SPBE Kabupaten Balangan disusun dengan mengacu pada kebijakan nasional, yang mencakup arah dan standar penyelenggaraan SPBE nasional, pedoman evaluasi dan pengukuran Indeks SPBE, Agenda transformasi digital pemerintahan. Keselarasan ini memastikan kebijakan daerah berada dalam satu kerangka nasional dan mendukung pencapaian Indeks SPBE secara optimal.
- Integrasi SPBE dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Kebijakan SPBE telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, antara lain RPJMD dan RKPD Kabupaten Balangan, Renstra dan Renja perangkat daerah terkait, program dan kegiatan pendukung transformasi digital. Integrasi ini menjamin keberlanjutan dan konsistensi pelaksanaan SPBE.
- Penguatan Tata Kelola SPBE. Kebijakan SPBE Kabupaten Balangan menekankan kejelasan peran dan tanggung jawab perangkat daerah dalam penyelenggaraan SPBE, penguatan koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah, penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi SPBE secara berkala. Tata kelola yang kuat menjadi fondasi keberhasilan pencapaian Indeks SPBE.
- Peningkatan Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kebijakan diarahkan pada digitalisasi layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan public, integrasi aplikasi dan sistem informasi antarperangkat daerah, peningkatan kualitas, kemudahan, dan aksesibilitas layanan digital. Langkah ini mendukung peningkatan nilai domain layanan dalam Indeks SPBE.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.130 Indeks SPBE dalam dokumen RPJMD Kabupaten Balangan 2025-2029 akan berlaku sampai tahun 2025 yang akan dilaporkan pada LKIP tahun 2025. Pada tahun 2026 sampai akhir masa RPJMD Pemerintah Kabupaten Balangan menjadikan Indeks Pemerintahan Digital sebagai indikator kinerja sasaran daerah. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi Indeks SPBE ini adalah

- Penguatan Kebijakan dan Regulasi SPBE. Rencana aksi difokuskan pada penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, pedoman, dan standar operasional SPBE daerah, penyesuaian regulasi daerah agar selaras dengan kebijakan SPBE nasional, penguatan landasan hukum dalam penyelenggaraan SPBE lintas perangkat daerah. Langkah ini bertujuan menciptakan kepastian arah dan konsistensi implementasi SPBE.
- Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan SPBE. Rencana aksi diarahkan pada penegasan peran dan tanggung jawab perangkat daerah dalam penyelenggaraan SPBE, penguatan koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah, penetapan mekanisme pengendalian, monitoring, dan evaluasi SPBE secara berkala. Tata kelola yang kuat menjadi kunci keberhasilan percepatan realisasi Indeks SPBE.
- Melakukan integrasi data lintas SKPD yang lebih akurat.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.131 adalah menjelaskan bahwa realisasi Indeks SPBE Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 3,83, realisasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah 3,48, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan 3,69. Sedangkan realisasi Nasional dan Internasional tidak ada sumber data. Sedangkan realisasi Nasional dan Internasional tidak ada sumber data. Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Balangan tahun 2025 sebesar 3,83 jika dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan berada di atas dengan selisih poin sebesar 0,35. Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan 0,13 poin Kabupaten Balangan berada di atas Provinsi Kalimantan Selatan.

Faktor dominan yang mempengaruhi Indeks SPBE Kabupaten Balangan adalah

- Tata Kelola dan Kebijakan SPBE. Kondisi Balangan kebijakan dan regulasi SPBE telah tersedia, arsitektur SPBE mulai disusun namun penerapan kebijakan belum konsisten lintas SKPD.
- Integrasi Aplikasi dan Data. Balangan masih memiliki aplikasi sektoral yang berdiri sendiri dan duplikasi fungsi aplikasi, integrasi data antar SKPD belum optimal dan pemanfaatan *shared services* masih terbatas.
- Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur TIK. Balangan infrastruktur dasar TIK tersedia, konektivitas antar wilayah relatif baik namun kapasitas server terbatas dan keamanan informasi belum optimal.
- SDM TIK dan Budaya Digital Aparatur. Jumlah SDM TIK terbatas, ketergantungan pada pihak ketiga cukup tinggi dan literasi digital aparatur belum merata.
- Pemanfaatan SPBE dalam Layanan Publik dan Manajemen Pemerintahan. SPBE sudah digunakan untuk administrasi pemerintahan dan sebagian layanan public namun pemanfaatannya belum terintegrasi end-to-end dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan pengguna

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.128 sampai dengan tabel 3.131 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks SPBE adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks SPBE yaitu :**

- Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE agar dapat menggerakkan dan melibatkan setiap perangkat daerah untuk dapat bekerja sama mendukung pemenuhan bukti dukung Indikator SPBE.
- Optimalisasi Kebijakan dan Dokumen SPBE melalui penguatan tata kelola yang terintegrasi, arsitektur SPBE, dan manajemen data.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang kompeten dengan literasi digital tinggi, pengelola TIK, dan agen perubahan digital tinggi dengan pengelolaan manajemen dan pelatihan SDM atau kepegawaian sesuai kompetensi teknis
- Integrasi Layanan dan data.
- Pengelolaan jaringan intra, pusat data, aplikasi, dan keamanan informasi.
- Pembentukan dan optimalisasi Tim Audit SPBE yang bertujuan untuk mengevaluasi infrastruktur dan aplikasi secara internal, mencakup tata kelola serta keamanan digital.
- Layanan publik digital benar-benar terintegrasi (*end to end*)

2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator 4 : Indeks SPBE)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator kinerja Indeks SPBE. Adapun gambaran umum keterikatan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Memberikan kontribusi penting dalam mendukung pencapaian Indeks SPBE dalam penguatan tata kelola, manajemen, dan layanan digital terintegrasi.
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks SPBE yaitu:

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika di Kabupaten Balangan Tahun 2025 telah memberikan kontribusi penting dalam mendukung pencapaian Indeks SPBE dalam penguatan tata kelola, manajemen, dan layanan digital terintegrasi dengan kunci utama meliputi penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, pengembangan aplikasi berbagi pakai, peningkatan kompetensi SDM, serta pemantauan dan evaluasi berkala yang didalamnya juga

mencakup pengembangan aplikasi layanan publik, integrasi sistem, peningkatan keamanan siber, dan manajemen data dan aset TIK. Tujuannya adalah mencapai penerapan SPBE yang matang, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung transformasi digital pemerintah.

Dari program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.132
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian*	Berperan sebagai <i>leading sektor</i> SPBE dan penggerak integrasi lintas SKPD.	Tersusunnya kebijakan dan arsitektur SPBE, pengelolaan infrastruktur TIK dan pusat data, integrasi aplikasi dan layanan digital, keamanan informasi dan sistem elektronik
		Bapperida	Memastikan keterpaduan SPBE dalam perencanaan pembangunan daerah.	Integrasi SPBE dalam RPJMD dan RKPD, sinkronisasi program digitalisasi lintas SKPD, dan penajaman indikator kinerja SPBE
		BPKPAD	Keuangan Daerah Berbasis Elektronik	Implementasi pengelolaan keuangan dan aset melalui Aplikasi SIPANDA
		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Penguatan Tata Kelola SPBE dan Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Peta Proses Bisnis
		Seluruh SKPD	Pemanfaatan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penggunaan aplikasi perencanaan, penganggaran, kepegawaian, pengelolaan data, serta pelayanan publik berbasis digital

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD *leading sektor* utama dan SKPD lainnya sebagai *supporting sektor*. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Indeks SPBE di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting kinerja SKPD:

Tabel 3.133
Monev Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Monev Offline	Monev Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks SPBE	1. Rapat koordinasi area fasilitas Reformasi Birokrasi General Substansi SPBE	1. Penilaian/evaluasi mandiri bukti dukung indikator SPBE di website Tauval SPBE	

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Monev Offline	Monev Online	Keterangan
				2. Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Indeks Desa	

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator 4 : Indeks SPBE)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target indikator kinerja Indeks SPBE tahun 2025 dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

- Efisiensi SDM tercermin dari kemampuan aparatur dalam mengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik secara efektif, termasuk dalam penyusunan kebijakan SPBE, pengelolaan basis data, dan pelayanan digital.
- Pemerintah Kabupaten Balangan aktif menyelenggarakan kegiatan seperti bimbingan teknis SPBE untuk perangkat daerah, yang menunjukkan peningkatan kapasitas SDM dalam memahami dan menerapkan SPBE sesuai standar nasional. Pelatihan tersebut membantu aparatur memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik tanpa harus menambah jumlah SDM secara signifikan, sehingga efisiensi SDM lebih fokus pada peningkatan kualitas sumber daya yang ada.
- Peningkatan kompetensi ini mendukung integrasi layanan digital, alur kerja yang lebih produktif, serta mengurangi ketergantungan pada proses manual, yang seluruhnya berkontribusi terhadap kenaikan skor Indeks SPBE di kategori kebijakan dan manajemen SPBE.

b. Efisiensi Anggaran

- Implementasi SPBE yang efisien juga mencakup penggunaan anggaran yang efektif untuk infrastruktur digital, pengembangan aplikasi terintegrasi, dan pemeliharaan sistem TI.
- Dengan menghadirkan kebijakan dan roadmap SPBE, pemerintah daerah dapat mengefisienkan anggaran TI dengan memprioritaskan investasi pada sistem yang terintegrasi dan mengotomatisasi proses pemerintahan.
- Walaupun indikator biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem tidak selalu ditampilkan sebagai angka SPBE langsung, efisiensi anggaran terlihat dari penyederhanaan layanan digital yang mengurangi kebutuhan biaya operasi manual serta alokasi anggaran yang lebih tajam pada pengembangan kapasitas SDM dan infrastruktur digital.
- Anggaran yg digunakan untuk indikator ini adalah sebesar 2,5 M untuk kebutuhan memaksimalkan hasil. Terlebih pada tahun 2026, SPBE bertransisi menjadi Pemerintahan Digital (Pemdi) sehingga diperlukan pembuatan dokumen arsitektur as, is, tobe, peta rencana, proses bisnis pemdi, manajemen pemdi, serta layanan pemdi. Namun, anggaran tersebut tidak tersedia pada tahun 2026. Sementara itu, anggaran yang tersedia pada tahun 2025 hanya 230 juta.

c. Efisiensi Waktu

- Efisiensi waktu di dalam konteks Indeks SPBE ditunjukkan oleh percepatan alur kerja internal pemerintah melalui transformasi digital, seperti:
 - Adanya integrasi antar aplikasi pemerintahan yang mempercepat proses layanan publik
 - Pengurangan waktu pemrosesan data dan dokumen dengan sistem elektronik
 - Penyederhanaan prosedur administrasi digital yang meminimalkan durasi layanan manual

- Transformasi digital ini membantu mencapai efisiensi waktu karena sistem SPBE menyederhanakan proses dan memperpendek waktu penyelesaian tugas, sehingga makin banyak layanan dapat diproses secara cepat, terukur, dan akuntabel.

B.12 Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
(Indikator 5 : Indeks Manajemen Risiko)

Tabel 3.134
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator 6 : Indeks Manajemen Risiko

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Manajemen Risiko	3,049	3,053	100,13

Target Indeks Manajemen Risiko tahun 2025 adalah 3,049. Realisasi tahun 2025 adalah 3,053, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100,13 persen.

Tabel 3.135
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator 6 : Indeks Manajemen Risiko

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Manajemen Risiko	3,049	3,053	3,000	2,951	2,985

Target Indeks Manajemen Risiko tahun 2025 adalah 3,049. Realisasi tahun 2025 adalah 3,053, Realisasi tahun 2024 adalah 3,000, Realisasi tahun 2023 adalah 2,951, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 2,985.

Tabel 3.136
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator 6 : Indeks Manajemen Risiko

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Manajemen Risiko	3,245	3,053	94,08

Target Akhir RPJMD untuk Indeks Manajemen Risiko adalah 3,245 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 3,053 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 94,08 persen.

Tabel 3.137
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator 6 : Indeks Manajemen Risiko

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Manajemen Risiko	3,053	2,9	2,997	-	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Indeks Manajemen Resiko Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 3,053, realisasi Kabupaten Tabalong 2,9, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan 2,997. Sedangkan realisasi Nasional dan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.134, tabel 3.135, tabel 3.136, dan tabel 3.137 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator 6 : Indeks Manajemen Risiko)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.134 adalah target Indeks Manajemen Risiko tahun 2025 yaitu 3,049. Realisasi tahun 2025 adalah 3,053, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100,13 persen tercapai sesuai target. Indeks Pemerintahan Digital sebesar 3,053 pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 100,13 persen dipengaruhi oleh berbagai faktor pendongkrak kinerja antara lain adalah:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

- **Komitmen Pimpinan.** Pimpinan Kabupaten Balangan (Bupati dan Sekretaris Daerah) memberikan dukungan penuh terhadap implementasi manajemen risiko, termasuk penyediaan arahan, kebijakan, dan sumber daya yang diperlukan. Komitmen ini memastikan risiko menjadi bagian integral dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja SKPD. Dampaknya memastikan penerapan manajemen risiko konsisten di seluruh SKPD dan program pemerintah.
- **Struktur Organisasi dan Tata Kelola yang Jelas.** Setiap SKPD memiliki unit atau personel yang bertanggung jawab terhadap manajemen risiko. Mekanisme koordinasi antar SKPD berjalan secara terstruktur, termasuk rapat rutin, forum evaluasi, dan sistem pelaporan risiko. Dampaknya risiko dapat diidentifikasi, dianalisis, dan ditindaklanjuti secara cepat dan sistematis.
- **SDM Kompeten dan Berbasis Kapasitas.** Aparatur pemerintah memiliki kemampuan teknis dan pemahaman prinsip manajemen risiko, melalui pelatihan, pendampingan, dan pengalaman kerja. Penggunaan SDM internal memaksimalkan efisiensi dan efektivitas penanganan risiko tanpa selalu bergantung pada konsultan eksternal. Dampaknya identifikasi dan mitigasi risiko lebih akurat dan tepat waktu.
- **Sistem Monitoring dan Pelaporan Internal.** Kabupaten Balangan memiliki mekanisme monitoring risiko yang meliputi pengumpulan data risiko, evaluasi berkala, dan pelaporan ke pimpinan. Laporan risiko digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mitigasi dan pengendalian internal. Dampaknya risiko dapat dikelola secara proaktif, bukan reaktif.
- **Integrasi Manajemen Risiko dengan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja.** Risiko diidentifikasi dan dianalisis sejak tahap perencanaan program/kegiatan (misal dalam RKPD, Renstra, atau anggaran SKPD). Integrasi ini memungkinkan pengendalian risiko sekaligus memastikan pencapaian indikator kinerja. Dampaknya Pencapaian target kinerja lebih terjamin dan risiko kerugian atau hambatan dapat diminimalkan.

2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- **Kebijakan dan Regulasi Nasional.** Adanya panduan dan standar manajemen risiko dari Kementerian PANRB dan regulasi terkait akuntabilitas serta pengendalian internal. Regulasi ini menjadi acuan teknis dan normatif bagi seluruh SKPD dalam menerapkan manajemen risiko. Dampaknya memberikan kerangka kerja yang jelas, standar evaluasi yang terukur, dan mendorong konsistensi penerapan manajemen risiko.
- **Dukungan Birokrasi Provinsi.** Biro Organisasi dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan memberikan konsultasi, asistensi, dan supervisi terhadap implementasi manajemen risiko. Dukungan ini membantu penyelarasan mekanisme dan indikator manajemen risiko antara kabupaten dan provinsi. Dampaknya meningkatkan akurasi pelaporan risiko dan integrasi risiko dalam perencanaan pembangunan daerah.
- **Ketersediaan Data dan Informasi.** Akses terhadap data valid dan terkini, baik dari internal pemerintah maupun dari pihak eksternal, mempermudah identifikasi risiko. Informasi yang tepat waktu dan akurat mendukung analisis risiko yang berbasis bukti. Dampaknya Mitigasi risiko lebih tepat sasaran dan keputusan strategis berbasis data dapat diambil lebih cepat.
- **Kolaborasi Lintas Instansi dan Pemangku Kepentingan.** Kerjasama antar SKPD, dengan pihak swasta, masyarakat, dan lembaga eksternal lainnya, membantu mitigasi risiko yang bersifat lintas sektor. Contohnya,

mitigasi risiko bencana atau keamanan data yang membutuhkan koordinasi beberapa pihak. Dampaknya Risiko yang berdampak pada banyak sektor dapat dikelola lebih efektif dan cepat.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.135 adalah target Indeks Manajemen Risiko tahun 2025 adalah 3,049. Realisasi tahun 2025 adalah 3,053, Realisasi tahun 2024 adalah 3,000, Realisasi tahun 2023 adalah 2,951, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 2,985. Berdasarkan data ini lonjakan tiap tahunnya jika dibandingkan dengan tahun 2025 adalah pada tahun 2024 sebesar 0,05 poin, tahun 2023 sebesar 0,10 dan tahun 2022 sebesar 0,07 artinya secara simultan Indeks Manajemen Risiko mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,03 poin. Agar realisasi kinerja tidak mengalami penurunan diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan seluruh SKPD dan *stake holder* yang terlibat. Kebijakan terkait Indeks Manajemen Risiko dipermudah antara lain :

- Sederhananya prosedur dan standar yaitu kebijakan manajemen risiko dirumuskan dalam format yang mudah dipahami, dengan prosedur identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko yang praktis. Standar nasional tetap dijaga, namun disederhanakan untuk menyesuaikan kapasitas SKPD.
- Integrasi dengan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja. Risiko menjadi bagian langsung dalam dokumen perencanaan (RKPD, Renstra SKPD, dan RKA-SKPD) serta monitoring dan evaluasi risiko dilakukan bersamaan dengan pelaporan kinerja, sehingga tidak menambah beban administrasi.
- Fleksibilitas Kebijakan. SKPD diberikan ruang untuk menyesuaikan mitigasi risiko dengan konteks program/kegiatan masing-masing, sehingga memungkinkan penyesuaian metode pengendalian risiko sesuai kapasitas SDM dan kebutuhan teknis.
- Sosialisasi dan Pendampingan. Pemerintah Kabupaten Balangan menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan teknis agar setiap SKPD memahami prosedur manajemen risiko. Hal ini mempermudah implementasi kebijakan tanpa harus menunggu arahan tambahan dari pimpinan.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.136 adalah target akhir RPJMD untuk Indeks Manajemen Risiko adalah 3,245 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 3,053 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 94,08 persen. Berdasarkan data tabel di atas untuk menuju kepada pencapaian target akhir RPJMD tahun 2030 yakni 3,245 diperlukan 0,192 poin, maka Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas karena saat ini Indeks Manajemen Risiko hanya berada di 3,053, itu artinya harus melakukan gerakan percepatan setiap tahunnya. Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi Indeks Manajemen Risiko ini adalah :

- Penguatan Tata Kelola dan Kebijakan untuk menyederhanakan prosedur manajemen risiko agar mudah diterapkan dan menetapkan pedoman baku dan kebijakan yang mendukung penerapan risiko lintas SKPD.
- Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan teknis manajemen risiko untuk seluruh pegawai terkait dan penugasan SDM kompeten sebagai pengelola risiko di setiap SKPD.
- Integrasi dengan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yaitu menjadikan risiko sebagai bagian dari RKPD, Renstra SKPD, dan RKA-SKPD. Memastikan indikator risiko terhubung langsung dengan pencapaian kinerja SKPD.
- Koordinasi dan Kolaborasi Lintas SKPD. Rapat koordinasi rutin untuk membahas risiko yang bersifat lintas sektor dan Follow-up action cepat terhadap risiko yang berdampak pada beberapa program/kegiatan.
- Monitoring dan Evaluasi Berkala. Pemantauan indikator risiko secara rutin untuk melihat progres dan efektivitas mitigasi serta review berkala untuk menyesuaikan strategi percepatan sesuai dinamika risiko dan kondisi eksternal.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.137 adalah menjelaskan bahwa realisasi Indeks Manajemen Risiko Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 3,053, realisasi Kabupaten Tabalong 2,9, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan 2,997. Sedangkan realisasi Nasional dan realisasi Internasional tidak ada sumber data. Realisasi Indeks

Manajemen Risiko (IMR) Kabupaten Balangan sebesar **3,053** pada tahun 2025 menunjukkan tren positif dalam tata kelola risiko daerah. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Balangan pada jajaran daerah dengan performa di atas rata-rata regional Kalimantan Selatan (2,997). Meskipun pembandingan pada level nasional dan internasional masih terbatas secara ketersediaan data, efektivitas sistem yang berjalan saat ini menandakan integrasi tata kelola melalui SPIP, SAKIP, dan peran APIP telah berjalan sesuai dengan standar kematangan yang diharapkan

Faktor dominan yang mempengaruhi Indeks Manajemen Risiko Kabupaten Balangan adalah

- Komitmen Pimpinan dan Tata Kelola Manajemen Risiko. Kondisi Balangan kebijakan dan pedoman manajemen risiko telah tersedia, struktur pengelolaan risiko sudah dibentuk, namun komitmen pimpinan SKPD dalam mengintegrasikan risiko ke perencanaan dan pelaksanaan program belum merata.
- Integrasi Manajemen Risiko dengan SPIP dan SAKIP. Balangan telah mengaitkan manajemen risiko dengan SPIP dan perencanaan dan kinerja.
- Kualitas Identifikasi dan Penilaian Risiko. Di Balangan risiko telah dipetakan di tingkat SKPD namun masih generic dan kurang spesifik terhadap proses bisnis utama.
- Peran APIP dalam Pembinaan dan Assurance Risiko. APIP aktif melakukan revidu, memberikan rekomendasi penguatan risiko namun fokus masih kepatuhan dan belum sepenuhnya berbasis risiko (*risk-based approach*)
- Budaya Risiko dan Kapasitas SDM. Pemahaman aparatur terhadap manajemen risiko masih terbatas dan risiko sering dipandang sebagai kewajiban administrative bukan alat perbaikan, dan kapasitas SDM pengelola risiko belum merata.

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.134 sampai dengan tabel 3.137 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks Manajemen Risiko adalah melalui upaya-upaya percepatan. **Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks Manajemen Risiko yaitu :**

- Penguatan Kebijakan dan Regulasi. Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan kebijakan dan pedoman manajemen risiko yang sederhana, jelas, dan mudah diimplementasikan oleh seluruh SKPD. Penyederhanaan prosedur manajemen risiko memastikan bahwa setiap SKPD dapat dengan cepat mengidentifikasi, menilai, dan menindaklanjuti risiko. Peraturan Bupati Balangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko merupakan penyempurnaan atas Perbup Nomor 23 Tahun 2024 yang bertujuan memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui pengelolaan risiko yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Peraturan ini mewajibkan pengelolaan risiko pada tingkat tujuan strategis Pemerintah Daerah (RPJMD), tujuan strategis Perangkat Daerah (Renstra), hingga tingkat operasional/sub kegiatan (RKA/DPA), dengan struktur yang jelas mulai dari Bupati sebagai penanggung jawab, Sekretaris Daerah sebagai koordinator, Unit Pemilik Risiko pada setiap level, serta pengawasan oleh Inspektorat. Prosesnya meliputi penetapan konteks, identifikasi dan analisis risiko menggunakan skala dampak dan kemungkinan, penetapan tingkat risiko yang dapat atau tidak dapat diterima, penyusunan rencana tindak pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi berkala. Dengan pengaturan ini, Pemerintah Kabupaten Balangan memastikan pengelolaan risiko menjadi bagian dari siklus manajemen kinerja untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah potensi risiko korupsi dan kegagalan pencapaian target.
- Peningkatan Kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan teknis bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan risiko, disertai penempatan SDM yang kompeten di setiap SKPD agar manajemen risiko berjalan berkelanjutan dan selaras dengan struktur pengelolaan risiko daerah. Salah satu langkah konkretnya adalah penyelenggaraan Workshop Manajemen Risiko dan Penyusunan Perencanaan Berbasis Risiko (PPBR) oleh Inspektorat Kabupaten Balangan pada tanggal 13 s.d. 17 Mei 2025 di Hotel Aeris, Banjarbaru dan Penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada 13 s.d. 16 November 2025 di Hotel Aeris, Banjarbaru. Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman dasar mengenai manajemen risiko kepada perwakilan setiap unit kerja. Dengan adanya workshop tersebut, diharapkan

setiap SKPD memiliki personil yang memahami tata cara pengisian register risiko, sehingga proses pelaporan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat berjalan lebih teratur dan berkelanjutan.

- Integrasi Manajemen Risiko dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja. Risiko dimasukkan dalam dokumen perencanaan seperti RKPD, Renstra SKPD, dan RKA-SKPD. Monitoring risiko dilakukan bersamaan dengan evaluasi kinerja SKPD. Berikut tabel manajemen resiko (Identifikasi Masalah Strategis dan Operasional Perangkat Daerah) Inspektorat Kabupaten Balangan:

Kantor Kepala										Kantor Kepala									
Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah										Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah									
Nama Kantor Inspektorat Kabupaten Balangan Jalan Balangan Balangan Balangan					Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah					Nama Kantor Inspektorat Kabupaten Balangan Jalan Balangan Balangan Balangan					Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah				
No					Kategori Risiko					No					Kategori Risiko				
1					Kategori Risiko					1					Kategori Risiko				
2					Kategori Risiko					2					Kategori Risiko				
3					Kategori Risiko					3					Kategori Risiko				
4					Kategori Risiko					4					Kategori Risiko				
5					Kategori Risiko					5					Kategori Risiko				
6					Kategori Risiko					6					Kategori Risiko				
7					Kategori Risiko					7					Kategori Risiko				
8					Kategori Risiko					8					Kategori Risiko				
9					Kategori Risiko					9					Kategori Risiko				
10					Kategori Risiko					10					Kategori Risiko				
11					Kategori Risiko					11					Kategori Risiko				
12					Kategori Risiko					12					Kategori Risiko				
13					Kategori Risiko					13					Kategori Risiko				
14					Kategori Risiko					14					Kategori Risiko				
15					Kategori Risiko					15					Kategori Risiko				
16					Kategori Risiko					16					Kategori Risiko				
17					Kategori Risiko					17					Kategori Risiko				
18					Kategori Risiko					18					Kategori Risiko				
19					Kategori Risiko					19					Kategori Risiko				
20					Kategori Risiko					20					Kategori Risiko				
21					Kategori Risiko					21					Kategori Risiko				
22					Kategori Risiko					22					Kategori Risiko				
23					Kategori Risiko					23					Kategori Risiko				
24					Kategori Risiko					24					Kategori Risiko				
25					Kategori Risiko					25					Kategori Risiko				
26					Kategori Risiko					26					Kategori Risiko				
27					Kategori Risiko					27					Kategori Risiko				
28					Kategori Risiko					28					Kategori Risiko				
29					Kategori Risiko					29					Kategori Risiko				
30					Kategori Risiko					30					Kategori Risiko				
31					Kategori Risiko					31					Kategori Risiko				
32					Kategori Risiko					32					Kategori Risiko				
33					Kategori Risiko					33					Kategori Risiko				
34					Kategori Risiko					34					Kategori Risiko				
35					Kategori Risiko					35					Kategori Risiko				
36					Kategori Risiko					36					Kategori Risiko				
37					Kategori Risiko					37					Kategori Risiko				
38					Kategori Risiko					38					Kategori Risiko				
39					Kategori Risiko					39					Kategori Risiko				
40					Kategori Risiko					40					Kategori Risiko				
41					Kategori Risiko					41					Kategori Risiko				
42					Kategori Risiko					42					Kategori Risiko				
43					Kategori Risiko					43					Kategori Risiko				
44					Kategori Risiko					44					Kategori Risiko				
45					Kategori Risiko					45					Kategori Risiko				
46					Kategori Risiko					46					Kategori Risiko				
47					Kategori Risiko					47					Kategori Risiko				
48					Kategori Risiko					48					Kategori Risiko				
49					Kategori Risiko					49					Kategori Risiko				
50					Kategori Risiko					50					Kategori Risiko				
51					Kategori Risiko					51					Kategori Risiko				
52					Kategori Risiko					52					Kategori Risiko				
53					Kategori Risiko					53					Kategori Risiko				
54					Kategori Risiko					54					Kategori Risiko				
55					Kategori Risiko					55					Kategori Risiko				
56					Kategori Risiko					56					Kategori Risiko				
57					Kategori Risiko					57					Kategori Risiko				
58					Kategori Risiko					58					Kategori Risiko				
59					Kategori Risiko					59					Kategori Risiko				
60					Kategori Risiko					60					Kategori Risiko				
61					Kategori Risiko					61					Kategori Risiko				
62					Kategori Risiko					62					Kategori Risiko				
63					Kategori Risiko					63					Kategori Risiko				
64					Kategori Risiko					64					Kategori Risiko				
65					Kategori Risiko					65					Kategori Risiko				
66					Kategori Risiko					66					Kategori Risiko				
67					Kategori Risiko					67					Kategori Risiko				
68					Kategori Risiko					68					Kategori Risiko				
69					Kategori Risiko					69					Kategori Risiko				
70					Kategori Risiko					70					Kategori Risiko				
71					Kategori Risiko					71					Kategori Risiko				
72					Kategori Risiko					72					Kategori Risiko				
73					Kategori Risiko					73					Kategori Risiko				
74					Kategori Risiko					74					Kategori Risiko				
75					Kategori Risiko					75					Kategori Risiko				
76					Kategori Risiko					76					Kategori Risiko				
77					Kategori Risiko					77					Kategori Risiko				
78					Kategori Risiko					78					Kategori Risiko				
79					Kategori Risiko					79					Kategori Risiko				
80					Kategori Risiko					80					Kategori Risiko				
81					Kategori Risiko					81					Kategori Risiko				
82					Kategori Risiko					82					Kategori Risiko				
83					Kategori Risiko					83					Kategori Risiko				
84					Kategori Risiko					84					Kategori Risiko				
85					Kategori Risiko					85					Kategori Risiko				
86					Kategori Risiko					86					Kategori Risiko				
87					Kategori Risiko					87					Kategori Risiko				
88					Kategori Risiko					88					Kategori Risiko				
89					Kategori Risiko					89					Kategori Risiko				
90					Kategori Risiko					90					Kategori Risiko				
91					Kategori Risiko					91					Kategori Risiko				
92					Kategori Risiko					92					Kategori Risiko				
93					Kategori Risiko					93					Kategori Risiko				
94					Kategori Risiko					94					Kategori Risiko				
95					Kategori Risiko					95					Kategori Risiko				
96					Kategori Risiko					96					Kategori Risiko				
97					Kategori Risiko					97					Kategori Risiko				
98					Kategori Risiko					98					Kategori Risiko				
99					Kategori Risiko					99					Kategori Risiko				
100					Kategori Risiko					100					Kategori Risiko				

tidak hanya bersifat reaktif terhadap penyimpangan, tetapi juga proaktif melalui implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan pengawasan berbasis risiko. Koordinasi dan Pemantauan MCSP KPK Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Inspektorat dan SKPD terkait aktif mengikuti Rakor dan Pemantauan Indeks Pencegahan Korupsi (MCSP) yang diselenggarakan oleh KPK. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau capaian indikator pencegahan korupsi secara periodik dan mendorong percepatan pemenuhan dokumen serta indikator MCSP. Pengawasan yang mengintegrasikan elemen pencegahan korupsi dalam mekanisme pengawasan internal memperluas ruang kontrol atas potensi risiko integritas dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini akan memperkuat komponen risiko kepatuhan dan integritas dalam perhitungan IMR dan meningkatkan budaya pengawasan di tingkat SKPD.

- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi ini membantu memastikan bahwa setiap unit kerja pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi risiko strategis dan operasional secara dini, kemudian menyusun strategi mitigasi yang tepat. Dengan demikian, tingkat *maturitas manajemen risiko* di tiap organisasi meningkat, yang berdampak positif pada skor IMR secara keseluruhan. Pendampingan dan asistensi teknis memperkuat proses perumusan kebijakan untuk menjadikan manajemen risiko sebagai bagian integral perencanaan dan pelaksanaan program/skpd. Program pendampingan dan asistensi bukan hanya bersifat administratif tetapi pula strategis, yakni mengintegrasikan SPIP dengan praktik manajemen risiko di SKPD. Hal ini meliputi bantuan teknik penyusunan dokumen pengendalian internal dan proses pengendalian risiko berdasarkan risiko prioritas yang teridentifikasi. Integrasi SPIP dengan manajemen risiko melalui kebijakan internal membantu meningkatkan kualitas kontrol dan mitigasi risiko di semua level organisasi. SPIP yang baik juga merupakan inti dari perhitungan variabel dalam IMR, karena mencerminkan sejauh mana risiko telah diidentifikasi, dinilai, dan dikelola secara sistematis. Salah satu fokus program asistensi adalah membantu unit kerja yang sedang menuju predikat Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui pendampingan penyusunan kebijakan internal, profil risiko, serta tindak lanjut rekomendasi pengendalian risiko. Pendampingan ini memperkuat integritas dan akuntabilitas di unit kerja, sehingga dapat mengurangi potensi risiko kepatuhan dan meningkatkan kepercayaan publik. Komponen ini penting dalam indikator IMR karena mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola risiko integritas dan tata kelola yang lebih bersih.

Dari kedua program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

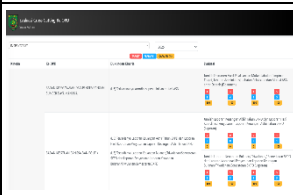
Tabel 3.138
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat*	Melakukan audit internal berbasis risiko dan review SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).	Peta risiko daerah, reviu dokumen manajemen risiko, serta evaluasi tingkat kematangan SPIP
		Bapperida	Memastikan risiko strategis (bencana, fiskal, sosial) masuk ke perencanaan pembangunan daerah.	Penyusunan dokumen RPJMD, RKPD, hingga Renstra dan Renja perangkat daerah
		BPKPAD	Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel serta mendukung penerapan manajemen risiko dalam proses penganggaran,	Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, serta dengan seluruh SKPD dalam penerapan pengendalian

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
			pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah	intern pada pengelolaan anggaran dan aset daerah.
		BKPSDM	Pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang kompeten dalam penerapan manajemen risiko dan SPIP.	Peningkatan kompetensi aparatur terkait SPIP dan manajemen risiko
		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kinerja birokrasi melalui penyusunan kebijakan kelembagaan, analisis jabatan, serta evaluasi kinerja organisasi	Memastikan bahwa struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta proses bisnis perangkat daerah mendukung implementasi pengendalian intern dan mitigasi risiko
		Seluruh SKPD Teknis	Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing sektor pembangunan.	Implementasi manajemen risiko di tingkat perangkat daerah menjadi kunci dalam memastikan tercapainya target kinerja serta meminimalkan potensi hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Indeks Manajemen Risiko di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting SKPD:

Tabel 3.139
Monev Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Monev Offline	Monev Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Manajemen Risiko	Rakor pemantauan Indeks Pencegahan Korupsi (MCSP) yang diselenggarakan KPK	Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Indeks Manajemen Risiko	

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator 6 : Indeks Manajemen Risiko)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target dari indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko tahun 2025 yaitu dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

- Pengelolaan manajemen risiko dilaksanakan secara terkoordinasi melalui peran Inspektorat, Bapperida, dan perangkat daerah lainnya sehingga proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi dalam perencanaan program pembangunan Kabupaten Balangan.

- Peningkatan kapasitas aparaturnya melalui Workshop Manajemen Risiko dan Penyusunan Perencanaan Berbasis Risiko (PPBR) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Balangan pada tanggal 13 s.d. 17 Mei 2025 di Hotel Aeris, Banjarbaru dan Penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada 13 s.d. 16 November 2025 di Hotel Aeris, Banjarbaru. Hal ini mendorong pemahaman yang lebih baik terhadap pengendalian risiko, sehingga potensi penyimpangan atau kegagalan program dapat dideteksi lebih dini tanpa perlu penambahan SDM secara signifikan. Penetapan penanggung jawab risiko pada masing-masing perangkat daerah meningkatkan kejelasan tugas dan fungsi, mengurangi tumpang tindih pekerjaan, serta memperkuat budaya sadar risiko dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.
- Penetapan penanggung jawab risiko pada masing-masing perangkat daerah meningkatkan kejelasan tugas dan fungsi, mengurangi tumpang tindih pekerjaan, serta memperkuat budaya sadar risiko dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.

b. Efisiensi Anggaran

Pengalokasian anggaran difokuskan pada penguatan sistem pengendalian intern, penyusunan peta risiko, serta monitoring dan evaluasi berkala, sehingga penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan workshop dan pelaksanaan evaluasi manajemen risiko pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 353.635.290,-

- Integrasi manajemen risiko dalam proses perencanaan dan penganggaran membantu meminimalkan potensi pemborosan akibat kegiatan yang tidak efektif atau berisiko tinggi, sehingga efisiensi belanja daerah dapat terjaga.
- Pemanfaatan sistem informasi dan pelaporan elektronik dalam pengawasan internal mengurangi biaya administrasi manual serta meningkatkan transparansi penggunaan anggaran di setiap perangkat daerah.

c. Efisiensi Waktu

- Penyusunan dan pembaruan register risiko secara periodik mempercepat proses identifikasi dan mitigasi risiko sebelum berdampak pada pelaksanaan program, sehingga waktu penanganan menjadi lebih singkat dan terukur.
- Koordinasi lintas perangkat daerah dalam pengendalian risiko memungkinkan penyelesaian permasalahan secara lebih cepat tanpa melalui tahapan birokrasi yang panjang.
- Integrasi manajemen risiko dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program mempercepat proses pengambilan keputusan karena informasi risiko telah tersedia secara sistematis dan terdokumentasi.

B.12 Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

(Indikator 6 : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)

Tabel 3.140
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator 7 : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80,70	93,48	115,84

Target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2025 adalah 80,70. Realisasi tahun 2025 adalah 93,48, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 115,84 persen.

Tabel 3.141
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Indikator 7 : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80,70	93,48	80,68	78,73	50,93

Target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2025 adalah 80,70. Realisasi tahun 2025 adalah 93,48, Realisasi Tahun 2024 adalah 80,68, Realisasi tahun 2023 adalah 78,73, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 50,93.

Tabel 3.142
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD
Indikator 7 : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (%)
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80,90	93,48	115,55

Target Akhir RPJMD untuk Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 80,90 tahun 2030. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 93,48 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 115,55 persen.

Tabel 3.143
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional
Indikator 7 : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi (%)			
				Kabupaten Tanah Laut	Provinsi Kalsel	Nasional	Internasional
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	93,48	89,10	72,32	93,48	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah 93,48, realisasi Kabupaten Tanah Laut adalah 89,10, realisasi Propinsi Kalimantan Selatan adalah 72,32, realisasi Nasional 93,48. Sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.140, tabel 3.141, tabel 3.142, dan tabel 3.143 analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator 7 : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.140 adalah target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2025 yaitu 80,70. Realisasi tahun 2025 adalah 93,48, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 115,84 persen tercapai sesuai target. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 93,48 pada tahun 2025 dengan perolehan capaian sebesar 115,84 persen dipengaruhi oleh berbagai faktor pendongkrak kinerja antara lain adalah:

1. Faktor Internal sebagai berikut :

- Kualitas Perencanaan Keuangan yang Baik
Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) memiliki dokumen perencanaan strategis dan operasional yang jelas untuk pengelolaan keuangan daerah, tercermin dalam *Renstra* dan *Renja* yang diperbarui serta *cascading* perencanaan keuangan untuk 2025. Perencanaan ini mencakup penyusunan DPA dan RKPD yang terintegrasi dengan target kinerja termasuk IPKD.

- **Penerapan Sistem Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah**
Pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah di Balangan menggunakan aplikasi informasi seperti SIPD dan sistem akuntansi yang terstandar, mulai dari perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan keuangan. Proses ini menjadi komponen inti dari tata kelola keuangan yang sehat dan transparan.
- **Kepatuhan terhadap Standar Pengelolaan Keuangan Daerah**
Dokumen catatan keuangan daerah menunjukkan proses pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan asas umum pengelolaan (termasuk prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku). Tahapan mulai dari penyusunan hingga pertanggungjawaban APBD dijabarkan secara sistematis.
- **Penguatan Pengendalian Internal dan Monitoring Anggaran**
Keberhasilan IPKD juga dipengaruhi oleh pengendalian internal yang kuat di lingkungan pemerintahan kabupaten misalnya melalui mekanisme monitoring realisasi anggaran, evaluasi kinerja keuangan, serta review internal terhadap laporan, termasuk program peningkatan standar satuan harga dan asistensi penyusunan RKA.
- **Efektivitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan**
Proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (termasuk penyusunan laporan keuangan audit) di Balangan dilakukan dengan konsisten dan menggunakan aplikasi FMIS/Simda-NG, menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan terotomatisasi dan terdokumentasi dengan baik.

2. Faktor Eksternal sebagai berikut :

- **Kondisi Ekonomi Makro dan Pendapatan Transfer**
Pendapatan Daerah yang Signifikan dari Transfer Pusat dan Provinsi. Data realisasi pendapatan menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan memperoleh porsi besar dari transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebagai bagian dari pendapatan daerah, yang tercatat signifikan dalam struktur APBD.
- **Kebijakan Fiskal dan Regulasi Nasional**
Kebijakan Pemerintah Pusat terkait APBD dan Pendanaan. Kebijakan umum APBD (KUA-PPAS) dan dokumen kebijakan perubahan anggaran yang diterbitkan pemerintah kabupaten menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah dipengaruhi oleh arahan fiskal nasional dan perubahan parameter kebutuhan pembangunan (misal prioritas IPM, kesejahteraan, inklusi sosial).
- **Stabilitas Ekonomi dan Lingkungan Eksternal**
Faktor Ekonomi Lokal (misal inflasi dan IPH). Kegiatan seperti *Sharing Knowledge* terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan mencerminkan bahwa pemahaman ekonomi makro lokal diperhatikan di level pemerintah daerah. IPH dan indikator ekonomi lain memengaruhi daya beli masyarakat, realisasi pajak daerah, dan perencanaan belanja.
- **Sistem Desentralisasi dan Transfer Fiskal**
Pengaruh Struktur Fiskal dan Peraturan Nasional. Faktor eksternal umum seperti struktur desentralisasi fiskal Indonesia dan regulasi transfer dana sangat memengaruhi kapasitas keuangan daerah dalam pengelolaan pajak, belanja, dan ketergantungan pada pusat. Ini tercatat dalam literatur bahwa tingkat otonomi fiskal dan transfer pusat dapat berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.141 adalah target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2025 adalah 80,70. Realisasi tahun 2025 adalah 93,48, Realisasi tahun 2024 adalah 80,68, Realisasi tahun 2023 adalah 78,73, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah 50,93. Hal ini disebabkan oleh komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan seluruh SKPD dan *stake holder* yang terlibat. Kebijakan terkait Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- Kebijakan pendukung yang relevan adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, yang

mengatur tata cara penyusunan RKA dan anggaran perubahan. Dampak terhadap IPK Perda ini menguatkan kerangka legal penganggaran perangkat daerah sehingga dokumen anggaran seperti RKA, DPA, dan cascading keuangan tersusun secara sistematis dan konsisten dengan perencanaan. Kepatuhan terhadap tata cara penyusunan anggaran memperkuat aspek kesesuaian perencanaan-anggaran, yang menjadi indikator penting dalam penilaian IPKD.

- Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS. Kabupaten Balangan menerbitkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) 2025 dan *Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)* sebagai bagian dari proses perencanaan anggaran daerah yang harus sesuai dengan target kinerja dan kondisi fiskal daerah. Dokumen ini menjadi dasar pembahasan anggaran yang disusun dalam APBD dan menjadi salah satu dokumen yang menjadi bukti dimensi IPKD.
- Integrasi Dokumen Perencanaan dan Anggaran dalam IPKD. Dokumen IPKD yang diperlukan menjadi bukti penilaian IPKD di semua daerah (termasuk dokumen yang perlu disiapkan oleh Balangan) meliputi:
 - RPJMD dan RKPD
 - Renja Perangkat Daerah
 - Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS
 - Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - DPA/APBD dan perubahan jika ada
 - Laporan keuangan, opini BPK, dan dokumen pendukung lain yang relevan
- Penguatan Tata Kelola Keuangan melalui Monitoring dan Evaluasi. Peran Pemerintah Pusat dalam monitoring sosialisasi IPKD juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi terus-menerus oleh pemerintah pusat, termasuk pendampingan teknis supaya penginputan dan pengukuran berjalan sesuai pedoman yang berlaku. Monitoring di tingkat pusat mendorong Balangan untuk melakukan perbaikan data dan laporan secara berkala, memperbaiki kualitas dokumen pendukung yang memengaruhi skor IPKD, serta membantu daerah memperbaiki kelemahan teknis dalam pengukuran.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.142 adalah target akhir RPJMD untuk Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 80,90 tahun 2030. Sementara Realisasi tahun 2025 adalah 93,48 dan dengan perolehan capaian tahun 2025 adalah 115,84 persen sudah mencapai target akhir RPJMD tahun 2030, maka Pemerintah Kabupaten Balangan harus memiliki *milestone* tahapan yang jelas. Karena saat ini Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah hanya berada di 93,48 dan telah mencapai target akhir Renstra. Adapun *milestone* yang kami susun sampai tahun 2025 terkait rencana aksi percepatan realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan yang Terintegrasi. Aksi percepatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan telah menyiapkan serangkaian dokumen perencanaan keuangan yang menjadi dasar IPKD:
 - Rencana Kerja (Renja) BPKPAD 2025, yang merinci program-kegiatan termasuk penyusunan KUA-PPAS, RKA-SKPD, DPA SKPD, serta peraturan daerah tentang APBD murni dan perubahan, dengan pagu total sekitar Rp 564 miliar lebih. Dokumen ini menjadi pedoman teknis bagi SKPD dalam perencanaan dan realisasi anggaran.
 - Dokumen cascading keuangan dan pendapatan untuk 2025 dibuat sebagai acuan operasional penyerapan anggaran.
 - Perencanaan tersebut *selaras* dengan RKPD 2025 yang menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD 2025.
- Optimalisasi Penyerapan Anggaran melalui Monitoring Berkala. Aksi percepatan Pemkab. Balangan ikut serta dalam pelaporan realisasi anggaran sejak awal tahun (misal Realisasi Pendapatan dan Belanja sampai *oktober* 2025) sehingga setiap perubahan cepat terdeteksi dan ditindaklanjuti.

- Penyesuaian Kebijakan Anggaran melalui KUA-PPAS yang Dinamis. Aksi percepatan yang dilakukan pembentukan KUA-PPAS APBD 2025 disepakati bersama DPRD dengan fokus pada prioritas pembangunan dan respons terhadap kondisi fiskal aktual, termasuk pembahasan perubahan anggaran yang diperlukan sepanjang tahun anggaran 2025.
- Dukungan Transfer Fiskal dan Realisasi Pendapatan. Aksi percepatan yang dilakukan adalah realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Balangan relatif tinggi sepanjang 2025 — mis. realisasi TKD mencapai sekitar Rp 2,107 triliun atau sekitar 81,85 % dari pagu total. Sektor *Dana Insentif Daerah (DID)* terealisasi 100 %, dan berbagai dana lain (DAK, Dana Desa) menunjukkan penyerapan yang cukup baik.
- Penguatan Tata Kelola Keuangan Melalui Sistem dan Standar Operasional. Aksi percepatan yang dilakukan meskipun tidak spesifik hanya disebut di dokumen rencana, berbagai informasi pelaporan menyiratkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan alat akuntansi terintegrasi (FMIS/Simda-NG) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.143 adalah menjelaskan bahwa realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan tahun ukur 2025 adalah 93,48 atau termasuk dalam kluster IPKD sangat tinggi dan kategori baik, dalam hal ini capaian IPKD Kabupaten Balangan tahun ukur 2025 meraih terbaik satu dan diikuti oleh Kabupaten Tanah Laut dengan realisasi IPKD sebesar 89,10 atau terbaik kedua. Realisasi Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 72,32 termasuk kluster tinggi dengan predikat cukup baik. Apabila dibandingkan antara capaian Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Balangan, capaian IPKD berdasarkan tahun ukur 2025 Kabupaten Balangan masih lebih tinggi dengan selisih point sebesar 21,16 point, dan jika dibandingkan dengan Kabupaten Tanah Laut sebagai predikat terbaik kedua selisih point Kabupaten Balangan sebesar 4,38, realisasi Nasional 93,48. Sedangkan realisasi Internasional tidak ada sumber data. Berikut tabel Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan:

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Kluster	Predikat
1.	Balangan	93,4811	Sangat Tinggi	Baik
2.	Tanah Laut	89,1043	Sangat Tinggi	Baik
3.	Hulu Sungai Selatan	86,7192	Tinggi	Baik
4.	Hulu Sungai Utara	84,3741	Sedang	Baik
5.	Tabalong	83,7359	Sangat Tinggi	Baik
6.	Hulu Sungai Tengah	83,6702	Sangat Tinggi	Baik
7.	Tanah Bumbu	81,9050	Sangat Tinggi	Baik
8.	Banjarmasin	80,8272	Sangat Tinggi	Baik
9.	Banjarbaru	78,7848	Sangat Tinggi	Cukup Baik
10.	Tapin	76,6452	Sangat Tinggi	Cukup Baik
11.	Kotabaru	76,4448	Sangat Tinggi	Cukup Baik
12.	Banjar	75,9604	Sedang	Cukup Baik
13.	Barito Kuala	70,0314	Sedang	Cukup Baik

****Kategori kluster berdasarkan PMK No. 127 Tahun 2024**

Faktor dominan yang mempengaruhi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan adalah

- Kapasitas dan Kemandirian Fiskal Daerah. Kondisi Balangan ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi, PAD relatif terbatas dan ruang fiskal untuk inovasi kebijakan masih sempit. Dampak terhadap IPKD struktur APBD stabil namun fleksibilitas pengelolaan keuangan terbatas, kemandirian fiskal adalah faktor paling dominan dalam IPKD.

- Kualitas Perencanaan dan Penganggaran. Proses perencanaan dan penganggaran telah berjalan sesuai regulasi, keterkaitan RPJMD – RKPD – APBD cukup baik namun penganggaran masih dominan berbasis input dan belanja berbasis outcome belum optimal.
- Komposisi dan Kualitas Belanja Daerah. Kondisi Balangan belanja operasional masih cukup besar, belanja modal dan belanja produktif terbatas serta efisiensi belanja belum optimal di semua SKPD. Kualitas belanja lebih menentukan IPKD daripada besarnya anggaran.
- Akuntabilitas dan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan tepat waktu, kepatuhan terhadap regulasi keuangan relatif baik dan tindak lanjut temuan pemeriksaan masih perlu penguatan Aspek kepatuhan adalah fondasi IPKD, tetapi bukan satu-satunya penentu.
- Peran Pengendalian Internal dan APIP. APIP aktif melakukan pengawasan, reviu perencanaan dan penganggaran berjalan namun pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko dan rekomendasi belum selalu ditindaklanjuti optimal.

Melihat gambaran umum diatas sebagaimana sajian tabulasi data tabel 3.140 sampai dengan tabel 3.143 maka secara umum kami ambil matrik garis kesimpulan hal-hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah melalui upaya-upaya percepatan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- Penyusunan Kebijakan Anggaran yang Tepat Waktu dan Terarah. Pemerintah Kabupaten Balangan secara konsisten menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun 2025, termasuk dokumen perubahan KUA yang mencerminkan respons pemerintah terhadap dinamika fiskal dan prioritas pembangunan daerah. KUA-PPAS ini menjadi landasan penyusunan APBD yang akurat dan realistis sesuai kebutuhan daerah. *Dampaknya* penyusunan dokumen yang tepat waktu, lengkap, dan terarah berkontribusi pada dimensi kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai salah satu komponen penting dalam penilaian IPKD.
- Penguatan Peraturan Daerah dan Bupati terkait Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran. Beberapa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang dibuat pada 2025 fokus pada tata cara penyusunan dan penjabaran anggaran, serta perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selaras dengan prioritas pembangunan tahun anggaran berikutnya. *Dampaknya* peraturan ini membantu memperjelas proses internal perencanaan anggaran, meningkatkan *transparansi*, kepastian hukum, dan keterpaduan antar SKPD dalam penyusunan RKA dan DPA, yang mendukung komponen kualitas anggaran dalam IPKD.
- Dokumentasi dan Penyusunan Dokumen Pendukung Anggaran. Pemerintah Kabupaten Balangan menyusun berbagai dokumen teknis seperti Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk 2025, yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran oleh setiap SKPD. *Dampaknya* dokumen-dokumen ini menjadi bukti nyata bahwa perencanaan anggaran telah dikelola dengan sistematis dan terdokumentasi dengan rapi, meningkatkan kesesuaian perencanaan dan anggaran serta aspek kelengkapan dokumen dalam penilaian IPKD.
- Monitoring Realisasi Anggaran dan Kas Daerah. Meski pada tahun 2025, realisasi belanja masih sekitar 50 % dan sisa kas daerah cukup besar (sekitar Rp 1,8 triliun), upaya monitoring ini menunjukkan keterbukaan pemerintah daerah dalam melacak realisasi keuangan sepanjang tahun anggaran berjalan. *Dampaknya* monitoring yang baik memungkinkan Balangan untuk menilai tren realisasi anggaran, mengidentifikasi keterlambatan penyerapan, dan mengambil langkah perbaikan sehingga mengurangi risiko penurunan skor dalam dimensi penyerapan anggaran dan kondisi keuangan daerah dalam IPKD.
- Konsistensi Opini WTP sebagai Bagian dari Tata Kelola Keuangan yang Baik. Pemerintah Kabupaten Balangan berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 12 kali berturut-turut, yang mencerminkan kinerja pelaporan keuangan yang kuat, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. *Dampaknya* konsistensi meraih WTP menjadi indikator penting dalam dimensi

opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) sebagai salah satu komponen penilaian utama dalam IPKD. Perolehan WTP meningkatkan kredibilitas pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat skor IPKD.

- Peningkatan Kapasitas dan Pemahaman Keuangan melalui Kegiatan Teknis. Balangan juga terlibat dalam kegiatan seperti Sharing Knowledge tentang Indeks Perkembangan Harga (IPH) bersama pihak eksternal seperti KPPN Tanjung sehingga aparaturnya daerah dapat memahami indikator ekonomi yang relevan untuk perencanaan fiskal dan pengelolaan anggaran. *Dampaknya* kegiatan semacam ini membantu meningkatkan kapasitas SDM dan pemahaman konteks ekonomi makro yang terkait dengan pendapatan dan belanja daerah, yang bisa berdampak pada pengambilan keputusan anggaran dan perencanaan fiskal berbasis data.

2. Analisis Atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator 7 : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang sudah disusun terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun gambaran umum keterkaitan program tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Alasan Mengapa Program Tersebut Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
12.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program yang komprehensif ini meningkatkan kesesuaian perencanaan dengan implementasi anggaran serta mendukung pencapaian indikator kualitas anggaran dan realisasi fiskal yang menjadi komponen penting dalam IPKD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD termasuk bagian dari kualitas pengelolaan aset dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang menjadi komponen penilaian dalam IPKD.
		Program Lain Sesuai Menu Cascading dalam SAKIPRA	Kontribusi SKPD pendukung kinerja akan dijelaskan dalam crosscutting

Berikut analisa atas Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2025 terutama kegiatan koordinasi penyusunan anggaran, penyusunan kebijakan anggaran, monitoring realisasi, serta penguatan regulasi internal telah menciptakan fondasi yang kuat dalam pengelolaan fiskal yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Hal-hal ini secara langsung menunjang keberhasilan pencapaian kinerja *Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah* (IPKD) dengan memperbaiki aspek perencanaan, penyerapan, serta penggunaan anggaran secara optimal sesuai standar tata kelola keuangan publik.
- Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD dari laporan realisasi anggaran *Pendapatan dan Belanja Daerah* menunjukkan bahwa sampai periode Oktober 2025, realisasi belanja baru mencapai sekitar 50 % dari total APBD hampir Rp 3,9 triliun, tetapi masih ada kas daerah yang cukup besar sebagai sumber belanja lanjutan. Dampak terhadap IPKD monitoring yang sistematis terhadap realisasi pendapatan dan belanja membantu menganalisis apakah program/kegiatan berjalan sesuai jadwal dan target, memberi bahan dasar untuk evaluasi dan tindak lanjut program agar realisasi belanja meningkat hingga akhir tahun, dan meningkatkan penyerapan anggaran yang berpengaruh pada skor dalam indikator realisasi anggaran IPKD.
- Integrasi dengan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Program pengelolaan keuangan juga secara tidak langsung terkait dengan penyusunan RPJMD 2025–2029 melalui konsultasi publik dan forum perencanaan yang melibatkan lembaga perencana (BAPPERIDA) serta diskusi lintas SKPD. Dampak terhadap IPKD integrasi ini memastikan kelayakan anggaran terhadap arah pembangunan jangka menengah, yang mendukung aspek relevansi penggunaan dana publik dalam IPKD. Penyusunan anggaran berlandaskan prioritas pembangunan juga membantu meningkatkan *efektivitas penggunaan anggaran*.

- Program dan kegiatan *Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Balangan* secara langsung mendukung pencapaian *Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2025* melalui:
 - Peningkatan kualitas data dan akurasi aset daerah. Melalui rekonsiliasi, aplikasi digital, dan inventarisasi, sehingga laporan aset dan neraca LKPD lebih valid.
 - Kepastian hukum atas aset. Sertifikasi aset memperkuat perlindungan hukum atas Barang Milik Daerah dan meningkatkan kualitas neraca aset.
 - Integrasi pengelolaan aset dengan pelaporan keuangan. Penggunaan sistem digital (Simandor/Sipanda BMD) serta rekonsiliasi aset membantu penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu.
 - Peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Kebijakan digital dan koordinasi multi-instansi memperkuat tata kelola aset daerah, yang positif terhadap indikator akuntabilitas dalam IPKD.

Dari kedua program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.144
Crosscutting Kinerja

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah*	Koordinator utama pengelolaan anggaran, penyusunan KUA-PPAS, RKA, DPA, serta laporan keuangan daerah (LKPD).	Penyusunan laporan keuangan yang akurat, pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), koordinasi penggunaan dana transfer, serta monitoring realisasi anggaran
		Inspektorat	Pengawasan internal berbasis risiko terhadap anggaran dan pengendalian internal operasional keuangan.	Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, termasuk review laporan keuangan, evaluasi kepatuhan SKPD terhadap aturan penganggaran, serta audit internal pengendalian anggaran.
		Bapperida	Sinkronisasi perencanaan dan program SKPD sesuai prioritas pembangunan daerah.	Perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dengan pengelolaan keuangan, melalui penyusunan dokumen RKPD, Renstra, dan RKA-SKPD yang berbasis data risiko dan prioritas Pembangunan.
		BKPSDM	Penguatan kapasitas aparatur untuk pengelolaan keuangan yang akuntabel	Melaksanakan pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kompetensi SDM
		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Menyiapkan kebijakan kelembagaan dan alur kerja yang mendukung	Pembenahan SOP, struktur organisasi, serta mekanisme koordinasi antar-SKPD agar

No	Kinerja	Croscutting dengan SKPD	Dukungan Kinerja	Data Dukung Kinerja
			pengelolaan keuangan daerah	proses penganggaran, belanja, dan pelaporan keuangan berjalan optimal
		Seluruh SKPD Teknis	Memiliki tanggung jawab langsung dalam pengelolaan anggaran program dan kegiatan	Menyusun rencana penggunaan anggaran yang efisien, melaksanakan belanja sesuai aturan, serta melaporkan realisasi anggaran tepat waktu

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk SKPD yang bertanda bintang adalah SKPD leading sektor utama dan SKPD lainnya sebagai supporting sektor. Dengan adanya rapat koordinasi yang rutin atau komprehensif antar SKPD maka Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Balangan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut tabel monev crosscutting kinerja SKPD:

Tabel 3.145
Money Crosscutting Kinerja

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator	Money Offline	Money Online	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Monev offline dengan dilaksanakannya FGD evaluasi pengukuran dan penginputan dokumen IPKD tahun anggaran 2024 tahun ukur 2025 dengan didampingi narasumber dari BSKDN Kemendagri dan peserta diikuti oleh Tim Pengampu IPKD (Sekretariat Daerah – Bagian Pemerintahan, Bapperida, dan BPKPAD) 2. Rapat pembahasan Dasar hukum pengukuran IPKD menggunakan Permendagri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Admin Kabupaten, Admin SKPD dan Tim SAKIP dalam SAKIPRA melakukan monev triwulan TRC SKPD yang terlibat dalam pencapaian kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah -	 

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator 7 : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapai target dari indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2025 yaitu dari efisiensi SDM, efisiensi anggaran, dan efisiensi waktu yaitu:

a. Efisiensi SDM

Kapasitas dan Kompetensi Aparatur

Efisiensi penggunaan SDM dilihat dari kemampuan aparatur dalam menyusun, melaksanakan, dan melaporkan anggaran secara tepat waktu dan akurat. Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian intern (SPIP) berpengaruh positif terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD di Balangan, yang artinya SDM yang kompeten mendorong tata kelola keuangan yang efisien dan akuntabel.

Efisiensi SDM dicerminkan oleh:

Lebih sedikit kesalahan administrasi keuangan, misalnya ketika menyusun RKPD, RKA, dan Laporan Realisasi, karena kemampuan pegawai sudah memadai. Monitoring dan evaluasi berkala (misal melalui FGD evaluasi kinerja) membantu memperbaiki area yang kurang efisien dan memperkuat area yang telah berjalan baik.

b. Efisiensi Anggaran

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Data realisasi menunjukkan bahwa hingga Oktober 2025, Pendapatan Daerah mencapai sekitar 76,11 % dari target tahunan, dengan kontribusi besar berasal dari *Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)*.

Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran berarti dana yang tersedia digunakan secara optimal untuk menghasilkan output kinerja yang maksimal. Beberapa indikasinya:

- Realisasi pendapatan signifikan mendekati target meningkatkan kapasitas daerah membiayai program/kegiatan tanpa defisit besar.
- Koordinasi perubahan KUA-PPAS melalui rapat paripurna bersama legislatif memastikan anggaran difokuskan pada prioritas yang tepat tahun berjalan, sehingga anggaran tidak terbuang untuk hal yang kurang strategis.
- Efisiensi alokasi dilakukan terutama pada proses prioritisasi anggaran, terutama ketika menghadapi pemangkasan APBD (misal pengurangan sekitar Rp 400 miliar untuk fokus efisiensi belanja).

c. Efisiensi Waktu

Ketepatan Waktu Pelaporan dan Implementasi

Efisiensi waktu dapat diukur dari ketepatan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran:

- Dokumen perencanaan dan anggaran: KUA, PPAS, RKA, DPA disusun dan disepakati tepat waktu, termasuk perubahan KUA-PPAS.
- Monitoring realisasi dilakukan berkala (misal realisasi hingga beberapa bulan berjalan) sehingga setiap deviasi cepat diidentifikasi dan diperbaiki memperkecil keterlambatan penyerapan anggaran dan pelaporan.
- Sinergi legislatif-eksekutif (rapat paripurna DPRD dan Pemerintah Kabupaten Balangan) mempercepat proses persetujuan anggaran dan pertanggungjawaban, yang esensial untuk memenuhi batas waktu pelaporan fiskal seperti submission LKPD.

C. Realisasi Anggaran

Berikut tabel rekapitulasi atas evaluasi RKPD Kabupaten Balangan Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang di Evaluasi Pada Triwulan IV Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)			
		K	APBD (Rp)	K (Sub Keg)	K (Kegiatan)	K (Program)	Rp	K (Sub Keg)	K (Kegiatan)	K (Program)	APBD (Rp)
1	2	3		4				5			
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	25.564.830.993,00	99,70%	95,69%	105,42%	20.150.116.694,00	99,70%	95,69%	105,42%	78,82%
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	16.343.928.365,00	97,32%	100,00%	83,11%	14.573.698.953,00	97,32%	100,00%	83,11%	89,17%
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	18.406.742.051,00	99,92%	100,00%	100,00%	16.804.903.398,00	99,92%	100,00%	100,00%	91,30%
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100	480.286.449.193,00	99,87%	101,70%	86,80%	399.768.096.466,00	99,87%	101,70%	86,80%	83,24%
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	100	26.609.748.673,00	100,00%	76,39%	86,51%	25.788.122.284,00	100,00%	76,39%	86,51%	96,91%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang di Evaluasi Pada Triwulan IV Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)			
		K	APBD (Rp)	K (Sub Keg)	K (Kegiatan)	K (Program)	Rp	K (Sub Keg)	K (Kegiatan)	K (Program)	APBD (Rp)
1	2	3		4				5			
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	100	42.899.181.296,00	93,58%	99,05%	81,09%	36.445.085.162,00	93,58%	99,05%	81,09%	84,96%
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	12.130.490.744,00	100,00%	90,00%	98,79%	10.310.477.904,00	100,00%	90,00%	98,79%	85,00%
8	Dinas Kesehatan	100	373.594.375.254,00	98,36%	100,04%	90,30%	305.520.214.854,00	98,36%	100,04%	90,30%	81,78%
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	100	318.244.367.721,00	98,80%	101,49%	88,65%	284.481.761.478,00	98,80%	101,49%	88,65%	89,39%
10	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Persandian	100	29.153.841.197,00	100,00%	100,00%	103,38%	27.180.400.637,00	100,00%	100,00%	103,38%	93,23%
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	100	85.295.033.398,00	95,38%	116,04%	104,34%	79.472.379.902,00	95,38%	116,04%	104,34%	93,17%
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100	1.130.522.761.836,00	98,04%	111,32%	100,32%	966.105.735.694,00	98,04%	111,32%	100,32%	85,46%
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100	125.134.672.783,00	95,98%	103,84%	92,38%	121.911.138.785,00	95,98%	103,84%	92,38%	97,42%
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100	13.369.605.871,00	100,00%	101,09%	103,37%	11.982.214.125,00	100,00%	101,09%	103,37%	89,62%
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	594.738.157.877,00	98,40%	98,59%	95,35%	465.740.487.944,00	98,40%	98,59%	95,35%	78,31%
16	Dinas Perhubungan	100	61.223.979.181,00	85,81%	94,92%	91,44%	59.088.993.286,00	85,81%	94,92%	91,44%	96,51%
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100	18.970.658.838,00	92,79%	105,94%	95,78%	16.410.876.785,00	92,79%	105,94%	95,78%	86,51%
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	20.610.536.189,00	87,75%	124,97%	85,86%	18.946.727.540,00	87,75%	124,97%	85,86%	91,93%
19	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	100	46.927.180.030,00	94,82%	186,95%	201,59%	40.127.366.275,00	94,82%	186,95%	201,59%	85,51%
20	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	100	26.280.018.602,00	100,00%	100,00%	100,00%	20.192.409.993,00	100,00%	100,00%	100,00%	76,84%
21	Dinas Sosial	100	29.570.772.100,00	96,21%	88,77%	97,38%	24.786.042.916,00	96,21%	88,77%	97,38%	83,82%
22	Inspektorat	100	36.721.000.553,00	94,94%	66,75%	53,53%	32.696.885.770,00	94,94%	66,75%	53,53%	89,04%
23	Kecamatan Lamphong	100	7.567.578.814,00	88,33%	100,00%	100,24%	7.058.682.575,00	88,33%	100,00%	100,24%	93,28%
24	Kecamatan Awayan	100	5.726.546.072,00	100,00%	100,00%	100,07%	5.403.322.192,00	100,00%	100,00%	100,07%	94,36%
25	Kecamatan Batumandi	100	6.827.136.854,00	100,00%	107,14%	99,19%	6.514.967.811,00	100,00%	107,14%	99,19%	95,43%
26	Kecamatan Halong	100	6.491.860.314,00	100,00%	100,00%	115,81%	6.099.471.482,00	100,00%	100,00%	115,81%	93,96%
27	Kecamatan Juai	100	5.825.933.332,00	99,81%	100,00%	100,09%	5.649.696.035,00	99,81%	100,00%	100,09%	96,97%
28	Kecamatan Paringin	100	14.565.568.524,00	99,70%	100,00%	99,96%	13.888.997.866,00	99,70%	100,00%	99,96%	95,35%
29	Kecamatan Paringin Selatan	100	10.606.889.895,00	100,00%	100,00%	100,00%	9.951.978.437,00	100,00%	100,00%	100,00%	93,83%
30	Kecamatan Tebing Tinggi	100	6.167.568.439,00	99,79%	100,00%	100,04%	5.840.843.927,00	99,79%	100,00%	100,04%	94,70%
31	Sekretariat Daerah	100	307.290.693.088,00	95,07%	95,83%	145,80%	226.970.271.492,00	95,07%	95,83%	145,80%	73,86%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang di Evaluasi Pada Triwulan IV Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)			
		K	APBD (Rp)	K (Sub Keg)	K (Kegiatan)	K (Program)	Rp	K (Sub Keg)	K (Kegiatan)	K (Program)	APBD (Rp)
1	2	3		4				5			
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100	90.036.991.359,00	95,80%	96,33%	89,91%	74.818.454.281,00	95,80%	96,33%	89,91%	83,10%
			3.993.705.099.436				3.360.680.822.943	97,07%	101,96%	99,89%	84,15%
								SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	TINGGI

D. REFOCUSING ANGGARAN

Berikut Laporan pengalihan hasil efisiensi belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Balangan:

Kode Urusan/Uraian Tematik	Nama Urusan/Uraian Tematik	Belanja			Keterangan
		Sebelum Efisiensi (Rp)	Setelah Efisiensi (Rp)	Selisih (Bertambah / Berkurang) (Rp)	
1.01	Pendidikan	583.142.555.021,00	560.212.788.687,00	-22.929.766.334,00	-
1.02	Kesehatan	313.415.060.570,00	350.250.481.179,00	36.835.420.609,00	-
Tematik	Infrastruktur dan Sanitasi	1.074.980.119.189,00	1.165.933.606.636,02	90.953.487.447,02	-
Tematik	Optimalisasi Penanganan Pengendalian Inflasi	62.845.671.884,00	65.583.154.314,00	7.737.482.430,00	-
Tematik	Stabilitas Harga Makanan dan Minuman	817.754.400,00	759.857.200,00	-57.897.200,0	-
Tematik	Penyediaan Cadangan Pangan	5.523.867.548,00	5.110.937.048,00	-412.930.500,00	-
Tematik	Prioritas lainnya yang Berorientasi pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi	307.445.169.219,00	363.872.309.989,98	56.427.140.770,98	-
TOTAL		2.348.170.197.831,00	2.511.723.135.054,00	163.552.937.223,00	-

Keterangan:

- Kolom (3) = pagu berdasarkan belanja APBD TA 2025 sebelumnya (Perda)
- Kolom (4) = pengalihan dari hasil efisiensi belanja ke urusan / uraian tematik (dialihkan dari Belanja pada Lampiran 1 Penjabaran APBD TA 2025)

Peruntukkan Pengalihan Anggaran sebagai berikut:

- Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agrimaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- Membangun lingkungan hidup. Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

7. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milineal dan generasi Z) dan pengandang disabilitas;
8. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

E. Piagam Penghargaan

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Balangan menerima beberapa penghargaan, penghargaan adalah suatu bentuk dari pengakuan tertulis dari orang lain baik secara kelembagaan instansi pemerintah maupun swasta. Penghargaan yang diberikan merupakan sebuah motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Balangan untuk melakukan perbaikan terus menerus dan berkelanjutan demi Balangan yang lebih baik dan lebih maju serta lebih sejahtera. Adapun Penghargaan yang diterima pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Tempat	Penghargaan	Oleh	Foto Kegiatan
1.	26 Mei 2025	Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Kalsel.	Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025	BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	
2.	17 Juni 2025	Bali	Asia Pacific Leaders Summit on Malaria Elimination ke-9	Menteri Kesehatan Budi G Sadikin	
3.	21 Oktober 2025	Hotel Lorin Dwangsa, Surakarta	ATM Award 2025 (Penanggulangan dan Pencegahan AIDS, Tuberkulosis, Malaria di Daerah)	Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES)	
4.	11 Nopember 2025	Ballroom Hotel Rattan Inn, Kota Banjarmasin	Penilaian kinerja Pembudayaan Klaster Germas	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	
5.	1 Desember 2025	Hotel Borobudur Jakarta	Apresiasi Kinerja Pemerintah.	Kerja Sama Tempo dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	
6.	10 Desember 2025	Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat	Innovative Government Award (IGA) 2025	Kementerian Dalam Negeri	
7.	10 Desember 2025	Banjarmasin	Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk yang baik dan capaian kinerja hingga 100% dalam Pemenuhan Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta	Gubernur Kalimantan Selatan	

No.	Tanggal	Tempat	Penghargaan	Oleh	Foto Kegiatan
			Perceraian di Kabupaten Balangan		
8.	19 Desember 2025	Banjarmasin	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan	
9.		Banjarmasin	Terbaik IV Atas dukungan dalam Percepatan Proses Kenaikan Pangkat (KP) di Wilayah Kerja Kantor Regional VIII BKN	Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII	
10.	12 Februari 2026	Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin	Terbaik II Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kinerja Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2025 Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0102/KUM/2026 Tanggal 27 Januari 2026	Gubernur Kalimantan Selatan	

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Capaian Kinerja Sasaran

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1.1 Sasaran Strategis : Meningkatnya Kontribusi Pengembangan Infrastruktur					
1.	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,512	0,550	107,42
1.2 Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana					
2.	Penurunan Intensitas Emis Gas Rumah Kaca	Angka	0,83	0,000012	200
3.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,62	0,64	103,23
2.1 Sasaran Strategis : Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah					
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Angka	3,78	17,72	468,78
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	Angka	4,04	9,18	227,23
6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Angka	5,29	9,40	177,69
7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Angka	8,34	12,59	150,96
2.2 Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi					
8.	Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	Angka	10	4,11	41,10
2.3 Sasaran : Menurunnya Pengangguran Daerah					
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	2,67	2,74	97,38
10.	Rasio Kewirausahaan	Angka	2,40	1,74	72,50
2.4 Sasaran : Meningkatnya Kemajuan Perekonomian dan Kemandirian Desa					
11.	Indeks Desa	Angka	69,35	80,08	115,47
3.1 Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat					
12.	Umur Harapan Hidup	Usia	74,26	74,14	99,84
13.	Prevalensi Stunting	Angka	11,88	14,53	77,69

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
3.2 Sasaran : Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata					
14.	Harapan Lama Sekolah	Angka	13,17	13,35	101,37
15.	Rata-rata Lama Sekolah	Angka	8,37	8,34	99,64
4.1 Sasaran : Menurunnya Kemiskinan Daerah					
16.	Angka Kemiskinan	Angka	4,62	4,64	99,57
4.2 Sasaran : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat					
17.	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	70	81,15	115,93
4.3 Sasaran Meningkatnya Kemajuan Budaya					
18.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	60,34	60,64	100,50
5.1 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan					
19.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,49 (-A)	4,57 (-A)	101,78
20.	Indeks Integritas	Indeks	75,25	74,68	99,24
21.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	77	77,10	100,13
22.	Indeks SPBE	Indeks	3,40	3,82	112,35
23.	Indeks Manajemen Resiko	Indeks	3,049	3,053	100,13
24.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	80,70	93,48	115,84

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 16 target.
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target.
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 8 target; dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

B. Rencana Aksi Tahun 2026

Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan Penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Implementasi SAKIP berdasarkan LHE Kemenpan RB Nomor : B/50/AA.05/2025 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 tanggal 20 Desember 2025 dimana hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan memperoleh nilai 77,10 atau Predikat BB. Adapun beberapa rencana aksi atas perbaikan hasil evaluasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No.	Rencana Aksi Tindaklanjuti	Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi Tindaklanjuti
1.	Membuat Perbup SAKIP	Revisi April 2026
2.	Telah ditetapkan Perbup Perencanaan/Pengukuran (Perbup Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah)	Sudah ditetapkan 20 Juni 2024
3.	Membuat Perbup Pelaporan	Mei 2026
4.	Membuat Perbup Evaluasi	Tahun 2024
5.	Membuat SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemda dan SKPD	Sudah ditindaklanjuti tahun 2025
6.	Melakukan rewiu SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemda dan SKPD	Minggu Pertama Maret 2026
7.	Membuat SOP Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemda dan SKPD	Penyusunan LKIP Pemda sudah ada pada tahun 2021
8.	Melakukan revisi SOP Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemda dan SKPD	Minggu Pertama Maret 2026
9.	Membuat SOP Pelaksanaan Evaluasi SAKIP SKPD	Ada SOP evaluasi SAKIP Tahun 2024
10.	Melakukan rewiu SOP Pelaksanaan Evaluasi SAKIP SKPD	Minggu Pertama Maret 2026
11.	Membuat SOP Pelaksanaan rewiu LKIP Pemda	Minggu Pertama Maret 2026
12.	Membuat SOP Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja SKPD	Minggu Pertama Maret 2026
13.	Menyusun Draft Keputusan Bupati tentang penetapan implementasi SOP SAKIP Kabupaten Balangan	Minggu Pertama Maret 2026
14.	Melakukan sosialisasi SOP	Minggu Kedua Maret 2026
15.	Menambah muatan dalam Fakta Integritas terkait Mutasi Jabatan dan Serah Terima Jabatan wajib transfer pengetahuan untuk mendukung kesinambungan implementasi SAKIP	Februari / Maret 2026
16.	Membuat Surat ke Bapperida agar untuk implementasi inovasi ke depan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut bahwa inovasi harus menyelesaikan masalah kinerja dan inovasi harus memberikan kontribusi terhadap capaian outcome yang dituju	Maret 2026
17.	Melakukan pengembangan menu monev crosscutting dalam Aplikasi SAKIPRA	Maret 2026
18.	Membuat tabel monev crosscutting baik level Pemda dan SKPD dengan 2 format tabulasi yakni sebagaimana tabel yang sudah ada di Aplikasi SAKIPRA dan tabel seperti monev crosscutting dalam LKIP Pemda	Maret, April, Mei 2026
19.	Melakukan pembenahan dan pengembangan pada menu pengukuran/pelaporan kinerja dalam Aplikasi SAKIPRA	Maret s/d Mei 2026
20.	Mengintegrasikan ASN digital e-Kinerja dan Aplikasi SAKIPRA	Maret s/d Mei 2026
21.	Memperbarharui SK Tim SAKIP PEMDA dan menambah tupoksi pemeriksaan kedua atau Komite Validasi data <i>ex officio</i>	Maret s/d April 2026
22.	Memastikan koordinasi lebih mendalam bersama BPS, Kominfo dan Bapperida dalam pengelolaan data statistik sektoral	Maret 2026
23.	Menambah menu penyimpanan data dukung kinerja pada Aplikasi SAKIPRA	Maret s/d Mei 2026

No.	Rencana Aksi Tindaklanjuti	Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi Tindaklanjuti
24.	Menambahkan menu pengukuran kinerja terkait hambatan dan rencana tindak yang sudah dilakukan dan menambahkan upload data hal yang sudah dilakukan	Maret s/d Mei 2026
25.	Memastikan tindak lanjut atau rencana aksi perbaikan akan menjadi tolak ukur dalam penentuan program kegiatan dalam dokumen perencanaan tahunan selanjutnya	Maret 2026
26.	Telah dilakukan penggalan efisisensi baik SDM, Anggaran maupun efisiensi Waktu dalam LKIP Pemda dan SKPD	Pebruari s/d Maret 2026
27.	Telah dilakukan penajaman analisis faktor penghambat dan pendorong dalam LKIP Pemda dan SKPD	Pebruari s/d Maret 2026
28.	Telah memuat rekap masalah dan tindaklanjuti dalam LKIP Bab 3 baik Level Pemda dan SKPD	Pebruari s/d Maret 2026
29.	Telah membuat rencana aksi hasil LHE SAKIP Kemen PANRB dan LHE APIP	Pebruari s/d Maret 2026
30.	Menu dalam aplikasi SAKIPRA khususnya di sub menu pelaporan kinerja agar rekap tindak lanjut muncul	Maret s/d Mei 2026
31.	Melakukan update menu pada evaluasi Aplikasi SAKIPRA	Maret 2026
32.	Membuat Surat Edaran tentang evaluasi kinerja termasuk di dalamnya aspek budaya kinerja dan orientasi hasil	Maret 2026
33.	Membuat KAK evaluasi <i>Soft Skill</i> Budaya Kerja BerSAKIP	Maret 2026
34.	Membuat atau menambah menu kontrol pada evaluasi SAKIPRA	Maret s/d Mei 2026
35.	Menambah kapasitas data dukung dalam aplikasi atau link google drive tersendiri	Maret s/d Mei 2026
36.	Hasil MTL di monev oleh Inspektorat secara Triwulanan by aplikasi	Maret s/d Mei 2026

C. Langkah Perbaikan SAKIP Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi

Langkah perbaikan SAKIP difokuskan pada penguatan budaya kinerja, integrasi perencanaan dan evaluasi serta peningkatan akuntabilitas guna mewujudkan organisasi yang efektif, transparan dan berorientasi hasil sebagai berikut:

1. Mengawal Kinerja Makro yaitu melakukan pemantauan terhadap indikator pembangunan daerah secara berkala agar seluruh program perangkat daerah selaras dengan target kinerja makro serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian Pembangunan daerah.
2. Menginternalisasi Budaya BerSAKIP yaitu membangun budaya kerja berbasis kinerja melalui pemahaman SAKIP di seluruh level organisasi sehingga setiap pegawai memiliki orientasi pada hasil, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Fakta Integritas SAKIP dalam Mutasi Pegawai yaitu menjadikan komitmen penerapan SAKIP sebagai bagian dari pertimbangan mutasi dan promosi jabatan guna memastikan pejabat yang ditempatkan memiliki integritas kinerja yang kuat.
4. Integrasi Kinerja Individu dan Organisasi yaitu menyelaraskan sasaran kinerja pegawai dengan tujuan strategis organisasi sehingga kontribusi individu dapat terukur secara langsung terhadap capaian kinerja perangkat daerah.

5. Perbaikan Menu SAKIP (Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi) yaitu menyempurnakan sistem pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja agar lebih terukur, berbasis data serta mampu menjadi dasar pengambilan keputusan yang efektif.
6. Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah disamping meningkatkan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang bisa digali dalam rangka meningkatkan proporsi PAD terhadap APBD yang saat ini masih rendah.
7. Perbaikan Penyerapan Anggaran. Diperlukan strategi penyerapan anggaran yang terencana dan terukur, terutama program/kegiatan yang menjadi prioritas Pembangunan, agar pelaksanaan belanja Pembangunan tidak menumpuk di akhir tahun, sehingga kualitas pekerjaan dapat lebih terjaga.

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN PERIODE
RPJMD 2025-2029



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/766/Kum TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025-2029

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu adanya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran Pemerintah Kabupaten Balangan yang ditetapkan melalui indikator kinerja yang memberikan penjelasan baik sebagai acuan kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang dilakukan untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran sudah tercapai;
 - sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja, Unit Kerja Mandiri, dalam menentukan kinerja utama yang akan diwujudkan dan;
 - untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis rencana pembangunan daerah dan SKPD yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 01 September 2025

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR : 188.45 / 766 /Kum TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025-2029

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
VISI : BALANGAN BAHARAT (MEMBANGUN DESA DAN MENATA KOTA, MENUJU MASYARAKAT YANG HARMONIS, RELIGIUS, MAJU DAN SEJAHTERA)								
MISI I : MENGEMBANGKAN WILAYAH DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN LINGKUNGAN YANG LESTARI								
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Daya Dukung Lingkungan yang Berdampak pada Kemajuan Daerah Secara Berkelanjutan	1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Angka)	Makna : IKLI adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas, aksesibilitas, dan kinerja layanan infrastruktur publik Alasan Pemilihan : Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dipilih karena menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas, ketersediaan, dan kemudahan akses terhadap layanan infrastruktur publik seperti jalan, air bersih, sanitasi dan transportasi.. Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Rumus Perhitungan : Indeks Kepuasan = $\sum$ (Skor Aktual) x 100 dibagi Skor tertinggi x Jumlah Responden	1 Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur	1 Indeks Infrastruktur (Angka)	Makna : Indeks Infrastruktur adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas infrastruktur dasar di suatu wilayah. Alasan Pemilihan : Indikator Indeks Infrastruktur dipilih karena menggambarkan tingkat ketersediaan, kualitas, dan pemerataan sarana prasarana dasar yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik di suatu daerah. Infrastruktur merupakan fondasi utama pembangunan yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, daya saing wilayah, dan kesejahteraan masyarakat Rumus Perhitungan : Indeks Infrastruktur = 15% (persentase RT akses sanitasi aman) + 15% (persentase RT akses sumber air aman) + 15% (persentase RT akses internet) + 20% (persentase jalan dalam kondisi mantap) + 15% (persentase RT dg akses hunian layak) + 10% (Persentase Perumahan yang dilengkapi PSU) + 10% (rasio konektivitas)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
MISI I : MENGEMBANGKAN WILAYAH DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN LINGKUNGAN YANG LESTARI								
		2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	Makna : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indeks komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada periode tertentu. IKLH mencerminkan kondisi kualitas udara, air, dan tutupan lahan, yang penting bagi kesehatan manusia dan kelestarian ekosistem Alasan Pemilihan : Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dipilih karena mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga, mengelola, dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup. IKLH menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh mana pembangunan daerah dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem dapat terjaga Rumus Perhitungan : $IKLH = \frac{IKU + IKA + ITL}{3}$	2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	2 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (Persen)	Makna : Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah indikator yang menggambarkan efisiensi emisi GRK terhadap aktivitas ekonomi, yaitu berapa besar emisi GRK yang dihasilkan per unit Produk Domestik Bruto (PDB). Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas upaya pengurangan emisi dalam konteks pembangunan ekonomi. Alasan Pemilihan : Indikator Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dipilih karena menggambarkan komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon dari kegiatan pembangunan. Indikator ini menjadi tolok ukur sejauh mana pembangunan ekonomi dapat dilakukan tanpa meningkatkan tekanan terhadap lingkungan dan iklim global. Rumus Perhitungan : Intensitas Emisi GRK = Total Emisi GRK (ton CO2e) / PDB (miliar Rp) Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) = (Intensitas Tahun Dasar - Intensitas Tahun Berjalan / Intensitas Tahun Dasar) x 100	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
		3 Indeks Resiko Bencana (Angka)	Makna : Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat potensi kerugian akibat bencana di suatu wilayah. Indeks ini memperhitungkan bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana.			3 Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
MISI I : MENGEMBANGKAN WILAYAH DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN LINGKUNGAN YANG LESTARI								
			Alasan Pemilihan : Indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) dipilih karena memiliki peran penting dalam menggambarkan tingkat kerentanan dan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana alam maupun nonalam. Indeks ini memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana suatu daerah siap dan mampu mengelola risiko bencana untuk melindungi masyarakat, lingkungan, dan aset ekonomi daerah			Alasan Pemilihan : Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dipilih karena menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, menyesuaikan diri, dan pulih dari berbagai tantangan dan tekanan, baik yang bersifat ekonomi, sosial, politik, lingkungan, maupun keamanan. IKD menjadi ukuran penting untuk menilai seberapa kuat suatu daerah dalam menjaga stabilitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai potensi gangguan atau krisis.		
			Rumus Perhitungan : $IRB = \frac{(Bahaya \times Kerentanan)}{Kapasitas}$			Rumus Perhitungan : IKD = Kapasitas / Kerentanan x Ancaman		
MISI II : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN								
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (Angka)	Makna : Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah indikator yang menunjukkan persentase peningkatan nilai output barang dan jasa (Produk Domestik Bruto / PDB) dalam suatu wilayah dari satu periode ke periode berikutnya (biasanya per tahun atau per kuartal). Alasan Pemilihan : Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan ukuran makro utama yang mencerminkan kemajuan/keberhasilan pembangunan ekonomi daerah secara menyeluruh Rumus Perhitungan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) = $\frac{(PDB \text{ Tahun } t - PDB \text{ Tahun } -1)}{PDB \text{ Tahun } t-1} \times 100$	3 Meningkatkan Kontribusi Sektor Unggulan Strategis (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan (Persen)	Makna : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan adalah tingkat perubahan nilai tambah bruto sektor pertanian dan perikanan dari tahun ke tahun, dihitung dalam persentase. Pertumbuhan ini mencerminkan kinerja sektor primer dalam mendukung perekonomian suatu wilayah. Alasan Pemilihan : Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan memberikan gambaran dan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu. Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah. Rumus Perhitungan : Laju Pertumbuhan = $\frac{(PDB \text{ Tahun Ini} - PDB \text{ Tahun Lalu})}{PDB \text{ Tahun Lalu}} \times 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Badan Pusat Statistik

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
MISI II : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN								
					5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan (Persen)	Makna : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan adalah persentase pertumbuhan nilai tambah bruto (PDB) sektor industri pengolahan dari suatu wilayah dalam periode waktu tertentu (biasanya tahunan). Nilai ini mencerminkan performa sektor industri manufaktur, yang mencakup semua aktivitas pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi Alasan Pemilihan : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan memberikan gambaran dan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu. Dengan bantuan data Industri pengolahan, maka dapat ditentukan sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah. Rumus Perhitungan : Laju Pertumbuhan = $\frac{\text{PDB Industri Tahun ini} - \text{PDB Industri Tahun Lalu}}{\text{PDB Industri Tahun Lalu}} \times 100 \%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Badan Statistik Pusat
					6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan (Persen)	Makna : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan adalah tingkat perubahan (kenaikan atau penurunan) nilai tambah bruto dari sektor perdagangan besar dan eceran (termasuk reparasi mobil dan sepeda motor) dalam suatu periode waktu, biasanya dihitung tahunan. Alasan Pemilihan : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan memberikan gambaran dan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu. Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah. Rumus Perhitungan : Laju Pertumbuhan = $\frac{\text{PDB Sektor Perdagangan tahun ini} - \text{PDB Tahun Lalu}}{\text{PDB Tahun Lalu}} \times 100\%$		
					7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen)	Makna : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah persentase perubahan tahunan nilai tambah bruto sektor ini (dalam PDB harga konstan), yang mencerminkan tingkat peningkatan aktivitas ekonomi dari usaha penyedia penginapan dan layanan makanan/minuman. Alasan Pemilihan : Laju pertumbuhan ekonomi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memberikan gambaran dan informasi terkait dinamika ekonomi lokal terkait pariwisata, perdagangan dan jasa yang menunjukkan peningkatan kunjungan wisata, kegiatan ekonomi dan daya tarik daerah. Indikator ini menggambarkan tingkat kemajuan sektor pariwisata daerah secara tidak langsung. Rumus Perhitungan : Laju Pertumbuhan = $\frac{\text{PDB Sektor Tahun ini} - \text{PDB Tahun Lalu}}{\text{PDB Tahun lalu}} \times 100\%$		

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
MISI II : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN								
				4 Meningkatkan Pertumbuhan Realisasi Investasi	8 Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi (Persen)	Makna : Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi adalah persentase kenaikan atau penurunan nilai realisasi investasi pada suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat perkembangan realisasi investasi yang masuk ke suatu daerah atau negara, baik Alasan Pemilihan : Indikator Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi dipilih untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor. Pertumbuhan investasi yang positif akan mendorong aktivitas ekonomi, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah, sehingga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Rumus Perhitungan : $\text{Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi} = \frac{\text{Realisasi } t - \text{Realisasi } t-1}{\text{Realisasi } t-1} \times 100 \%$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; BKPM / Kementerian Investasi RI
		5 Indeks Gini (Angka)	Makna : Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Indeks ini menunjukkan seberapa besar kesenjangan ekonomi antara kelompok penduduk dengan pendapatan tertinggi dan terendah dalam suatu wilayah atau negara. Alasan Pemilihan : Indeks Gini dipilih sebagai indikator kinerja karena menggambarkan tingkat pemerataan hasil pembangunan ekonomi di daerah. Penurunan Indeks Gini menunjukkan meningkatnya pemerataan pendapatan dan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Indikator ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dan tujuan SDGs dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat.	5 Menurunnya Pengangguran Daerah	9 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	Makna : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan terhadap total angkatan kerja. Alasan Pemilihan : Nilai Angka Pengangguran Terbuka diperlukan sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan ketenagakerjaan dan acuan bagi Pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah serta Tenaga Kerja	Badan Pusat Statistik

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
MISI II : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN								
			Rumus Perhitungan : G sama dengan Sigma i dari 1 sampai n, dijumlahkan dengan Sigma j dari 1 sampai n, dari nilai mutlak (x sub i dikurang x sub j), dibagi dengan 2 dikali n kuadrat dikali x bar.			Rumus Perhitungan : TPT - (Jumlah Penganguran Terbuka/Jumlah Angkatan Kerja) x 100%		
					10 Rasio Kewirausahaan (Persen)	Makna : Rasio kewirausahaan adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang berstatus sebagai wirausaha (entrepreneur) dengan total jumlah penduduk usia kerja atau angkatan kerja di suatu wilayah pada periode tertentu	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah serta Tenaga Kerja	Badan Pusat Statistik
						Alasan Pemilihan : Indikator Rasio Kewirausahaan dipilih karena memiliki peran strategis dalam menggambarkan kemandirian ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia, serta kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.		
						Rasio Kewirausahaan = (Jumlah Berusaha Dibantu Buruh Tetap Dibagi Jumlah Angkatan Kerja) x 100%		
			6 Meningkatnya Kemajuan Perekonomian dan Kemandirian Desa	6 Meningkatnya Kemajuan Perekonomian dan Kemandirian Desa	11 Indeks Desa (Nilai)	Makna : Indeks Desa adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian suatu desa berdasarkan berbagai aspek pembangunan. Indeks ini mencerminkan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan desa, serta kemampuan desa dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Penduduk dan Keluarga Berencana serta pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pusat Statistik
						Alasan Pemilihan : Indikator Indeks Desa dipilih karena mencerminkan tingkat kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa secara komprehensif dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indeks ini penting bagi pemerintah daerah untuk mengukur keberhasilan pembangunan di tingkat desa serta menentukan arah kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.		
						Rumus Perhitungan : Indeks Desa (ID) = Total skor desa / skor maksimum X 100%		

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA								
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Angka)	Makna : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu daerah atau negara dalam membangun kualitas hidup manusia. IPM mencerminkan keberhasilan pembangunan tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari kesehatan, pendidikan, dan daya beli.	7 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	12 Umur Harapan Hidup (Tahun)	Makna : Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata usia yang akan dicapai seseorang sejak lahir jika selama hidupnya ia mengalami pola kematian seperti yang berlaku pada saat itu.	Dinas Kesehatan	Badan Pusat Statistik
			Alasan Pemilihan : Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipilih karena mencerminkan tingkat kualitas hidup, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat daerah. IPM menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, serta taraf hidup masyarakat. Peningkatan IPM menjadi tolok ukur utama dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing			Alasan Pemilihan : Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.		
			Rumus Perhitungan : $IPM = 1/3 (I \text{ Kesehatan} + I \text{ Pendidikan} + I \text{ Ekonomi})$ I Kesehatan dihitung dari umur harapanq hidup I Pendidikan dihitung dari HLS dan RLS I Ekonomi dihitung dari logaritma pengeluaran perkapita			Rumus Perhitungan : Umur Harapan Hidup Saat Lahir = Total tahun hidup yang akan dijalani oleh penduduk sejak usia 0 tahun (umur lahir) / jumlah penduduk yang hidup pada awal usia (biasanya 100.000 penduduk)		
					13 Prevalensi Stunting (Persen)	Makna : Prevalensi stunting adalah persentase balita (anak usia di bawah 5 tahun) yang mengalami tumbuh kerdil atau gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis, biasanya akibat asupan gizi yang kurang dalam waktu lama dan/atau infeksi berulang, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan; Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI)
						Alasan Pemilihan : Memperoleh gambaran terhadap status gizi masyarakat untuk kemudian dilakukan perbaikan baik intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik terhadap perbaikan status gizi masyarakat.		
						Rumus Perhitungan : Prevalensi stunting = (Jumlah balita stunting / Jumlah Total Balita) x 100%		

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN BERAHLAK MULIA								
				8 Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	14 Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Makna : Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah rata-rata jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat dijalani oleh seorang anak usia tertentu (biasanya anak usia 7 tahun), jika mengikuti sistem pendidikan yang berlaku saat ini <u>sepanjang hidupnya</u> .	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Pusat Statistik
						Alasan Pemilihan : Mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.		
						Rumus Perhitungan : $HLS = \sum (Pi \times i)$ dimana : Pi = probabilitas penduduk akan melanjutkan ke jenjang pendidikan ke-i , i = jenjang atau tingkat pendidikan (dalam tahun)		
					15 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Makna : Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal, terlepas dari jenjang pendidikan yang diselesaikan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Pusat Statistik
						Alasan Pemilihan : Mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah.		
						Rumus Perhitungan : $RLS = \sum (Jumlah\ penduduk\ pada\ tingkat\ pendidikan\ tertentu \times lama\ sekolah) / jumlah\ total\ penduduk\ usia\ 25\ tahun\ ke\ atas$		
MISI IV : MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT YANG HARMONIS DAN KONDUSIF								
4	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif	7 Indeks Harmoni Indonesia (IHI) (Angka)	Makna : Indeks Harmoni Indonesia (IHI) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keharmonisan kehidupan sosial di Indonesia. Indeks ini mencerminkan kondisi kohesi sosial, toleransi antarumat beragama, serta kerukunan masyarakat di berbagai wilayah Alasan Pemilihan : Indikator Indeks Harmoni Indonesia dipilih karena mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam membina kehidupan masyarakat yang rukun, toleran, dan damai di tengah keberagaman. Meningkatnya nilai IHI menunjukkan meningkatnya kualitas hubungan sosial dan stabilitas daerah, yang menjadi fondasi utama bagi tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	9 Menurunnya Kemiskinan Daerah	16 Angka Kemiskinan (Persen)	Makna : Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Alasan Pemilihan : Indikator Angka Kemiskinan dipilih karena mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjadi ukuran keberhasilan pembangunan daerah dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Penurunan angka kemiskinan menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta pelayanan dasar lainnya. Selain itu, indikator ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan SDGs dalam upaya pengentasan kemiskinan.	Dinas Sosial	Dinas Sosial; Kementerian Sosial

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
MISI IV : MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT YANG HARMONIS DAN KONDUSIF								
			Rumus Perhitungan : IHaI = 1/3 (I Toleransi + I Kesetaraan + I Kerja Sama) Ket. I Toleransi : skor indeks toleransi antar umat beragama I Kesetaraan : skor indeks kesetaraan hak dan kewajiban antar umat beragama I Kerja Sama : skor indeks kerja sama antau umat beragama			Rumus Perhitungan : Angka Kemiskinan = Jumlah Penduduk Miskin / Total Penduduk X 100%		
				10 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	17 Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Angka)	Makna : IPKKU (Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) oleh pemerintah daerah. IPKKU mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil menciptakan kondisi aman, tertib, dan terlindunginya masyarakat.	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
					Alasan Pemilihan : Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) dipilih karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Peningkatan nilai IPKKU menunjukkan meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Trantibumlinmas, kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, serta terwujudnya lingkungan sosial yang kondusif bagi pembangunan daerah			
					Rumus Perhitungan : Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraan dan Ketertiban Umum (IPKKU) = ∑ (Nilai bobot pada dimensi ke-i x Nilai bobot pada subdimensi ke - n dimensi ke-i x Nilai rerata likert pada indikator di subdimensi ke-n dimensi ke-i			
					$I_{IPKKU} = \sum_n^i (WD^i \times WS_n^i \times S_n^i)$ dimana: I_{IPKKU} : Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) WD^i : Nilai bobot pada dimensi ke-i			
				11 Meningkatnya Kemajuan Budaya	18 Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)	Makna : Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pembangunan bidang kebudayaan di suatu wilayah secara kuantitatif. Indeks ini disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan tujuan menilai sejauh mana kebudayaan dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
MISI IV : MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT YANG HARMONIS DAN KONDUSIF								
						Alasan Pemilihan : Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dipilih karena mencerminkan tingkat kemajuan dan ketahanan budaya daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan nilai IPK menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam melestarikan warisan budaya, mengembangkan ekonomi kreatif, memperkuat identitas lokal, dan menumbuhkan karakter masyarakat yang berbudaya dan toleran. Rumus Perhitungan : $IPK = \sum_{i=1}^n W_i \cdot X_i$ * xi = skor standar dari masing-masing indikator * wi = bobot dari masing-masing dimensi/indikator IPK terdiri dari 7 dimensi utama,masing-masing dengan indikator tersendiri: 1. Ekspresi Budaya - Partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, seni dan tradisi. 2. Warisan Budaya - Pelestarian cagar budaya,benda budaya, dan warisan tak benda. 3. Ekonomi Budaya - Kontribusi sektor budaya terhadap ekonomi (pendapatan lapangan kerja) 4. Pendidikan dan Literasi Budaya - Akses masyarakat terhadap pendidikan budaya dan literasi 5. Ketahanan Sosial Budaya - Toleransi, kohesi sosial dan penghormatan terhadap keberagaman 6. Gender dan Budaya - Keterlibatan gender dalam praktik budaya dan akses terhadap sumber daya budaya 7. Kebebasan Ekspresi dan Partisipasi Budaya - Perlindungan terhadap kebebasan berbudaya dan berekspresi		

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG MELAYANAI DAN INOVATIF								
5	Terwujudnya Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	8 Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Makna : Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran capaian perubahan dalam tata kelola pemerintahan, yang menunjukkan seberapa jauh suatu instansi pemerintah telah berhasil memperbaiki sistem kerja, menata organisasi, meningkatkan kualitas SDM aparatur, memperkuat akuntabilitas, mencegah korupsi, dan memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat.	12 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	19 Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Angka)	Makna : Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Indeks ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek layanan publik, seperti efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas.	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) dan Unit Pelayanan Publik	Penilaian PEKPP; Kementerian PANRB
			Alasan Pemilihan : Indeks Reformasi Birokrasi dipilih sebagai indikator kinerja karena mencerminkan tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Peningkatan nilai indeks RB menunjukkan keberhasilan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik. Indikator ini juga sejalan dengan agenda nasional dalam memperkuat integritas, akuntabilitas, serta profesionalitas aparatur sipil negara.			Alasan Pemilihan : Guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan.		
			Rumus Perhitungan : Indeks RB= $\frac{\sum \text{Bobot}}{\sum (\text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot Komponen})}$			Rumus Perhitungan : $IPP = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\text{Skor } i \times \text{Bobot } i)$		
					20 Indeks Integritas (Angka)	Makna : Indeks Integritas adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat integritas suatu lembaga atau institusi publik, terutama dalam konteks pencegahan korupsi, pelayanan publik, dan tata kelola yang bersih. Indeks ini sering digunakan untuk mengukur persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap praktik integritas dan korupsi di instansi pemerintah	Inspektorat	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
						Alasan Pemilihan : Indeks Integritas dipilih sebagai indikator kinerja karena mencerminkan tingkat penerapan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan nilai Indeks Integritas menunjukkan keberhasilan reformasi birokrasi, penguatan sistem pengawasan, dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif, dan berkeadilan		

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG MELAYANAI DAN INOVATIF								
						Rumus Perhitungan : Indeks Integritas = $\sum n_i = i (X_i * W_i) / \sum n_i = i W_i$ $II = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i \times W_i)}{\sum_{i=1}^n W_i}$		
					21 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Nilai)	Makna : Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi terhadap substansi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran kinerja.	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi); Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan Seluruh SKPD	LHE SAKIP Kementerian PAN RB RI
						Alasan Pemilihan : Dengan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal ini Sekretariat Daerah yang merupakan salah satu tim pembina SAKIP kabupaten mampu mengukur tingkat akuntabilitas kinerja baik level Pemda, SKPD hingga ke Individu mampu mengukur tingkat akuntabilitas kinerja baik itu level Pemda, SKPD hingga ke Individu Pegawai.		
						Rumus Perhitungan : Nilai AKIP = (Skor Perencanaan x 30%) + (Skor Pengukuran x 30%) + (Skor Pelaporan x 15) + (Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja x 25%) LHE SAKIP Kemenpan RB RI		
					22 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Persen)	Makna : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh. IPKD dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai alat ukur kinerja tata kelola keuangan daerah, berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Kementerian Dalam Negeri

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG MELAYANAI DAN INOVATIF								
					23 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Angka)	Alasan Pemilihan : Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dipilih karena mencerminkan tingkat kualitas tata kelola keuangan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Indikator ini menjadi ukuran penting untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara bertanggung jawab serta memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah		
						Rumus Perhitungan : IPKD Total = $\frac{\sum (\text{Skor Dimensi} \times \text{Bobot})}{\text{Total Bobot}}$ IPKD terdiri dari 6 dimensi utama (versi Kemendagri Terbaru) : 1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD 3. Pelaksanaan APBD 4. Pengelolaan Pendapatan Daerah 5. Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah) 6. Transparansi Keuangan Daerah		
						Makna : Indeks SPBE adalah ukuran tingkat kematangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat maupun pemerintah daerah. Alasan Pemilihan : Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dipilih karena mencerminkan tingkat kematangan dan efektivitas penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital di daerah. Peningkatan nilai Indeks SPBE menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Pemilihan indikator ini penting karena SPBE menjadi tolok ukur transformasi digital pemerintahan daerah yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Melalui penerapan SPBE, proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, hemat sumber daya, serta mampu memberikan layanan publik yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.		
						Rumus Perhitungan : Indeks SPBE = $\frac{\sum n_i (X_i * W_i)}{\sum n_i W_i}$		

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG MELAYANAI DAN INOVATIF								
					24 Indeks Pemerintahan Digital (Angka)	Makna : Indeks Pemerintahan Digital (IPD) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan, pemanfaatan, dan efektivitas transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indeks ini pada dasarnya menggambarkan sejauh mana pemerintah mampu memanfaatkan teknologi digital dalam memberikan layanan publik, mengelola administrasi pemerintahan, serta membangun tata kelola yang transparan, efisien, dan partisipatif. Alasan Pemilihan : Indikator Indeks Pemerintahan Digital dipilih karena menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan transformasi digital pemerintahan secara terpadu. Peningkatan nilai DGI menunjukkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi. Rumus Perhitungan : Indeks Pemerintah Digita = (Skor Strategi dan Rencana x 5%) + (Skor Tata Kelola dan Manajemen x 5%) + (Skor Teknologi Digital x 20%) + (Skor Audit Teknologi Digital + 6%) + (Skor Keamanan Siber x 9%) + (Skor Kapabilitas dan Budaya Digital x 10%) + (Skor Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi x 10%) + (Skor Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah x 15%) + (Skor Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah x 20%)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Kementerian PANRB
					25 Indeks Manajemen Risiko (Angka)	Makna : Alat ukur tingkat penerapan manajemen risiko di suatu instansi/organisasi untuk melihat sejauh mana organisasi sudah mengidentifikasi, menganalisis, memitigasi, dan memonitor risiko sesuai standar manajemen risiko. Alasan Pemilihan : Indikator Indeks Manajemen Risiko dipilih karena mencerminkan tingkat kematangan pemerintah daerah dalam mengelola risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Peningkatan nilai IMR menunjukkan penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan akuntabilitas, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta berketahanan terhadap berbagai perubahan dan ancaman risiko. Rumus Perhitungan : $IMR = \frac{\sum n_i = i (X_i \times W_i)}{\sum n_i = i W_i}$		

BUPATI BALANGAN,
H. ABDUL HADI

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN
TAHUN 2025



KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PERUBAHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Abdul Hadi, S.Ag., M.I.Kom.**

Jabatan : **Bupati Balangan**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Paringin, 3 September 2025



BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI, S.Ag., M.I.Kom.

**LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	0,512 Angka
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	0,83 Persen
		Indeks Ketahanan Daerah	0,62 Angka
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	4,04 Persen
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	5,29 Persen
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	3,78 Persen
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,34 Persen
4	Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi	Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	10 Persen
5	Menurunnya Pengangguran Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,67 Persen
		Rasio Kewirausahaan	2,40 Persen
6	Meningkatnya Kemajuan Perekonomian dan Kemandirian Desa	Indeks Desa	69,35 Nilai
7	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	74,26 Tahun
		Prevalensi Stunting	11,88 Persen
8	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	Harapan Lama Sekolah	13,17 Tahun
		Rata-Rata lama Sekolah	8,37 Tahun
9	Menurunnya Kemiskinan Daerah	Angka Kemiskinan	4,62 Persen
10	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	70 Angka
11	Meningkatnya Kemajuan Budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	60,34 Angka
12	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80,7 Persen
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77 Nilai
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,4 Angka
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,49 Angka
		Indeks Manajemen Risiko	3,049 Angka
		Indeks Integritas	75,25 Angka

No	Program	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.118.601.435.748
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	267.062.939.386
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	535.107.600
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.393.077.200
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	90.234.000
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	171.477.609.822

No	Program	Anggaran (Rp)
	KESEHATAN MASYARAKAT	
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	11.538.513.100
8	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	491.315.000
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	875.815.900
10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	88.919.485.700
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	17.854.046.000
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	29.457.305.927
13	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	347.742.604.776
14	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	107.010.974.361
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	291.208.817.898
16	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	5.771.571.200
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.980.899.300
18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.126.129.800
19	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	13.402.662.380
20	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	32.505.945.300
21	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	168.342.718.108
22	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.800.446.612
23	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	6.667.428.200
24	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.746.966.500
25	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	5.932.289.500
26	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.933.048.600
27	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.356.484.000
28	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	797.954.900
29	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	121.070.000
30	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	222.172.500
31	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	49.960.003.710
32	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.103.758.700
33	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	15.024.999.800
34	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.889.783.700
35	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	252.022.600
36	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	391.553.000
37	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	111.734.200
38	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	598.583.200
39	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	262.208.500
40	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.507.235.508
41	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	6.891.120.400
42	PROGRAM PENANGANAN KERAHANAN PANGAN	630.219.100
43	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	282.145.200
44	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	0
45	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	157.190.600

No	Program	Anggaran (Rp)
46	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	10.000.300
47	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	523.944.700
48	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	719.079.700
49	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.742.587.500
50	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.406.768.450
51	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	11.958.360.200
52	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	40.100.000
53	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	299.115.170
54	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	22.502.400
55	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	87.178.500
56	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	55.348.800
57	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.607.448.530
58	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	786.436.500
59	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	600.125.100
60	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	922.643.500
61	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	27.772.500
62	PROGRAM PENATAAN DESA	223.064.000
63	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	76.625.792.100
64	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	12.064.688.040
65	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5.722.967.100
66	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	8.179.672.800
67	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.134.721.200
68	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.069.527.800
69	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	47.528.393.614
70	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	11.117.025.400
71	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	7.123.434.852
72	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	478.297.400
73	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	131.730.000
74	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.591.953.850
75	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	489.535.000
76	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	319.270.000
77	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	542.993.500
78	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	3.908.092.900
79	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	275.310.000
80	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	388.366.000
81	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.741.044.400
82	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	18.429.872.500
83	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	344.212.000
84	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	415.461.700

No	Program	Anggaran (Rp)
85	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	272.835.800
86	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	677.605.000
87	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	4.525.807.230
88	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.013.103.500
89	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.224.278.000
90	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	5.320.466.050
91	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	261.522.500
92	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	847.015.500
93	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	857.194.800
94	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	35.496.400
95	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.118.470.500
96	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	56.406.287.675
97	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	484.838.300
98	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.323.288.100
99	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.901.212.518
100	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.408.263.300
101	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.430.354.600
102	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	69.060.739.000
103	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	113.557.779.010
104	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	906.922.450
105	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	17.999.625.500
106	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.501.838.200
107	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	118.505.000
108	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.150.470.300
109	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	983.380.800
110	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	236.883.500
111	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	395.314.900
112	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.481.508.000
113	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	702.390.000
114	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	505.214.000
115	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.162.091.900
116	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	762.080.000
117	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	381.750.000
118	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	184.171.361.600
119	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.086.156.700
120	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	39.946.645.215
121	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.541.199.300
122	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.926.389.400
123	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	419.586.191.633
124	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	18.027.142.300
125	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.165.819.500
126	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8.217.242.700

No	Program	Anggaran (Rp)
127	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.655.597.800
128	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.046.613.000
129	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.387.427.200
130	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.276.430.500
131	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.340.749.040
132	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.928.959.688
133	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	840.764.300
134	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.105.153.800
135	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.850.975.100
136	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.863.312.800
137	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.685.076.500
138	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	443.943.000
139	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	998.395.900
140	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.474.237.000

Paringin, 3 September 2025



BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI, S.Ag., M.I.Kom.

LAMPIRAN III

CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kondisi Awal (2025)	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	1 Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur	1 Indeks Infrastruktur	0,415	0,512	0,550	107,42	0,63	87,30
	2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Terhadap Bencana	2 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	0	0,83	0,000012	200	0,66	200,00
		3 Indeks Ketahanan Daerah	0,59	0,62	0,64	103,23	0,74	86,49
2	3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	3,63	3,78	17,72	468,78	4,19	422,91
		5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan (Persen)	3,82	4,04	9,18	227,23	4,48	204,91
		6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	4,96	5,29	9,40	177,69	5,86	160,41
		7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,69	8,34	12,59	150,96	9,25	136,11
	4 Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi	8 Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	9,72	10	4,11	41,10	11	37,36
	5 Menurunnya Pengangguran Daerah	9 Tingkat Pengangguran Terbuka	2,69	2,67	2,74	97,38	2,33	82,40
		10 Rasio Kewirausahaan	2,38	2,40	1,74	72,50	2,80	62,14
	6 Meningkatnya Kemajuan Perekonomian dan Kemandirian	11 Indeks Desa	0	69,35	80,08	115,47	79,76	100,40
		12 Umur Harapan Hidup	73,87	74,26	74,14	99,84	75,41	98,32
3	7 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	13 Prevalensi Stunting	14,58	11,88	14,53	77,69	7,28	0,41
		14 Harapan Lama Sekolah	13,09	13,17	13,35	101,37	13,77	96,95
	8 Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	15 Rata-Rata Lama Sekolah	8,13	8,37	8,34	99,64	9,05	92,15
4	9 Menurunnya Kemiskinan Daerah	16 Angka Kemiskinan	4,87	4,62	4,64	99,57	3,55	69,30
	10 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	17 Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	68	70,00	81,15	115,93	90	90,17
	11 Meningkatnya Kemajuan Budaya	18 Indeks Pembangunan Kebudayaan	58,55	60,34	60,64	100,50	67,52	89,81
5	12 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	19 Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,39	4,49	4,57	101,78	4,89	93,46
		20 Indeks Integritas	74,96	75,25	74,68	99,24	77	96,99
		21 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	72,09	77	77,10	100,13	87	88,62
		22 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80,688	80,70	93,48	115,84	80,9	115,55
		23 Indeks SPBE	3,34	3,40	3,82	112,35	0	0,00
		25 Indeks Manajemen Risiko	3	3,05	3,05	100,13	3,25	94,08

LAMPIRAN IV

MATRIK TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI SAKIP
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

MATRIKS TINDAK LANJUT

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025

No	Komponen Penilaian LHE		Kondisi Terkini	Rencana Aksi	Indikator	Target	Kegiatan / Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab / (PIC/Support)	Status / Progres Penyelesaian	Bukti Dukung	Keterangan	
	Temuan/Catatan	Rekomendasi											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	AREA PERENCANAAN												
1	Instansi belum memiliki sistem knowledge management yang memastikan pembelajaran SAKIP terdokumentasi dan diturunkan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Akibat rotasi dan mutasi pegawai yang berlangsung cepat, pemahaman mengenai SAKIP tidak terjaga secara sistematis, sehingga praktik pengelolaan kinerja sering kembali ke titik awal dan tidak mencerminkan keberlanjutan organisasi	Membangun mekanisme knowledge management yang terdokumentasi dengan baik, termasuk SOP, catatan pembelajaran, template kerja, dan pedoman pelaksanaan SAKIP pada setiap tahap. Proses serah terima jabatan harus mewajibkan transfer pengetahuan sehingga rotasi pegawai tidak menghambat kesinambungan implementasi SAKIP	Saat ini Pemerintah Kabupaten Balangan sedang melakukan review terhadap Perbup Sakip Lama yakni Perbup Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dan Draft Perbup SAKIP 2026	A Regulasi									
				1	Melaksanakan Revisi Perbup SAKIP yakni Perbup Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dan Draft Perbup SAKIP 2026	Jumlah produk hukum daerah tentang Sakip	1 (Satu) Perbup SAKIP Tahun 2026	Penyusunan draft, harmonisasi, fasilitasi Bagian Hukum	Mei 2026	Bagian Organisasi	Masih Proses dan dalam bentuk Draft Perbup SAKIP	Perbup SAKIP No 19 Tahun 2016 dan Draft Perbup SAKIP Tahun 2026	
				2	Menginternalisasikan Perbup Nomor 17 Tahun 2024 dalam penyusunan RKPD 2026 dan 2027	Persentase dokumen perencanaan yang disusun berbasis aturan (regulatif)	100 persen dokumen sesuai regulasi	Sosialisasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam penyusunan RKPD 2027	April 2026	Bapperida	Selesai	Perbup Nomor 17 Tahun 2024	
				3	Menyusun dan menetapkan Perbup Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai acuan SKPD dalam menyusun laporan kinerja, Perbup ini baru ditetapkan tahun 2026	Dokumen Perbup LKJIP	1 Perbup	Penyusunan pedoman dan format LKJIP	Maret 2026	Bagian Organisasi	Selesai	PERBUP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyusunan LKJIP Pemerintah	
				4	Mengoptimalkan implementasi Perbup Pedoman Evaluasi AKIP melalui Aplikasi SAKIPRA	Persentase evaluasi internal berbasis aplikasi	100 persen OPD menggunakan aplikasi	Pengembangan menu evaluasi dan monitoring	Mei sampai Juli 2026	Inspektorat	Masih proses	PERBUP NO 58 TH 2024 Pedoman Evaluasi AKIP Pada Pemkab. Balangan	
				5	Menyusun Perbup Budaya Kinerja berbasis akuntabilitas dan berakhlak kinerja	Dokumen perbup budaya kinerja	1 Perbup	Penyusunan regulasi dan internalisasi budaya kerja	Maret 2026	Bagian Organisasi	Selesai	Perbup No 17 Tahun 2026 tentang Budaya Kinerja Berbasis SAKIP	
			Pemerintah Kabupaten Balangan telah memiliki PERBUP Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Perbup ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	B Ketatalaksanaan									
				1	Melakukan review dan penyempurnaan SOP Nomor 01/SOP/SEKRE/2025 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan SOP Nomor 02/SOP/SEKRE/2025 tentang Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah	Dokumen SOP hasil review	SOP yang sesuai regulasi terbaru dan kebutuhan Perangkat Daerah	Reviu kesesuaian SOP dengan regulasi terbaru, harmonisasi SOP antar Perangkat Daerah, penyempurnaan alur proses bisnis	Triwulan II tahun 2026	Bagian Organisasi dan BKPSDM serta Bapperida dan Inspektorat	Masih proses	SK SOP RKPD dan RENJA 2025	
				2	Melakukan review dan penyempurnaan SOP penyusunan pelaporan melalui SK Sekda Nomor 188.45/22/Setda/Kum TAHUN 2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan	Dokumen draft hasil reviu	1 (Satu) Draft SOP Penyusunan LKJIP Penda dan 1 (Satu) Draft SOP Penyusunan LKJIP SKPD	Finalisasi draft SOP, pembahasan internal dan harmonisasi, penetapan SOP	Minggu Pertama Maret 2026	Bagian Organisasi	Masih proses dan dalam bentuk Draft SOP Penyusunan LKJIP Penda dan Draft SOP Penyusunan LKJIP SKPD	SK SOP No 188.45/22/Setda/Kum Tahun 2021 tentang SOP Setda Draft SOP Penyusunan LKJIP Penda dan SKPD	
				3	Melakukan implementasi dan evaluasi SOP pelaksanaan evaluasi Sakip SKPD	Dokumen atau draft SOP hasil review	1 (Satu) Draft SOP evaluasi hasil review	Monev evaluasi SOP baik melalui Sakipra maupun offline, penyempurnaan SOP berdasarkan hasil evaluasi	Maret sampai Mei 2026	Inspektorat	Masih proses dan dalam bentuk Draft Pernyataan telah direviu	SK SOP Pelaksanaan Evaluasi SAKIP SKPD Draft Pernyataan Telah Direviu SOP Evaluasi SAKIP 2024	

No	Komponen Penilaian LHE		Kondisi Terkini	Rencana Aksi	Indikator	Target	Kegiatan / Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab / (PIC/Support)	Status / Progres Penyelesaian	Bukti Dukung	Keterangan
	Temuan/Catatan	Rekomendasi										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				4 Membuat SOP Pelaksanaan reviu LKIP Pemda	Dokumen SOP	1 (Satu) SOP Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Penyusunan draft SOP Reviu LKIP, pembahasan internal bersama Perangkat Daerah terkait harmonisasi SOP dengan regulasi terbaru finalisasi dan penetapan	Minggu Pertama Maret 2026	Inspektorat	Selesai	SK tentang SOP Reviu LKIP Pemerintah 2026	SK Inspektur Nomor 188.45/225/Inspektorat Tahun 2026 tentang Standar Operasional Prosedur Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
				5 Membuat SOP Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja SKPD	Dokumen SOP	1 (Satu) SOP Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja SKPD	Identifikasi kebutuhan kinerja Perangkat Daerah, penyusunan alur pengumpulan data kinerja, penyusunan draft SOP, pembahasan, harmonisasi dan penetapan SOP	Minggu Pertama Maret 2026	Bapperida dan Bagian Organisasi	Selesai	SOP Pengukuran dan Pengumpulan Kinerja SAKIP	SOP Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja Pemda dan SKPD Nomor 002/SOP/SEKRE/2026
				6 Melakukan Sosialisasi SOP	Kegiatan	Sosialisasi SOP dengan SKPD sebanyak 1 kali	Penyusunan materi sosialisasi SOP, pelaksanaan sosialisasi, pendampingan implementasi SOP dan monev penerapan SOP	Juni sampai Nopember 2026	Bagian Organisasi	Rencana Sosialisasi melalui zoom meeting dilaksanakan pada Bulan Juni 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1PxyOLjd8qrNSpY1eWFEFFCx20S06P_G2?usp=sharing	
			C Internalisasi SAKIP dalam Manajemen Kepegawaian									
			Pemerintah Kabupaten Balangan telah melaksanakan mekanisme serah terima jabatan, namun muatan transfer knowledge implementasi SAKIP dalam proses mutasi dan pengantian jabatan belum diatur secara spesifik dan terstandarisasi	1 Mengintegrasikan muatan transfer knowledge implementasi SAKIP dalam dokumen Fakta Integritas dan Berita Acara Serah Terima Jabatan	Dokumen Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Fakta Integritas	Tersedianya klausul transfer knowledge implementasi SAKIP pada dokumen mutasi dan serah terima jabatan 1 (Satu) dokumen	Penyusunan tambahan klausul transfer knowledge implementasi SAKIP- Reviu dokumen Fakta Integritas dan Berita Acara Serah Terima Jabatan- Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait- Sosialisasi kepada ASN dan pejabat terkait	Februari / Maret 2026	BKPSDM	Selesai	Berita Acara Serah Terima Jabatan	
2	Beberapa inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan SAKIP yang disampaikan belum seluruhnya mencerminkan perubahan proses atau pendekatan yang substantif. Sebagian inovasi kurang memperlihatkan adanya modifikasi prosedur, penyederhanaan alur kerja, atau penyesuaian intervensi yang secara nyata meningkatkan efektivitas pencapaian outcome. Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi belum diarahkan untuk menyelesaikan masalah kinerja secara kontekstual	Mengembangkan inovasi yang benar-benar menyelesaikan masalah kinerja, misalnya penyederhanaan proses, perbaikan mekanisme pengukuran, penguatan dialog kinerja, atau modifikasi intervensi berdasarkan konteks lokal. Inovasi perlu dilengkapi penjelasan mengenai kontribusi terhadap outcome yang dituju	Pemerintah Kabupaten Balangan telah melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penajaman inovasi implementasi SAKIP bersama perangkat daerah guna memperkuat kualitas inovasi yang mendukung pencapaian outcome kinerja. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penajaman Inovasi Berdampak tanggal 13 Maret 2026 di Hotel Grand Qm Banjarbaru	1 Melakukan penajaman dan pengembangan inovasi implementasi SAKIP yang berorientasi pada penyelesaian masalah kinerja dan pencapaian outcome.	Jumlah inovasi implementasi SAKIP yang berdampak pada outcome	34 (tiga puluh empat) inovasi yang mendukung pencapaian outcome Perangkat Daerah	Pelaksanaan FGD inovasi, identifikasi permasalahan kinerja Perangkat Daerah, penyusunan desain inovasi berbasis outcome, pembahasan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan monev implementasi SAKIP	Maret sampai Desember 2026	Bagian Organisasi dan Bapperida	Selesai	Notulen dan Surat Tugas FGD Penajaman Inovasi Berdampak, Daftar Inovasi Berdampak 32 SKPD Balangan	

No	Komponen Penilaian LHE		Kondisi Terkini	Rencana Aksi	Indikator	Target	Kegiatan / Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab / (PIC/Support)	Status / Progres Penyelesaian	Bukti Dukung	Keterangan
	Temuan/Catatan	Rekomendasi										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Sudah dilakukan upaya pemetaan kinerja crosscutting lintas sektor, namun berdasarkan pemetaan yang ada belum dilakukan pemetaan target kinerja crosscutting secara spesifik berdasarkan kontribusi dari tiap instansi yang sudah dipetakan. Contoh pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kinerja "Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan" memetakan Dinas Perhubungan sebagai salahsatu instansi yang berkontribusi untuk Terbangunnya Jalan. Target kinerja Terbangunnya Jalan dalam movev crosscutting adalah "Panjang jalan yang dibangun", namun tidak bisa dilihat seberapa banyak jalan yang sebenarnya dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dibangun oleh Dinas perhubungan dan apakah memang realisasi pembangunan jalan sudah sesuai dengan kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Melakukan pemetaan secara detail untuk kinerja crosscutting termasuk target serta monitoring dan evaluasinya, agar realisasi dari kinerja crosscutting yang sudah dipetakan memang terwujud sesuai dengan kebutuhan dari Perangkat Daerah	Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan pengembangan menu monitoring dan evaluasi crosscutting pada aplikasi SAKIPRA serta penyusunan tabulasi monitoring crosscutting tingkat pmda dan perangkat daerah	1 Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi kinerja crosscutting melalui pengembangan menu dan tabulasi monitoring pada aplikasi Sakipra	Tersedianya menu monitoring croscutting pada aplikasi Sakipra	Menu monitoring crosscutting integrasi dalam Aplikasi SAKIPRA	Pengembangan menu monitoring crosscutting pada Aplikasi SAKIPRA, penyusunan mekanisme monitoring crosscutting dan ujicoba menu monitoring	Maret 2026	Bapperida, Organisasi dan Inspektorat	Masih Proses dan dalam bentuk Rancangan before after Perbaikan Menu Aplikasi SAKIPRA dan Tabulasi Movev	Rancangan Penambahan Menu di Aplikasi SAKIPRA	
					Tersedianya tabulasi monitoring crosscutting tingkat Pmda dan Perangkat Daerah	Tabel monitoring crosscutting tingkat Pmda dan SKPD tersedia dan digunakan	Penyusunan format tabulasi monitoring crosscutting, integrasi data monitoring Perangkat Daerah dan Penyusunan. Laporan movev eroscutting Pmda dan SKPD	Maret, April, Mei 2026	Bapperida, Organisasi dan Inspektorat	Masih Proses dan dalam bentuk Rancangan before after Perbaikan Menu Aplikasi SAKIPRA dan Tabulasi Movev	Rancangan Penambahan Menu di Aplikasi SAKIPRA	
B AREA PENGUKURAN												
4	Setiap Perangkat Daerah dan setiap level organisasi perlu melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja organisasi di bawahnya secara berjenjang	Meningkatkan kualitas sistem Aplikasi SAKIP agar dapat saling terintegrasi di setiap komponen pembangunan SAKIP (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja)	Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan pengembangan dan integrasi aoplikasi SAKIPRA dengan sistem e-kinerja ASN digital guna mendukung pengukuran dan pelaporan kinerja yang lebih terintegrasi	1 Melakukan pengembangan menu pengukuran dan pelaporan kinerja pada Aplikasi SAKIPRA	Tersedianya menu pengukuran dan pelaporan kinerja yang updating	Menu pengukuran dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dalam Aplikasi SAKIPRA	Pengembangan fitur pengukuran kinerja, pengembangan fitur pelaporan kinerja, ujicoba dan penyempurnaan aplikasi, pendampingan implementasi	Maret sampai Juni 2026	Bapperida, Organisasi, BKPSDM	Selesai	Mengintegrasikan ASN Digital e-Kinerja dan Aplikasi SAKIPRA	
				2 Mengintegrasikan ASN digital e-Kinerja dan Aplikasi SAKIPRA	Tersedianya integrasi sistem e-Kinerja dengan Aplikasi SAKIPRA	Integrasikan ASN digital e-Kinerja dan Aplikasi SAKIPRA	Sinkronisasi data e-Kinerja ASN pengembangan integrasi sistem, pengujian integrasi aplikasi movev implementasi integrasi sistem	Maret sampai Juli 2026	Bapperida, Organisasi, BKPSDM	Masih Proses	Mengintegrasikan ASN digital e-Kinerja dan Aplikasi SAKIPRA	
5	Belum terdapat informasi bahwa Pemkab Balangan memiliki mekanisme pemeriksa kedua (internal reviewer) atau komite validasi data yang bertugas memastikan kualitas data pada saat pengukuran kinerja dilakukan. Ketiadaan fungsi validasi ini meningkatkan risiko kesalahan, inkonsistensi, dan rendahnya keandalan data yang digunakan untuk evaluasi kinerja	Membentuk mekanisme pemeriksaan kedua atau komite validasi data (Bapperida atau Bagian Organisasi) secara formal untuk memastikan setiap data kinerja diverifikasi sebelum dilakukan. Proses validasi harus mencakup pengecekan sumber data, keakuratan perhitungan, dan konsistensi definisi indikator	Pemerintah Kabupaten Balangan sedang melakukan penguatan mekanisme validasi data kinerja melalui pembentukan Tim Validasi Data, koordinasi pengelolaan data statistik sektoral, serta pengembangan fitur penyimpanan data dukung kinerja pada Aplikasi SAKIPRA.	1 Membentuk mekanisme pemeriksaan kedua (internal review) dan Komite Validasi Data Kinerja	SK Tim /Komite Validasi Data (ex officio Tim SAKIP Pmda)	Terbitnya SK Tim SAKIP Pmda yang memuat tugas pemeriksaan kedua dan validasi data	Reviu dan pembaharuan SK Tim SAKIP Pmda, penyusunan tugas dan fungsi pemeriksaan kedua dan penetapan komite validasi data secara ex officio	Maret-Juli 2026	Bapperida dan Organisasi	Masih Proses dan dalam bentuk Draft SK Tim SAKIP Pmda	Draft SK TIM SAKIP Tahun 2026	
				2 Memperkuat koordinasi pengelolaan data statistik sektoral	Jumlah forum koordinasi statistik sektoral	Terlaksananya koordinasi pengelolaan data statistik sektoral	Rapat koordinasi bersama BPS, sinkronisasi data statistik sektoral, pembahasan standar data dan metadada	Maret - Juli 2026	Bapperida dan Organisasi, dis,oinfosan	Masih Proses	Notulen Rapat Pendahuluan Persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026	
				3 Mengembangkan menu penyimpanan data dukung kinerja pada Aplikasi SAKIPRA	Tersedianya menu penyimpanan data dukung	Menu penyimpanan data dukung kinerja tersedia pada Aplikasi SAKIPPPRA dan digunakan Perangkat Daerah	Pengembangan fitur penyimpanan data dukung, ujicoba dan penyempurnaan fitur, sosialisasi penggunaan aplikasi	Maret-Mei 2026	Bapperida, Organisasi dan Inspektorat	Selesai	Mengintegrasikan ASN digital e-Kinerja dan Aplikasi SAKIPRA	
				4 Melaksanakan validasi dan verifikasi data kinerja perangkat daerah secara berkala	Persentase data kinerja tervalidasi	100 persen data kinerja prioritas tervalidasi	Verifikasi data dukung kinerja, pemeriksaan capaian indikator, monitoring hasil validasi data	Triwulan I - IV 2026	Bagian Organisasi, Inspektorat	Masih Proses	Data Dukung Hasil Rekap Kinerja Masing-masing Tim Sakip TW 1	

No	Komponen Penilaian LHE		Kondisi Terkini	Rencana Aksi	Indikator	Target	Kegiatan / Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab / (PIC/Support)	Status / Progres Penyelesaian	Bukti Dukung	Keterangan
	Temuan/Catatan	Rekomendasi										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Faktor penghambat yang diidentifikasi dalam pengukuran kinerja setiap tahun cenderung berulang tanpa adanya rencana tindak lanjut yang jelas. Pola ini menunjukkan bahwa proses pengukuran berkala belum dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran dan perbaikan, sehingga fungsi monitoring tidak menghasilkan perubahan yang nyata terhadap peningkatan kinerja	Instansi perlu mewajibkan penyusunan rencana perbaikan untuk setiap penghambat yang diidentifikasi. Penghambat yang sama tidak boleh muncul kembali tanpa adanya bukti implementasi langkah korektif. Mekanisme monitoring harus memastikan bahwa hambatan yang berulang ditangani secara sistematis dan ditutup melalui tindakan konkret	Pemerintah Kabupaten Balangan sedang melakukan penguatan mekanisme monitoring dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja melalui pengembangan menu monitoring pada Aplikasi SAKIPRA dan pemanfaatan data monitoring sebagai bahan penyusunan perencanaan tahunan Perangkat Daerah.	1 Mengembangkan menu monitoring hambatan kinerja dan tinjau perbaikan pada apiaksi SAKIPRA	Tersedianya menu monitoring hambatan kinerja	Menu monev hambatan dan tindaklanjut tersedia pada Aplikasi SAKIPRA	Pengembangan menu monitoring hambatan kinerja. Penyusunan format tindak lanjut perbaikan. Penambahan fitur upload data dukung tindak lanjut. Uji coba dan penyempurnaan aplikasi	Maret-Mei 2026	Bapperida dan Bagian Organisasi	Selesai	Jepreran Layar Tabel MTL Menu Pelaporan Kinerja di Aplikasi SAKIPRA	
				2 Mengoptimalkan pemanfaatan data monev kinerja sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan	Dokumen monev evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Data monitoring digunakan sebagai dasar penyusunan dokren tahunan	Penyusunan tabulasi monitoring kinerja SKPD. Analisis hambatan dan tindak lanjut perbaikan. Integrasi hasil monitoring dalam penyusunan program/kegiatan. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut	Maret 2026	Bapperida dan Bagian Organisasi	Selesai	Dokumen Monev Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
C AREA PELAPORAN												
7	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya terutama anggaran sudah terdapat pada dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah, namun belum disertai dengan penjelasan upaya yang dilakukan sehingga efisiensi tersebut bisa tercapai	Memperdalam analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah dengan menambahkan penjelasan langkah/upaya yang telah dilakukan sehingga efisiensi bisa terwujud	Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan penyusunan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada LKIP Pemda dan SKPD, khususnya terkait efisiensi anggaran, SDM, dan waktu pelaksanaan kegiatan.	1 Memperkuat analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyusunan LKIP Pemda dan SKPD	Dokumen analisis efisiensi pada LKIP	LKIP Pemda dan SKPD memuat efisiensi SDM, Anggaran dan Waktu	Pendampingan penyusunan LKIP SKPD dan penggalian data efisiensi anggaran, SDM dan waktu, penyusunan narasi langkah perbaikan dan efisiensi	Februari-Maret 2026	Bagian Organisasi dan Bapperida	Selesai	LKIP Pemda dan LKj SKPD Tahun 2025	
8	Analisis faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja pada dokumen Laporan Kinerja beberapa perangkat daerah belum mendalam, khususnya terkait kinerja yang belum tercapai targetnya	Memperbaiki kedalaman analisis faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja pada dokumen LKJIP perangkat daerah, tidak hanya dengan menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh, tetapi juga penjelasan dampak/kontribusi faktor-faktor tersebut terhadap tercapai atau tidaknya kinerja yang ditargetkan	Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan penajaman analisis faktor pendorong dan penghambat dalam penyusunan LKIP Pemda dan SKPD, khususnya pada indikator kinerja yang belum mencapai target.	1 Memperdalam analisis faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja dalam LKIP Pemda dan SKPD	Dokumen analisis faktor pendorong dan penghambat pada LKIP	LKIP Pemda dan SKPD memuat analisis faktor penghambat dan pendorong	Identifikasi faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja. Analisis kontribusi faktor terhadap capaian indikator. Penyusunan narasi tindak lanjut perbaikan. Pendampingan penyusunan analisis pada LKIP Perangkat Daerah	Februari-Maret 2026	Bagian Organisasi	Selesai	LKIP Pemda dan LKj SKPD Tahun 2025	
9	Laporan Kinerja Perangkat Daerah masih belum maksimal memuat keterkaitan antara hasil pengukuran dengan rencana tindak lanjut. Hal ini menyebabkan kurang terlihat bagaimana temuan, deviasi, atau capaian kinerja digunakan untuk menyusun langkah perbaikan	Melengkapi setiap laporan kinerja dengan rencana tindak lanjut yang jelas, terukur, dan terkait langsung dengan hasil pengukuran. Setiap deviasi atau masalah yang teridentifikasi harus diikuti dengan langkah perbaikan yang spesifik dan memiliki tenggat waktu pelaksanaan	Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan penyempurnaan penyusunan LKIP Pemda dan SKPD dengan memuat rekap permasalahan, rencana tindak lanjut, serta pengembangan menu tindak lanjut pada Aplikasi SAKIPRA.	1 Melengkapi LKIP Pemda dan SKPD dengan rekap permasalahan dan tindaklanjut kinerja	Dokumen LKIP yang memuat tinjau kinerja	LKIP Pemda dan SKPD memuat rekap masalah dan tindaklanjut	Penyusunan format rekap permasalahan dan tindak lanjut. Pendampingan penyusunan LKIP Perangkat Daerah. Reviu kelengkapan tindak lanjut pada LKIP	Februari-Maret 2026	Bagian Organisasi	Selesai	LKIP Pemda dan LKj SKPD Tahun 2025	
				2 Menyusun rencana aksi tindaklanjut hasil evaluasi SAKIP Kemen PAN RB dan APIP	Dokumen rencana aksi tindaklanjut	LKIP Pemda dan SKPD memuat rencana aksi LHE SAKIP Kemen PANRB dan LHE APIP	Penyusunan matriks tindak lanjut rekomendasi. Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut	Februari-Maret 2026	Bagian Organisasi	Selesai	LKIP Pemda dan LKj SKPD Tahun 2025	
				3 Mengembangkan menu tindaklanjut pada Aplikasi SAKIPRA	Tersedianya menu tindaklanjut dalam aplikasi	Menu rekap tinjau tersedia dan digunakan dalam Aplikasi SAKIPRA	Pengembangan fitur tindak lanjut pada aplikasi. Penambahan menu rekap tindak lanjut. Uji coba dan penyempurnaan aplikasi. Sosialisasi penggunaan fitur	Maret s/d Mei 2026	Bagian Organisasi	Selesai	LKIP Pemda dan LKj SKPD Tahun 2025	

No	Komponen Penilaian LHE		Kondisi Terkini	Rencana Aksi	Indikator	Target	Kegiatan / Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab / (PIC/Support)	Status / Progres Penyelesaian	Bukti Dukung	Keterangan
	Temuan/Catatan	Rekomendasi										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
D	AREA EVALUASI											
10	Evaluasi AKIP Internal belum menilai aspek budaya kinerja dan perubahan perilaku yang berorientasi hasil. Fokus evaluasi masih terbatas pada dokumen budaya kinerja misalnya kedisiplinan pengukuran, kualitas dialog kinerja, konsistensi tindak lanjut, dan cara unit merespon masalah. Penilaian ini akan membantu memperjelas faktor non teknis yang memengaruhi capaian evaluasi kurang komprehensif dalam menggambarkan kesiapan organisasi untuk mencapai hasil yang berkelanjutan	Memperluas cakupan evaluasi dengan menambahkan indikator atau kriteria yang mencerminkan budaya kinerja misalnya kedisiplinan pengukuran, kualitas dialog kinerja, konsistensi tindak lanjut, dan cara unit merespon masalah. Penilaian ini akan membantu memperjelas faktor non teknis yang memengaruhi capaian kinerja	Pemerintah Kabupaten Balangan sedang melakukan penguatan evaluasi budaya kerja Ber-SAKIP melalui pengembangan menu evaluasi pada Aplikasi SAKIPRA, penyusunan Surat himbauan ke SKPD terkait perbup budaya kerja , dan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) evaluasi budaya kerja.	1 Mengembangkan menu evaluasi budaya kerja pada Aplikasi SAKIPRA	Tersedianya menu evaluasi budaya kerja pada Aplikasi SAKIPRA	Menu evaluasi budaya kerja terintegrasi dalam Aplikais SAKIPRA	Pengembangan fitur evaluasi budaya kerja. Penyusunan indikator evaluasi budaya kerja. Uji coba dan penyempurnaan aplikasi	Maret sampai Agustus 2026	Inspektorat	Masih Proses	Peningkatan Menu di Aplikasi SAKIPRA	
				2 Membuat Surat Pengantar Perbup Budaya Kerja Bersakip	Penyusunan draft Surat Pengantar	Surat Pengantar Perbup Budaya ber-Sakip	Penyusunan Surat Pengantar, Sosialisasi Perbup melalui Whatsapp	Mei 2026	Inspektorat Organisasi	dan Selesai	Surat Perangkat Daerah Perbup Budaya Kinerja	
				3 Menyusun KAK Evaluasi Budaya Kerja ber-Sakip	Dokumen KAK evaluasi	Tersedianya KAK Evaluasi Budaya Kerja Ber-Sakip	Penyusunan indikator penilaian budaya kerja. Penyusunan metode evaluasi soft skill dan perilaku kerja. Finalisasi KAK evaluasi budaya kerja	Maret sampai Juli 2026	Inspektorat	Masih Proses	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penguatan dan Evaluasi Budaya Kinerja BerSAKIP Pemerintah Kabupaten Balangan	
11	Evaluasi AKIP Internal sudah dilakukan melalui sistem terpadu yang mencakup dari tahap evaluasi, unggah nilai dan LHE AKIP Internal, serta didokumentasikan dengan baik unggah tindak lanjut dari hasil evaluasi. Namun, riwayat perbaikan kinerja dan bukti dukung perbaikan yang disampaikan PD belum terdokumentasi dengan baik sehingga menjadi catatan berulang yang dilakukan oleh PD dan status penyelesaiannya belum terinformasi secara utuh	Memastikan bahwa setiap riwayat perbaikan dan bukti dukung yang disampaikan oleh PD dapat didokumentasikan dengan baik sehingga saat evaluasi AKIP selanjutnya, bisa terpetakan mana rekomendasi yang sudah selesai dan memenuhi ekspetasi evaluator internal dan mana yang masih menjadi catatan berulang yang perlu diperbaiki dan di intervensi lebih lanjut	Pemerintah Kabupaten Balangan sedang melakukan pengembangan fitur monitoring tindak lanjut dan penyimpanan data dukung pada Aplikasi SAKIPRA guna memperkuat pengendalian tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Internal.	1 Mengembangkan menu kontrol dan monitoring tinjau pada Aplikasi SAKIPRA	Tersedianya menu kontrol monitoring tinjau	Menu kontrol dan monitoring tinjau tersedia dalam Aplikasi SAKIPRA	Pengembangan fitur monitoring tindak lanjut. Penambahan menu kontrol evaluasi Uji coba dan penyempurnaan aplikasi	Maret - Mei 2026	Inspektorat	Masih Proses	Draft Update Menu e-SAKIP PRA	
				2 Mengoptimalkan penyimpanan data dukung dan tinjau hasil evaluasi	Tersedianya kapasitas penyimpanan data dukung	Data dukung tinjau tersimpan dan terdokumentasi dalam aplikasi atau tautan terintegrasi	Penambahan kapasitas penyimpanan data dukung- Integrasi tautan penyimpanan Google Drive. Monitoring kelengkapan data dukung	Maret - Mei 2026	Bapperida, Organisasi dan Inspektorat	Selesai	Upload Data Dukung untuk Evaluasi Kinerja	
				3 Melaksanakan movev tinjau hasil evaluasi AKIP secara berkala	Dokumen movev tinjau hasil evaluasi	Monitoring tinjau dilaksanakan triwulan	Monitoring tinjau tindak lanjut Perangkat Daerah. Verifikasi bukti dukung tindak lanjut. Penyusunan laporan monitoring triwulanan	Maret - Mei 2026	Inspektorat	Masih Proses per Triwulan	Hasil MTL Movev Triwulan IV Tahun 2025 dan Money Triwulan I Tahun 2026	

Mengetahui :
SEKRETARIS DAERAH,

FAKRIYANTO, S.Pt., MP
NIP. 780601 200501 1 016

